

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Garut telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

Sebagai Entitas Pelaporan yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dengan tujuan menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, Pemerintah Kabupaten Garut telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2022.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok diatas, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD Kabupaten Garut, Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut. Tujuan disusunnya laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten



Garut selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Garut, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Garut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Garut serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Garut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Garut berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Kabupaten Garut.



1.2. Landasan Hukum

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Bupati Garut Nomor 232 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 384 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- l. Peraturan Bupati Garut Nomor 234 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 510 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut;
- m. Peraturan Bupati Garut Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- 1.4. Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
 - 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3. Indikator Pencapaian Target, Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



- 4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO
- 4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
- 4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.3.4. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.3.5. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.3.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.3.7. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.3.8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.3.9. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.3.10. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.3.11. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.3.12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas dan SILPA/SIKPA/SAL
- 4.3.13. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan Daerah
 - 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.1.2. Pendapatan Transfer
 - 5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 5.1.2. Belanja Daerah
 - 5.2.2.1. Belanja Operasi
 - 5.2.2.2. Belanja Modal
 - 5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga
 - 5.2.2.4. Belanja Transfer
 - 5.1.3. Pembiayaan Daerah
 - 5.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - 5.2.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
 - 5.2.3.3. Pembiayaan Neto
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/ SIKPA)
 - 5.2.4. Lain-Lain
 - 5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.1. Aset Lancar
 - 5.3.2. Piutang
 - 5.3.3. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
 - 5.3.4. Persediaan
 - 5.3.5. Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.6. Aset Tetap
 - 5.3.7. Dana Cadangan
 - 5.3.8. Aset Lainnya
 - 5.3.9. Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.10. Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.3.11. Ekuitas



- 5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan
 - 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.4.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.2.1 Beban Operasi
 - 5.4.2.2 Beban Transfer
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4 Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/Defisit - LO
- 5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 5.5.1. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
 - 5.5.5 Saldo Akhir Kas Daerah
- 5.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus (Defisit) - LO
 - 5.6.3 Koreksi Nilai Piutang
 - 5.6.4 Koreksi Nilai Persediaan
 - 5.6.5 Koreksi Nilai Penyertaan Modal
 - 5.6.6 Koreksi Nilai Aset Tetap
 - 5.6.7 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap
 - 5.6.8 Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud
 - 5.6.9 Koreksi Nilai Amortisasi
 - 5.6.10 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang
 - 5.6.11 Koreksi Nilai Aktiva Tidak Produktif
 - 5.6.12 Koreksi Nilai Aset Lain-Lain
 - 5.6.13 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain
 - 5.6.14 Koreksi Nilai Utang
 - 5.6.15 Koreksi Lain-Lain
 - 5.6.16 Ekuitas Akhir

Bab VI Pengungkapan Penting Lainnya

Bab VII Penutup

1.4. Organisasi Pemerintah Kabupaten Garut

Kabupaten Garut adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Wilayah administratif Kabupaten Garut sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri atas 42 Kecamatan, 21 Kelurahan, dan 421 Desa. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai dengan:



1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10).
2. Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut.
3. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
Sub Koordinator.
 4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
Sub Koordinator.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengelolaan Barang dan Jasa; dan
 - b) Sub Koordinator.
 4. Bagian Sumber Daya Alam, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator; dan
 - b) Subbagian Protokol.
 4. Bagian Perencanaan Keuangan, membawahkan:
 - a) Sub Koordinator; dan
 - b) Subbagian Keuangan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Protokol; dan
 3. Subbagian TataUsaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
Sub Koordinator
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
Sub Koordinator
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur;



- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Inspektur Pembantu investigasi dan pengaduan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
 - d. Bidang Sekolah Dasar (SD), membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Kurikulum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Kurikulum; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan.
 - f. Bidang Ketenagaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidik; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator



- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator
 - f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
Sub Koordinator
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Bina Marga, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Bidang Bangunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - i. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman,
g. membawahkan:
Sub Koordinator.
 - j. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pertanahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.



- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganeekaragaman Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Konservasi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Penataan Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Kerjasama Desa, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan



- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 16. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 17. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektor, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Kompilasi Data Statistik Sektor.
 - f. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Seksi Persandian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 18. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
 - 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Angkutan Dalam Trayek; dan
 - 3. Seksi Angkutan Multi Moda.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Terminal.
 - f. Bidang Keselamatan, Perkeretaapian, dan Pelayaran, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Seksi Pelayaran; dan



3. Seksi Perkeretaapian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
Sub Koordinator.
 - g. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
 20. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Perizinan Ekonomi dan SDA, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 21. Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - a. Bidang Daya Saing Keolahragaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - b. Bidang Kepramukaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - c. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 22. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:



- Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan Perpustakaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Arsip, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
24. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator; dan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - a. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - b. Bidang Peternakan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Koordinator;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Sarana Prasarana Pemberdayaan Industri, Energi, dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Pengembangan Promosi dan Kerjasama Perdagangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
26. Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:



1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Sub Koordinator.
 - c. Bidang Prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Perlindungan dan Pengembangan Usaha Pertanian, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
27. Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran; dan
 2. Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
 2. Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Operasi dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran; dan
 3. Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
28. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Hubungan Pengawasan; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidik.
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Pencegahan; dan
 3. Seksi Operasi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
 3. Seksi Kerjasama Antar Lembaga.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat; dan
 3. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
29. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:



1. Sub koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
30. Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Pengembangan Karier, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
31. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Penganggaran I; dan
 3. Subbidang Penganggaran II.
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD; dan
 3. Subbidang Akuntansi Aset.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Belanja Program dan Kegiatan; dan
 3. Subbidang Belanja Gaji dan Tunjangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
32. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pendataan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;



2. Subbidang Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Penetapan, Penilaian, dan Retribusi Daerah.
 - d. Bidang Penagihan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Pencatatan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah; dan
 3. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan Retribusi Daerah.
 - f. Bidang Teknologi dan Informasi, membawahkan:
 1. Sub Koordinator;
 2. Subbidang Teknologi dan Informasi; dan
 3. Subbidang Regulasi dan Kerjasama.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
33. Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Koordinator; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - d. Bidang Kewaspadaan Dini Daerah, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - e. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
Sub Koordinator.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk domisili keseluruhan entitas yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- o Daerah adalah Kabupaten Garut.
- o Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- o Bupati adalah Bupati Garut.
- o Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sekretariat Daerah adalah unsur staf pemerintah Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- o Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- o Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- o Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
- o Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
- o Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
- o Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
- o Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- o Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
- o Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
- o Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- o Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.



- o Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- o Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- o Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Sedangkan bentuk hukum dari domisili entitas yang ada di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

- o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950);
- o Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- o Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- o Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- o Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- o Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- o Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
- o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya:

- 1). Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada DPRD, serta Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan umum sekretariat yang meliputi kesekretariatan, bidang umum, persidangan dan perundang-undangan serta keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. menyelenggarakan perumusan sasaran dan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan bidang umum, persidangan dan perundang-undangan serta keuangan berdasarkan kebijakan teknis Sekretaris;
 - c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana kerja strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Dinas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan dokumen-dokumen kinerja lainnya;
 - d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf;
 - e. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 - g. menyelenggarakan asistensi, konsultasi dan fasilitasi terhadap unit kerja dan satuan kerja perangkat daerah lingkup tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara teknis maupun administratif untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - h. menyelenggarakan penjelasan atas perkembangan kebijakan dan prioritas kerja kepada staf;
 - i. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;



- j. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
 - k. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan atau sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - l. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
 - m. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dilingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
 - n. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2). Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, terdiri atas:
- a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan visi dan misi daerah serta visi dan misi kepala daerah;
 - b. mengkoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja pemerintah daerah berdasarkan kebijakan pemerintah daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam lingkup:
 - 1. urusan pemerintahan daerah;
 - 2. keuangan daerah;
 - 3. barang milik daerah;
 - 4. pemerintahan umum;
 - 5. pembangunan daerah; dan
 - 6. fungsi pemerintahan daerah lainnya.
 - d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan kepala daerah dan penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan;
 - e. mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para staf ahli, asisten dan kepala satuan kerja perangkat daerah melalui rapat-rapat intern dan atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. membina para staf ahli, asisten, kepala satuan kerja perangkat daerah serta staf dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur pemerintah daerah;
 - g. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan tugas dengan instansi/ lembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan atau sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - i. mengendalikan capaian kinerja organisasi perangkat daerah;
 - j. mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan pemerintah daerah;



- k. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada kepala daerah;
 - l. menyelenggarakan kebijakan umum daerah dalam bidang pemerintahan, perekonomian dan administrasi umum;
 - m. menyelenggarakan perumusan sasaran, strategi dan program kerja sekretariat daerah yang meliputi administrasi pemerintahan umum, hukum dan ham, organisasi, administrasi pembangunan, administrasi perekonomian, administrasi kesejahteraan rakyat, administrasi keuangan, informatika dan pelayanan umum;
 - n. mendistribusikan tugas, mengawasi dan mengendalikan staf pada sekretariat daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - o. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ; dan
 - p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala daerah.
- 3). Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada dinas yang ada di Kabupaten Garut, terdiri atas:
- a. Dinas daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dinas daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap UPTD dalam bidang dan lingkup tugasnya.
- 4). Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada badan yang ada di Kabupaten Garut, terdiri atas:
- a. Badan teknis daerah merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
 - b. Badan teknis daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretariat daerah dan dinas daerah;
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud badan teknis daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya;
 - b. Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. Pembinaan terhadap UPT dalam bidang dan lingkup tugasnya.
- 5). Kegiatan-kegiatan pokok yang terdapat pada kantor yang ada di Kabupaten Garut, terdiri atas:
- a. Kantor mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kantor itu sendiri mempunyai fungsi:
 1. Pengaturan koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan;
 2. Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia pertanian dan ketahanan pangan dan pemberdayaan balai penyuluhan pertanian dan kelompok tani;
 3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.



Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh DPRD, Sekretariat DPRD sama yaitu menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yaitu menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh dinas daerah yaitu menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk ketentuan perundangan-undangan yang digunakan oleh kantor, seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Kantor Satuan Pamong Praja daerah yaitu menggunakan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat. (Berita Negara Tahun 1950);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Evaluasi kinerja makro dilakukan untuk memperoleh gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian masing-masing 7 (tujuh) indikator makro pembangunan Kabupaten Garut pada RPJMD Tahun 2019-2024, yaitu Indeks Pembangunan Manusia; Persentase Penduduk Miskin; Persentase Pengangguran Terbuka; Laju Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Gini; Laju Pertumbuhan Penduduk; dan Inflasi, serta ditambah indikator Pendapatan Perkapita sebagai salah satu indikator kinerja makro berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2024 menjadi bagian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Garut. Gambaran pencapaian indikator makro terhadap target RPJMD pada Tahun 2022 maupun terhadap target RKPD Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Garut
Tahun 2021-2022

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi 2021	Target RPJMD 2022	Target RKPD 2022	Target RKPD 2022 (Target Median)	Realisasi 2022	% Capaian 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	66,45	67,52-68,54	67,52-68,54	68,03	67,41	99,09
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,65	8,41 - 8,52	8,41 - 8,52	8,465	10,42	76,90
3	Persentase Pengangguran Terbuka	%	8,68	8,21 - 8,41	8,21 - 8,41	8,31	7,6	108,54
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58	4,31 - 5,4	4,31 - 5,4	4,855	5,08	104,63
5	Pendapatan Perkapita	Juta Rp	23,356	23,25-23,52	23,25-23,52	23,385	25,346	108,39
6	Indeks Gini	Poin	0,322	0,36 - 0,362	0,36 - 0,362	0,361	0,302	116,34
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	1,1	1,1	1,1	0,86	121,82
8	Inflasi	%	1,17	2,5-4,5	2,5-4,5	3,5	6,65	10,00

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Status Pembangunan Manusia yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2021-2022 mengalami kenaikan 0,96 poin atau tumbuh 1,45% dari 66,45 poin pada tahun 2021 menjadi 67,41 poin pada tahun 2022 dan mencapai 99,09% dibandingkan target IPM Tahun 2022. Hal ini menunjukkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Garut yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.



Tabel 2.2
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia
Tahun 2021-2022

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2022	% Capaian 2022
1	IPM	Poin	66,45	67,41	67,52-68,54	99,09
A	Indeks Pendidikan	Poin	58,52	59,85	59,13 - 61,02	99,62
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,03	12,15	12,01 - 12,09	100,83
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,53	7,83	7,73 - 8,23	98,12
B	Indeks Kesehatan	Poin	79,37	79,77	79,62 - 79,82	100,06
	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,59	71,85	71,76 - 71,89	100,03
C	Indeks Daya Beli	Poin	63,17	64,17	65,39 - 66,1	97,60
	Pengeluaran per kapita	(000 Rp)	7961	8.227	8.562,5-8.762,5	94,97

Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, Perubahan RKPD Tahun 2022, BPS Kab. Garut Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

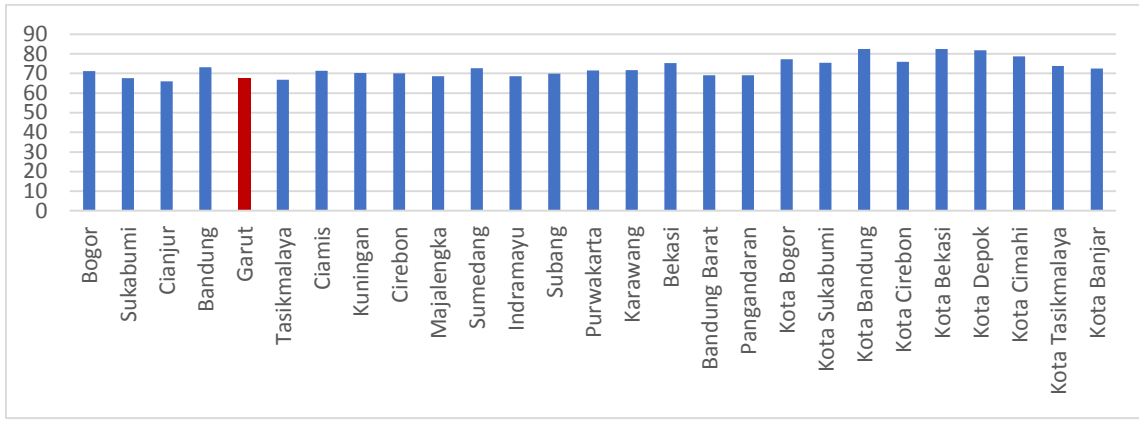
Kondisi tahun 2022, dari sisi nilai IPM sebesar 67,41 poin berada pada peringkat ke-25 dan dari sisi pertumbuhan IPM (1,45%) berada pada peringkat ke-1 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, diatas pertumbuhan IPM Jawa Barat sebesar 0,92% dan Nasional sebesar 0,86%.

Tabel 2.3
Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017-2022

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IPM Garut	64,52	65,42	66,22	66,12	66,45	67,41
IPM Jawa Barat	70,69	71,3	72,03	72,09	72,45	73,12
IPM Nasional	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91
Rangking IPM di Jawa Barat	25	25	25	25	25	25
Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat	2	2	4	20	9	1
Selisih dari Jawa Barat (poin)	-6,17	-5,88	-5,81	-5,97	-6	-5,7
Selisih dari Nasional (poin)	-6,3	-5,97	-5,7	-5,82	-5,84	-5,5
Pertumbuhan IPM Garut	1,37%	1,41%	1,22%	-0,16%	0,50%	1,45%
Pertumbuhan IPM Jawa Barat	0,91%	0,87%	1,02%	0,08%	0,50%	0,92%
Pertumbuhan IPM Nasional	0,90%	0,82%	0,75%	0,02%	0,49%	0,86%

Sumber : BPS RI, Tahun 2022 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD

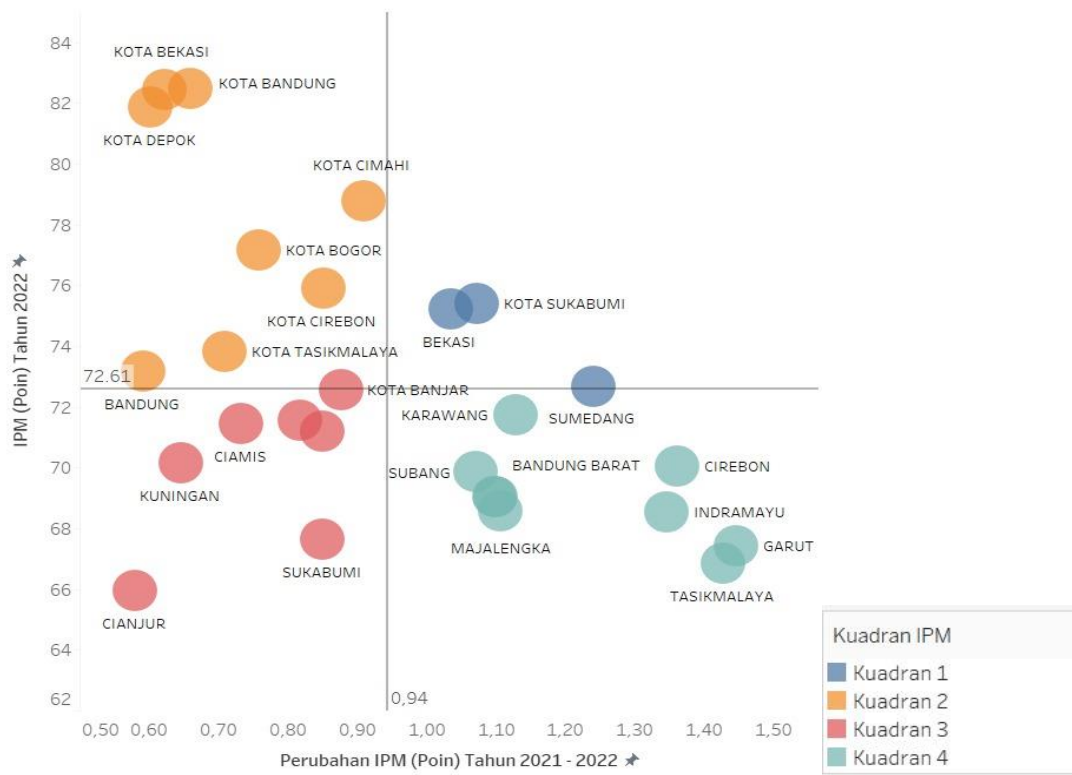
Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian IPM kabupaten Garut tahun 2022 masih berada di peringkat 25 di atas Kabupaten Tasikmalaya 66,84 poin dan Kabupaten Cianjur sebesar 65,94 poin.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.1
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan gap pertumbuhan IPM tahun 2021-2022, maka capaian IPM Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran IV yaitu kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat ($67,42 < 72,61$) namun pertumbuhannya lebih baik dan lebih tinggi dari rata-rata ($1,44 > 0,94$).



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.2
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Gap Rata-rata IPM Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2022

Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan gap pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian rata-rata provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Tasikmalaya serta Kabupaten Garut. Capaian IPM Kabupaten Garut Tahun 2022 (67,41 poin), juga di bawah rata-rata provinsi (73,12), di bawah kabupaten dan kota tetangga seperti Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Sumedang.

2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 0,23% dari 10,65% menjadi 10,42% (Maret 2022). Angka ini masih lebih tinggi dari angka Provinsi (8,06%) dan Nasional (9,54%). Secara jumlah, penduduk miskin telah berkurang sekitar 4.690 jiwa menjadi 276,67 ribu jiwa pada tahun 2022. Selama periode 2020-2022, dari sisi persentase penduduk miskin berada pada peringkat ke-10 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

Tabel 2.4
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut
Tahun 2017-2022

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	267.252	282.683	301.202	310.437	320.050	335.134
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	291,24	241,31	235,19	262,78	281,36	276,67
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,27	9,27	8,98	9,98	10,65	10,42**
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,72	1,49	0,87	0,97	1,40	1,81
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,43	0,37	0,16	0,15	0,29	0,45

Sumber : Berita Resmi Statistik/2022 BPS Kabupaten Garut, per Maret Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

Perbandingan kondisi pencapaian indikator kemiskinan terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2022 belum dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan. Untuk indikator jumlah penduduk miskin, realisasi pada tahun 2022 sebanyak 276.670 jiwa, baru mencapai 79,27% dari target pada tahun 2022 sebanyak 227.670-230.670 jiwa, dan mencapai 56,03% dari target akhir RPJMD pada tahun 2024 sebanyak 190.670-193.670 jiwa, sedangkan untuk indikator persentase penduduk miskin, realisasi pada tahun 2022 sebesar 10,65% mencapai 76,90% dari target RPJMD sebesar 8,41 - 8,52%, dan mencapai 50,60% dari target akhir RPJMD pada tahun 2024 sebesar 6,92 - 7,03%. Pencapaian tersebut tentu saja menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin, terutama terhadap masyarakat yang berada pada kelompok rentan miskin.

Tabel 2.5
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan
Tahun 2017-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2017	279.573	291.240	95,83%	91,56%	10,42	11,27	91,84%	86,05%
2018	272.583	241.310	111,47%	108,11%	10,02	9,27	107,49%	103,06%
2019	265.769	235.190	111,51%	111,51%	9,63	8,98	106,75%	106,75%

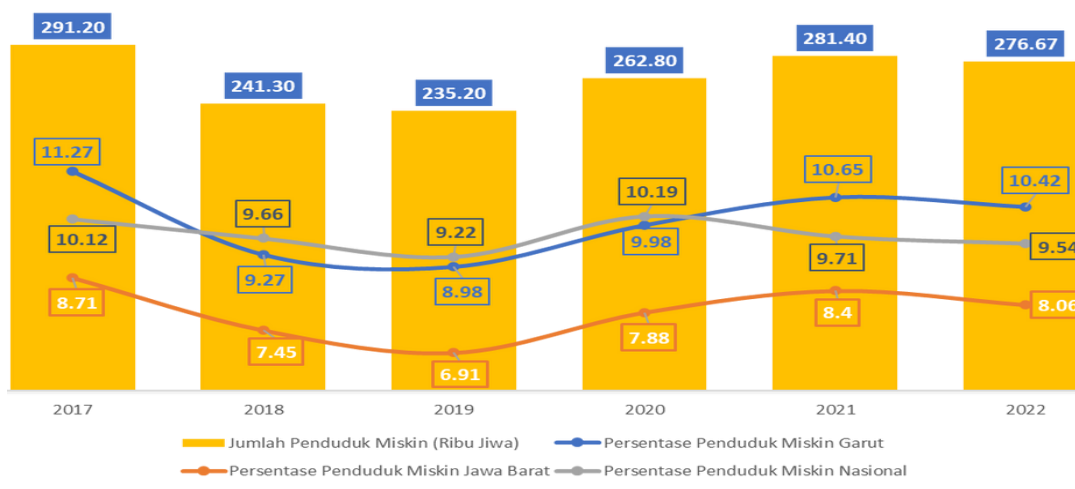
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin				Persentase Penduduk Miskin (%)			
	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD	Target RPJMD	Realisasi	% capaian target tahunan	% capaian target akhir RPJMD
2020	252.110 – 265.410	262.780	98,75%	63,26%	6,92-7,03	9,98	80,48%	56,92%
2021	240.960 – 254.380	281.360	86,40%	53,59%	8,98-9,48	10,65	84,62%	47,31%
2022	227.670-230.670	276.670	79,27%	56,03%	8,41 - 8,52	10,42	76,90%	50,60%
2023	209.170-212.170				7,66 - 7,77			
2024	190.670-193.670				6,92 - 7,03			

Sumber : Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut Tahun 2022 mengalami peningkatan Rp9.613,00 per kapita per bulan atau sebesar 4,71 % dari Rp320.050,00 per kapita per bulan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp335.134,00 per kapita per bulan pada tahun 2022. Apabila dilihat perkembangannya, selama periode tahun 2019-2021, garis kemiskinan Kabupaten Garut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Namun demikian, menurut kabupaten dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut mempunyai garis kemiskinan yang terendah selama periode 2015-2022. Secara umum, garis kemiskinan Tahun 2022 di Jawa Barat menunjukkan peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat pada tingkat ekonomi rendah lebih didominasi pengeluaran untuk kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan bukan makanan.

Jika dibandingkan dengan angka persentase penduduk miskin Jawa Barat maupun Nasional, pencapaian angka persentase penduduk miskin Kabupaten Garut sebesar 10,42% pada tahun 2022, berada diatas rata-rata penduduk miskin kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 8,06 % dan Nasional sebesar 9,54%. Hal ini perlu menjadi perhatian dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Garut.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2021, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.3
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Garut - Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017-2022

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut berada dalam urutan 10 besar kabupaten/kota persentase penduduk miskin terbanyak.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.4
Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut dengan Rata-Rata Gap Kabupaten Tahun 2021-2022

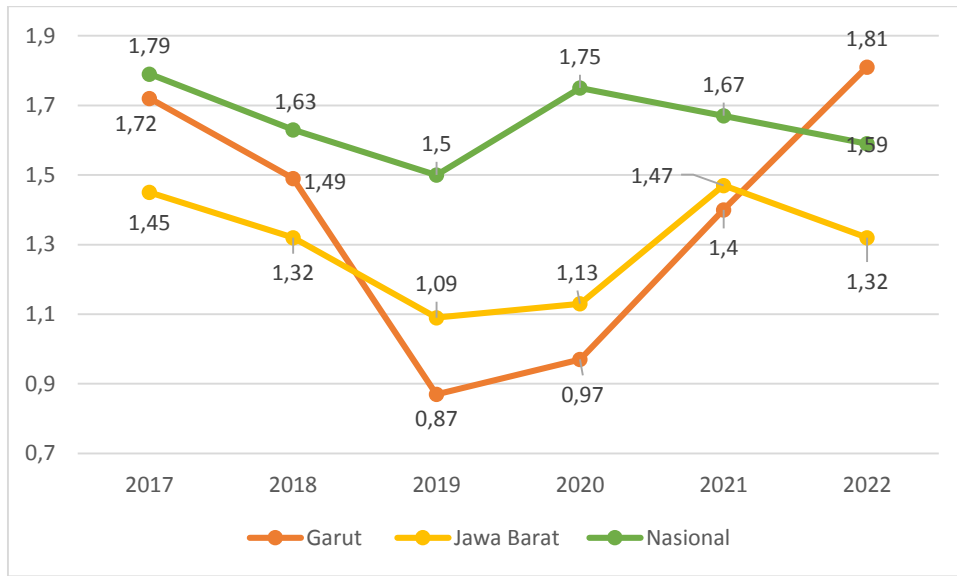
Berdasarkan analisis kuadran terhadap capaian persentase penduduk miskin kabupaten tahun 2022 dibandingkan dengan gap penurunan persentase penduduk miskin tahun 2021-2022, maka Kabupaten Garut dapat dikelompokkan dalam kategori kuadran I dengan angka capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat ($10,42 > 8,65\%$) dan laju peningkatan lebih rendah dibanding rata-rata ($2,16 < 3,60$).

Bahasan mengenai kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari indikator makro. Kabupaten Garut berada di kuadran I yang memiliki jumlah warga miskin di atas rata-rata provinsi (276,67 ribu jiwa) dan penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 4,69 ribu jiwa. Hal ini merupakan sebuah indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut memiliki kerentanan tinggi dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan juga Indeks Keparahannya (P2) sebagai indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan naik. Ini mengindikasikan adanya perburukan kondisi kesejahteraan pada penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) meningkat 0,40 poin dari 1,40 poin pada tahun 2021 menjadi 1,81 poin pada tahun 2022, artinya peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin menjauh dari garis kemiskinan. Kondisi Indeks Kedalaman

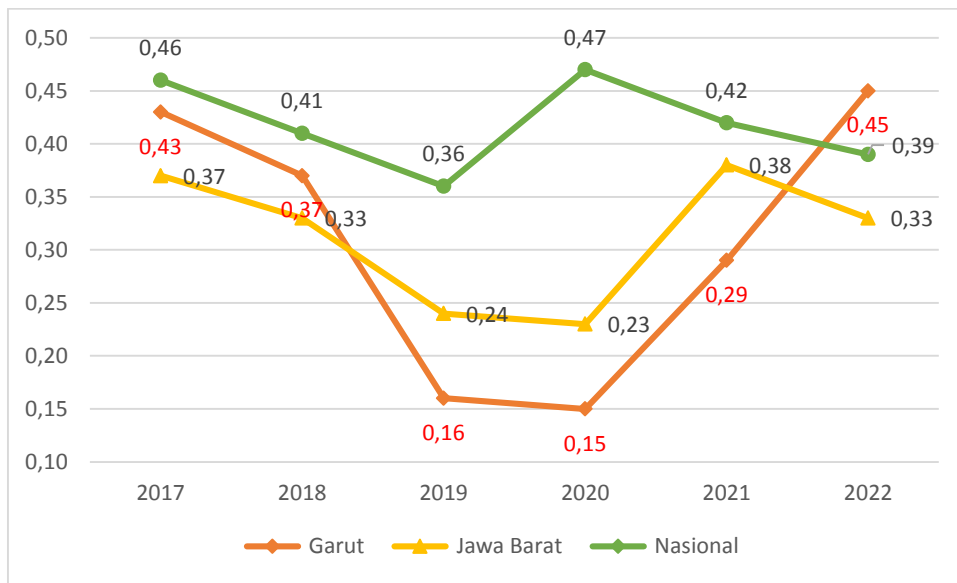
Kemiskinan pada tahun 2022 tersebut diatas Provinsi Jawa Barat sebesar sebesar 1,32 poin dan Nasional sebesar 1,59 poin.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.5
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut,
Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan naik 0,16 poin dari 0,29 poin pada tahun 2021 menjadi 0,45 poin pada tahun 2022, artinya kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin melebar. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat sebesar 0,33 poin maupun Nasional sebesar 0,39 poin.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.6
**Indeks Keparahan Kemiskinan
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022**



Berdasarkan pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, jumlah total DTKS Kabupaten Garut Tahun 2022 sebanyak 1.851.074 jiwa dengan sebaran per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Menurut Status Kesejahteraan Berdasarkan Data PBDT Tahun 2017-2019 dan DTKS 2022

NO	NAMA KECAMATAN	2017	2019	2020	2022
1	MALANGBONG	12.290	14.056	20.609	102.045
2	CILAWU	13.361	12.969	18.357	80.631
3	CISURUPAN	11.089	12.114	17.270	65.418
4	KARANGPAWITAN	10.133	10.351	17.361	93.566
5	BAYONGBONG	7.942	10.937	15.502	65.864
6	GARUT KOTA	10.248	13.831	26.229	100.265
7	KADUNGORA	8.700	9.189	13.081	62.332
8	PAKENJENG	9.279	8.729	13.009	56.430
9	BANYURESMI	9.440	9.100	13.448	63.987
10	BLUBUR LIMBANGAN	8.899	9.203	13.750	57.164
11	CISOMPET	8.898	8.652	12.193	44.853
12	TAROGONG KALER	8.291	7.941	12.181	58.590
13	CIKAJANG	7.520	8.128	11.789	51.750
14	CIBATU	9.288	8.604	12.048	56.417
15	BANJARWANGI	7.653	8.262	12.189	54.548
16	LELES	7.311	7.620	11.094	47.253
17	TAROGONG KIDUL	7.636	7.703	13.124	58.474
18	CIBALONG	6.050	6.502	9.397	35.993
19	CIKELET	6.748	6.560	9.340	34.570
20	SINGAJAYA	6.620	6.644	9.709	41.240
21	BUNGBULANG	6.174	5.978	8.866	35.879
22	SAMARANG	6.319	6.737	9.822	51.600
23	PASIRWANGI	5.599	6.353	9.487	54.617
24	PAMEUNGPEUK	5.034	5.303	7.911	29.266
25	SUKAWENING	5.146	5.288	7.593	41.303
26	SELAAWI	4.953	5.190	7.415	31.841
27	LEUWIGOONG	5.220	4.981	7.169	33.458
28	WANARAJA	4.126	5.141	7.802	31.361
29	PANGATIKAN	4.077	4.779	7.135	30.798
30	KERSAMANA	4.567	4.701	7.170	31.449
31	CISEWU	4.257	3.790	6.088	20.138
32	PEUNDEUY	3.860	3.885	5.846	20.412
33	TALEGONG	3.260	4.451	6.210	19.176
34	SUKARESMI	3.378	4.128	6.096	32.975
35	CIGEDUG	3.634	3.560	5.030	28.618
36	SUCINARAJA	3.435	4.276	6.015	23.143
37	CARINGIN	2.644	3.254	5.240	21.683
38	PAMULIHAN	2.800	2.686	3.753	14.822



NO	NAMA KECAMATAN	2017	2019	2020	2022
39	CIHURIP	2.745	2.511	3.853	14.503
40	CIBIUK	2.164	2.282	3.589	20.252
41	MEKARMUKTI	2.331	2.889	4.043	14.753
42	KARANGTENGAH	2.209	2.329	3.365	13.685
TOTAL		265.328	281.587	421.178	1.851.074

Sumber: Hasil Verivali data BDT 2017, 2019 dan DTKS Dinas Sosial 2022 yang dikelola dalam SIPD

2.1.3. Persentase Pengangguran Terbuka

Bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan
Kabupaten Garut Tahun 2017-2022

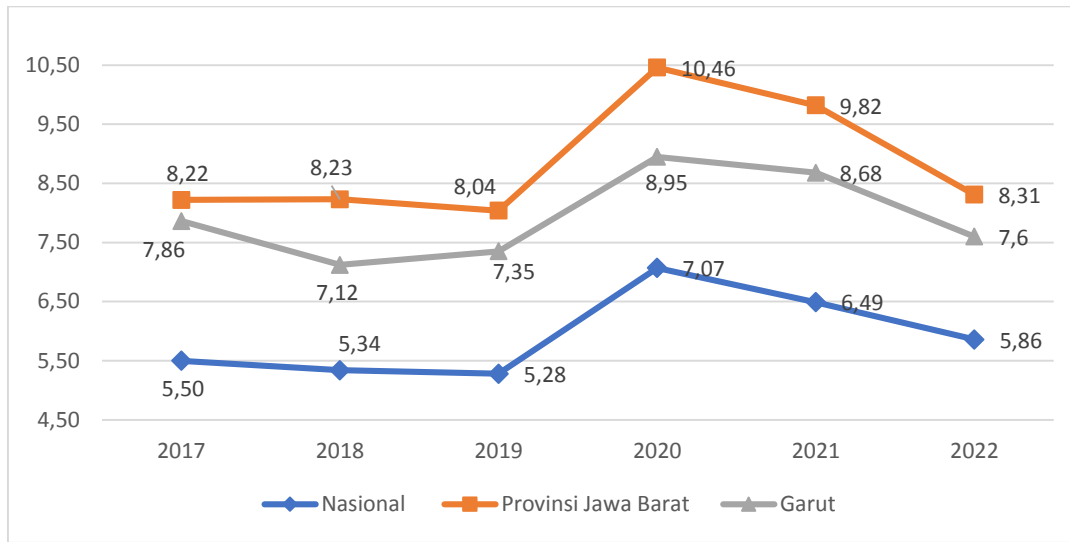
URAIAN INDIKATOR	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
a. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,86	7,07	7,28	8,96	8,68	7,6
b. Jumlah Pengangguran Terbuka	Jiwa	89.111	77.437	84.045	103.607	104.212	101.135
c. Persentase Penduduk Bekerja	%	92,14	92,93	92,72	91,04	91,32	92,40
d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	62,92	60,13	62,70	61,11	62,76	68,84
e. Jumlah Penduduk Usia Kerja	Jiwa	1.801.059	1.822.722	1.842.301	1.892.059	1.912.716	1.932.479
f. Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.133.248	1.095.981	1.155.071	1.156.180	1.200.346	1.330.353
g. Jumlah Penduduk Bekerja	Jiwa	1.044.137	1.018.544	1.071.026	1.052.573	1.096.134	1.229.218
h. Jumlah Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	667.811	726.741	687.230	735.879	712.370	602.126
Target RPJMD :							
a. TPT Usia 15 Tahun keatas	%	4,47	4,36	4,25	9,78-10,48	8,96-9,46	8,21 - 8,41
b. Capaian target RPJMD	%	24,16	37,84	28,71	111,55	105,75	108,54

Sumber : BPS Kab. Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Garut mencapai 1.330.353 orang, meningkat dari tahun 2021 sebanyak 1.200.346 orang. Persentase jumlah penduduk bekerja dari total angkatan kerja pada tahun 2021 meningkat dari 91,32% (1.096.134 orang) pada tahun 2021 menjadi 92,40% (1.229.218 orang) dimana angkatan kerja yang menjadi pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 8,68% menjadi 7,6% pada tahun 2022, dan dari sisi jumlahnya menurun 3.077 orang dari 104.212 orang menjadi 101.135 orang.

Angka tingkat pengangguran terbuka tersebut adalah angka yang dihitung dengan dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa digunakan, dimana penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. TPT merupakan perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah

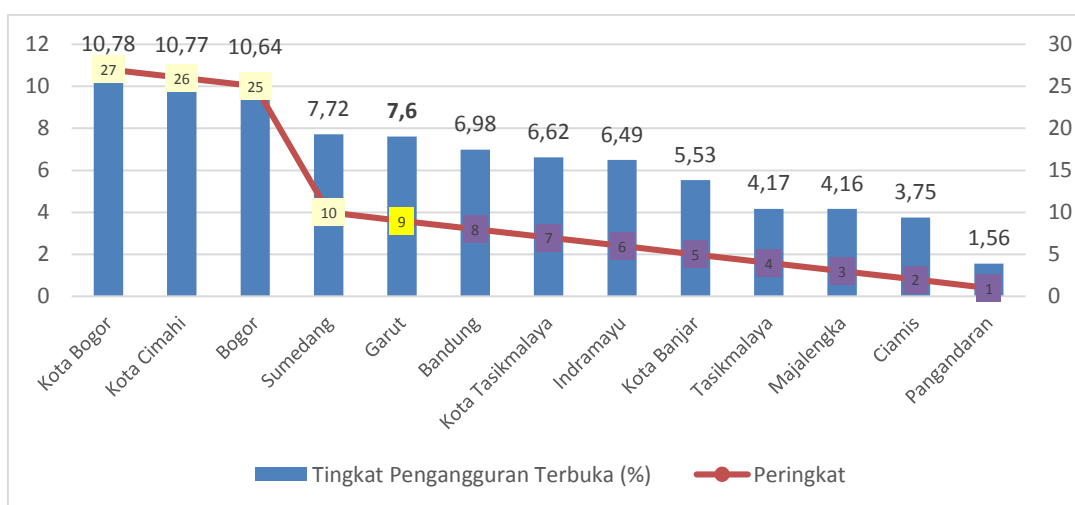
pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja. Pencapaian TPT tahun 2022 sebesar 7,6% adalah sebesar 108,54 % terhadap target yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun 2022 masih perlu terus diturunkan karena masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat sebesar 8,31%.



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

Gambar 2.7
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

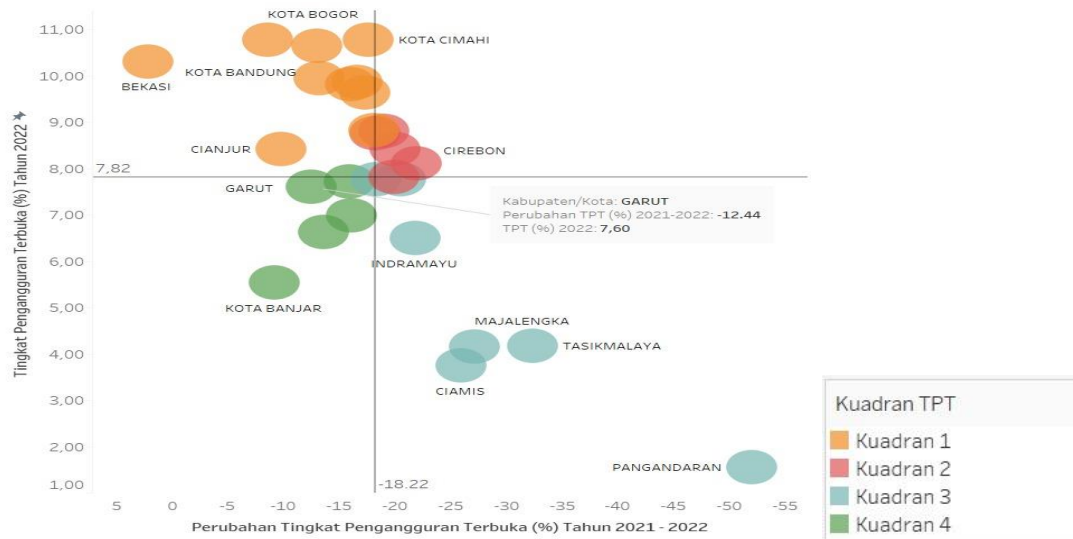
Dibandingkan capaian kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut tahun 2022 pada peringkat 9 meningkat dari pencapaian tahun 2021 yakni berada di peringkat 8. Pada tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi adalah Kota Bogor sebesar 10,78%, disusul Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka terendah adalah Kabupaten Pangandaran sebesar 1,56%, disusul Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

Gambar 2.8
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2022

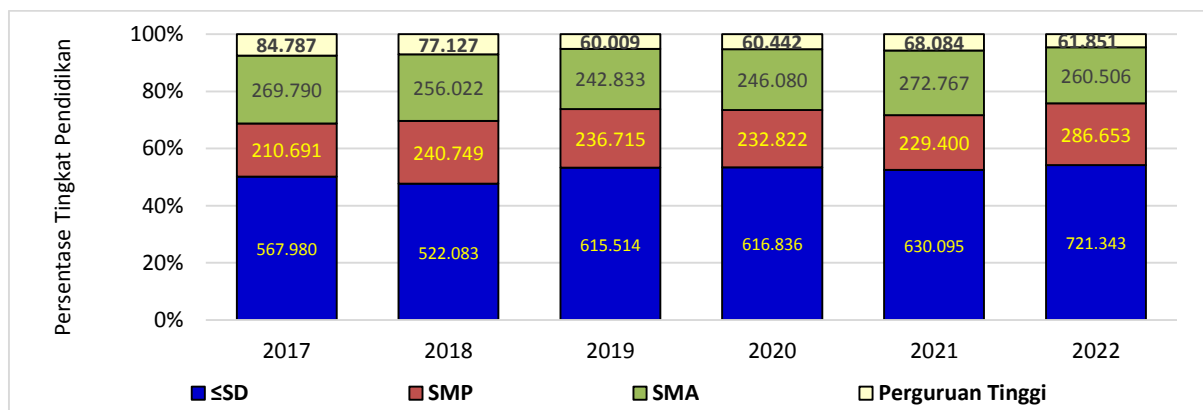
Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 Kabupaten Garut berada di kuadran IV dengan angka TPT lebih rendah dari rata-rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Barat ($7,60 < 7,82\%$) dan kinerja penurunan TPT dari tahun 2022 ke 2022 lebih rendah dari rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ($12,44 < 18,22$).



Sumber : BPS Kabupaten Garut. Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, Tahun 2022

Gambar 2.9
Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2022

Kualitas angkatan kerja masih tampak rendah yang ditunjukkan oleh dominasi jumlah angkatan kerja yang berpendidikan tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan lulusan SD sederajat sebesar 630.095 jiwa atau 52,49% dari total angkatan kerja. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi pergeseran komposisi pendidikan angkatan kerja dimana porsi angkatan kerja dengan pendidikan lulusan SLTA sederajat dan lulusan perguruan tinggi mengalami kenaikan dari masing-masing 21,28% dan 5,23% menjadi 22,72% dan 5,67% total angkatan kerja.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.10
Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2017-2022



Masih relatif tingginya jumlah pengangguran terbuka tersebut mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang cukup besar di Kabupaten Garut masih belum terserap secara optimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus digiatkan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada "human capital" ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/ lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga Kerja mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial. Capaian kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun 2017 - 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017-2022

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	Realisasi					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	24	26	28	23	16	21
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Kasus	24	26	28	17	8	14
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Orang	8.173	25.879	9.871	2.362	11.210	9.377
4	Keselamatan dan perlindungan (Kewenangan Provinsi)							
5	Besaran pekerja/buruh yang jadi peserta program Jamsostek	Orang	n/a	31.058	31.344	31.559	40.317	50.363
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	Kasus	0	0	0	0	0	0
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	1.666	932	1.328	560	1.372	304
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	80	322	108	656	320	0
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	100	0
10	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	7,48	7,57	5,21	5,51	5,96	4,95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD.



Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian, diantaranya melalui kegiatan pemberian kerja sementara di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Kompetensi Tenaga Kerja.

Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi di UPT-BLK sebanyak 304 orang.

Pencari Kerja Terdaftar.

Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) setiap tahun mengalami fluktuasi. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan kerja aktif dan kesempatan kerja, jumlah pencari kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) dalam tahun 2022 sebanyak 24.315, naik dari tahun 2021 sebanyak 22.072 orang. Hal ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian mulai pulih kembali pasca pandemi Covid-19. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan pun mengalami peningkatan persentase penempatan tenaga kerja tahun 2022 sebesar 9.377 orang, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak 11.210 orang.

Daya serap tenaga kerja

Jumlah perluasan kesempatan tenaga kerja dihitung dari tenaga kerja yang mengikuti kegiatan Padat Karya. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang terserap melalui sistem padat karya (PKS-PK) berjumlah sebanyak 46.305 HOK. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja melalui padat karya diharapkan dapat memberikan manfaat penambahan pendapatan bagi masyarakat terutama dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

2.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro besaran PDRB pada tahun 2022 yang diukur atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp5,76 Triliun atau 9,47% dari Rp60,83 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp66,59 Triliun pada tahun 2022. Keadaan ini menggambarkan adanya peningkatan dari nilai produk barang yang dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Garut, karena pada PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Tabel 2.9
Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut
Tahun 2019-2022

Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
a. PDRB atas dasar harga berlaku	Juta Rp	57.579.150	58.043.000	60.836.770	66.590.620
b. PDRB atas dasar harga Konstan 2010	Juta Rp	39.092.650	38.598.150	39.981.190	42.012.960
c. Jumlah penduduk pertengahan tahun	Jiwa	2.622.425	2.585.607	2.604.787	2.627.220
d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku	Rp	22.116.000	22.480.000	23.356.000	25.346.000
e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan	Rp	14.939.000	14.949.000	15.349.000	15.991.000
f. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	-1,26	3,58	5,08
g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh berlaku	%	8,69	1,65	3,90	8,48

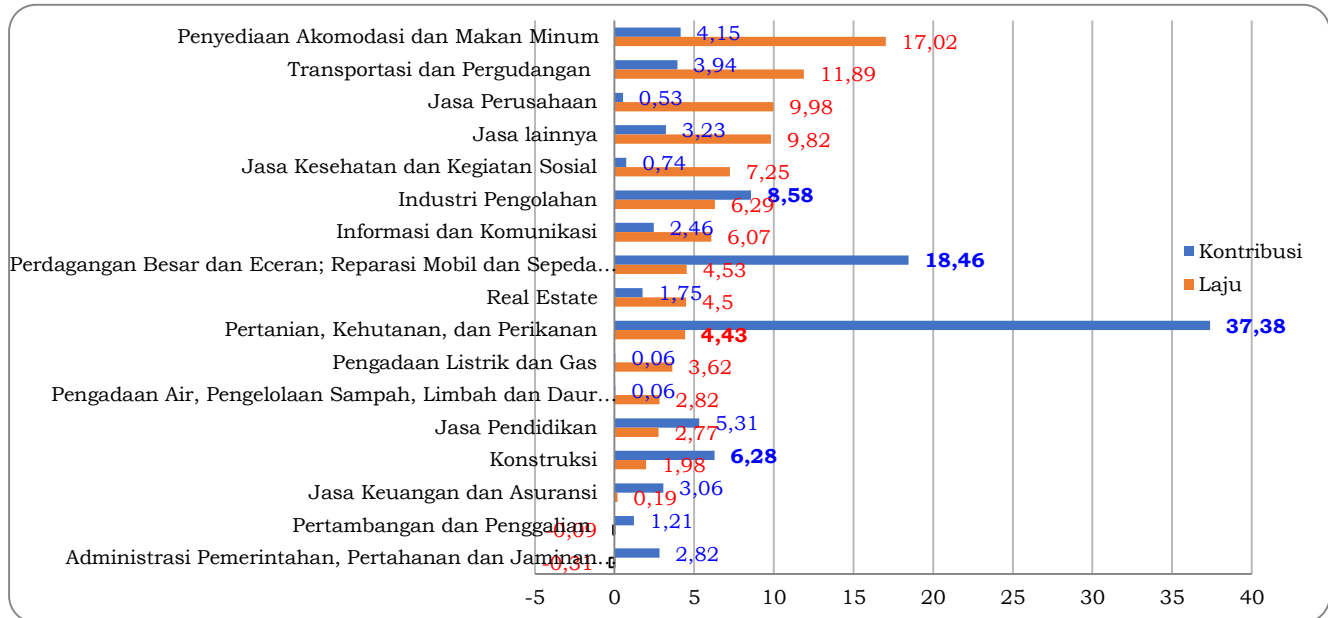


Uraian Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022
h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh konstan	%	4,60	0,07	2,68	4,18
Target Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	-0,17 - 2,9	3,39 - 4,37	4,31 - 5,4
Tingkat Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi	%	91,27	-131,72	92,27	104,63
Target PDRB Per Kapita adhb	Juta Rp	21,28	21,62-22,10	22,39-22,59	23,25-23,52
Tingkat Capaian Target PDRB Per Kapita adhb	%	103,16	100,70	103,85	108,36

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Sementara itu, PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010 di Kabupaten Garut pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan Rp2,03 Triliun atau tumbuh 5,08% dari sebesar Rp39,98 Triliun pada tahun 2021 menjadi Rp42,01 Triliun pada tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2022 sebesar 5,08%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,58%. Apabila dibandingkan dengan target LPE tahun 2022 sebesar 4,31% - 5,4%, maka capaian LPE 2022 adalah sebesar 104,63% dari median range target tersebut.

Selama periode 2020-2022, struktur perekonomian sebagian masyarakat tidak bergeser yaitu tetap pada kategori pertanian, yang terlihat dari besarnya perannya terhadap pembentukan PDRB mencapai 37,38% pada tahun 2022, mengalami sedikit peningkatan 0,03% dari tahun 2021 sebesar 37,35%. Kondisi tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan ekonomi sebagian besar penduduk di wilayah Kabupaten Garut bermata pencaharian di kategori ini serta sebagian besar lahan digunakan untuk kegiatan di kategori pertanian. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2022 selain sektor pertanian, adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 18,46% dan sektor industri pengolahan sebesar 8,58%.



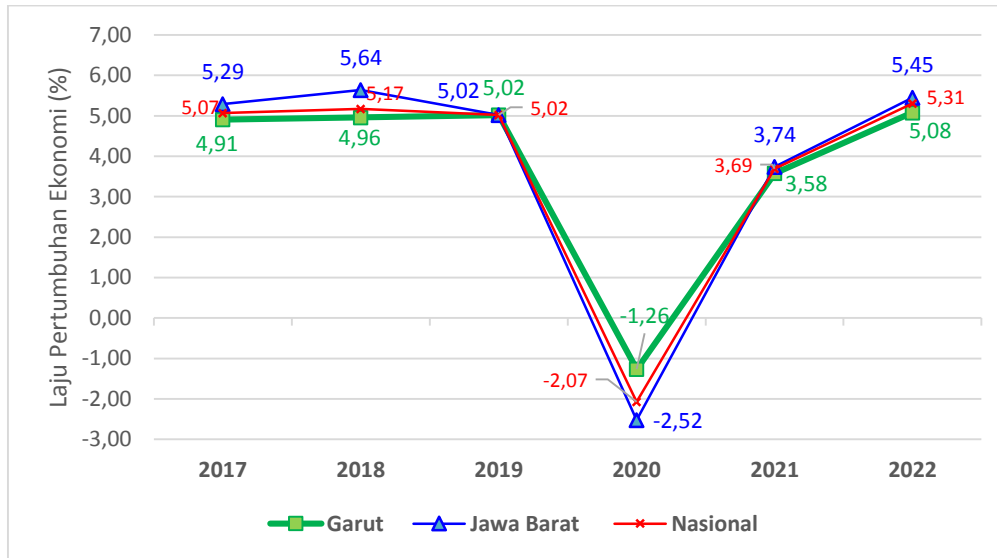
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.11
Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022

Adapun dilihat dari sektor lapangan usaha, hampir semuanya mencatatkan pertumbuhan positif kecuali untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-0,31%) dan Pertambangan dan Penggalian (-0,09%). Sektor lapangan usaha yang menyumbang pertumbuhan

tertinggi yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (17,02%), Transportasi dan Pergudangan (11,89%), Jasa Perusahaan (9,98%), Jasa Lainnya (9,82%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,25%).

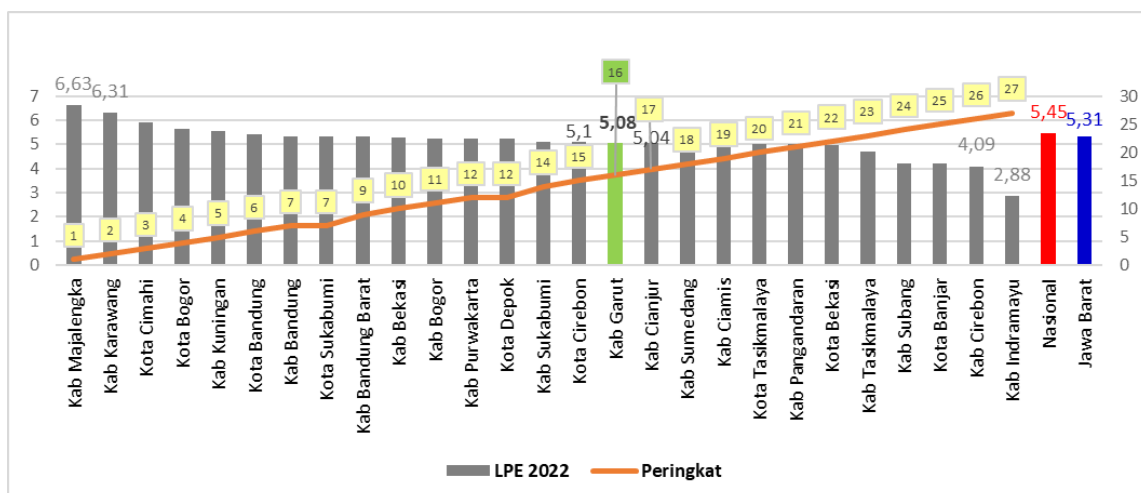
Pada periode 2022, kinerja perekonomian Kabupaten Garut sebesar 5,08% masih berada dibawah capaian LPE Provinsi Jawa Barat (5,31%) dan Nasional (5,31%).



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

Gambar 2.12
Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017-2022

Perbandingan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terhadap kabupaten/kota se-Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-16. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan positif. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat setelah pada tahun 2020 sebanyak 24 kabupaten dan kota mengalami kontraksi akibat adanya pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Jawa Barat Tahun 2022

2.1.5. Pendapatan Perkapita (PDRB Per Kapita)

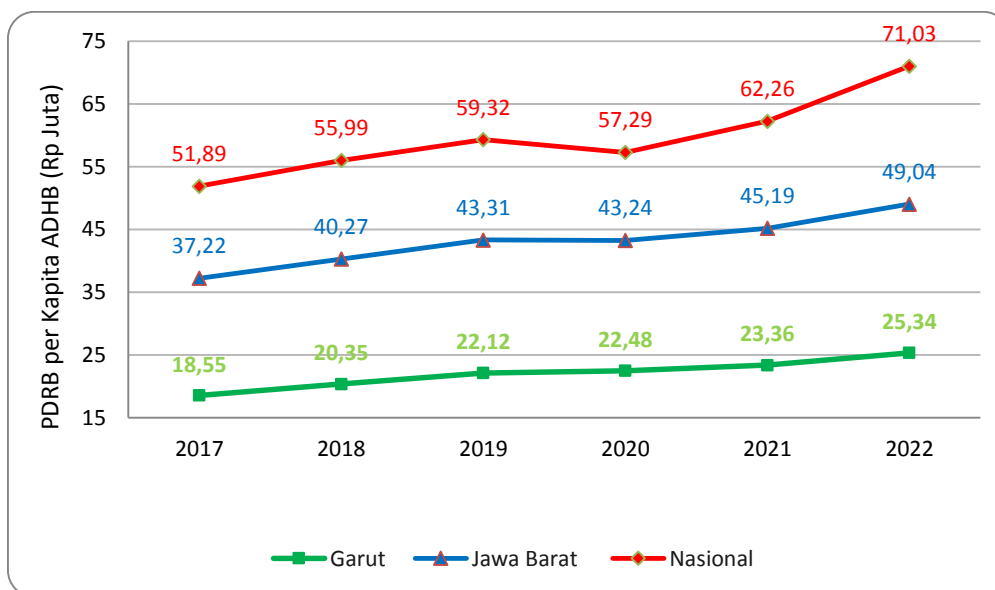
Pada tahun 2022, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 8,48% atau dari semula Rp23,36 juta pada tahun 2021 menjadi Rp25,34 juta pada tahun 2022 dan mencapai 108,36% dari target RKPD tahun 2022 sebesar Rp23,25 juta - Rp23,52 juta. PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata.

Tabel 2.10
Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2017-2022

Tahun	PDRB Per Kapita (Rp Juta)		Jumlah Penduduk	Laju PDRB Per Kapita (%)	
	ADHB	ADHK		ADHB	ADHK
2017	18,55	13,699	2.588.839	7,24	4,13
2018	20,35	14,282	2.606.399	9,68	4,26
2019	22,12	14,939	2.622.425	8,69	4,60
2020	22,48	14,949	2.585.607	1,65	0,07
2021	23,36	15,349	2.604.787	3,90	2,68
2022	25,34	15,991	2.627.220	8,48	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD.

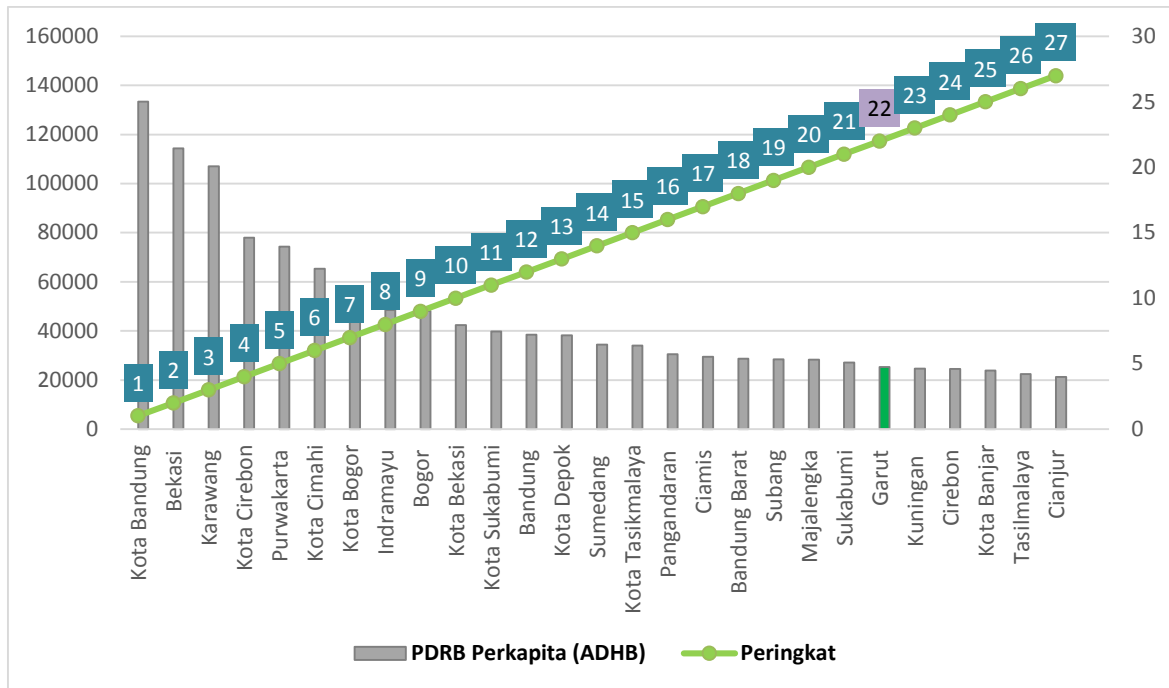
Pencapaian PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2017-2022 terus mengalami peningkatan, namun demikian capaian kabupaten Garut masih tergolong rendah jika dibandingkan capaian Jawa Barat sebesar Rp49,04 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp71,03 juta.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.14
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB
Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

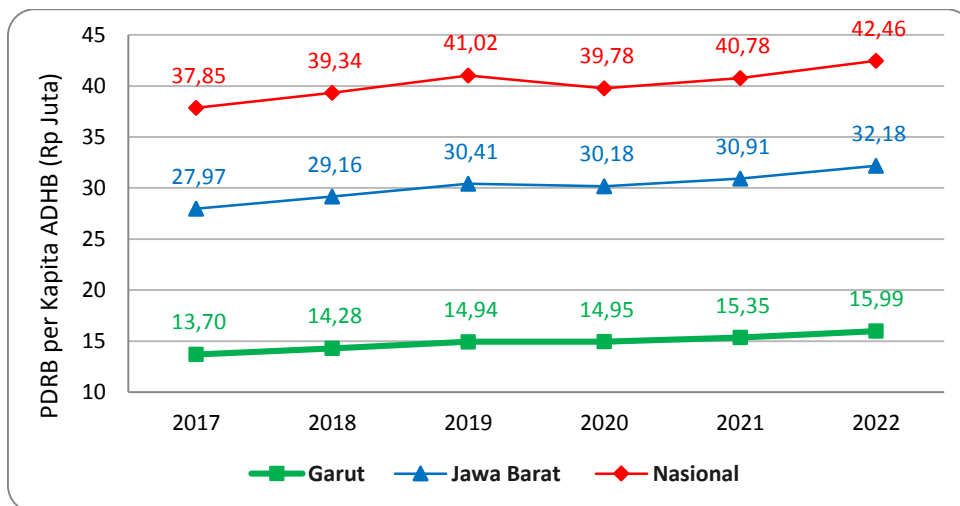
Pencapaian PDRB per kapita ADHB kabupaten Garut tahun 2022 dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, masih berada di peringkat 22 sama seperti tahun sebelumnya di atas Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Cianjur.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.15
Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

Capaian PDRB perkapita adh konstan (ADHK) tahun 2022 sebesar Rp15,99 juta masih tergolong rendah atau hanya mencapai 49,69% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp32,18 juta dan terpaut jauh dari Nasional yang telah mencapai sebesar Rp42,46 juta.



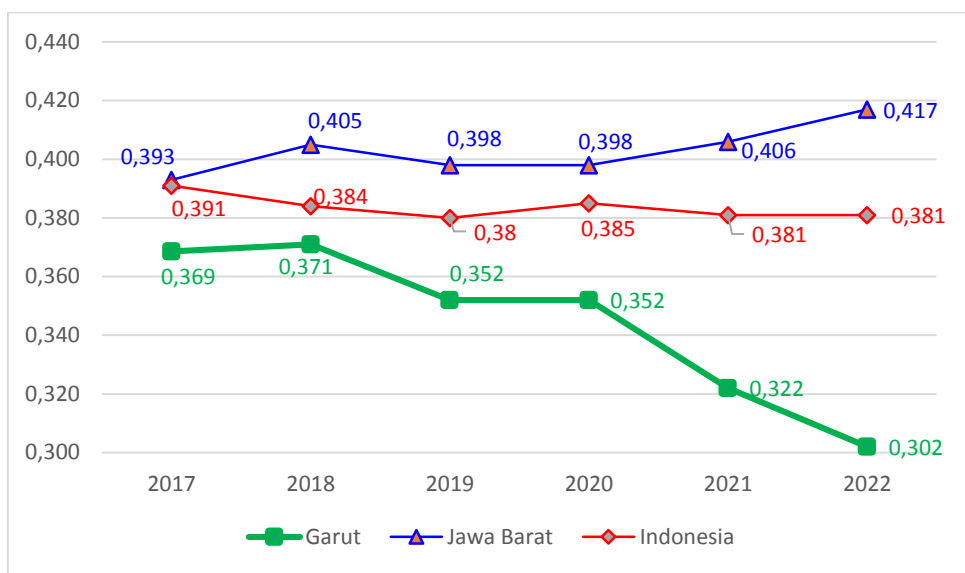
Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.16
Perbandingan PDRB Perkapita ADHK Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

2.1.6. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat golongan ekonomi bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

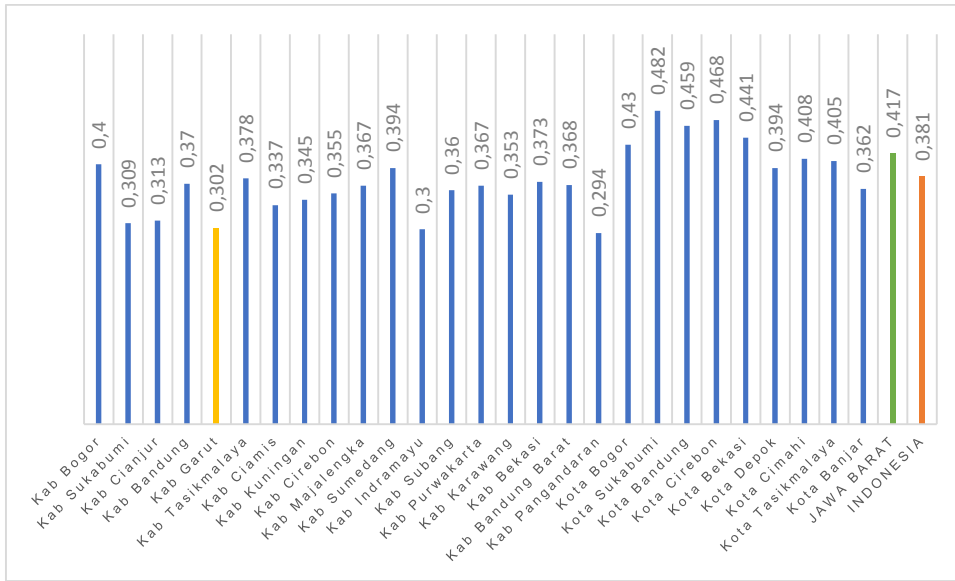
Berdasarkan data Susenas BPS, pencapaian gini rasio tahun 2022 berada pada level menengah dengan besaran 0,302, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 0,20 poin dan dikategorikan kelompok ketimpangan "ringan" karena berada di bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini tahun 2022 mencapai 116,34% dari target pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 0,360-0,362 poin.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.17
Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2017-2022

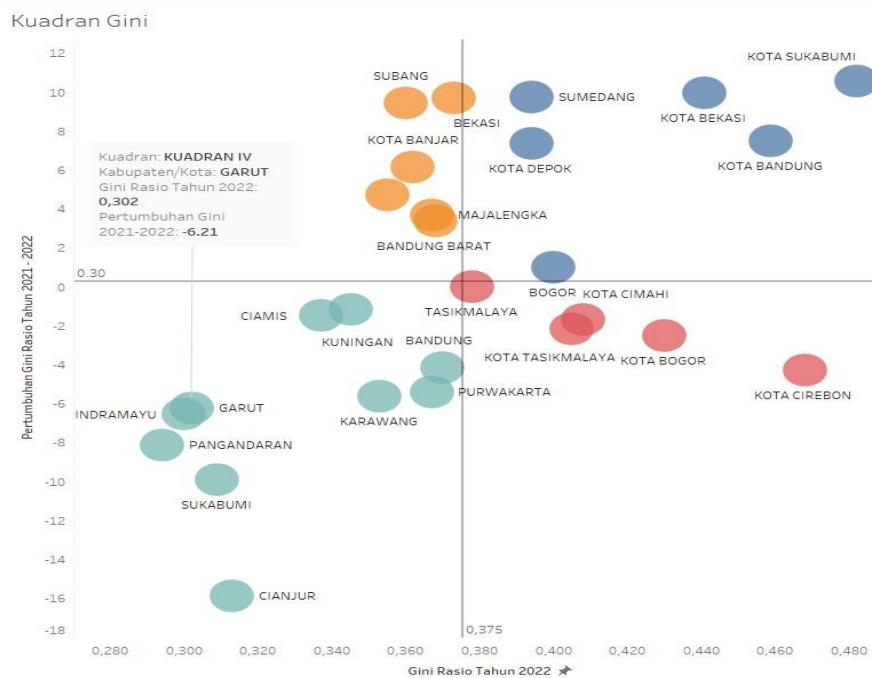
Jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, pada tahun 2022 kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 di bawah Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut sama dengan tahun 2021 Kabupaten Garut berada pada peringkat ke-3 dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.18
Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022

Dari analisis kuadran, Kabupaten Garut berada di kuadran IV yaitu kabupaten/kota dengan pencapaian Indeks Gini lebih lebih baik dari rata-rata (0,375) dan penurunan/perbaikan tingkat ketimpangan lebih baik dari rata-rata, turun 0,020 poin menjadi 0,302 pada tahun 2022.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.19
Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022

2.1.7. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Garut pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak 2.627.220 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.345.400 jiwa dan perempuan sebanyak 1.281.820 jiwa. Kondisi jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,86%. Tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 menjadi rata-rata sebesar 8.495,57 jiwa/ km².

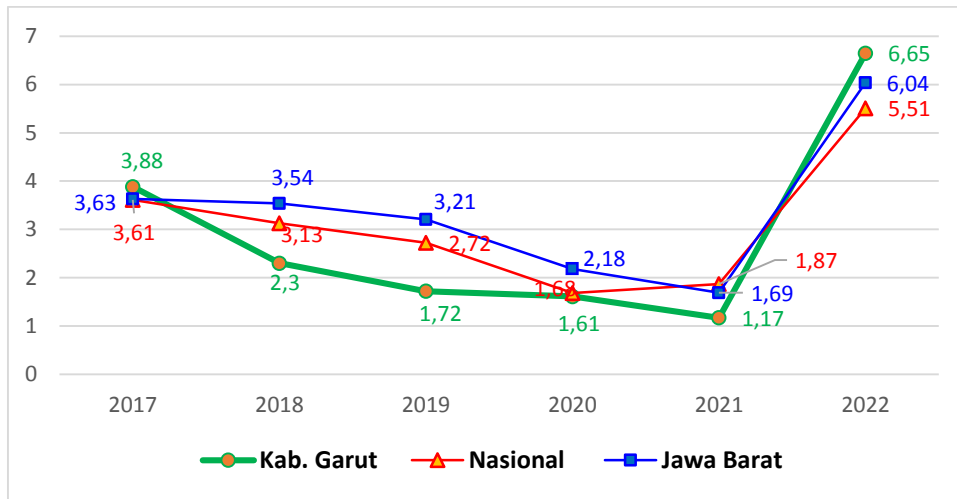
Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2022

INDIKATOR	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*	2.585.607	2.604.787	2.627.220
- Laki-Laki (Jiwa)	1.324.971	1.334.360	1.345.400
- Perempuan (Jiwa)	1.260.636	1.270.427	1.281.820
2. Sex Ratio (%)	105,1	105	105,12
3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*	0,75	0,56	0,86
4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	843,54	849,80	845,57
5. Jumlah Rumah Tangga (KK)	658.461	650.096	655.467
6. Rasio Ketergantungan Umur	47,59	47,23	47,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2022

2.1.8. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya sebesar 6,65 persen dengan IHK sebesar 111,78 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4,86 persen dengan IHK sebesar 110,32, menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang kurang terkendali dibandingkan tahun sebelumnya, dimana selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara umum telah mencapai 6,65%. Hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa beban hidup rumah tangga secara makro di Kabupaten Garut pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih 5,48%, dengan struktur kebutuhan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,17%. Kondisi inflasi pada tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan yang tinggi, hal ini ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga gangguan pasokan domestik akibat cuaca. Hal ini menyebabkan kenaikan inflasi hampir di seluruh wilayah termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 6,04% dan Nasional sebesar 5,51%. Kenaikan Pencapaian inflasi tahun 2022 mencapai 190,00% dari target Tahun 2022 sebesar 2,5% - 4,5%. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional tersaji pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.20
Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

Perbandingan inflasi tahun 2022 pada tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar 6,65% (berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di Kota Tasikmalaya), mengalami inflasi tertinggi kedua dibandingkan dengan enam kota lainnya, dan Kota Bandung berada pada peringkat satu dengan nilai inflasi 7,45%.

Tabel 2.12
Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Bulan Desember 2022 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional

Kota		IHK Desember 2022	Inflasi Desember 2022	Inflasi Tahun Kalender (ytd)	Inflasi Tahun ke tahun (yoy)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bogor	115,54	0,49	5,82	5,82
2	Sukabumi	113,32	0,50	5,45	5,45
3	Bandung	115,43	2,04	7,45	7,45
4	Cirebon	110,32	0,35	4,86	4,86
5	Bekasi	115,67	0,46	5,37	5,37
6	Depok	114,90	0,32	6,06	6,06
7	Tasikmalaya	111,78	0,53	6,65	6,65
	Gabungan Jawa Barat	115,11	0,74	6,04	6,04
	Nasional	113,59	0,66	5,51	5,51

Sumber : BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Asas



umum pengelolaan keuangan daerah meliputi tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah secara umum mengacu pada ketentuan perundangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Perubahan kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2020 tidak hanya mencakup penambahan atau pengurangan anggaran, tetapi juga menampung pergeseran anggaran, baik antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah pada masing-masing urusan pemerintahan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target; dan
 - f. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/ Perdesaan.
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
 - d. Optimalisasi proses pelaporan penggunaan dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aplikasi KRISNA; dan
 - e. Optimalisasi penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan transfer.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dari sisi pendapatan daerah, perubahan asumsi dasar kebijakan umum pendapatan Tahun Anggaran 2022 antara lain diprioritaskan untuk menampung dan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian anggaran pendapatan bantuan keuangan dan pendapatan bagi hasil provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022, yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 233 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

2. Penyesuaian pendapatan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
3. Penyesuaian Dana Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
4. Penyesuaian dana transfer berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
5. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik yang bersumber dari Perumda BPR Garut, PT. BPR Intan Jabar, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta PT. LKM Garut;
6. Penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dan Kurang Salur Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pada tahun 2022, dana transfer keuangan daerah dan dana desa mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara umum masih didominasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.



Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan dengan mengacu kepada Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Memenuhi pelaksanaan Program Unggulan yang merupakan program prioritas dalam pembangunan daerah selama 5 tahun;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3. Memenuhi pelaksanaan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional;
4. Mengakomodir semaksimal mungkin program pembangunan yang dijangkit melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
5. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
6. Mengedepankan program-program yang menunjang pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing daerah;
7. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
8. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih besar daripada Anggaran Belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan lebih kecil daripada Anggaran Belanja. Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/ dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

2.2.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil



penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi:

- 1) Sisa Lebih Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimalkan mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
- 2) Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah (Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang) dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah.

2.2.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah:

- 1) Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD;
- 2) Penyertaan modal dan pemberian pinjaman mana kala terjadi surplus anggaran;
- 3) Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

2.3. Indikator Pencapaian Target, Kinerja APBD

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten baik urusan konkuren pemerintahan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Urusan konkuren pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan konkuren pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Garut meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar maupun Non Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Selain melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 18 (delapan belas) bidang urusan pemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan.

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang urusan lainnya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 meliputi 411 Program dan 1.052 Kegiatan serta 2.434 Sub Kegiatan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara keseluruhan untuk target pendapatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.626.954.746.948,10 mencapai 99,06% bila dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp4.670.657.405.901,40. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4.684.404.923.196,61 mengalami penurunan sebesar Rp(57.450.176.248,51) atau (1,23%).

Sementara untuk belanja dan transfer selama tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.688.375.421.003,00 mencapai 95,29% bila dibandingkan dengan anggaran yaitu sebesar Rp4.919.944.484.758,40. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4.649.602.155.581,00 mengalami peningkatan sebesar Rp38.773.265.422,00 atau 0,83%.

Rincian perkembangan realisasi pendapatan dan belanja selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah
Berdasarkan Sumbernya Tahun 2021 - 2022*)

NO	SUMBER PENDAPATAN	TA 2021		TA 2022	
		(RP)	(%)	(RP)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	560.783.376.918,61	113,77	486.038.766.410,10	100,33
2.	Pendapatan Transfer	3.784.572.413.274,00	97,65	4.081.264.360.586,00	98,55
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	339.049.133.004,00	99,49	59.651.619.952,00	132,47
	Jumlah	4.684.404.923.196,61	99,47	4.626.954.746.948,10	99,06

*) Format klasifikasi Rekening Penganggaran

Tabel 3.2
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah
Berdasarkan Kelompok dan Jenis Tahun 2021 - 2022 **)

NO	KELOMPOK BELANJA	TA 2021		TA 2022	
		(Rp)	(%)	(RP)	(%)
1.	Belanja Operasi	3.289.003.496.580,00	92,99	3.227.936.895.047,00	95,10
2.	Modal	558.797.286.428,00	93,36	700.943.778.898,00	93,92
3.	Belanja Tidak Terduga	39.452.922.903,00	94,25	28.771.620.642,00	60,14
4.	Belanja Transfer	762.348.449.670,00	99,69	730.723.126.416,00	99,89
	Jumlah*)	4.649.602.155.581,00	94,14	4.688.375.421.003,00	95,29

*) Belum termasuk Pembiayaan (terpisah)

***) Bagi Hasil Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan (Transfer)

Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Sedangkan efektifitas diukur dengan membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Garut dari pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka



Kemiskinan dan Ketimpangan, Perluasan Kesempatan Kerja, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah, Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Penjelasan lebih rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan program dan kegiatan disajikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

a. Permasalahan

1. Beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi permasalahan dalam realisasi Pendapatan Daerah:
 - 1) Belum optimalnya realisasi pajak dan retribusi daerah, yang disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi yang belum maksimal, masih berpengaruhnya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan pelaku usaha baik di sektor perdagangan maupun pariwisata;
 - 2) Secara Umum Dana Transfer Pemerintah Pusat tidak mengalami penurunan, akan tetapi penerapan kebijakan baru berupa adanya DAU yang diarahkan penggunaannya bagi PPPK yang sangat signifikan, pemerintah daerah dalam penerapannya perlu melakukan adaptasi yang tidak mudah;
 - 3) Secara Umum Dana Transfer Provinsi tidak mengalami penurunan dan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan;
 - 4) Pada Lain - Lain PAD yang Sah, pendapatan dari Hasil Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah belum optimal.
2. Permasalahan sektor Belanja Daerah, meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 masih diwarnai oleh dinamika keadaan Pandemi COVID-19, sehingga penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa mengalami penyesuaian untuk mendukung pendanaan Program Vaksinasi dan penanganan Pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penanganan COVID-19 maupun penanganan kejadian bencana alam sesuai ketentuan;
 - 2) Masih tingginya persentase belanja pegawai, yaitu diatas 30% untuk tahun 2022 dan belum terpenuhinya persentase belanja insfrastruktur sebesar 40% sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoaman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Belum efektif dan efisiennya belanja yang dialokasikan, sehingga berpengaruh pada output dan outcome suatu program dan kegiatan.

Adanya perubahan regulasi berkenaan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mendorong perlu dilakukannya penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2021 untuk disesuaikan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mengenai Hasil



Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik.

b. Upaya Pemecahan

1. Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD di antaranya melalui:

- 1) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- 6) Pengembangan aplikasi pajak daerah melalui SPTPD *online*, e-PAD, *Tapping Box* serta kerjasama pembayaran *online* dengan toko modern;
- 7) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor BPN/ATR dalam hal intensifikasi pendapatan dari BPHTB;
- 8) Melaksanakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Garut dalam hal pembinaan kepada wajib pajak daerah;
- 9) Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- 10) Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak daerah melalui verifikasi pembayaran pajak daerah (*Tax Clearance*) yang mengajukan perizinan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut;
- 11) Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- 12) Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak;
- 13) Melaksanakan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal intensifikasi pendapatan Pajak Daerah;
- 14) Pengadaan kendaraan pelayanan keliling pajak daerah secara mobile;
- 15) Penguatan/peningkatan sistem secara *online*;
- 16) Mengadakan sensus pajak daerah;
- 17) Kerjasama dengan BPN;
- 18) Penyesuaian NJOP;
- 19) Peningkatan batas minimal PBB.

2. Upaya pemecahan sektor Belanja Daerah, yaitu:

- 1) Perencanaan belanja daerah yang terukur, antara lain dengan adanya kesesuaian antara belanja daerah yang tercantum dalam penganggaran dengan dokumen awal perencanaan, adanya penetapan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) serta rendahnya selisih antara anggaran belanja yang diajukan dengan kebutuhan belanja yang sesungguhnya diperlukan.
- 2) Pengendalian belanja daerah yang menyeluruh, mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Sehingga setiap bentuk pengeluaran belanja daerah, dapat dilakukan pelacakan mulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga bukti-bukti transaksi yang merupakan dokumen pertanggungjawaban.
- 3) Pelaksanaan belanja daerah yang akuntabel, di mana dalam pelaksanaan belanja



daerah dapat dipertanggungjawabkan dan dibentuk laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan verifikasi dan audit terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan.

BAB IV **Kebijakan Akuntansi**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 384 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut dan Peraturan Bupati Garut Nomor 234 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 510 tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Serta Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Garut, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut terdiri dari 7 laporan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD Kabupaten Garut. SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang telah menyusun Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut

NO	UNIT ORGANISASI
1.	Dinas Pendidikan
2.	Dinas Kesehatan
3.	BLUD RSUD dr. Slamet Kabupaten Garut
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Dinas Pemadam Kebakaran
8.	Dinas Sosial
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10.	Dinas Ketahanan Pangan
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Dinas Perhubungan
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18.	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21.	Dinas Perikanan dan Peternakan
22.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Dinas Pertanian
24.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
25.	Inspektorat Daerah
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28.	Badan Pendapatan Daerah
29.	Badan Kepegawaian dan Diklat
30.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31.	Sekretariat Daerah
32.	Sekretariat DPRD
33.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
34.	Kecamatan Banjarwangi
35.	Kecamatan Banyuresmi
36.	Kecamatan Bayongbong
37.	Kecamatan Balubur Limbangan
38.	Kecamatan Bungbulang
39.	Kecamatan Caringin
40.	Kecamatan Cibalong
41.	Kecamatan Cibatuh
42.	Kecamatan Cibiuk
43.	Kecamatan Cigedug
44.	Kecamatan Cihurip



NO	UNIT ORGANISASI
45.	Kecamatan Cikajang
46.	Kecamatan Cikelet
47.	Kecamatan Cilawu
48.	Kecamatan Cisewu
49.	Kecamatan Cisompet
50.	Kecamatan Cisurupan
51.	Kecamatan Garut Kota
52.	Kecamatan Kadungora
53.	Kecamatan Karangtengah
54.	Kecamatan Karangpawitan
55.	Kecamatan Kersamanah
56.	Kecamatan Leles
57.	Kecamatan Leuwigoong
58.	Kecamatan Malangbong
59.	Kecamatan Mekarmukti
60.	Kecamatan Pakenjeng
61.	Kecamatan Pameungpeuk
62.	Kecamatan Pamulihan
63.	Kecamatan Pangatikan
64.	Kecamatan Pasirwangi
65.	Kecamatan Peundeuy
66.	Kecamatan Samarang
67.	Kecamatan Selaawi
68.	Kecamatan Singajaya
69.	Kecamatan Sucinaraja
70.	Kecamatan Sukaesmi
71.	Kecamatan Sukawening
72.	Kecamatan Talegong
73.	Kecamatan Tarogong Kaler
74.	Kecamatan Tarogong Kidul
75.	Kecamatan Wanaraja

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Garut dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas Pemerintah Kabupaten Garut wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Garut tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Kedua, prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Garut.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Ketiga, prinsip Realisasi (*Realization Principle*) adalah ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Kabupaten Garut (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut. Pertimbangan sehat

mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Garut sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan walaupun belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang akun Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan pengungkapan Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a. Saat timbulnya kewajiban;
- b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban
- b. Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer
- d. Beban Non Operasional
- e. Beban Luar Biasa

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
- b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:

- a. Penggunaan SILPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Pinjaman Dalam Negeri;
- e. Penerimaan Kembali Piutang; dan
- f. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari:

- a. Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Lain;
- b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- c. Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman; dan
- d. Pembentukan dana cadangan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran (LRA).

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- a. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/ pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Klasifikasi kas dan setara kas sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), yaitu:

Tabel 4.2
Klasifikasi Kas dan Setara Kas Sesuai dengan BAS

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
	Kas di Bendahara BOS	Uang Titipan BLUD
		Kas Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Kas Lainnya	Jasa Giro	
	Saldo Rekening	
	Pajak di SKPD yang Belum disetor	
	Kas Lain-lain	
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan Kas dan Setara Kas, antara lain:

- a. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. Kebijakan manajemen setara kas;
- c. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur;

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang disajikan sebagai bagian dari aset lancar setelah dikurangi nilai penyisihan piutang dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
- c. Berisiko rendah.

Jenis-jenis investasi jangka pendek adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas. Termasuk Investasi jangka pendek adalah Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh pemerintah pusat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.



Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

1. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
2. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
5. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
6. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas dan SILPA/SIKPA/SAL

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Ekuitas diukur dengan nilai akun yang mempengaruhinya. SiLPA/SiKPA/SAL diukur sebesar nilai nominal yang diterima atau dikeluarkan sesuai dengan nilai akun-akun yang mempengaruhinya.

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

Konsolidasi yang dimaksud oleh kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dengan PPKD sebagai entitas pelaporan dengan mengeliminasi akun timbal balik di laporan keuangan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Konsolidasi dilaksanakan dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal account*).

Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) pada pemerintah Kabupaten Garut adalah akun Rekening Koran (R/K) yaitu akun yang timbul ketika ada hubungan transaksi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

Selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBD), BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan standar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Dalam CaLK perlu diungkapkan nama-nama entitas yang dikonsolidasikan atau digabungkan beserta status masing-masing, apakah entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik, maka perlu diungkapkan nama-nama dan besaran saldo akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum dilaksanakannya eliminasi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut antara lain sebagai berikut:

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau (masuk pertama keluar pertama), di mana nilai persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan.

- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, rampasan dan lainnya. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel di bawah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih di luar piutang pada BLUD pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0,5 %
B	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
D	Macet	100 %

Sedangkan untuk piutang pada BLUD besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penyisihan Piutang Tak Tertagih BLUD

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	25 %
B	Kurang Lancar	50 %
C	Diragukan	75 %
D	Macet	100 %

Penyisihan piutang tersebut di atas, dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang masih eksis lembaganya.

- c. Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

Pengeluaran untuk per-satuan peralatan dan mesin dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dianggap aset tetap.

- d. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang



masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 2. Bertambah manfaat/umur ekonomis, dan/atau
 3. Bertambah volume, dan/atau
 4. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau
- b) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap yang meliputi:
 1. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas;
 2. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
 3. *Overhaul* merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
- c) Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan baik berupa renovasi, restorasi dan *overhaul* didasarkan pada Peraturan Bupati Garut Nomor 232 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 384 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.

e. Penyusutan Aset Tetap dan Aset tidak berwujud

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) dengan memperhitungkan nilai sisa (residu) = Rp0,00. Aset tetap yang telah habis masa manfaatnya dan sudah tidak disusutkan lagi, dicantumkan dalam neraca sebesar Rp0,00.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 384 Tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Garut. Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tidak berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan amortisasi. Penurunan nilai tersebut, apabila nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan aset tidak berwujud tidak dapat dimanfaatkan dan perubahan kebijakan penggunaan sistem.



Amortisasi aset tidak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap tahun selama masa manfaat. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per tahun} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat aset tidak berwujud ditentukan untuk setiap unit aset tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi
Goodwill	20 tahun	5%
Lisensi	10 tahun	10%
Hak Cipta	50 tahun	2%
Hak paten	10 tahun	10%
Aset Tak Berwujud Lainnya:		
Software/Sistem Informasi Manajemen	5 tahun	20%
Hasil Kajian	5 tahun atau berdasarkan masa kajian atau masa kontrak	20%

Penambahan masa manfaat Aset Tak Berwujud akibat perbaikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Penambahan Masa Manfaat
Amortisasi Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Persentase Perbaikan dari Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
Goodwill		
Lisensi		
Hak Cipta		
Hak Paten	>25% s.d 50%	2
Aset Tak Berwujud Lainnya:	>50% s.d 75%	4
Software/Sistem Informasi Manajemen	>75% s.d 100%	6
Hasil Kajian		



Bab V
Penjelasan Pos-Pos
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut TA 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 11 Oktober 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut TA 2022. Secara garis besar jumlah anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Garut

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Daerah	4.670.657.405.901,40	4.626.954.746.948,10	99,06	4.684.404.923.196,61
2.	Belanja Daerah	4.919.944.484.758,40	4.688.375.421.003,00	95,29	4.649.602.155.581,00
	Surplus/ Defisit	(249.287.078.857,00)	(61.420.674.054,90)	24,64	34.802.767.615,61

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Garut TA 2022 defisit sebesar (Rp61.420.674.054,90) yaitu turun sebesar (Rp96.223.441.670,51) atau (276,48%) dibandingkan dengan surplus TA 2021 sebesar Rp34.802.767.615,61. Hal tersebut dikarenakan masih adanya rasionalisasi pendapatan dan belanja sesuai dengan kebijakan pemerintah diantaranya:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2022 masih diwarnai oleh dinamika keadaan Pandemi COVID-19, sehingga penggunaan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa mengalami penyesuaian untuk mendukung pendanaan Program Vaksinasi dan penanganan Pandemi COVID-19. Pemerintah Daerah harus mengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penanganan COVID-19 maupun penanganan kejadian bencana alam sesuai ketentuan;
- b. Masih tingginya persentase belanja pegawai, yaitu diatas 30% untuk tahun 2022 dan belum terpenuhinya persentase belanja infrastruktur sebesar 40% sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. Belum efektif dan efisiennya belanja yang dialokasikan, sehingga berpengaruh pada output dan *outcome* suatu program dan kegiatan.
- d. Adanya perubahan regulasi berkenaan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mendorong perlu dilakukannya penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya pada RKPD Tahun 2021 untuk disesuaikan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri



mengenai Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (*Mapping*) Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penggunaan DBH-CHT, DAK Fisik, DAK Non Fisik.

Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Garut secara umum masih didominasi oleh sumber dana perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Kabupaten Garut TA 2022 dan perbandingannya dengan TA 2021 dapat diuraikan pada penjelasan berikut:

5.1.1 Pendapatan Daerah	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
		4.626.954.746.948,10

Pendapatan Daerah Kabupaten Garut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Asli Daerah	484.443.369.392,40	486.038.766.410,10	100,33	560.783.376.918,61
2.	Pendapatan Transfer	4.141.182.670.916,00	4.081.264.360.586,00	98,55	3.784.572.413.274,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	45.031.365.593,00	59.651.619.952,00	132,47	339.049.133.004,00
	Jumlah	4.670.657.405.901,40	4.626.954.746.948,10	99,06	4.684.404.923.196,61

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Garut TA 2022 secara keseluruhan tidak melebihi target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan bila dibanding realisasi TA 2021. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp4.670.657.405.901,40 dan realisasinya mencapai sebesar Rp4.626.954.746.948,10 atau 99,06%. Dengan demikian Pendapatan Daerah mengalami penurunan sebesar (Rp57.450.176.248,51) atau (1,23%) dari realisasi pendapatan TA 2021 yaitu Rp4.684.404.923.196,61.

Kenaikan terbesar terjadi pada sektor pendapatan daerah dari hasil pajak daerah dengan kontribusi terbesar kenaikan pendapatan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Hotel. Kenaikan di sektor tersebut berkaitan dengan mulai bangkitnya pertumbuhan sektor perdagangan dan pariwisata baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga mempengaruhi rantai perekonomian.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
		486.038.766.410,10

Realisasi PAD untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pajak Daerah	156.311.500.000,00	157.571.464.634,00	100,81	126.527.804.958,00
2.	Retribusi Daerah	22.150.188.325,40	15.711.817.595,00	70,93	15.259.959.070,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.044.369.160,00	7.044.369.160,00	100,00	6.455.066.625,00
4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	298.937.311.907,00	305.711.115.021,10	102,27	412.540.546.265,61
	Jumlah	484.443.369.392,40	486.038.766.410,10	100,33	560.783.376.918,61

PAD dianggarkan sebesar Rp484.443.369.392,40 sedangkan realisasinya mencapai sebesar Rp486.038.766.410,10 atau 100,33%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp560.783.376.918,61 maka realisasi TA 2022 mengalami penurunan sebesar (Rp74.744.610.508,51) atau (13,33%). Adapun rincian untuk masing-masing sumber PAD adalah sebagai berikut:

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
157.571.464.634,00	126.527.804.958,00

Anggaran Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp156.311.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp157.571.464.634,00 atau 100,81%. Realisasi Pajak Daerah TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp31.043.659.676,00 atau 24,54% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp126.527.804.958,00. Sumbangan terbesar realisasi pajak TA 2022 berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp44.617.855.665,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp19.900.000,00. Realisasi Pajak Daerah untuk periode TA 2022 dengan rincian:

Tabel 5.4
Realisasi Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pajak Hotel	12.200.000.000,00	9.904.120.349,00	81,18	6.513.436.392,00
2.	Pajak Restoran	19.400.000.000,00	23.073.804.305,00	118,94	14.391.870.291,00
3.	Pajak Hiburan	6.900.000.000,00	5.472.853.602,00	79,32	1.522.728.014,00
4.	Pajak Reklame	5.865.000.000,00	5.492.151.074,00	93,64	5.390.669.111,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	35.000.000.000,00	36.097.702.237,00	103,14	29.675.305.054,00
6.	Pajak Parkir	805.000.000,00	581.154.471,00	72,19	332.435.303,00
7.	Pajak Air Tanah	667.000.000,00	557.175.988,00	83,53	441.690.692,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	11.500.000,00	19.900.000,00	173,04	11.150.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.863.000.000,00	1.641.637.493,00	88,12	1.361.570.848,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	46.460.000.000,00	44.617.855.665,00	96,03	42.127.045.819,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	27.140.000.000,00	30.113.109.450,00	110,95	24.759.903.434,00
	Jumlah	156.311.500.000,00	157.571.464.634,00	100,81	126.527.804.958,00



5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
15.711.817.595,00	15.259.959.070,00

Anggaran Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp22.150.188.325,40 dan terealisasi sebesar Rp15.711.817.595,00 atau 70,93%. Realisasi Retribusi Daerah TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp451.858.525,00 atau 2,96% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp15.259.959.070,00. Sumbangan terbesar realisasi Retribusi TA 2022 berasal dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp5.953.629.800,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.202.888.005,00. Realisasi hasil Retribusi Daerah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Retribusi Jasa Umum	6.607.041.522,40	5.555.299.790,00	84,08	4.648.051.910,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	3.858.477.793,00	4.202.888.005,00	108,93	2.065.887.160,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	11.684.669.010,00	5.953.629.800,00	50,95	8.546.020.000,00
	Jumlah	22.150.188.325,40	15.711.817.595,00	70,93	15.259.959.070,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Rp5.555.299.790,00

Anggaran Retribusi Jasa Umum TA 2022 sebesar Rp6.607.041.522,40 dan terealisasi sebesar Rp5.555.299.790,00 atau 84,08%. Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp907.247.880,00 atau 19,52% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp4.648.051.910,00. Sumbangan terbesar realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2022 berasal dari sektor Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.507.440.000,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar Rp9.810.000,00. Realisasi Hasil Retribusi Jasa Umum untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Retribusi Jasa Umum

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.145.069.464,00	1.097.166.800,00	95,82	984.731.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.801.000,00	9.810.000,00	100,09	8.060.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	493.700.850,00	542.084.000,00	109,80	526.982.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.805.380.526,40	1.507.440.000,00	83,50	1.454.518.000,00
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.553.151.160,00	1.156.869.600,00	74,49	1.229.833.600,00
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	10.164.000,00	15.856.050,00	156,00	16.336.950,00
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	53.036.371,00	55.000.000,00	103,70	48.965.000,00
8.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku	13.854.500,00	13.870.000,00	100,11	12.600.000,00
9.	Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang	30.250.000,00	31.029.500,00	102,58	28.000.000,00
10.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.492.633.651,00	1.126.173.840,00	75,45	338.025.360,00
	Jumlah	6.607.041.522,40	5.555.299.790,00	84,08	4.648.051.910,00



5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Rp4.202.888.005,00

Anggaran Retribusi Jasa Usaha TA 2022 sebesar Rp3.858.477.793,00 dan terealisasi sebesar Rp4.202.888.005,00 atau 108,93%. Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp2.137.000.845,00 atau 103,44% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.065.887.160,00. Sumbangan terbesar realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2022 berasal dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp2.435.075.005,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp50.628.000,00. Realisasi Hasil Retribusi Jasa Usaha untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	149.886.966,00	163.917.000,00	109,36	156.725.000,00
2.	Retribusi Terminal	301.615.512,00	244.573.200,00	81,09	210.706.160,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	843.089.000,00	934.842.000,00	110,88	679.105.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	43.074.000,00	50.628.000,00	117,54	44.944.000,00
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.147.702.475,00	2.435.075.005,00	113,38	637.079.000,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	373.109.840,00	373.852.800,00	100,20	337.328.000,00
	Jumlah	3.858.477.793,00	4.202.888.005,00	108,93	2.065.887.160,00

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Rp5.953.629.800,00

Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 sebesar Rp11.684.669.010,00 dan terealisasi sebesar Rp5.953.629.800,00 atau 50,95%. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 tersebut menurun sebesar (Rp2.592.390.200,00) atau (30,33%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp8.546.020.000,00. Sumbangan terbesar realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2022 berasal dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.823.041.000,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp130.588.800,00. Realisasi Hasil Retribusi Jasa Perizinan Tertentu untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	11.228.580.000,00	5.823.041.000,00	51,86	8.142.917.000,00
2.	Retribusi Izin Trayek utk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	186.220.210,00	130.588.800,00	70,13	102.006.000,00
3.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	800.000,00	-	-	800.000,00
4.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	269.068.800,00	-	-	300.297.000,00
	Jumlah	11.684.669.010,00	5.953.629.800,00	50,95	8.546.020.000,00



5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
7.044.369.160,00	6.455.066.625,00

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp7.044.369.160,00 dan terealisasi sebesar Rp7.044.369.160,00 atau 100,00%. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp589.302.535,00 atau 9,13% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp6.455.066.625,00. Sumbangan terbesar realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 berasal dari sektor Bagian Laba dari PD. BPR Garut sebesar Rp3.812.821.837,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Bagian Laba dari PT. LKM sebesar Rp179.480.443,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Bagian Laba dari PD BPR Garut	3.812.821.837,00	3.812.821.837,00	100,00	3.221.633.222,00
2.	Bagian Laba PT BPR Intan JABAR	-	-	-	569.015.150,00
3.	Bagian Laba dari PT LKM	179.480.443,00	179.480.443,00	100,00	140.070.586,00
4.	Bagian Laba dari PT Bank Jabar Banten	3.052.066.880,00	3.052.066.880,00	100,00	2.524.347.667,00
	Jumlah	7.044.369.160,00	7.044.369.160,00	100,00	6.455.066.625,00

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
305.711.115.021,10	412.540.546.265,61

Anggaran Hasil Lain-Lain PAD yang Sah TA 2022 sebesar Rp298.937.311.907,00 dan terealisasi sebesar Rp305.711.115.021,10 atau 102,27%. Realisasi Hasil Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah TA 2022 tersebut menurun sebesar (Rp106.829.431.244,51) atau (25,90%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp412.540.546.265,61. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	152.695.000,00	645.569.406,00	422,78	621.343.000,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.768.135.926,00	1.819.423.561,00	102,90	1.307.273.630,00
3.	Jasa Giro	14.000.000.000,00	8.608.104.931,00	61,49	6.895.379.907,00
4.	Pendapatan Bunga	-	379.616.437,00	-	8.887.945.183,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.031.694.850,00	2.831.167.044,00	139,35	4.774.030.585,00
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	767.501.971,00	-	217.331.067,00
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	19.512.259,00	-	13.267.956,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000,00	113.096.494,00	37,70	173.889.367,00
9.	Pendapatan BLUD	280.684.786.131,00	290.527.122.918,10	103,51	389.650.085.570,61
	Jumlah	298.937.311.907,00	305.711.115.021,10	102,27	412.540.546.265,61



5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
4.081.264.360.586,00	3.784.572.413.274,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp4.141.182.670.916,00 dan realisasinya mencapai Rp4.081.264.360.586,00 atau 98,55%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.784.572.413.274,00, maka realisasi TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp296.691.947.312,00 atau 7,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.935.857.584.765,00	2.883.274.233.594,00	98,21	2.712.886.380.851,00
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	530.371.893.000,00	530.022.372.200,00	99,93	549.086.677.200,00
3.	Transfer Pemerintah dari Provinsi	674.953.193.151,00	667.967.754.792,00	98,97	522.599.355.223,00
	Jumlah	4.141.182.670.916,00	4.081.264.360.586,00	98,55	3.784.572.413.274,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
2.883.274.233.594,00	2.712.886.380.851,00

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp2.935.857.584.765,00 dan terealisasi sebesar Rp2.883.274.233.594,00 atau 98,21%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp170.387.852.743,00 atau 6,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.712.886.380.851,00.

Sumbangan terbesar realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2022 berasal dari sektor Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.657.145.048.168,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp129.254.394.668,00. Beberapa komponen pendapatan yang bersumber dari dana transfer seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, sedangkan komponen lainnya seperti Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi mengalami peningkatan dari tahun 2021.

Tabel 5.12
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Bagi Hasil Pajak	127.728.253.238,00	129.254.394.668,00	101,19	139.697.220.120,00



No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	111.038.803.527,00	132.610.716.585,00	119,43	248.139.310.049,00
3.	Dana Alokasi Umum	1.665.908.667.000,00	1.657.145.048.168,00	99,47	1.665.908.667.000,00
4.	Dana Alokasi Khusus	1.031.181.861.000,00	964.264.074.173,00	93,51	659.141.183.682,00
	Jumlah	2.935.857.584.765,00	2.883.274.233.594,00	98,21	2.712.886.380.851,00

Rincian Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari:

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
129.254.394.668,00	139.697.220.120,00

Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 sebesar Rp127.728.253.238,00 dan terealisasi sebesar Rp129.254.394.668,00 atau 101,19%. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 tersebut menurun sebesar (Rp10.442.825.452,00) atau (7,48%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp139.697.220.120,00. Sumbangan terbesar realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2022 berasal dari sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp66.310.899.191,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN sebesar Rp3.960.808.542,00. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	61.808.636.447,00	66.310.899.191,00	107,28	67.221.784.907,00
2.	DBH PPh Pasal 21	33.768.776.168,00	34.439.237.910,00	101,99	41.677.631.587,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 /WPOPDN	8.105.142.243,00	3.960.808.542,00	48,87	3.803.975.668,00
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	24.045.698.380,00	24.543.449.025,00	102,07	26.993.827.958,00
	Jumlah	127.728.253.238,00	129.254.394.668,00	101,19	139.697.220.120,00

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
132.610.716.585,00	248.139.310.049,00

Anggaran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 sebesar Rp111.038.803.527,00 dan terealisasi sebesar Rp132.610.716.585,00 atau 119,43%. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp115.528.593.464,00) atau (46,56%) dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp248.139.310.049,00. Sumbangan terbesar realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam TA 2022 berasal dari sektor Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi sebesar Rp116.360.006.791,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Bagi Hasil dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp163.310.332,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.14
Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	4.178.211.705,00	6.486.579.939,00	155,25	3.490.313.900,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.425.421.000,00	5.974.722.332,00	246,34	192.486.100,00
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	101.167.299.994,00	116.360.006.791,00	115,02	241.756.296.688,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	342.180.000,00	445.576.600,00	130,22	371.185.800,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	818.706.116,00	1.222.209.591,00	149,29	776.151.068,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	148.673.712,00	163.310.332,00	109,84	195.257.343,00
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
	Jumlah	111.038.803.527,00	132.610.716.585,00	119,43	248.139.310.049,00

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.657.145.048.168,00	1.665.908.667.000,00

Anggaran DAU TA 2022 sebesar Rp1.665.908.667.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.657.145.048.168,00 atau 99,47%. Realisasi DAU TA 2022 tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp8.763.618.832,00) atau (0,53%) dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.665.908.667.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
964.264.074.173,00	659.141.183.682,00

Anggaran DAK TA 2022 sebesar Rp1.031.181.861.000,00 dan terealisasi sebesar Rp964.264.074.173,00 atau 93,51%. Realisasi DAK TA 2022 tersebut meningkat signifikan sebesar Rp305.122.890.491,00 atau 46,29% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp659.141.183.682,00 karena adanya perubahan pencatatan pendapatan Dana BOS dari Pendapatan Hibah menjadi Pendapatan Transfer - DAK. Realisasi DAK untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Dana Alokasi Khusus

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	DAK Reguler	84.766.331.000,00	79.149.439.032,00	93,37	59.779.933.305,00
	Bidang Pendidikan - PAUD	5.130.669.000,00	4.934.921.550,00	96,18	262.803.000,00
	Bidang Pendidikan - SD	24.969.214.000,00	24.441.455.900,00	97,89	14.772.745.800,00
	Bidang Pendidikan - SMP	11.450.211.000,00	11.432.917.400,00	99,85	2.876.099.200,00
	Bidang Pendidikan - Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	297.611.000,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00	0,00	0,00	4.757.705.660,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian	12.111.590.000,00	8.839.293.159,00	72,98	8.652.006.145,00
	Bidang Kesehatan dan KB - KB	1.551.825.000,00	1.185.125.000,00	76,37	1.133.355.500,00
	Bidang Jalan	6.343.350.000,00	6.198.311.900,00	97,71	27.027.607.000,00
	Bidang Air Minum	7.364.381.000,00	7.362.940.000,00	99,98	0,00
	Bidang Sanitasi	7.880.580.000,00	7.310.580.000,00	92,77	0,00



No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
	Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	7.964.511.000,00	7.443.894.123,00	93,46	0,00
2.	DAK Penugasan	36.430.704.000,00	34.395.553.461,00	94,41	75.809.939.828,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan AKI dan AKB	5.176.932.000,00	4.971.554.387,00	96,03	16.384.805.864,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	3.341.800.000,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	870.408.000,00	848.793.690,00	97,52	0,00
	Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting (KB)	2.500.917.000,00	2.492.717.600,00	99,67	488.750.000,00
	Bidang Perumahan dan Permukiman - Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	0,00	1.292.475.000,00
	Bidang Industri Kecil dan Menengah - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00	0,00	0,00	1.109.000.000,00
	Bidang Pertanian - Pembangunan/ Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	14.296.014.000,00	12.914.660.178,00	90,34	4.736.029.500,00
	Bidang Kelautan dan Perikanan	2.621.760.000,00	2.553.204.665,00	97,39	1.101.563.900,00
	Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	2.623.340.195,00
	Bidang Jalan	5.130.000.000,00	4.921.099.600,00	95,93	12.999.058.000,00
	Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	10.790.845.869,00
	Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	10.625.098.000,00
	Bidang Irigasi	4.534.673.000,00	4.398.708.341,00	97,00	9.020.763.000,00
	Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.294.815.000,00	99,60	1.296.410.500,00
3.	DAK Non Fisik	909.984.826.000,00	850.719.081.680,00	93,49	523.551.310.549,00
	BOS Reguler	364.495.300.000,00	353.170.465.205,00	96,89	0,00
	BOS Kinerja	11.700.000.000,00	11.620.000.000,00	99,32	0,00
	TPG PNSD	364.567.062.000,00	328.310.489.240,00	90,05	381.058.430.905,00
	Tamsil Guru PNSD	3.576.000.000,00	3.416.262.500,00	95,53	1.320.000.000,00
	BOP PAUD	50.392.200.000,00	50.098.862.000,00	99,42	46.965.900.000,00
	BOP Pendidikan Kesetaraan	22.222.200.000,00	22.202.700.000,00	99,91	15.113.114.720,00
	BOKKB - BOK	63.216.343.000,00	53.912.631.535,00	85,28	40.193.362.821,00
	Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)	445.836.000,00	334.377.000,00	75,00	550.883.000,00
	BOKKB - Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	4.209.705.000,00
	BOKKB - Jaminan Persalinan	2.734.068.000,00	2.050.551.000,00	75,00	15.766.171.000,00
	BOKKB - BOKB	23.882.211.000,00	23.232.000.000,00	97,28	11.450.894.370,00
	PK2UKM	400.800.000,00	394.284.000,00	98,37	390.304.000,00
	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	4.378.159.733,00
	Dana Pelayanan Kepariwisata	758.892.000,00	758.892.000,00	100,00	861.423.000,00
	Dana Fasilitas Penanaman Modal	383.914.000,00	269.607.200,00	70,23	372.462.000,00
	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00	0,00
	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	608.200.000,00	346.160.000,00	56,92	920.500.000,00
	Jumlah	1.031.181.861.000,00	964.264.074.173,00	93,51	659.141.183.682,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
530.022.372.200,00	549.086.677.200,00

Anggaran Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 sebesar Rp530.371.893.000,00 dan terealisasi sebesar Rp530.022.372.200,00 atau 99,93%. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2022 tersebut menurun sebesar (Rp19.064.305.000,00) atau (3,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp549.086.677.200,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Dana Insentif Daerah	12.124.874.000,00	12.124.874.000,00	100,00	43.042.894.000,00
2.	Dana Desa	518.247.019.000,00	517.897.498.200,00	99,93	506.043.783.200,00
	Jumlah	530.371.893.000,00	530.022.372.200,00	99,93	549.086.677.200,00

Dana Desa TA 2022 ditransfer dari rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening Pemerintah Desa tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bendahara Umum Daerah Kabupaten Garut telah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sekaligus Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) pada tanggal 17 Maret 2022. Dana Desa disahkan dalam dua puluh delapan SP2DD sekaligus SPBDD sesuai tahapan/termin penyaluran ke rekening Pemerintah Desa sesuai konfirmasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total sebesar Rp517.897.498.200,00

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah dari Provinsi

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
667.967.754.792,00	522.599.355.223,00

Anggaran Transfer Pemerintah dari Provinsi TA 2022 sebesar Rp674.953.193.151,00 dan terealisasi sebesar Rp667.967.754.792,00 atau 98,97%. Realisasi Transfer Pemerintah dari Provinsi TA 2022 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp145.368.399.569,00 atau 27,82% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp522.599.355.223,00. Realisasi Transfer Pemerintah dari Provinsi untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Pendapatan Transfer dari Provinsi

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	270.388.964.314,00	269.534.660.055,00	99,68	216.472.865.839,00
2.	Pendapatan Bantuan Keuangan	404.564.228.837,00	398.433.094.737,00	98,48	306.126.489.384,00
	Jumlah	674.953.193.151,00	667.967.754.792,00	98,97	522.599.355.223,00

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

Rp269.534.660.055,00

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 sebesar Rp270.388.964.314,00 dan terealisasi sebesar Rp269.534.660.055,00 atau 99,68%. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp53.061.794.216,00 atau 24,51% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp216.472.865.839,00. Sumbangan terbesar realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2022 berasal dari sektor Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar Rp134.657.649.830,00. Sedangkan sumbangan terkecil berasal dari Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp1.314.314.000,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.18
Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.607.189.934,00	45.522.522.435,00	99,81	39.739.999.530,00
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.538.105.980,00	31.876.935.090,00	97,97	28.528.264.830,00
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	56.163.238.700,00	56.163.238.700,00	100,00	44.611.218.762,00
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.422.779.870,00	1.314.314.000,00	92,38	938.661.000,00
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	134.657.649.830,00	134.657.649.830,00	100,00	102.654.721.717,00
	Jumlah	270.388.964.314,00	269.534.660.055,00	99,68	216.472.865.839,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan dari Provinsi

Rp398.433.094.737,00

Anggaran Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp404.564.228.837,00 dan terealisasi sebesar Rp398.433.094.737,00 atau 98,48%. Realisasi Bantuan Keuangan TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp92.306.605.353,00 atau 30,15% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp306.126.489.384,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
59.651.619.952,00	339.049.133.004,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 sebesar Rp45.031.365.593,00 dan terealisasi sebesar Rp59.651.619.952,00 atau 132,47%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah TA 2022 tersebut menurun sebesar (Rp279.397.513.052,00) atau (82,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp339.049.133.004,00. Realisasi Pendapatan Lainnya untuk periode TA 2022 dengan rincian Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Hibah	38.825.055.689,00	46.365.278.610,00	119,42	20.133.542.423,00
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dg Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.206.309.904,00	13.286.341.342,00	214,08	318.915.590.581,00
	Jumlah	45.031.365.593,00	59.651.619.952,00	132,47	339.049.133.004,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
46.365.278.610,00	20.133.542.423,00

Anggaran Pendapatan Hibah TA 2022 sebesar Rp38.825.055.689,00 dan terealisasi sebesar Rp46.365.278.610,00 atau 119,42%. Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 tersebut meningkat sebesar Rp26.231.736.187,00 atau 130,29% dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp20.133.542.423,00.

Tabel 5.20
Realisasi Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat (IPDMIP)	5.023.612.689,00	13.289.985.122,00	264,55	7.291.622.423,00
	Pendapatan Hibah Upland	26.622.400.000,00	25.903.797.488,00	97,30	9.086.920.000,00
	Pendapatan Hibah Air Minum	1.750.000.000,00	1.742.453.000,00	99,57	3.755.000.000,00
	Pendapatan Hibah dari BNPB	5.429.043.000,00	5.429.043.000,00	100,00	-
	Jumlah	38.825.055.689,00	46.365.278.610,00	119,42	20.133.542.423,00

5.1.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
13.286.341.342,00	318.915.590.581,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2022 sebesar Rp6.206.309.904,00 dan terealisasi sebesar Rp13.286.341.342,00 atau 214,08%. Realisasi tersebut menurun signifikan sebesar (Rp305.629.249.239,00) atau (95,83%) dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp318.915.590.581,00 karena adanya perubahan pencatatan pendapatan Dana BOS dari Pendapatan hibah menjadi Pendapatan Transfer - DAK. Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia merupakan Bonus Produksi dari Star Energi untuk Produksi Geothermal. Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	-	-	303.039.670.000,00
2.	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	6.206.309.904,00	13.286.341.342,00	214,08	15.875.920.581,00
	Jumlah	6.206.309.904,00	13.286.341.342,00	214,08	318.915.590.581,00

5.1.2 Belanja Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
4.688.375.421.003,00	4.649.602.155.581,00

Akun ini menggambarkan Belanja Daerah untuk periode TA 2022 sesuai dengan jenis pengelompokannya yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Anggaran dan realisasi masing-masing belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Garut

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Operasi	3.394.266.640.148,93	3.227.936.895.047,00	95,10	3.289.003.496.580,00
2.	Belanja Modal	746.293.704.496,43	700.943.778.898,00	93,92	558.797.286.428,00
3.	Belanja Tak Terduga	47.841.981.894,04	28.771.620.642,00	60,14	39.452.922.903,00
4.	Belanja Transfer	731.542.158.219,00	730.723.126.416,00	99,89	762.348.449.670,00
	Jumlah	4.919.944.484.758,40	4.688.375.421.003,00	95,29	4.649.602.155.581,00

Belanja dianggarkan sebesar Rp4.919.944.484.758,40 dan realisasinya sebesar Rp4.688.375.421.003,00 atau 95,29%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 yaitu sebesar Rp4.649.602.155.581,00 maka realisasi belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp38.773.265.422,00 atau 0,83%. Peningkatan Belanja Daerah diakibatkan perekonomian nasional mulai bangkit meskipun pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian, diantaranya:

- Rasionalisasi Belanja Pegawai
Belanja pegawai dengan mengurangi honorarium dan pemberian uang lembur.
- Rasionalisasi Belanja Barang/Jasa
Belanja Barang/Jasa dengan mengurangi antara lain, belanja pemeliharaan, belanja jasa kantor, cetak dan penggandaan, makanan dan minuman.
- Rasionalisasi Belanja Modal
Belanja Modal dengan mengurangi antara lain pengadaan kendaraan dinas/operasional dan pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda pada tahun berikutnya.

Dengan rincian Belanja Daerah sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
3.227.936.895.047,00	3.289.003.496.580,00

Belanja Operasi Kabupaten Garut meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp3.394.266.640.148,93 dan realisasinya sebesar Rp3.227.936.895.047,00 atau 95,10%. Realisasi tersebut menurun sebesar (Rp61.066.601.533,00) atau (1,86%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp3.289.003.496.580,00. Dengan anggaran dan realisasi TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	1.779.790.468.944,20	1.678.298.468.729,00	94,30	1.711.698.801.354,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.191.358.135.018,73	1.142.664.116.391,00	95,91	1.088.825.013.582,00
3.	Belanja Subsidi	951.000.000,00	951.000.000,00	100,00	-
4.	Belanja Hibah	395.928.841.186,00	380.148.919.928,00	96,01	477.437.424.029,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	26.238.195.000,00	25.874.389.999,00	98,61	11.042.257.615,00
	Jumlah	3.394.266.640.148,93	3.227.936.895.047,00	95,10	3.289.003.496.580,00

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:



5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.678.298.468.729,00	1.711.698.801.354,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.779.790.468.944,20 dan realisasinya sebesar Rp1.678.298.468.729,00 atau 94,30%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp33.400.332.625,00) atau (1,95%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.711.698.801.354,00. Realisasi Belanja Pegawai untuk periode TA 2022. dengan rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.061.275.921.390,00	1.012.846.421.844,00	95,44	1.029.128.966.588,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	170.270.504.533,20	160.971.664.526,00	94,54	133.500.342.481,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	394.239.967.277,00	353.076.021.747,00	89,56	401.350.914.486,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.992.146.924,00	29.797.858.124,00	99,35	28.204.046.264,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH /WKDH	175.396.369,00	173.824.702,00	99,10	174.997.261,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH /WKDH	1.080.505.000,00	1.038.084.000,00	96,07	1.112.067.000,00
7.	Belanja Pegawai BOS	102.540.923.998,00	102.540.923.998,00	100,00	98.938.659.135,00
8.	Belanja Pegawai BLUD	20.215.103.453,00	17.853.669.788,00	88,32	19.288.808.139,00
	Jumlah	1.779.790.468.944,20	1.678.298.468.729,00	94,30	1.711.698.801.354,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
1.142.664.116.391,00	1.088.825.013.582,00

Belanja Barang dan Jasa meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang/Jasa, Belanja BOS dan Belanja BLUD dianggarkan sebesar Rp1.191.358.135.018,74 dan realisasinya sebesar Rp1.142.664.116.391,00 atau 95,91%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp53.839.102.809,00 atau 4,94% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.088.825.013.582,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Barang	202.612.117.394,00	194.267.098.710,00	95,88	152.655.522.293,00
2.	Belanja Jasa	353.659.959.235,74	338.018.357.601,00	95,58	300.150.969.896,00
3.	Belanja Pemeliharaan	27.477.690.287,00	27.182.549.401,00	98,93	32.348.943.776,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	118.857.687.407,00	109.384.427.433,00	92,03	85.849.965.165,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga	28.086.385.440,00	26.898.695.540,00	95,77	60.660.965.444,00



No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
	/Pihak Lain /Masyarakat				
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	161.830.610.303,00	161.813.112.299,00	99,99	170.765.361.209,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	298.833.684.952,00	285.099.875.407,00	95,40	286.393.285.799,00
	Jumlah	1.191.358.135.018,74	1.142.664.116.391,00	95,91	1.088.825.013.582,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
951.000.000,00	-

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp951.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp951.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut meningkat 100,00% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Rp-. Realisasi Belanja Subsidi untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Belanja Subsidi

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Subsidi kepada BUMN	951.000.000,00	951.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	951.000.000,00	951.000.000,00	100,00	-

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
380.148.919.928,00	477.437.424.029,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp395.928.841.186,00 dan realisasinya sebesar Rp380.148.919.928,00 atau 96,01%. Realisasi tersebut menurun (Rp97.288.504.101,00) atau (20,38%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 Rp477.437.424.029,00. Realisasi Belanja Hibah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.497.700.000,00	5.489.926.038,00	99,86	5.950.000.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00
3.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	312.340.673.091,00	308.047.962.683,00	98,63	469.518.585.529,00
4.	Belanja Hibah Dana BOS	74.914.070.595,00	63.434.633.707,00	84,68	0,00
5.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.176.397.500,00	3.176.397.500,00	100,00	1.905.838.500,00
	Jumlah	395.928.841.186,00	380.148.919.928,00	96,01	477.437.424.029,00

Rincian belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Hibah per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	REALISASI
1	Dinas Pendidikan	149.155.962.555,00
2	Dinas Kesehatan	400.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	44.502.897.150,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	58.656.294.799,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	143.571.850,00
6	Dinas Sosial	165.000.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	1.192.476.873,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.917.729.200,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.166.001.410,00
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	550.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	278.285.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga	22.124.256.848,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	37.250.000,00
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.226.885.219,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.244.603.700,00
18	Dinas Pertanian	39.736.410.681,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.755.238.250,00
20	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	30.863.535.155,00
21	Inspektorat Daerah	254.860.100,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.627.661.138,00
	JUMLAH	380.148.919.928,00

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
25.874.389.999,00	11.042.257.615,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp26.238.195.000,00 dan realisasinya sebesar Rp25.874.389.999,00 atau 98,61%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp14.832.132.384,00 atau 134,32% bila dibanding dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.042.257.615,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode TA 2022 dengan rincian Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	19.429.740.000,00	19.080.800.000,00	98,20	975.000.000,00
2.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.917.182.000,00	3.904.617.000,00	99,68	8.745.922.800,00
3.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.891.273.000,00	2.888.972.999,00	99,92	1.171.284.815,00
4.	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	150.050.000,00
	JUMLAH	26.238.195.000,00	25.874.389.999,00	98,61	11.042.257.615,00

Rincian belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30
Realisasi Belanja Bantuan Sosial per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	REALISASI
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.878.500.000,00
2	Dinas Sosial	13.364.119.999,00
3	Dinas Perhubungan	2.420.000.000,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.055.000.000,00
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	216.270.000,00
6	Dinas Pertanian	2.530.000.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	910.500.000,00
8	Sekretariat Daerah Kabupaten Garut	1.500.000.000,00
	JUMLAH	25.874.389.999,00

5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
700.943.778.898,00	558.797.286.428,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp746.293.704.496,43 realisasinya sebesar Rp700.943.778.898,00 atau 93,92%. Realisasi tersebut meningkat Rp142.146.492.470,00 atau 25,44% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp558.797.286.428,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.31
Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Tanah	28.823.821.290,00	21.374.678.883,00	74,16	34.923.261.221,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.372.268.779,00	115.797.914.649,00	93,86	114.413.219.545,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	156.653.893.243,63	149.847.397.573,00	95,66	204.878.310.049,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	418.336.007.552,80	394.817.632.912,00	94,38	184.540.470.291,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.107.713.631,00	19.106.154.881,00	99,99	20.042.025.322,00
	Jumlah	746.293.704.496,43	700.943.778.898,00	93,92	558.797.286.428,00

Belanja Modal TA 2022 terdiri dari:

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
21.374.678.883,00	34.923.261.221,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp28.823.821.290,00 realisasinya sebesar Rp21.374.678.883,00 atau 74,16%. Realisasi tersebut menurun (Rp13.548.582.338,00) atau (38,80%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp34.923.261.221,00. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.32
Realisasi Belanja Modal Tanah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Tanah Persil	13.153.559.380,00	9.401.331.441,00	71,47	7.313.407.500,00
2.	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.626.036.000,00	2.189.954.400,00	83,39	2.908.198.450,00
3.	Belanja Modal Lapangan	12.927.187.910,00	9.783.393.042,00	75,68	24.625.192.271,00
4.	Belanja Modal Tanah BLUD	117.038.000,00	-	-	76.463.000,00
	Jumlah	28.823.821.290,00	21.374.678.883,00	74,16	34.923.261.221,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
115.797.914.649,00	114.413.219.545,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp123.372.268.779,00 dan realisasinya sebesar Rp115.797.914.649,00 atau 93,86%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.384.695.104,00 atau 1,21% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp114.413.219.545,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Alat Besar	816.357.370,00	766.958.006,00	93,95	1.677.722.500,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	11.352.654.887,00	10.255.139.050,00	90,33	24.459.172.198,00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.816.950.100,00	1.804.223.760,00	99,30	1.859.728.741,00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	1.118.967.800,00	790.511.150,00	70,65	506.417.000,00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.011.329.078,00	5.780.065.655,00	96,15	10.219.739.809,00
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2.745.534.793,00	2.703.007.533,00	98,45	2.457.251.746,00
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.635.068.323,00	20.959.341.142,00	96,88	30.530.572.585,00
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.124.580.052,00	1.109.759.364,00	98,68	389.904.050,00
9.	Belanja Modal Komputer	25.128.547.319,00	24.452.741.042,00	97,31	12.837.495.157,00
10.	Belanja Modal Alat Eksplorasi	399.986.000,00	391.406.801,00	97,86	565.990.100,00
11.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	379.132.695,00	377.623.365,00	99,60	1.167.190.290,00
12.	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	126.080.000,00	122.514.800,00	97,17	-
13.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	73.764.800,00	64.604.100,00	87,58	9.900.000,00
14.	Belanja Modal Alat Peraga	303.000.000,00	268.500.000,00	88,61	488.750.000,00
15.	Belanja Modal Peralatan Proses /Produksi	-	-	-	1.944.800,00
16.	Belanja Modal Rambu-Rambu	281.258.700,00	281.258.700,00	100,00	669.608.600,00
17.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	241.394.000,00	240.360.900,00	99,57	511.747.710,00
18.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.229.586.448,00	19.213.386.448,00	99,92	14.421.618.875,00
19.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	30.588.076.414,00	26.216.512.833,00	85,71	11.638.465.384,00
	Jumlah	123.372.268.779,00	115.797.914.649,00	93,86	114.413.219.545,00



5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
149.847.397.573,00	204.878.310.049,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp156.653.893.243,63 dan realisasinya sebesar Rp149.847.397.573,00 atau 95,66%. Realisasi tersebut menurun (Rp55.030.912.476,00) atau (26,86%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp204.878.310.049,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Gedung	129.885.346.719,63	125.749.054.299,00	96,82	197.317.998.813,00
2.	Belanja Modal Bangunan Menara	89.468.300,00	88.920.000,00	99,39	481.595.000,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol /Pasti	3.901.740.249,00	3.797.211.070,00	97,32	3.282.623.282,00
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.777.337.975,00	20.212.212.204,00	88,74	3.796.092.954,00
	Jumlah	156.653.893.243,63	149.847.397.573,00	95,66	204.878.310.049,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
394.817.632.912,00	184.540.470.291,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp418.336.007.552,80 realisasinya sebesar Rp394.817.632.912,00 atau 94,38%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp210.277.162.621,00 atau 113,95% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp184.540.470.291,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	256.918.170.630,00	245.617.891.086,00	95,60	128.805.343.965,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	159.789.028.922,80	148.091.008.080,00	92,68	49.022.683.826,00
3.	Belanja Modal Instalasi	208.318.000,00	205.694.400,00	98,74	6.116.677.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan	420.490.000,00	405.002.000,00	96,32	150.229.000,00
5.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	1.000.000.000,00	498.037.346,00	49,80	445.536.500,00
	Jumlah	418.336.007.552,80	394.817.632.912,00	94,38	184.540.470.291,00



5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
19.106.154.881,00	20.042.025.322,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp19.107.713.631,00 dan realisasinya sebesar Rp19.106.154.881,00 atau 99,99%. Realisasi tersebut menurun sebesar (Rp935.870.441,00) atau (4,67%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp20.042.025.322,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.088.390.000,00	1.087.438.000,00	99,91	711.982.125,00
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan /Olahraga	286.396.750,00	285.790.000,00	99,79	-
3.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.732.926.881,00	17.732.926.881,00	100,00	19.065.546.977,00
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	-	-	-	264.496.220,00
	Jumlah	19.107.713.631,00	19.106.154.881,00	99,99	20.042.025.322,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
28.771.620.642,00	39.452.922.903,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp47.841.981.894,04 dan realisasinya sebesar Rp28.771.620.642,00 atau 60,14%. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp10.681.302.261,00) atau (27,07%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp39.452.922.903,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga pada TA 2022 tersebut antara lain digunakan untuk penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Garut dan penanggulangan pandemi Covid-19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Belanja Tak Terduga

(dalam rupiah)

NO	SKPD	URAIAN	REALISASI
1	Dinas Kesehatan	BTT Pencegahan dan Penanggulangan wabah Covid-19	3.621.499.392,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	BTT Pencegahan dan Penanggulangan wabah Covid-19	135.809.600,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	BTT Penegakan Hukum Protokol melalui Patroli dan Penegakan Yustisi dan Non Yustisi dan Pencegahan Pengendalian Covid-19 di kab. Garut	105.450.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Covid-19)	BTT Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid-19	1.856.875.714,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Longsor)	BTT Penanggulangan Bencana keadaan tertentu Darurat Bencana Longsor Kec. Talegong	15.036.643.056,00
		BTT Penanganan Bencana Tanggap Hidrometeorologi Angin Puting Beliung Kec. Garut Kota, Banyuresmi dan Leles Kab. Garut	
		BTT Bencana Tanggap Darurat Kec. Pakenjeng dan Kec. Pamulihan	
		BTT Bencana Tanggap Darurat Banjir Bandang di 14 Kecamatan Kab. Garut	



NO	SKPD	URAIAN	REALISASI
		BTT Bencana Tanggap Darurat Banjir Bandang Tahap II di 14 Kecamatan Kab. Garut	
		BTT Penambahan Anggaran Cash For Work pada Tahap III sebanyak 330.000 x 500.000	
		BTT Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kec. Pameungpeuk, Cisompet, Cibalong, Singajaya dan Kec. Banjarwangi	
		BTT Penanggulangan Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kec. Pameungpeuk, Cibalong, Singajaya dan Kec. Banjarwangi Tahap II	
		BTT Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Desa Gunamekar Kec. Bungbulang, Pengaspalan Jalan dan Saluran Drainase Kec. Cibat, Perbaikan /Rehabilitasi Gedung SDN 1 Bunisari Malangbong	
		BTT Hidrometeorologi	
		BTT Bencana Banjir, Angin Putting Beliung dan Pergerakan Tanah di Kab. Garut	
5	Dinas Perhubungan	BTT Kebutuhan Belanja Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Covid-19	149.360.000,00
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	BTT Bencana Tanggap Darurat Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku	1.561.718.090,00
7	Kecamatan Bayongbong	BTT Bencana Hidrometeorologi di Wilayah Desa Banjarsari	188.495.000,00
8	Kecamatan Pangatikan	BTT Pembuatan Jembatan Cibeureum di Wilayah Desa Cimaragas	774.757.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BTT dalam rangka dukungan Logistik Pengamanan Distribusi Vaksin Covid-19	124.746.600,00
10	Badan Pendapatan Daerah	BTT Pengembalian Retribusi IMB Ke PT. Mancagahar Persada /DPUPR	109.981.000,00
11	Kasda Provinsi	BTT Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi ke kasda Provinsi	5.106.285.190,00
	Jumlah		28.771.620.642,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
730.723.126.416,00	762.348.449.670,00

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp731.542.158.219,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp730.723.126.416,00 atau 99,89%. Realisasi tersebut menurun sebesar (Rp31.625.323.254,00) atau (4,15%) dibandingkan TA 2021 sebesar Rp762.348.449.670,00.

Realisasi belanja Transfer untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Realisasi Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Bagi Hasil	17.892.168.753,00	17.422.666.527,00	97,38	13.045.583.078,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	713.649.989.466,00	713.300.459.889,00	99,95	749.302.866.592,00
	Jumlah	731.542.158.219,00	730.723.126.416,00	99,89	762.348.449.670,00

Belanja Transfer TA 2022 terdiri dari:

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
17.422.666.527,00	13.045.583.078,00



Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp17.892.168.753,00 realisasinya sebesar Rp17.422.666.527,00 atau 97,38%. Realisasi tersebut meningkat Rp4.377.083.449,00 atau 33,55% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp13.045.583.078,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Realisasi Belanja Bagi Hasil

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten /Kota dan Desa	15.631.150.000,00	15.221.233.739,00	97,38	11.820.556.048,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten /Kota Kepada Pemerintah Desa	2.261.018.753,00	2.201.432.788,00	97,36	1.225.027.030,00
	Jumlah	17.892.168.753,00	17.422.666.527,00	97,38	13.045.583.078,00

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
713.300.459.889,00	749.302.866.592,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp713.649.989.466,00 realisasinya sebesar Rp713.300.459.889,00 atau 99,95%. Realisasi tersebut menurun (Rp36.002.406.703,00) atau (4,80%) bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp749.302.866.592,00.

Tabel 5.40
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten /Kota kepada Desa	713.649.989.466,00	713.300.459.889,00	99,95	749.302.866.592,00
	Jumlah	713.649.989.466,00	713.300.459.889,00	99,95	749.302.866.592,00

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
249.287.079.236,90	229.484.311.241,00

Anggaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp249.287.078.857,00 dan realisasinya Rp249.287.079.236,90 atau 100,00%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.802.767.995,90 atau 8,63% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp229.484.311.241,00.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. yang dalam penganggarnya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dengan anggaran dan realisasi TA 2022 termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan adalah sebagai berikut:



Tabel 5.41
Realisasi Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Penerimaan Pembiayaan	264.287.078.857,00	264.287.078.856,90	100,00	240.634.311.241,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	14.999.999.620,00	100,00	11.150.000.000,00
	Jumlah	249.287.078.857,00	249.287.079.236,90	100,00	229.484.311.241,00

Realisasi masing-masing jenis pembiayaan TA 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
264.287.078.856,90	240.634.311.241,00

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp264.287.078.857,00 dan realisasinya sebesar Rp264.287.078.856,90 atau 100,00%.

5.1.3.1.1 Penggunaan SiLPA

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
264.287.078.856,90	240.634.311.241,00

Penerimaan Daerah dari penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya yang dianggarkan sebesar Rp264.287.078.857,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp264.287.078.856,90 atau 100,00%. Realisasi SiLPA tersebut berasal dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp171.361.576.205,00 ditambah sisa kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp92.925.502.651,90 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42
Kas Sisa Belanja

(dalam rupiah)

No	NAMA SKPD	KAS PER 31 DESEMBER 2021
1	Sisa Bendahara Pengeluaran TA 2021 (8 SKPD)	26.229.764,00
2	Sisa Kas BLUD RSUD dr. Slamet	83.796.094.944,90
3	Sisa Kas BLUD UPT Puskesmas	9.050.359.718,00
4	Sisa Kas Dana BOS	52.818.225,00
	JUMLAH	92.925.502.651,90

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
14.999.999.620,00	11.150.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp14.999.999.620,00 atau 100,00%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp3.849.999.620,00 atau 34,53% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp11.150.000.000,00. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk periode TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.43
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	URAIAN	TA 2022			TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
1.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	14.999.999.620,00	100,00	11.150.000.000,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	14.999.999.620,00	100,00	11.150.000.000,00

Nilai realisasi ini terdiri dari:

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
14.999.999.620,00	11.150.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp14.999.999.620,00 atau 100,00%. Nilai tersebut meningkat Rp3.849.999.620,00 atau 34,53% dibandingkan TA 2021 terealisasi sebesar Rp11.150.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada TA 2022 sebesar Rp14.999.999.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Penambahan penyertaan modal kepada Perumda BPR Garut sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan SP2D Nomor 01603/LS/5.02.01/2022 tanggal 22 April 2022 dan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 dengan SP2D Nomor 03429/KU.03.05/LS/5.02.01/2022 tanggal 13 Juli 2022.
- Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan SP2D Nomor 06343/KU.03.05/LS/5.02.01/2022 tanggal 4 November 2022.
- Penambahan penyertaan modal kepada PT BPR Intan JABAR sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan SP2D Nomor 01604/LS/5.02.01/2022 tanggal 22 April 2022.
- Pembelian Saham PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp5.999.999.620,00 dengan SP2D Nomor 00528/LS/5.02.01/2022 tanggal 7 Maret 2022.

5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
187.866.405.182,00	264.287.078.856,61

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2022 sebesar Rp187.866.405.182,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan	Rp4.626.954.746.948,10
Jumlah Belanja	Rp4.688.375.421.003,00 (-)
Defisit 1)	(Rp61.420.674.054,90)
Pembiayaan - Penerimaan Daerah	Rp264.287.078.856,90
Pembiayaan - Pengeluaran Daerah	Rp14.999.999.620,00 (-)
Pembiayaan Daerah Neto 2)	Rp249.287.079.236,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (1+2)	Rp187.866.405.182,00



5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain, serta Saldo Anggaran Lebih Akhir.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal pada TA 2022 sebesar Rp264.287.078.856,90 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir pada TA 2021.

5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penerimaan Pembiayaan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp264.287.078.857,00 dan terealisasi sebesar Rp264.287.078.856,90 atau 100,00%.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Realisasi SILPA TA 2022 sebesar Rp187.866.405.182,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pendapatan LRA TA 2022	Rp4.626.954.746.948,10
Jumlah Belanja LRA TA 2022	<u>Rp4.688.375.421.003,00</u> (-)
Defisit (1)	(Rp61.420.674.054,90)
Pembiayaan - Penerimaan Daerah	Rp264.287.078.856,90
Pembiayaan - Pengeluaran Daerah	<u>Rp14.999.999.620,00</u> (-)
Pembiayaan Daerah Netto (2)	Rp249.287.079.236,90
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (1+2)	Rp187.866.405.182,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp187.866.405.182,00 terdiri dari:

1. Kas Daerah	Rp154.118.430.385,00
2. Kas di BP	Rp146.404.697,00
3. Kas Pada BLUD RSU	Rp26.373.751.295,00
4. Kas Pada BLUD Puskesmas	Rp7.119.518.708,00
5. Kas pada Dana BOS	<u>Rp108.300.097,00</u> (+)
	Rp187.866.405.182,00

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada TA 2022 tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan pada SAL TA 2021.

5.2.5 Lain-Lain Kas BLUD

Pada TA 2022 tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan pada SAL TA 2022.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp187.866.405.182,00 merupakan SiLPA Pemerintah Kabupaten Garut pada TA 2022 yang akan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada TA 2023.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Kabupaten Garut per 31 Desember 2022 menyajikan saldo Aset, Kewajiban dan Ekuitas sebagai berikut:

- Aset sebesar Rp4.414.342.434.302,15;
- Kewajiban sebesar Rp13.460.929.634,34; dan
- Ekuitas sebesar Rp4.400.881.504.667,81.

Saldo Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.414.342.434.302,15 atau mengalami penurunan sebesar (Rp406.912.631.774,48) atau (8,44%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.821.255.066.076,63. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.460.929.634,34 mengalami penurunan sebesar (Rp48.817.225.444,22) atau (78,39%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp62.278.155.078,56. Sedangkan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.400.881.504.667,81 mengalami penurunan sebesar (Rp358.095.406.330,26) atau (7,52%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.758.976.910.998,07.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1 Aset Lancar	590.635.061.412,91	348.141.196.118,27

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp590.635.061.412,91 mengalami kenaikan sebesar Rp242.493.865.294,64 atau 69,65% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Kenaikan terbesar terjadi pada beban dibayar dimuka yaitu dengan adanya pembayaran dimuka untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, selain itu kenaikan terjadi pada nilai persediaan akibat dari adanya reklasifikasi aset lainnya ke persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM. Saldo Aset Lancar terdiri dari:

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1 Kas di Kas Daerah	154.118.430.385,00	171.361.576.205,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp154.118.430.385,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp17.243.145.820,00) atau (10,06%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Penurunan Saldo Kas di Kasda akibat dari pada tahun 2022 penggunaan dana lebih optimal sehingga berdampak pada penurunan nilai utang. Saldo Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Garut pada Rekening Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) Cabang Garut Nomor 0170239201008, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Saldo tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum (BKU) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Garut, sesuai Berita Acara tanggal 5 Januari 2023. Adapun rincian Kasda dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian Saldo Kas Umum Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	1.028.814.300,00



No.	Uraian	Jumlah
2.	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	110.250.000,00
3.	Dana Tunjangan Khusus Guru	357.669.300,00
4.	Dana Bantuan Operasional Kesehatan	10.827.865.026,00
5.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	99.203,00
6.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	660.249,00
7.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini	64.200.000,00
8.	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Kesetaraan	15.900.000,00
9.	Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	373.491.343,00
10.	Dana Bantuan Peningkatan Kapasitas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	6.844.900,00
11.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.666.748,00
12.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	84.178.900,00
13.	DAK Fisik Reguler Pendidikan (SMP)	360.300,00
14.	DAK Fisik Reguler Jalan	750.643,00
15.	DAK Fisik Reguler Air Minum	243.400,00
14.	DAK Fisik Reguler Sanitasi	1.200.000,00
15.	DAK Fisik Penugasan Irigasi (Ketahanan Pangan)	476.000,00
16.	Dana Insentif Daerah	261.439.372,00
17.	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	6.570.335.953,00
18.	Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BNPB)	5.429.043.000,00
19.	Dana Hibah Air Minum Perdesaan	1.742.453.000,00
20.	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	10.772.964.149,00
21.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	421.916,00
22.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	670.461.742,00
23.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.168.277.105,00
24.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	2.308.368.234,00
25.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	3.549.301.332,00
26.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	15.192.706.797,00
27.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	60.850.275,00
28.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	14.636.620,00
29.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	74.374.555.726,00
30.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	3.913.056.294,00
31.	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	15.208.888.558,00
	Jumlah	154.118.430.385,00

**5.3.1.2 Kas di Bendahara
Pengeluaran**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
146.404.697,00	26.229.764,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp146.404.697,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp120.174.933,00 atau 458.16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut akibat dari Bendahara Pengeluaran di beberapa SKPD menyetorkan sisa belanja melebihi tanggal 31 Desember 2022. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 merupakan sisa belanja tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 5.45
Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Jumlah	Tanggal Setor
1.	Dinas Kesehatan	500.000,00	11-01-2023
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.755.000,00	07-02-2023
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	23.896.790,00	09-01-2023
4.	Dinas Ketahanan Pangan	22.500,00	06-01-2023
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000,00	05-01-2023
6.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	51.000,00	17-01-2023
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500,00	06-01-2023
8.	Kecamatan Bl. Limbangan	2.611.948,00	10-01-2023
9.	Kecamatan Garut Kota	36.935.084,00	04-01-2023
10.	Kecamatan Kersamanah	1.254.409,00	06-01-2023
11.	Kecamatan Malangbong	69.512.000,00	20-01-2023
12.	Kecamatan Pamulihan	3.380.000,00	09-01-2023
13.	Kecamatan Sucinaraja	2.425.119,00	06-01-2023
14.	Kecamatan Sukaesmi	33.637,00	10-01-2023
15.	Kecamatan Tarogong Kidul	25.710,00	04 & 05-01-2023
	Jumlah	146.404.697,00	

5.3.1.3 Kas di BLUD

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
33.493.270.003,00	92.846.454.662,90

Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.493.270.003,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp59.353.184.659,90) atau (63,93%) dari saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2021. Penurunan terbesar pada BLUD RSUD dr. Slamet karena pada tahun 2022 RSUD mengoptimalkan penggunaan dana untuk operasionalnya dan berdampak pada penurunan nilai utang RSUD. Rincian saldo per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.46
Kas di BLUD

(dalam Rupiah)

No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
I	DINAS KESEHATAN		
1	Laboratorium Kesehatan Daerah	253.655.496,00	74.205.616,00
2	Puskesmas Bagendit	92.731.134,00	111.699.859,00
3	Puskesmas Banjarwangi	96.935.208,00	44.489.552,00
4	Puskesmas Bayongbong	190.357.040,00	38.628.222,00
5	Puskesmas Bojongloa	16.964.718,00	37.097.660,00
6	Puskesmas Bungbulang	8.067.983,00	120.527.612,00
7	Puskesmas Cempaka	39.641.375,00	240.586.982,00
8	Puskesmas Cibalong	85.162.217,00	405.148.706,00
9	Puskesmas Cibatu	262.539.134,00	119.464.187,00
10	Puskesmas Cibiuk	59.117.078,00	44.365.682,00
11	Puskesmas Cihurip	38.343.433,00	6.779.724,00
12	Puskesmas Cikajang	273.152.984,00	79.119.986,00
13	Puskesmas Cikelet	6.954.327,00	13.400.982,00
14	Puskesmas Cilawu	18.544.334,00	11.097.657,00
15	Puskesmas Cilimus	14.145.989,00	32.992.136,00
16	Puskesmas Cimaragas	112.430.987,00	427.030.393,00
17	Puskesmas Cimari	8.746.138,00	48.021.674,00
18	Puskesmas Cipanas	75.399.079,00	40.944.923,00



No	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
19	Puskesmas Cisandaan	16.890.808,00	19.792.920,00
20	Puskesmas Cisewu	114.331.204,00	100.786.061,00
21	Puskesmas Cisompet	184.870.809,00	143.053.506,00
22	Puskesmas Cisarupan	182.414.315,00	551.609.881,00
23	Puskesmas Citeras	257.151.560,00	368.786.154,00
23	Puskesmas Gadog	1.191.857,00	630.849,00
25	Puskesmas Garawangsa	246.213.221,00	125.417.225,00
26	Puskesmas Guntur	116.381.331,00	56.737.112,00
27	Puskesmas Haurpanggung	2.784.187,00	21.563.747,00
28	Puskesmas Kadungora	101.139.900,00	411.178.041,00
29	Puskesmas Karang Mulya	7.369.791,00	201.978.663,00
30	Puskesmas Karangpawitan	74.901.531,00	284.659.461,00
31	Puskesmas Karangsari	8.135.100,00	10.521.937,00
32	Puskesmas Karangtengah	2.052.629,00	4.905.702,00
33	Puskesmas Kersamenak	25.403.170,00	46.661.553,00
34	Puskesmas Leles	433.211.040,00	723.235.706,00
35	Puskesmas Lembang	12.143.897,00	26.059.303,00
36	Puskesmas Leuwigoong	99.366.334,00	24.742.788,00
37	Puskesmas Limbangan	300.762.920,00	148.694.154,00
38	Puskesmas Malangbong	475.637.135,00	129.300.391,00
39	Puskesmas Maripari	64.400.201,00	174.547.735,00
40	Puskesmas Maroko	200.967,00	1.507.939,00
41	Puskesmas Mekarmukti	23.853.543,00	2.386.346,00
42	Puskesmas Mekarwangi	22.714.155,00	44.533.099,00
43	Puskesmas Padaawas	56.949.381,00	43.902.324,00
44	Puskesmas Pakuwon	44.231.453,00	377.734.851,00
45	Puskesmas Pameungpeuk	141.656.566,00	76.123.938,00
46	Puskesmas Pamulihan	1.992.632,00	28.957.240,00
47	Puskesmas Pasundan	439.144.152,00	471.007.878,00
48	Puskesmas Pembangunan	11.924.616,00	155.992.323,00
49	Puskesmas Peundeuy	9.638.914,00	18.054.238,00
50	Puskesmas Rancasalak	31.575.485,00	50.192.074,00
51	Puskesmas Samarang	238.459.344,00	226.212.544,00
52	Puskesmas Selaawi	116.519.682,00	160.173.174,00
53	Puskesmas Siliwangi	45.751.427,00	76.999.544,00
54	Puskesmas Sindangratu	26.693.440,00	7.780.677,00
55	Puskesmas Singajaya	99.754.385,00	7.239.918,00
56	Puskesmas Sukahurip	39.054.577,00	25.383.117,00
57	Puskesmas Sukakarya	96.254.691,00	132.646.274,00
58	Puskesmas Sukamerang	220.680.151,00	162.033.674,00
59	Puskesmas Sukamukti	4.162.074,00	12.264.461,00
60	Puskesmas Sukamulya	341.760.768,00	312.428.932,00
61	Puskesmas Sukaraja	16.231.726,00	98.676.050,00
62	Puskesmas Sukarame	186.620.098,00	113.111.338,00
63	Puskesmas Sukasenang	13.541.365,00	38.972.414,00
64	Puskesmas Sukawening	5.108.778,00	3.089.169,00
65	Puskesmas Talegong	16.215.107,00	68.388.727,00
66	Puskesmas Tarogong	386.902.142,00	692.237.751,00
67	Puskesmas Tegalgede	34.123.939,00	33.560.468,00
68	Puskesmas Wanaraja	68.161.556,00	138.304.794,00
II	BLUD RSUD dr. SLAMET	26.373.751.295,00	83.796.094.944,90
	Jumlah	33.493.270.003,00	92.846.454.662,90



5.3.1.4 Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
108.300.097,00	52.818.225,00

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.300.097,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.481.872,00 atau 105,047% dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan tersebut karena pada tahun anggaran 2022 sisa BOS di sekolah swasta harus dicatat dan diakui sebagai saldo akhir tahun. Kas di Bendahara BOS terdiri dari :

1. Saldo BOS Reguler sebesar Rp28.582.490,00;
2. Saldo BOS Kinerja sebesar Rp5.115.514,00; dan
3. Saldo BOS Sekolah Swasta sebesar Rp74.602.093,00.

5.3.1.5 Kas Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
84.662.280,00	181.893.584,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.662.280,00. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar (Rp97.231.304,00) atau (53,46%) jika dibandingkan dengan Kas Lainnya per 31 Desember 2021. Penurunan nilai kas lainnya dikarenakan jumlah pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami penurunan. Kas Lainnya terdiri dari:

Tabel 5.47
Kas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Rekening	Pajak Daerah	Pajak Pusat	Jumlah	Tanggal Setor
1	Dinas Pendidikan	-	17.524.050,00	55.323.737,00	72.847.787,00	
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	6.000,00	-	-	6.000,00	03-02-2023
3	Kecamatan Balubur Limbangan	272.901,00	3.693.883,00	1.511.700,00	5.478.484,00	
4	Kecamatan Cibalong	2.884,00	-	-	2.884,00	16-02-2023
5	Kecamatan Malangbong	362.000,00	-	-	362.000,00	07-03-2023
6	Kecamatan Peundeuy	-	2.661.000,00	3.300.047,00	5.961.047,00	
7	Kecamatan Sukaresmi	4.078,00	-	-	4.078,00	
	Jumlah	647.863,00	23.878.933,00	60.135.484,00	84.662.280,00	

5.3.2 Piutang

5.3.2.1. Piutang Pajak

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
33.503.535.473,26	27.541.096.663,26

Piutang Pajak adalah saldo tagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan ke depan. Saldo Piutang Pajak tahun 2022 sebesar Rp33.503.535.473,26 yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.962.438.810,00 atau 21,65% dibandingkan dengan saldo piutang pajak tahun 2021. Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.48
Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Piutang Pajak Hotel	57.506.423,00	13.136.250,00
2. Piutang Pajak Restoran	77.648.090,00	15.763.810,00



Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3. Piutang Hiburan	4.197.250,00	-
4. Piutang Pajak Reklame	92.967.774,00	200.459.465,00
5. Piutang Pajak Parkir	4.043.424,00	-
6. Piutang Pajak Air Tanah	145.162.484,00	94.723.459,00
7. Piutang pajak Mineral Bukan Logam	20.966.055,00	-
8. Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.151.408.617,00	2.678.472.993,00
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	29.949.635.356,26	24.538.540.686,26
Jumlah	33.503.535.473,26	27.541.096.663,26

5.3.2.2 Piutang Retribusi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	7.367.946.067,00	5.760.890.587,00

Saldo Piutang Retribusi didasarkan pada Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) yang belum dibayar oleh wajib retribusi daerah. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.367.946.067,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.607.055.480,00 atau 27,90% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi Tahun 2021. Kenaikan akibat dari pembayaran piutang tahun lalu relatif kecil sehingga berdampak pada jumlah piutang tahun berjalan. Rincian piutang retribusi sebagai berikut:

Tabel 5.49
Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Piutang Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Ijin Mendirikan Bangunan	5.819.670.507,00	4.433.847.507,00
2.	Ijin Gangguan	1.669.000,00	1.669.000,00
3.	Menara Telekomunikasi	1.546.606.560,00	1.325.374.080,00
	Jumlah	7.367.946.067,00	5.760.890.587,00

Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp5.819.670.507,00 terdiri dari piutang retribusi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.813.294.000,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp6.376.507,00. Piutang Retribusi Ijin Gangguan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu sebesar Rp1.669.000,00. Piutang Menara Telekomunikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.546.606.560,00.

5.3.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	19.902.476.862,58	11.966.283.727,56

Saldo Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.902.476.862,58 yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.936.193.135,02 atau 66,32% jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut akibat dari penambahan nilai piutang kontribusi dan *profit sharing* Pasar Cibatuh dan penambahan nilai piutang denda pajak yang belum tercatat pada tahun lalu. Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari piutang pada BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan, piutang pada BLUD RSUD dr. Slamet, piutang pada cicilan kios pasar, piutang kontribusi dan *profit sharing* pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM, piutang atas penjualan tanah Pemda dan piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta piutang atas denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah. Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebagai berikut:

5.3.2.3.1 Piutang Pelayanan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan

Saldo piutang Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp469.169.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp138.198.250,00) atau (22,75%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp607.367.250,00. Piutang pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pelayanan puskesmas atas BPJS sesuai hasil konfirmasi BPJS Kesehatan Cabang Tasikmalaya. Rincian piutang sebagai berikut:

Tabel 5.50
Piutang Dinas Kesehatan

(dalam rupiah)

No.	PUSKESMAS	PIUTANG
1.	Puskesmas Tegal Gede	2.100.000,00
2.	Puskesmas Karangpawitan	2.594.000,00
3.	Puskesmas Haurpanggung	7.890.000,00
4.	Puskesmas Bagendit	33.120.000,00
5.	Puskesmas Samarang	21.162.500,00
6.	Puskesmas Padaawas	5.412.500,00
7.	Puskesmas Gadog	7.000.000,00
8.	Puskesmas Leles	1.880.000,00
9.	Puskesmas Kadungora	20.270.000,00
10.	Puskesmas Limbangan	128.825.000,00
11.	Puskesmas Sukamerang	21.580.000,00
12.	Puskesmas Citeras	7.700.000,00
13.	Puskesmas Bayongbong	44.480.000,00
14.	Puskesmas Cisurupan	67.435.000,00
15.	Puskesmas Cihurip	31.680.000,00
16.	Puskesmas Sindangratu	26.040.000,00
17.	Puskesmas Garawangsa	14.100.000,00
18.	Puskesmas Sukakarya	25.900.000,00
Jumlah		469.169.000,00

5.3.2.3.2 Piutang Pelayanan pada BLUD RSUD dr. Slamet

Piutang Pelayanan BLUD RSUD dr.Slamet per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.770.020.699,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp124.939.365,00 atau 0,03% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021.

Tabel 5.51
Piutang Pelayanan BLUD RSUD dr. Slamet

(dalam Rupiah)

Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a. Piutang Pasien dari Perusahaan yang bekerja sama	840.416.113,00	885.665.975,00
b. Piutang Jasa Raharja	57.168.641,00	156.748.402,00
c. Piutang Perjanjian	2.872.435.945,00	2.602.666.957,00
Jumlah	3.770.020.699,00	3.645.081.334,00

Piutang Perjanjian sebesar Rp2.872.435.945,00 merupakan piutang atas pelayanan kepada pasien, namun pada saat pasien pulang tidak dapat membayar seluruh tagihan sehingga dibuatkan surat perjanjian pembayaran dengan penangguhan pembayaran.

5.3.2.3.3 Piutang pada Cicilan Kios Pasar

Piutang pada cicilan kios pasar adalah piutang para pembeli kios pasar di lima lokasi pasar yaitu Pasar Andir Bayongbong, Pasar Cikajang, Pasar Leles, Pasar Kadungora dan Pasar Pameungpeuk. Rincian saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.52
Piutang pada Cicilan Kios Pasar

(dalam Rupiah)

No	Nama Pasar	Tipe Kios	Saldo per 31-Des-2021	Mutasi Saldo		Saldo per 31-Des-2022
				Debet	Kredit	
1	Andir Bayongbong	A,B,C	432.276.200,00	-	-	432.276.200,00
2	Cikajang	A,B,C	449.880.000,00	-	-	449.880.000,00
3	Leles	Kios	52.301.785,00	-	-	52.301.785,00
4	Kadungora	Kios B	108.410.000,00	-	6.355.000,00	102.055.000,00
5	Pameungpeuk	A,B,C,D&PKL	1.969.858.450,00	-	-	1.969.858.450,00
	Jumlah		3.012.726.435,00	-	6.355.000,00	3.006.371.435,00

5.3.2.3.4 Piutang Kontribusi dan *Profit Sharing*

Piutang Kontribusi dan *Profit Sharing* merupakan hasil dari kerjasama Bangun Guna (Kelola) Serah atau *Built, Operate and Transfer* (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT Trie Mukty Pertama Putra untuk pembangunan Pasar Cibatu pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT Trie Mukty Pertama Putra Nomor 511.2/1546-DP2KU/V/2012 tentang Pembangunan Pasar Cibatu, bahwa Pihak Kedua wajib memberikan kontribusi kepada Pihak Kesatu sebesar Rp150.000.000,00 secara rutin setiap tahun ditambah *profit sharing* sebesar Rp187.894.960,00. Kemudian dilakukan Addendum Kedua atas Perjanjian Kerja Sama Nomor 511.2/800-Indagpas/2014 tanggal 8 Desember 2014. Maka sesuai dengan addendum tersebut saldo piutang kontribusi dan *profit sharing* per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.239.033.752,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.53
Piutang Kontribusi dan *Profit Sharing*

(dalam rupiah)

Keterangan	Nilai Kontribusi	Nilai Profit Sharing	Total
11 Mei 2015 s.d. 31 Desember 2015	100.000.000,00	35.157.984,00	135.157.984,00
Tahun 2016	150.000.000,00	52.736.976,00	202.736.976,00
Tahun 2017	150.000.000,00	52.736.976,00	202.736.976,00
Tahun 2018	150.000.000,00	52.736.976,00	202.736.976,00
Tahun 2019	150.000.000,00	52.736.976,00	202.736.976,00
Jumlah A	700.000.000,00	246.105.888,00	946.105.888,00
Nilai Pembayaran s.d. Tahun 2019	-	-	(5.000.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2019	-	-	941.105.888,00
Penambahan Piutang Tahun 2020	50.000.000,00	87.894.960,00	137.894.960,00
Pembayaran Tahun 2020	-	-	(5.062.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2020	-	-	1.073.938.848,00
Penambahan Piutang Tahun 2021	-	105.473.952,00	105.473.952,00
Pembayaran Tahun 2021	-	-	(21.853.000,00)
Saldo Per 31 Desember 2021	-	-	1.157.559.800,00



Keterangan	Nilai Kontribusi	Nilai Profit Sharing	Total
Penambahan Piutang Tahun 2022	-	81.473.952,00	1.239.033.752,00
Pembayaran Tahun 2022	-	-	-
Saldo Per 31 Desember 2022			1.239.033.752,00

5.3.2.3.5 Piutang Tanah Pemda

Berdasarkan Keputusan Bupati No.030/Kep.285-BPKD/2008 tentang Pelepasan Hak atas Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Garut (Bekas Tanah Kas Desa Kota Wetan, Pakuwon, Sukamentri dan Ciwalen) yang terletak di blok Sukaregang Kidul dan Blok Pesantren Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota dengan Cara Penjualan kepada Masyarakat dan Keputusan Bupati Garut No. 028/Kep.286-Plk/2002 tentang Penghapusan Aset Berupa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Garut. Tanah tersebut sebelumnya adalah tanah kas desa. Namun karena desa berubah status menjadi kelurahan, maka masyarakat yang tinggal di tanah kas desa tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi tanah sebesar ketetapan bupati.

Tanah yang dijual terletak di tiga lokasi, yaitu blok Pakuwon Kelurahan Pakuwon, Blok Regol Kelurahan Regol dan Blok Sukaregang. Rincian saldo per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 5.54
Piutang Tanah PEMDA

(dalam Rupiah)

No.	Lokasi	Saldo per 31-Des-2021	Mutasi Saldo		Saldo per 31-Des-2022
			Penambahan	Pembayaran	
1.	Blok Pakuwon, Kelurahan Pakuwon	96.112.000,00	-	1.657.000,00	94.455.000,00
2.	Blok Regol, Kelurahan Regol	2.279.000,00	-	-	2.279.000,00
3.	Blok Sukaregang	575.236.000,00	-	-	575.236.000,00
	Jumlah	673.627.000,00	-	1.657.000,00	671.970.000,00

5.3.2.3.6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF

Berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Data Saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD) pada kantor pusat bank Indonesia nomor rekening 519000312980 atas nama rekening lain BI TDF TKD Kabupaten Garut per 31 Desember 2022 terdapat remunerasi atas DBH yang dibayarkan melalui fasilitas TDF sebesar Rp5.350.464,06.

5.3.2.3.7 Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan

Piutang denda PBB merupakan piutang yang timbul karena adanya denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran PBB dan masih belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2022. Besaran nilai denda PBB adalah sebesar 2% per bulan dari nilai PBB. Rincian Piutang PBB sebagai berikut:

Tabel 5.55
Piutang Denda PBB

(dalam rupiah)

Tahun	Piutang Denda Pajak
2022	480.473.014,22
2021	1.362.528.132,62



Tahun	Piutang Denda Pajak
2020	2.103.421.350,76
2019	1.553.429.669,36
2018	1.333.858.784,24
2017	879.285.024,96
2016	929.377.168,76
2015	775.634.630,60
2014	309.871.122,02
sd 2013	1.012.682.614,98
Jumlah	10.740.561.512,52

5.3.2.4. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	17.607.906.445,00	14.898.229.979,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan nilai yang muncul akibat adanya kekurangan pembayaran penyaluran bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Nilai Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.607.906.445,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.709.676.466,00 atau 18,19% bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

5.3.2.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(29.756.383.635,62)	(21.439.742.326,90)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (29.756.383.635,62), mengalami kenaikan sebesar 8.316.641.308,72 atau 38,79% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar (Rp21.439.742.326,90). Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdiri dari Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pajak, Penyisihan Piutang Tak Tertagih Retribusi dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

5.3.2.5.1 Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar (Rp11.724.152.444,56) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Hotel

Tabel 5.56
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Hotel

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	57.506.423,00	0,50%	287.532,12
	Jumlah	57.506.423,00		287.532,12

b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Restoran

Tabel 5.57
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Restoran

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	67.773.890,00	0,50%	338.869,45
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	6.768.900,00	10%	676.890,00
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	3.105.300,00	50%	1.552.650,00



Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
	Jumlah	77.648.090,00		2.568.409,45

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Hiburan

Tabel 5.58
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Hiburan

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	4.197.250,00	0,50%	20.986,25
	Jumlah	4.197.250,00		20.986,25

d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Reklame

Tabel 5.59
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Reklame

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	61.566.434,00	0,50%	307.832,17
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	23.054.000,00	10%	2.305.400,00
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	4.990.000,00	50%	2.495.000,00
Macet	> 5 Tahun	3.357.340,00	100%	3.357.340,00
	Jumlah	92.967.774,00		8.465.572,17

e. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Parkir

Tabel 5.60
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Parkir

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	4.043.424,00	0,50%	20.217,12
	Jumlah	4.043.424,00		20.217,12

f. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Air Tanah

Tabel 5.61
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Air Tanah

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	74.523.931,00	0,50%	372.619,66
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	51.523.619,00	10%	5.152.361,90
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	19.114.934,00	50%	9.557.467,00
	Jumlah	145.162.484,00		15.082.448,56

g. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Mineral Bukan Logam

Tabel 5.62
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Mineral Bukan Logam

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	20.966.055,00	0,50%	104.830,28
	Jumlah	20.966.055,00		104.830,28

h. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Tabel 5.63
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang PBB P2

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 Tahun	6.019.404.269,00	0,50%	30.097.021,35
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	9.200.873.894,00	10%	920.087.389,40
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	7.963.878.310,80	50%	3.981.939.155,40
Macet	> 5 Tahun	6.765.478.882,46	100%	6.765.478.882,46
Jumlah		29.949.635.356,26		11.697.602.448,61

5.3.2.5.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Retribusi

Penyisihan piutang Retribusi sebesar (Rp5.228.943.468,80) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih - Piutang Retribusi IMB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5.64
Penyisihan Piutang Retribusi IMB pada Dinas PUPR

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 bulan	842.759.000,00	0,50%	4.213.795,00
Kurang Lancar	> 1 s.d 3 bulan	217.165.000,00	10%	21.716.500,00
Diragukan	> 3 s.d 12 bulan	325.899.000,00	50%	162.949.500,00
Macet	> 12 bulan	4.427.471.000,00	100%	4.427.471.000,00
Jumlah		5.813.294.000,00		4.616.350.795,00

b. Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih - Piutang Retribusi DPMPT

Tabel 5.65
Penyisihan Piutang Retribusi pada DPMPT

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang IMB				
Macet	> 12 bulan	6.376.507,00	100%	6.376.507,00
Piutang Ijin Gangguan				
Macet	> 12 bulan	1.669.000,00	100%	1.669.000,00
Jumlah		8.045.507,00		8.045.507,00

Tabel 5.66
Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas PUPR

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Lancar	< 1 bulan	946.793.360,00	0,50%	4.733.966,80
Macet	> 12 bulan	599.813.200,00	100%	599.813.200,00
Jumlah		1.546.606.560,00		604.547.166,80



5.3.2.5.3 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp12.803.287.722,26) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Tahun 2022		
	Piutang Bruto	Penyisihan piutang tak tertagih	Piutang Neto
1. Piutang Dinas Kesehatan	469.169.000,00	-	469.169.000,00
2. Piutang BLUD RSUD dr. Slamet	3.770.020.699,00	(3.205.823.513,25)	564.197.185,75
3. Piutang Cicilan Kios Pasar	3.006.371.435,00	(3.006.371.435,00)	-
4. Piutang Kontribusi dan Profit Sharing	1.239.033.752,00	(659.273.184,96)	579.760.567,04
5. Piutang Tanah Pemda	671.970.000,00	(671.970.000,00)	-
6. Piutang Denda PBB	10.740.561.512,52	(5.259.849.589,05)	5.480.711.923,47
Jumlah	19.897.126.398,52	(12.803.287.722,26)	7.093.838.676,26

Berikut rincian perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah:

a. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Pelayanan BLUD pada BLUD RSUD dr. Slamet.

Tabel 5.68
Penyisihan Pelayanan BLUD RSUD dr. Slamet

(dalam rupiah)

Jenis Piutang	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Piutang Pasien dari Perusahaan yang bekerja sama	Lancar	< 1 Tahun		25%	
	Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	105.000,00	50%	(52.500,00)
	Diragukan	> 2 s.d 3 Tahun	8.859.871,00	75%	(6.644.903,25)
	Macet	> 3 Tahun	831.451.242,00	100%	(831.451.242,00)
	Jumlah 1		840.416.113,00		(838.148.645,25)
Piutang Jasa Raharja	Lancar	< 1 Tahun	41.564.555,00	25%	(10.391.138,75)
	Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	1.865.716,00	50%	(932.858,00)
	Macet	> 3 Tahun	13.738.370,00	100%	(13.738.370,00)
	Jumlah 2		57.168.641,00		(25.062.366,75)
Piutang Perjanjian	Lancar	< 1 Tahun	271.471.915,00	25%	(67.867.978,75)
	Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	273.509.345,00	50%	(136.754.672,50)
	Diragukan	> 2 s.d 3 Tahun	757.859.340,00	75%	(568.394.505,00)
	Macet	> 3 Tahun	1.569.595.345,00	100%	(1.569.595.345,00)
	Jumlah 3		2.872.435.945,00		(2.342.612.501,25)
Jumlah (1+2+3)					(3.205.823.513,25)

b. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Cicilan Kios Pasar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM

Tabel 5.69
Penyisihan Piutang Cicilan Kios Pasar

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Macet	> 5 Tahun	3.006.371.435,00	100%	(3.006.371.435,00)
Jumlah		3.006.371.435,00		(3.006.371.435,00)

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang *Built, Operate and Transfer* (BOT) pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM**Tabel 5.70**
Penyisihan Piutang BOT

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Lancar	< 1 Tahun	105.473.952,00	0,50%	527.369,76
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	192.453.912,00	10%	19.245.391,20
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	603.210.928,00	50%	301.605.464,00
Macet	> 5 Tahun	337.894.960,00	100%	337.894.960,00
Jumlah		1.239.033.752,00		659.273.184,96

d. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Tanah Pemda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**Tabel 5.71**
Penyisihan Piutang Tanah PEMDA

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Macet	> 5 Tahun	671.970.000,00	100%	671.970.000,00
Jumlah		671.970.000,00		671.970.000,00

e. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda PBB pada Badan Pendapatan Daerah**Tabel 5.72**
Penyisihan Piutang Denda Pajak

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Lancar	< 1 Tahun	480.473.014,22	0,50%	2.402.365,07
Kurang Lancar	> 1 s.d 2 Tahun	3.465.949.483,38	10%	346.594.948,34
Diragukan	> 2 s.d 5 Tahun	3.766.573.478,56	50%	1.883.286.739,28
Macet	> 5 Tahun	3.027.565.536,36	100%	3.027.565.536,36
Jumlah		10.740.561.512,52		5.259.849.589,05

5.3.3. Beban Dibayar Di Muka

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
31.216.707.809,52	453.822.101,37

Beban Dibayar Di Muka merupakan beban yang pembayarannya dilakukan untuk satu periode tertentu, namun terdapat sejumlah nilai yang belum menjadi beban sepenuhnya karena masih ada jangka waktu tersisa. Beban dibayar di muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.216.707.809,52. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp30.762.885.708,15 atau 6.778,62% dibandingkan dengan Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2021. Kenaikan dikarenakan pada tahun 2022 terdapat pembayaran dimuka untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Beban dibayar dimuka secara rinci disajikan dalam Lampiran 5.3.3.



5.3.4 Persediaan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
322.841.804.929,17	44.491.642.946,08

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp322.841.804.929,17 mengalami kenaikan sebesar Rp278.350.161.983,09 atau 625,62% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2021. Jumlah tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/*stock opname* yang dilaksanakan pada periode pelaporan, termasuk barang-barang hasil hibah dari pemerintah pusat, badan usaha milik daerah, lembaga lainnya dan masyarakat secara langsung kepada satuan kerja perangkat daerah. Kenaikan nilai persediaan akibat dari reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada 7 SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.73
Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

Uraian	Nilai
Persediaan Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	239.737.650,00
Persediaan Bahan - Bahan Kimia	462.550,00
Persediaan Bahan - Bahan Bakar dan Pelumas	982.227,00
Persediaan Bahan - Bahan Baku	3.086.671.894,20
Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	2.800.000,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.603.981.713,33
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	125.076.348,36
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	899.819.540,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	1.440.000,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	4.714.500,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	6.007.500,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	77.675.425,00
Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	48.461.977,00
Persediaan Obat - Obatan - Obat	24.745.727.366,67
Persediaan Obat - Obatan - Obat - Obatan Lainnya	34.966.250,00
Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	280.584.233.385,73
Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	260.669.228,80
Persediaan Barang - BLUD	11.118.377.373,08
Jumlah	322.841.804.929,17

Rincian Persediaan per SKPD disajikan dalam Lampiran 5.3.4

5.3.5 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
131.444.400.447,72	122.970.043.852,73

Investasi jangka panjang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Garut kepada perusahaan daerah milik Kabupaten Garut. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.444.400.447,72 mengalami kenaikan sebesar Rp8.474.356.594,99 atau 6,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen, dengan Rincian sebagai berikut:



5.3.5.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2022 berupa Dana Bergulir, yang sampai dengan 31 Desember 2016 dikategorikan sebagai Aset Lain-lain - Penyertaan Modal pada BPR. Sesuai surat Bupati Garut nomor 900/1360-BPKAD pada tanggal 5 Mei 2017, Penyertaan Modal pada BPR tersebut direklasifikasi pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir di Laporan Keuangan TA 2017. Secara rinci disajikan sebagai berikut:

5.3.5.1.1 Dana Bergulir	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		1.302.948.050,00

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.302.948.050,00. Tidak terdapat mutasi saldo dana bergulir bila dibandingkan dengan 31 Desember 2021.

Tabel 5.74
Penyertaan Modal Terarah setelah Perubahan
Status Hukum Kelembagaan

(dalam rupiah)

No	Nama Lembaga	Penyertaan Modal Terarah 2002	Pengembalian kredit dari masyarakat yang ditetapkan sebagai penyertaan modal tahun 2005	Dana Bergulir
1.	Perumda BPR Garut	853.055.500,00	473.630.700,00	399.424.800,00
2.	PT BPR Intan Jabar	823.444.500,00	179.740.250,00	643.704.250,00
3.	PT LKM Garut	313.500.000,00	33.681.000,00	259.819.000,00
	Jumlah	1.990.000.000,00	687.051.950,00	1.302.948.050,00

Per September 2018, ketiga lembaga keuangan tersebut menyerahkan seluruh piutang dari dana bergulir kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya. Sampai dengan 31 Desember 2022 belum terdapat laporan penerimaan piutang dari KPKNL Tasikmalaya.

5.3.5.1.2 Penyisihan Dana Bergulir	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(1.302.948.050,00)

Jumlah Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.302.948.050,00). Jumlah penyisihan dana bergulir merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, maka perhitungan nilai penyisihan dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.75
Penyisihan Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

Kualitas Dana Bergulir	Umur Dana Bergulir	Jumlah Dana Bergulir	% Penyisihan	Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih
Macet	> 5 Tahun	1.302.948.050,00	100%	1.302.948.050,00
	Jumlah	1.302.948.050,00		1.302.948.050,00

5.3.5.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2022 berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Bank Jabar Banten, PDAM Tirta Intan, Perumda BPR Garut, PT BPR Intan Jabar dan PT LKM Garut.

5.3.5.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
		(Rp)	(Rp)
		131.444.400.447,72	122.970.043.852,73

Saldo Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp131.444.400.447,72. Nilai penyertaan modal pada PT. BPR Intan Jabar dicatat sebesar Rp0,00 karena mengalami kerugian sehingga nilai penyertaan modal menjadi sebesar (Rp25.131.281.284,19). Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.76
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	BUMD	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bank BJB	Metode biaya	12.591.674.120,00	6.591.674.500,00
2	PDAM Tirta Intan Garut	Metode ekuitas	60.964.985.631,78	56.472.638.168,97
3	Perumda BPR Garut	Metode ekuitas	48.040.443.141,00	44.003.911.606,00
4	PT BPR Intan Jabar	Metode ekuitas	-	6.038.448.901,85
5	PT LKM Garut	Metode ekuitas	9.847.297.554,94	9.863.370.675,91
	Jumlah		131.444.400.447,72	122.970.043.852,73

Adapun perincian Mutasi Perubahan Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Garut pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.77
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

(dalam rupiah)

No	BUMD	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
A	Metode Biaya				
1	Bank Jabar Banten	6.591.674.500,00	5.999.999.620,00	0,00	12.591.674.120,00
B	Metode Ekuitas				
2	PDAM Tirta Intan	56.472.638.168,97	5.000.000.000,00	507.652.537,19	60.964.985.631,78
3	Perumda BPR Garut	44.003.911.606,00	7.849.353.372,00	3.812.821.837,00	48.040.443.141,00
4	PT BPR Intan Jabar	6.038.448.901,85	6.780.400.000,00	12.818.848.901,85	0,00
5	PT LKM Garut	9.863.370.675,91	163.407.322,03	179.480.443,00	9.847.297.554,94
	Jumlah	122.970.043.852,73	25.793.160.314,03	17.318.803.719,04	131.444.400.447,72

Penjelasan atas mutasi tambah dan kurang nilai penyertaan modal adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah pada Bank Jabar Banten sebesar Rp5.999.999.620,00 merupakan penambahan pembelian saham seri B sebanyak 4.428.044 lembar dengan harga per lembar saham Rp1.355,00;
2. Mutasi tambah pada PDAM Tirta Intan sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan penambahan penyertaan modal pada tahun 2022. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp507.652.537,19 adalah bagian rugi Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2022;
3. Mutasi tambah pada Perumda BPR Garut sebesar Rp7.849.353.372,00 merupakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.000.000.000,00 dan bagian laba Pemerintah



- Kabupaten Garut sebesar Rp4.849.353.372,00. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp3.812.821.837,00 merupakan pembagian dividen pada tahun 2022;
4. Mutasi tambah pada PT BPR Intan Jabar sebesar Rp6.780.400.000,00 merupakan kurang catat penyertaan modal berupa tanah pada tahun 2020 dengan nilai buku sebesar Rp9.724.100,50, koreksi saldo awal sebagai hasil revaluasi atas nilai buku tanah tersebut sebesar Rp5.770.675.899,50, dan penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp12.818.848.901,85 merupakan bagian rugi tahun berjalan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2022;
 5. Mutasi tambah pada PT LKM Garut sebesar Rp163.407.322,03 merupakan bagian laba Pemerintah Kabupaten Garut pada tahun 2022 sedangkan mutasi kurang sebesar Rp179.480.443,00 merupakan pembagian dividen pada tahun 2022. Laporan Keuangan PT LKM Garut sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *audited* masih dalam proses audit oleh KAP, sehingga nilai yang dicatat adalah nilai *unaudited*.

5.3.6. Aset Tetap

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
3.592.032.566.954,91	4.017.464.656.054,30

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan, dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai ini merupakan nilai Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Garut. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.592.032.566.954,91 atau mengalami penurunan sebesar (Rp425.432.089.099,39) atau (10,59%) dari tahun 2021 sebesar Rp4.017.464.656.054,30 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.78
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Garut

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1. Tanah	935.732.588.575,55	913.245.248.469,55
2. Peralatan dan Mesin	1.236.770.587.536,39	1.133.254.213.793,12
3. Gedung dan Bangunan	2.120.888.626.215,82	1.972.306.275.177,09
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.967.498.635.786,12	1.549.985.889.907,39
5. Aset Tetap Lainnya	328.340.495.624,81	327.386.193.182,25
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	131.453.014.072,78	119.536.041.613,76
7. Akumulasi Penyusutan	(3.128.651.380.856,56)	(1.998.249.206.088,86)
Jumlah	3.592.032.566.954,91	4.017.464.656.054,30

Rincian nilai aset tetap per SKPD disajikan dalam lampiran 5.3.6.

5.3.6.1 Tanah

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
935.732.588.575,55	913.245.248.469,55

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp935.732.588.575,55 atau mengalami kenaikan sebesar Rp22.487.340.106,00 atau 2,46% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp913.245.248.469,55. Mutasi aset tetap Tanah tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.79
Mutasi Aset Tetap Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	913.245.248.469,55
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal Tahun 2022	21.374.678.883,00
- Dari Belanja Barang dan Jasa	112.076.770,00
- Hibah dari Pihak Ketiga (CSR dll)	10.904.142.341,00
- Mutasi Antar KIB	3.298.641.391,00
- Biaya Umum	14.839.200,00
- Mutasi Bertambah dari SKPD Lain	11.320.394.500,00
- Aset Tahun lalu yang (kurang) dicatat	563.600.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	47.588.373.085,00
Mutasi Kurang:	
- Hibah	(3.684.743.000,00)
- Penghapusan (sudah ada SK)	(9.724.100,50)
- Hutang pihak ketiga	(2.660.203.970,00)
- Aset Tahun Lalu yang (Lebih) dicatat	(172.200.000,00)
- Mutasi Berkurang ke SKPD Lain	(11.320.394.500,00)
- Mutasi Antar KIB	(284.401.218,50,00)
- Reklas ke Persediaan	(6.969.366.190,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(25.101.032.979,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	935.732.588.575,55

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 sebesar Rp47.588.373.085,00 terdiri dari:

- Belanja Modal sebesar Rp21.374.678.883,00.
- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Tanah sebesar Rp112.076.770,00.
- Hibah dari pihak ketiga (CSR, dll) sebesar Rp10.904.142.341,00. Merupakan fasum fasos sebanyak 14 Perumahan yang di hibahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman, dan aset tanah di hibahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang terdiri dari:

Tabel 5.80
Pendapatan Hibah Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/BAST.3541-DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Sumber Jati Residence	288.160.000,00
2	648/3542/DISPERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Pos Jaga Perumahan Cluster Jati Putra	2.640.000,00
3	648/3542/DISPERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Cluster Jati Putra	56.700.000,00
4	648/3533/DISPERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Griya Balewangi	186.179.000,00
5	648/3533/DISPERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Griya Balewangi	71.638.000,00
6	648/3537/DISPERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Balai/Pertemuan Perumahan Villa Pataruman Asri	54.354.114,00
7	648/3537/DISPERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Villa Pataruman Asri	401.842.364,00
8	648/3536/DISPERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Cluster Cisarupan	267.046.500,00
9	648/3536/DISPERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Cluster Cisarupan	84.546.000,00
10	648/3538/DISPERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Pos Jaga Perumahan Aka Karangpawitan	6.145.800,00
11	648/3538/DISPERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA	Dinas Perumahan dan	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan	250.630.785,00



No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
			PUTRA	Permukiman	Aka Karangpawitan	
12	648/3540/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Griya Wanamekar	786.527.102,00
13	648/3532/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Pos Jaga Perumahan Puri Cisurupan	6.060.000,00
14	648/3532/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Puri Cisurupan	276.981.000,00
15	648/3544/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Green Cisalam Permai	427.200.000,00
16	648/3544/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Green Cisalam Permai	61.047.000,00
17	648/3540/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Griya Wanamekar	396.000.000,00
18	648/3540/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Griya Wanamekar	60.000.000,00
19	648/3534/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Gedung Pameran Perumahan Cempaka Permai Residence	7.286.400,00
20	648/3534/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Cempaka Permai Residence	57.779.376,00
21	648/3539/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Mandala Residence	359.713.200,00
22	648/3539/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Sarana Olahraga Terbuka Perumahan Mandala Residence	290.413.200,00
23	648/3539/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Mandala Residence	4.895.594.800,00
24	648/3535/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Ngamplang City View	529.290.000,00
25	648/3535/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Pos Jaga Perumahan Ngamplang City View	5.460.000,00
26	648/3535/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Ngamplang City View	162.930.000,00
27	648/3454/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Jalan Khusus/Komplek Perumahan Mandala Pamoyanan	698.880.000,00
28	648/3454/DISPE RKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Bangunan Mesjid Perumahan Mandala Pamoyanan	195.670.000,00
29	PM.02.04/2658/ um	28-06-2022	PT.CTE (CIKAENGAN TIRTA ENERGI)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tanah	17.427.700
Jumlah						10.904.142.341,00

- d. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp3.298.641.391,00 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Kode Rekening Belanja.
- e. Biaya Umum sebesar Rp14.839.200,00 merupakan Reklasifikasi dari Kode Rekening Belanja Honorarium yang menunjang terhadap Aset Tetap Tanah.



- f. Mutasi Bertambah dari SKPD lain sebesar Rp11.320.394.500,00 merupakan penambahan Aset Tetap Tanah yang beralih dari SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.81
Mutasi Bertambah antar SKPD Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Mutasi		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	KU01/1871/DL H-2020	26-12-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Makam Umum	11.320.394.500,00

- g. Aset Tahun lalu yang (kurang) dicatat sebesar Rp563.600.000,00 merupakan penambahan aset yang belum tercatat pada Dinas Pendidikan.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah pada Tahun 2022 sebesar (Rp25.101.032.979,00) terdiri dari:

- a. Aset Tetap Tanah yang dihibahkan sebesar (Rp3.684.743.000,00) merupakan aset Tanah yang tercatat di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut yang dihibahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia sejumlah 4 bidang peruntukan Polsek, Brimob, dan ke Masyarakat akibat pergeseran tanah.

Tabel 5.82
Hibah ke Kepolisian RI Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/KEP.672-BPKAD/2022	23-11-2022	Kecamatan Sukawening	Kepolisian Republik Indonesia	Tanah	(119.900.000,00)
2	028/KEP.672-BPKAD/2022	23-11-2022	Kecamatan Cigedug	Kepolisian Republik Indonesia	Tanah	(179.417.000,00)
3	028/KEP.672-BPKAD/2022	23-11-2022	Kecamatan Cilawu	Kepolisian Republik Indonesia	Tanah	(590.400.000,00)
4	028/KEP.672-BPKAD/2022	23-11-2022	Kecamatan Banyuresmi	Kepolisian Republik Indonesia	Tanah	(787.366.000,00)
5			Dinas Perumahan dan Permukiman	Masyarakat	Tanah	(176.970.000,00)
6			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Brimob	Tanah	(1.830.690.000,00)
Jumlah						(3.684.743.000,00)

- b. Penghapusan (sudah ada SK) merupakan aset Tanah yang akan disertakan sebagai Penyertaan Modal sebesar (Rp9.724.100,50).

Tabel 5.83
Penghapusan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/11925/BAST /BPKAD/2020	23-12-2020	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PT.Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar	Tanah	(9.200.000,00)
2	028/11925/BAST /BPKAD/2020	23-12-2020	Kecamatan Cikajang	PT.Bank Perkreditan Rakyat Intan Jabar	Tanah	(524.100,50)
Jumlah						(9.724.100,50)

- c. Pembayaran atas Hutang kepada Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar (Rp2.660.203.970,00).

Tabel 5.84
Pembayaran Hutang ke Pihak Ketiga Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	SKPD	Nilai
1	Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.907.422.223,00)
2	Tanah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(752.781.747,00)
Jumlah			(2.660.203.970,00)

- d. Aset Tahun lalu yang (lebih) dicatat sebesar (Rp172.200.000,00) merupakan aset yang tercatat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- e. Mutasi berkurang ke SKPD lain sebesar (Rp11.320.394.500,00) merupakan pengurangan Aset Tanah yang beralih ke SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.85
Mutasi Berkurang antar SKPD Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Mutasi		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	KU01/1871/DL H-2020	26-12-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tanah Makam Umum	(11.320.394.500,00)

- f. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp284.401.218,50) merupakan mutasi kurang Aset Tetap Tanah dari Reklasifikasi Kode Rekening Belanja.
- g. Reklas ke Aset Persediaan sebesar (Rp6.969.366.190,00) merupakan aset yang direklasifikasi karena akan diserahkan atau dihibahkan kepada masyarakat atau pihak lain.

Tabel 5.86
Reklas ke Aset Persediaan Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	SKPD	Nilai
1	Tanah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(6.969.366.190,00)

Aset Tetap Tanah pada Pemerintah Kabupaten Garut belum seluruhnya bersertifikat. Sampai dengan 31 Desember 2022, dari jumlah 2.545 objek Tanah sebanyak 48,68% atau 1.239 objek yang sudah bersertifikat dan 1.306 belum bersertifikat, dari 157 sedang proses sertifikasi tanah. Berikut data realisasi sertifikasi tanah pada Pemerintah Kabupaten Garut per 31 Desember 2022:

Tabel 5.87
Realisasi Sertifikasi Tanah

No	Uraian	Peruntukan Tanah	Jumlah Objek
1	Realisasi sertifikasi objek tanah per 31 Desember 2022	Tanah SD	317
		Tanah SMP	31
		Tanah PKM	24
		Tanah Fasum	54
		Tanah Jalan	364
		Tanah Kantor Lainnya	449
Total			1239



5.3.6.2 Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		1.236.770.587.536,39

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.236.770.587.536,39 atau mengalami kenaikan sebesar Rp103.516.373.743,27 atau 9,13% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.133.254.213.793,12. Adapun mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.88
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.133.254.213.793,12
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal Tahun 2022	77.119.736.000,00
- BTT	68.477.000,00
- Mutasi Antar KIB	1.657.981.269,15
- Dari Biaya Umum	7.190.000,00
- BOS SD	15.237.373.146,00
- BOS SMPN	3.976.013.302,00
- BLUD	3.508.228.555,00
- Mutasi Bertambah dari SKPD Lain	6.361.523.117,82
- JKN	12.013.142.292,00
- DBHCT	3.943.421.354,00
- Mutasi Tambah dari Aset Tidak Produktif	161.500.000,00
- Aset Tahun Lalu yang (kurang) dicatat	2.675.108.971,00
- Dari Belanja Barang dan Jasa	924.018.634,00
Jumlah Mutasi Tambah	127.653.713.640,97
Mutasi Kurang:	
- Hibah	(17.409.617,30)
- Reklas ke Barang Pakai Habis	(1.152.916.047,53)
- Pemeliharaan yang tidak Menambah Aset	(20.812.500,00)
- Reklas ke Aset Ekstrakomptabel	(7.848.713.549,60)
- Reklas ke Aset Tak Berwujud	(999.693.034,00)
- Hutang	(70.360.583,00)
- Mutasi antar KIB	(519.563.177,00)
- Reklas ke Aset lain-lain	(143.507.016,00)
- Reklas ke Aset Tidak Produktif	(327.481.488,05)
- Penghapusan (sudah ada SK)	(6.675.359.767,40)
- Mutasi Berkurang ke SKPD Lain	(6.361.523.117,82)
Jumlah Mutasi Kurang	(24.137.339.897,70)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.236.770.587.536,39

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp127.653.713.640,97 terdiri dari:

- Belanja Modal sebesar Rp77.119.736.000,00.
- Pengadaan /pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BTT sebesar Rp68.477.000,00.

Tabel 5.89
Pengadaan dari Dana BTT
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	15.939.000,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.038.000,00
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.500.000,00
	Jumlah	68.477.000,00



- c. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp1.657.981.269,15 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.
- d. Biaya Umum terhadap Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.190.000,00 merupakan belanja yang menambah nilai (atribusi) dari Peralatan dan Mesin.
- e. Pengadaan /pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BOS SDN sebesar Rp15.237.373.146,00.
- f. Pengadaan /pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BOS SMPN sebesar Rp3.976.013.302,00.
- g. Pengadaan /pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana BLUD sebesar Rp3.508.228.555,00.
- h. Mutasi bertambah dari SKPD lain sebesar Rp6.361.523.117,82 merupakan penambahan Aset Peralatan dan Mesin yang beralih dari SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.90
Mutasi Bertambah antar SKPD
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	322.473.356,00
2	Badan Pendapatan Daerah	383.447.500,00
3	Dinas Perhubungan	302.000.000,00
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	185.130.167,00
5	Dinas Sosial	209.330.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	226.500.000,00
7	Sekretariat Daerah	2.039.732.609,18
8	Dinas Ketahanan Pangan	238.061.500,00
9	Inspektorat Daerah	378.000.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	745.172.885,64
11	Dinas Perumahan dan Permukiman	13.500.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	628.000.000,00
13	Dinas Pemadam Kebakaran	15.782.500,00
14	Badan Kepegawaian dan Diklat	96.102.600,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	433.490.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	125.000.000,00
17	Kecamatan Karangtengah	19.800.000,00
	Jumlah	6.361.523.117,82

- i. Pengadaan/pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana JKN sebesar Rp12.013.142.292,00.
- j. Pengadaan /pembelian Peralatan dan Mesin yang bersumber dari dana DBHCT sebesar Rp3.943.421.354,00.
- k. Reklasifikasi dari Aset Tidak Produktif Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp161.500.000,00.
- l. Aset Tahun Lalu yang (Kurang) dicatat sebesar Rp2.675.108.971,00.

Tabel 5.91
Kurang Catat Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset	SKPD	Nilai
1	Mobil Ambulance	Dinas Kesehatan	474.000.000,00
2	Beckoe Loader, Mini Excavator, Dump Truck dan alat berat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.451.000.000,00
3	Mobil Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	250.995.507,00
4	Kendaraan Roda Tiga	Dinas Lingkungan Hidup	447.500.000,00
5	Mini Bus	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	51.613.464,00
Jumlah			2.675.108.971,00

m. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp924.018.634,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar (Rp24.137.339.897,70) terdiri dari:

a. Peralatan dan Mesin yang dihibahkan sebesar (Rp17.409.617,30) merupakan Peralatan dan Mesin yang dihibahkan ke Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Desa.

Tabel 5.92
Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/979/disdam kar/2022	11-09-2022	Dinas Pemadam Kebakaran	Desa Jatisari	Alat Pemadam Kebakaran	(1.204.808,65)
2	028/173/disdam kar/2022	27-01-2022	Dinas Pemadam Kebakaran	Kejaksaaan Negeri Garut	Alat Pemadam Kebakaran	(1.204.808,65)
3	028/01/HBH-DLH/2022	02-12-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Desa Mekargalih	Saung Budidaya Maggot	(5.000.000,00)
4	028/02/HBH-DLH/2022	02-12-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan Jayawaras	Saung Budidaya Maggot	(5.000.000,00)
5	028/03/HBH-DLH/2022	02-12-2022	Dinas Lingkungan Hidup	Kelurahan Sukarya	Saung Budidaya Maggot	(5.000.000,00)
Jumlah						(17.409.617,30)

b. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Barang Habis Pakai sebesar (Rp1.152.916.047,53).

Tabel 5.93
Reklasifikasi Barang Habis Pakai Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(31.500.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(1.200.000,00)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(315.046.936,00)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	(3.593.134,00)
5	Dinas Pemadam Kebakaran	(142.762.890,00)
6	Dinas Sosial	(507.000,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan	(11.330.000,00)



No	SKPD	Nilai
8	Dinas Lingkungan Hidup	(4.978.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(9.812.000,00)
10	Dinas Perhubungan	(209.762.727,53)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.826.500,00)
12	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(875.000,00)
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	(238.802.400,00)
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	(34.050.150,00)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(3.500.000,00)
16	Dinas Pertanian	(74.673.030,00)
17	Sekretariat Daerah	(30.526.180,00)
18	Badan Kepegawaian dan Diklat	(7.500.000,00)
19	Kecamatan Mekarmukti	(5.000.000,00)
20	Kecamatan Singajaya	(19.890.000,00)
21	Kecamatan Tarogong Kidul	(780.100,00)
	Jumlah	(1.152.916.047,53)

- c. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Pemeliharaan yang tidak menambah aset sebesar (Rp20.812.500,00) merupakan Peralatan dan Mesin yang di pelihara namun tidak termasuk terhadap klasifikasi dalam pemeliharaan.
- d. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Ekstrakomptabel sebesar (Rp7.848.713.549,60) merupakan Peralatan dan Mesin yang dibawah nilai kapitalisasi yang sudah ditentukan.

Tabel 5.94
Reklasifikasi Aset Ekstrakomptabel
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(6.174.618.267,27)
2	Dinas Kesehatan	(779.102.247,39)
3	RSUD dr. Slamet	(201.524.038,00)
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	(4.149.179,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(8.350.000,03)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(18.675.500,00)
7	Dinas Sosial	(7.500.000,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(9.000.000,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(17.491.762,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(29.470.500,00)
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(157.000,00)
12	Dinas Perhubungan	(28.120.241,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(5.089.350,00)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(21.494.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(3.673.170,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.565.326,93)
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	(45.785.950,00)
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(3.177.900,00)
19	Dinas Pertanian	(73.437.850,00)
20	Sekretariat Daerah	(16.718.750,00)
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.180.550,00)



No	SKPD	Nilai
22	Badan Pendapatan Daerah	(67.376.250,00)
23	Badan Kepegawaian dan Diklat	(791.126,00)
24	Kecamatan Banjarwangi	(20.512.800,00)
25	Kecamatan Banyuresmi	(2.149.800,00)
26	Kecamatan Bl. Limbangan	(6.333.600,00)
27	Kecamatan Bungbulang	(15.665.000,00)
28	Kecamatan Cibalong	(1.150.000,00)
29	Kecamatan Cibatuh	(4.000.000,00)
30	Kecamatan Cibiuk	(13.920.000,00)
31	Kecamatan Cihurip	(15.092.850,00)
32	Kecamatan Cikajang	(49.866.750,00)
33	Kecamatan Cisurupan	(48.343.830,00)
34	Kecamatan Karangtengah	(11.592.500,00)
35	Kecamatan Kersamanah	(4.177.200,00)
36	Kecamatan Mekarmukti	(37.025.560,00)
37	Kecamatan Pakenjeng	(2.098.635,00)
38	Kecamatan Pasirwangi	(600.000,00)
39	Kecamatan Peundeuy	(38.007.975,00)
40	Kecamatan Sucinaraja	(22.150.000,00)
41	Kecamatan Sukaesmi	(650.000,00)
42	Kecamatan Sukawening	(1.975.400,00)
43	Kecamatan Talegong	(21.127.691,98)
44	Kecamatan Tarogong Kaler	(2.500.000,00)
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(10.325.000,00)
	Jumlah	(7.848.713.549,60)

- e. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tak berwujud sebesar (Rp999.693.034,00)

Tabel 5.95
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(97.125.000,00)
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(84.434.234,00)
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(47.175.000,00)
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(197.580.000,00)
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	(27.355.050,00)
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(49.839.000,00)
7	Badan Pendapatan Daerah	(436.272.750,00)
8	Kecamatan Tarogong Kidul	(59.912.000,00)
	Jumlah	(999.693.034,00)

- f. Pembayaran atas Hutang kepada Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar (Rp70.360.583,00).
g. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp519.563.177,00) merupakan mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.
h. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain (Rp143.507.016,00).

Tabel 5.96
Reklasifikasi Aset Lain-lain
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jenis Aset	Nilai
1	Dinas Pemadam Kebakaran	Sepeda Motor (Proses TGR)	(31.850.000,00)
2	Dinas Pertanian	Sepeda Motor (Proses TGR)	(76.846.166,00)
3	Kecamatan Sukawening	Sepeda Motor (Proses TGR)	(34.810.850,00)
		Jumlah	(143.507.016,00)

- i. Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-lain (Aset Tidak Produktif) sebesar (Rp327.481.488,05).

Tabel 5.97
Reklasifikasi Aset Tidak Produktif
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cigedug	(158.698.300,00)
2	Kecamatan Pameungpeuk	(69.494.132,00)
3	Kecamatan Pasirwangi	(99.289.056,05)
	Jumlah	(327.481.488,05)

- j. Penghapusan Peralatan dan Mesin (sudah ada Keputusan Bupati Garut) sebesar (Rp6.675.359.767,40) merupakan penghapusan dari pencatatan buku inventaris dengan mekanisme pemindahtanganan.

Tabel 5.98
Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(2.699.395.445,87)
2	Dinas Kesehatan	(565.714.283,00)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(100.000.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.451.000.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	(250.995.507,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(401.448.160,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan	(208.491.307,61)
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(206.400.000,00)
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(138.739.198,48)
10	Badan Kepegawaian dan Diklat	(653.175.865,44)
	Jumlah	(6.675.359.767,40)

- k. Mutasi berkurang ke SKPD lain sebesar (Rp6.361.523.117,82) merupakan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin yang beralih ke SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.99
Mutasi Berkurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	(209.330.000,00)
2	Dinas Ketahanan Pangan	(537.750.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(13.500.000,00)
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(35.582.500,00)
5	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(240.260.334,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(383.447.500,00)
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(628.000.000,00)
8	Sekretariat Daerah	(1.572.654.100,00)
9	Sekretariat Dewan	(221.521.000,00)
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(497.221.049,18)
11	Badan Pendapatan Daerah	(322.473.356,00)
12	Inspektorat Daerah	(1.185.393.278,64)
13	Kecamatan Cibiuk	(139.300.000,00)
14	Kecamatan Sukawening	(148.590.000,00)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(226.500.000,00)
	Jumlah	(6.361.523.117,82)

5.3.6.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.120.888.626.215,82	1.972.306.275.177,09

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.120.888.626.215,82 atau mengalami kenaikan sebesar Rp148.582.351.038,73 atau 7,53% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.972.306.275.177,09. Adapun mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.100
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.972.306.275.177,09
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal	141.794.289.817,00
- Dari Belanja Pemeliharaan	2.298.011.958,00
- Dari Belanja Barang dan Jasa	477.820.980,00
- BTT	865.884.570,00
- Mutasi Antar KIB	44.811.285.043,00
- BLUD	1.402.157.050,00
- DBHCT	6.650.950.706,00
- Hibah	11.246.476.081,00
- Aset tahun lalu yang (kurang) dicatat	944.677.324,00
- Mutasi Bertambah dari SKPD Lain	3.038.832.600,00
Jumlah Mutasi Tambah	213.530.386.129,00
Mutasi Kurang:	
- Hibah	(1.087.885.689,47)
- Reklas ke Barang Pakai Habis	(122.753.000,00)
- Reklas Pemeliharaan yg Tidak Menambah Aset	(36.962.000,00)
- Reklas ke Aset Ekstrakomtabel	(8.061.346.325,00)
- Mutasi antar KIB	(47.454.725.160,25)
- Hutang ke Pihak Ketiga	(2.158.935.495,55)
- Mutasi Berkurang Ke SKPD Lain	(3.038.832.600,00)
- Reklas ke Aset Lain-lain	(2.986.594.820,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(64.948.035.090,27)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.120.888.626.215,82

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp213.769.110.446,00 terdiri dari:



- a. Belanja Modal sebesar Rp141.794.289.817,00.
- b. Reklasifikasi dari Kode Rekening Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp2.298.011.958,00.

Tabel 5.101
Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan Dikapitalisasi
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Sekretariat Daerah	1.639.058.114,00
2	Sekretariat DPRD	213.908.350,00
3	Inspektorat Daerah	102.230.654,00
4	Kecamatan Cibatu	110.389.000,00
5	Kecamatan Karangpawitan	24.840.000,00
6	Kecamatan Karangtengah	40.000.000,00
7	Kecamatan Malangbong	70.311.840,00
8	Kecamatan Wanaraja	97.274.000,00
	Jumlah	2.298.011.958,00

- c. Reklasifikasi dari Kode Rekening Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp477.820.980,00.

Tabel 5.102
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa dikapitalisasi
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	117.000.000,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	81.575.200,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.899.950,00
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	16.000.000,00
5	Dinas Pertanian	180.916.950,00
6	Sekretariat Daerah	63.428.880,00
7	Kecamatan Tarogong Kaler	16.000.000,00
	Jumlah	477.820.980,00

- d. Pengadaan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dari sumber dana BTT sebesar Rp865.884.570,00.
- e. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp44.811.285.043,00 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain dan pengklasifikasian terhadap Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang sudah selesai dan dapat digunakan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi.

Tabel 5.103
Mutasi antar KIB
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	1.016.992.650,00
2	Dinas Kesehatan	4.687.365.200,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	11.376.463.500,00



No	SKPD	Nilai
4	Dinas Sosial	332.912.000,00
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	59.378.000,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	26.938.911.568,00
7	Sekretariat Daerah	72.809.000,00
8	Inspektorat Daerah	57.805.445,00
9	Kecamatan Cikajang	48.574.700,00
10	Kecamatan Cikelet	49.918.000,00
11	Kecamatan Cisurupan	50.881.700,00
12	Kecamatan Garut Kota	69.427.880,00
13	Kecamatan Malangbong	49.845.400,00
	Jumlah	44.811.285.043,00

- f. Pengadaan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dari sumber dana BLUD sebesar Rp1.402.157.050,00.
- g. Pengadaan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dari sumber dana DBHCT sebesar Rp6.650.950.706,00.
- h. Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp11.246.476.081,00 merupakan Hibah Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pihak Ketiga (Fasum Fasos, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Bangunan Sentra Kuliner.

Tabel 5.104
Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/BAST.3541 - DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Tempat Parkir Perumahan Sumber Jati Residence	17.662.500,00
2	028/BAST.3541 - DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Perumahan Sumber Jati Residence	64.725.000,00
3	028/BAST.3541 - DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen Perumahan Sumber Jati Residence	311.600.000,00
4	648/3542/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Perumahan Cluster Jati Putra	58.317.600,00
5	648/3537/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Villa Pataruman Asri	131.416.480,00
6	648/3536/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Perumahan Cluster Cisarupan	31.682.200,00
7	648/3538/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Perumahan Aka Karangpawitan	165.108.867,00
8	648/3538/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Permanen Perumahan Aka Karangpawitan	150.880.080,00
9	648/3543/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. GHANI RAHMA LESMANA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Permanen Perumahan Ghani Cinunuk Indah	86.052.522,00
10	648/3543/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. GHANI RAHMA LESMANA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Permanen Perumahan Ghani Cinunuk Indah	89.957.249,00



Pemerintah Kabupaten Garut
Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
11	648/3532/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Puri Cisurupan	99.149.600,00
12	648/3532/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Perumahan Perumahan Puri Cisurupan	58.213.000,00
13	648/3544/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Green Cisalam Permai	43.151.100,00
14	648/3544/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Green Cisalam Permai	30.378.600,00
15	648/3540/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Perumahan Perumahan Griya Wanamekar	37.320.000,00
16	648/3540/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Perumahan Perumahan Griya Wanamekar	40.300.000,00
17	648/3534/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Cempaka Permai Recidence	42.873.798,00
18	648/3534/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Cempaka Permai Recidence	40.419.936,00
19	648/3539/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Mandala Recidence	238.128.000,00
20	648/3539/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Tempat Parkir Perumahan Mandala Recidence	127.412.400,00
21	648/3535/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Ngamplang City View	49.574.800,00
22	648/3535/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Taman Perumahan Perumahan Ngamplang City View	22.918.180,00
23	648/3545/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Gudang Terbuka Perumahan Perumahan Mandala Pamoyanan	39.933.000,00
24	648/3545/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Bangunan Olah Raga Terbuka Perumahan Perumahan Mandala Pamoyanan	41.568.000,00
25	648/3537/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Pos Jaga Perumahan Perumahan Villa Pataruman Asri	7.003.200,00
26	648/3536/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Pos Jaga Perumahan Perumahan Cluster Cisurupan	4.800.000,00
27	648/3543/DISP ERKIM	09-10-2022	PT GHANI RAHMA LESMANA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Pos Jaga Perumahan Perumahan Ghani Cinunuk Indah	3.954.400,00
28	648/3544/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Pos Jaga Perumahan Perumahan Green Cisalam Permai	4.500.000,00
29	648/3540/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Gedung Pos Jaga Perumahan Perumahan Griya Wanamekar	5.460.000,00



No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
30	46/NH/BN.07/K PB/2021	22-03-2022	Direktorat Jenderal Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi	Dinas Perhubungan	Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.489.214.225,00
31	B.6698/DJPDSP KP.0/HK.150/XI I/2022 - 253/12538-Diskannak/2022	30-12-2022	Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bangunan Sentra Kuliner Ikan	2.712.801.344,00
Jumlah						11.246.476.081,00

- i. Gedung dan Bangunan yang belum tercatat (koreksi) pada tahun 2022 sebesar Rp944.677.324,00.

Tabel 5.105
Koreksi Belum Tercatat
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	909.677.324,00
2	Kecamatan Karangpawitan	35.000.000,00
Jumlah		944.677.324,00

- j. Mutasi bertambah dari SKPD lain sebesar Rp3.038.832.600,00 merupakan penambahan aset Gedung dan Bangunan yang beralih dari SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.106
Mutasi Bertambah
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.748.832.600,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	290.000.000,00
Jumlah		3.038.832.600,00

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar (Rp64.948.035.090,27) terdiri dari:

- a. Hibah sebesar (Rp1.087.885.689,47).

Tabel 5.107
Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1			Dinas Kesehatan	Desa	Bangunan Eks. PKM Samarang	(176.643.789,47)
2	028/KEP.672-BPKAD/2022	23-11-2022	Kecamatan Sukawening	Kepolisian RI	Bangunan Kantor	(911.241.900,00)
Jumlah						(1.087.885.689,47)

- b. Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis atau Persediaan sebesar (Rp122.753.000,00).



Tabel 5.108
Reklasifikasi Persediaan
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(114.800.000,00)
2	Dinas Ketahanan Pangan	(7.953.000,00)
	Jumlah	(122.753.000,00)

c. Reklasifikasi Pemeliharaan yang tidak menambah aset sebesar (Rp36.962.000,00).

Tabel 5.109
Reklasifikasi Pemeliharaan Tidak Menambah
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(12.275.000,00)
2	Dinas Sosial	(5.287.000,00)
3	Kecamatan Peundeuy	(13.400.000,00)
4	Kecamatan Sukaresmi	(6.000.000,00)
	Jumlah	(36.962.000,00)

d. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar (Rp8.061.346.325,00).

Tabel 5.110
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perhubungan	(8.017.966.225,00)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	(43.380.100,00)
	Jumlah	(8.061.346.325,00)

e. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp47.454.725.160,25) merupakan mutasi kurang aset Gedung dan Bangunan sebagai kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.

Tabel 5.111
Mutasi antar KIB
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(3.744.099.470,00)
2	Dinas Kesehatan	(437.598.777,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(25.643.258.203,45)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.280.975.338,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(191.927.000,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(7.611.082.510,00)
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.304.730.168,00)
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(313.641.675,00)
9	Dinas Pertanian	(96.688.097,00)
10	Sekretariat Daerah	(3.316.605.690,00)
11	Badan Pendapatan Daerah	(88.920.000,00)
12	Kecamatan Cibalong	(87.991.230,00)
13	Kecamatan Cihurip	(74.110.000,00)



No	SKPD	Nilai
14	Kecamatan Cisompet	(1.662.683.375,00)
15	Kecamatan Pakenjeng	(18.824.000,00)
16	Kecamatan Pangatikan	(52.289.535,00)
17	Kecamatan Pasirwangi	(66.030.225,00)
18	Kecamatan Sucinaraja	(29.480.000,00)
19	Kecamatan Talegong	(240.672.866,80)
20	Kecamatan Tarogong Kaler	(93.348.000,00)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(99.769.000,00)
	Jumlah	(47.454.725.160,25)

f. Hutang ke Pihak Ketiga sebesar (Rp2.158.935.495,55).

Tabel 5.112
Hutang Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(2.158.935.495,55)

g. Mutasi berkurang ke SKPD lain sebesar (Rp3.038.832.600,00) merupakan pengurangan aset Gedung dan Bangunan yang beralih ke SKPD lain karena aset tersebut disesuaikan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD penerima.

Tabel 5.113
Mutasi Berkurang
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Sosial	(114.000.000,00)
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(176.000.000,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	(2.748.832.600,00)
	Jumlah	(3.038.832.600,00)

h. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain sebesar (Rp2.986.594.820,00) merupakan aset Gedung dan Bangunan (eks Gedung dan Bangunan kantor kecamatan) yang akan dihapuskan.

Tabel 5.114
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cikelet	(401.973.200,00)
2	Kecamatan Cisompet	(523.822.000,00)
3	Kecamatan Cisarupan	(998.784.200,00)
4	Kecamatan Karangpawitan	(35.000.000,00)
5	Kecamatan Malangbong	(1.027.015.420,00)
	Jumlah	(2.986.594.820,00)

5.3.6.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.967.498.635.786,12	1.549.985.889.907,39



Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.967.498.635.786,12 atau mengalami kenaikan sebesar Rp417.512.745.878,73 atau 26,94% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.549.985.889.907,39. Adapun mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.115
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		1.549.985.889.907,39
Mutasi Tambah:		
- Belanja Modal Tahun 2022		394.817.632.912,00
- Biaya Umum		2.430.000,00
- Mutasi Antar KIB		22.451.476.470,78
- Dari Belanja Barang dan Jasa		1.767.875.000,00
- Hibah dari Pihak ketiga		34.365.223.447,00
Jumlah Mutasi Tambah		453.404.637.829,78
Mutasi Kurang:		
- Reklas Pemeliharaan yang Tidak Menambah Aset		(49.136.027,00)
- Mutasi antar KIB		(32.735.227.650,05)
- Reklas Ke Barang Pakai Habis/Persediaan		(254.229.000,00)
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel		(32.901.000,00)
- Hutang ke Pihak Ketiga		(2.820.398.274,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(35.891.891.951,05)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		1.967.498.635.786,12

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar Rp453.404.637.829,78 terdiri dari:

- Belanja Modal sebesar Rp394.817.632.912,00.
- Biaya Umum terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.430.000,00 merupakan belanja yang menambah nilai (atribusi) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp22.451.476.470,78 merupakan mutasi tambah aset Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain dan pengklasifikasian terhadap Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dan dapat digunakan.

Tabel 5.116
Mutasi antar KIB
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.810.866.511,48
2	Dinas Pendidikan	3.756.374.470,00
3	Dinas Kesehatan	882.026.909,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	141.927.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	157.759.364,40
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	286.903.495,00
7	Kecamatan Cisewu	126.641.854,10
8	Kecamatan Pakenjeng	18.824.000,00
9	Kecamatan Sucinaraja	29.480.000,00
10	Kecamatan Talegong	240.672.866,80
	Jumlah	22.451.476.470,78

- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.767.875.000,00.



Tabel 5.117
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	BLUD RSUD dr. Slamet	1.005.446.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	762.429.000,00
	Jumlah	1.767.875.000,00

- e. Hibah dari pihak ketiga sebesar Rp34.365.223.447,00 merupakan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari pihak ketiga berupa Fasum Fasos yang diterima oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, jembatan gantung yang diterima oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 5.118
Hibah dari Pihak Ketiga
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
1	028/BAST.3541 - DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Sumber Jati Residence	2.517.855.000,00
2	028/BAST.3541 - DISPERKIM/2022	13-06-2022	PT. PUTERA SUMBER PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Sumber Jati Residence	399.316.500,00
3	648/3542/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Cluster Jati Putra	1.800.000,00
4	648/3537/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Villa Pataruman Asri	6.000.400,00
5	648/3536/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Cluster Cisarupan	2.700.000,00
6	648/3538/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Aka Karangpawitan	4.285.800,00
7	648/3543/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. GHANI RAHMA LESMANA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Ghani Cinunuk Indah	4.071.600,00
8	648/3532/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Puri Cisarupan	4.200.000,00
9	648/3540/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Griya Wanamekar	3.600.000,00
10	648/3534/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Cempaka Permai Residence	1.843.200,00
11	648/3535/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Ngamplang City View	3.600.000,00



Pemerintah Kabupaten Garut
Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Berita Acara		Hibah		Jenis Aset	Nilai
	Nomor	Tanggal	Menyerahkan	Menerima		
12	648/3545/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATUR KRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Tempat Pembuangan Sampah Perumahan Mandala Pamoyanan	800.000,00
13	648/3542/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Cluster Jati Putra	420.117.500,00
14	648/3542/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Cluster Jati Putra	121.354.688,00
15	648/3533/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Griya Balewangi	50.945.000,00
16	648/3537/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Villa Pataruman Asri	1.285.691.136,00
17	648/3537/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. BINTANG KARTIKA PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Villa Pataruman Asri	214.654.920,00
18	648/3536/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Cluster Cisirupan	73.365.000,00
19	648/3538/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Aka Karangpawitan	1.021.132.900,00
20	648/3538/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKA RAFASYA PUTRA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Aka Karangpawitan	160.177.486,00
21	648/3543/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. GHANI RAHMA LESMANA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Ghani Cinunuk Indah	54.186.300,00
22	648/3532/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Puri Cisirupan	741.006.000,00
23	648/3532/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANCAGAHAR PERSADA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Puri Cisirupan	175.100.000,00
24	648/3544/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. AKSARA BERKAH SAUDARA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Green Cisalam Permai	80.811.000,00
25	648/3540/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. SHAKIRA PUTRI PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Griya Wanamekar	67.589.600,00
26	648/3534/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Jalan Khusus Komplek Perumahan Cempaka Permai Residence	267.059.650,00
27	648/3534/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. KAYLA PUTRA PRATAMA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Cempaka Permai Residence	70.755.178,00
28	648/3539/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Mandala Residence	993.184.000,00
29	648/3535/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. ARCHILAND INTI PERKASA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Ngamplang City View	122.009.680,00
30	648/3545/DISP ERKIM	09-10-2022	PT. MANDALA PUTRA CATURKRIYA	Dinas Perumahan dan Permukiman	Saluran Drainase Perumahan Mandala Pamoyanan	192.010.000,00
31				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Gantung	25.304.000.909,00
Jumlah						34.365.223.447,00

Mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar (Rp35.891.891.951,05) terdiri dari:

a. Reklasifikasi pemeliharaan yang tidak menambah aset sebesar (Rp49.136.027,00).

Tabel 5.119
Reklasifikasi Pemeliharaan Tidak Menambah
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	(7.500.000,00)
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	(12.156.027,00)
3	Kecamatan Sucinaraja	(29.480.000,00)
	Jumlah	(49.136.027,00)

- b. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp32.735.227.650,05) merupakan mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.

Tabel 5.120
Mutasi antar KIB
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	(32.467.552.250,05)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	(239.905.000,00)
3	Dinas Pemuda dan Olahraga	(27.770.400,00)
	Jumlah	(32.735.227.650,05)

- c. Reklas Ke Barang Pakai Habis atau Persediaan sebesar (Rp254.229.000).
d. Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel sebesar (Rp32.901.000,00).
e. Pembayaran atas Hutang kepada Pihak Ketiga tahun 2022 sebesar (Rp2.820.398.274,00).

Tabel 5.121
Pembayaran Hutang Pihak Ketiga
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	(2.820.398.274,00)

5.3.6.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
328.340.495.624,81	327.386.193.182,25

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp328.340.495.624,81 atau mengalami kenaikan sebesar Rp94.302.442,56 atau 0,29% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp327.386.193.182,25. Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.122
Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	327.386.193.182,25
Mutasi Tambah:	
- Belanja Modal Tahun 2022	1.373.228.000,00
- Mutasi Antar KIB	60.000.000,00
- Dari Belanja Barang dan Jasa	20.930.000,00
- BOS SDN	13.621.088.193,00
- BOS SMPN	4.111.838.688,00
Jumlah Mutasi Tambah	19.187.084.881,00



Mutasi Kurang:	
- Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	(14.013.518.850,43)
- Reklas Ke Aset Tak Berwujud	(680.112.000,00)
- Mutasi antar KIB	(1.398.699.992,15)
- Reklas Ke Barang Pakai Habis	(912.050.000,00)
- Penghapusan	(1.228.401.595,86)
Jumlah Mutasi Kurang	(18.232.782.438,44)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	328.340.495.624,81

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebesar Rp19.187.084.881,00 terdiri dari:

- Belanja Modal sebesar Rp1.373.228.000,00.
- Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp60.000.000,00 merupakan mutasi tambah Aset Tetap Lainnya akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.

Tabel 5.123
Mutasi antar KIB Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	60.000.000,00

- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20.930.000,00.

Tabel 5.124
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20.930.000,00

- Pengadaan /pembelian Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari dana BOS SDN sebesar Rp13.621.088.193,00.
- Pengadaan /pembelian Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari dana BOS SMPN sebesar Rp4.111.838.688,00.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebesar (Rp18.232.782.438,44) terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel sebesar (Rp14.013.518.850,43).

Tabel 5.125
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(13.903.493.859,85)
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(104.990.990,58)
3	Sekretariat Daerah	(5.034.000,00)
	Jumlah	(14.013.518.850,43)

- Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar (Rp680.112.000,00).

Tabel 5.126
Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(635.457.000,00)
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(44.655.000,00)
	Jumlah	(680.112.000,00)

- c. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp1.398.699.992,15) merupakan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebagai akibat kesalahan pencatatan yang diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain.

Tabel 5.127
Mutasi antar KIB Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(1.112.909.992,15)
2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(52.699.000,00)
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(197.691.000,00)
4	Inspektorat Daerah	(14.900.000,00)
5	Kecamatan Cikelet	(15.000.000,00)
6	Kecamatan Singajaya	(5.500.000,00)
	Jumlah	(1.398.699.992,15)

- d. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke barang habis pakai sebesar (Rp912.050.000,00).

Tabel 5.128
Reklasifikasi ke Habis Barang Pakai
Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(912.050.000,00)

- e. Penghapusan (sudah ada SK) sebesar (Rp1.228.401.595,86).

Tabel 5.129
Penghapusan Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(1.228.401.595,86)

5.3.6.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
131.453.014.072,78	119.536.041.613,76

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp131.453.014.072,78 atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.916.972.459,02 atau 9,97% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp119.536.041.613,76. Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.130
Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		119.536.041.613,76
Mutasi Tambah:		
- Belanja Pemeliharaan		115.958.000,00
- Dari Belanja Barang dan Jasa		1.195.515.235,00
- Mutasi Antar KIB		71.933.493.133,50
- Aset Tahun Lalu (Kurang) Catat		236.352.200,00
- Mutasi Bertambah dari Aset Lain-lain		255.914.000,00
Jumlah Mutasi Tambah		73.737.232.568,50
Mutasi Kurang:		
- Mutasi antar KIB		(61.820.260.109,48)
Jumlah Mutasi Kurang		(61.820.260.109,48)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		131.453.014.072,78

Mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada tahun 2022 sebesar Rp73.737.232.568,50 terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp115.958.000,00.

Tabel 5.131
Reklasifikasi Belanja Pemeliharaan
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cibiuk	115.958.000,00

- b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.195.515.235,00.

Tabel 5.132
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	99.845.000,00
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	19.730.000,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	101.501.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	114.423.307,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	438.820.300,00
6	Sekretariat Daerah	5.660.000,00
7	Kecamatan Karangpawitan	116.383.863,00
8	Kecamatan Pasirwangi	22.351.170,00
9	Kecamatan Singajaya	116.277.525,00
10	Kecamatan Sucinaraja	86.764.000,00
11	Kecamatan Tarogong Kidul	73.759.070,00
Jumlah		1.195.515.235,00

- c. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp71.933.493.133,50 merupakan mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan akibat semula diklasifikasi sebagai kelompok aset yang lain namun masih dalam tahap pengerjaan atau belum selesai.

Tabel 5.133
Mutasi Tambah antar KIB
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.612.718.230,50
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.280.975.338,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.611.082.510,00
5	Sekretariat Daerah	3.316.605.690,00
6	Kecamatan Cibalong	87.991.230,00
7	Kecamatan Cisompet	1.662.683.375,00
8	Kecamatan Pangatikan	52.289.535,00
9	Kecamatan Pasirwangi	66.030.225,00
10	Kecamatan Tarogong Kaler	93.348.000,00
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.769.000,00
	Jumlah	71.933.493.133,50

d. Aset Tahun Lalu yang (Kurang) Catat sebesar Rp236.352.200,00.

Tabel 5.134
Aset Kurang Catat
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	236.352.200,00

e. Mutasi bertambah dari aset lain-lain sebesar Rp255.914.000,00.

kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2022 sebesar (Rp61.820.260.109,48) terdiri dari:

a. Mutasi antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar (Rp61.820.260.109,48) merupakan mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan terhadap kelompok aset yang telah selesai pengerjaannya.

Tabel 5.135
Mutasi Kurang antar KIB
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(1.016.992.650,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.687.365.200,00)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(11.376.463.500,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(16.810.865.511,48)
5	Dinas Sosial	(332.912.000,00)
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	(59.378.000,00)
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(26.938.911.568,00)
8	Sekretariat Daerah	(72.809.000,00)
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(255.915.000,00)
10	Kecamatan Cikajang	(48.574.700,00)
11	Kecamatan Cikelet	(49.918.000,00)
12	Kecamatan Cisarupan	(50.881.700,00)
13	Kecamatan Garut Kota	(69.427.880,00)
14	Kecamatan Malangbong	(49.845.400,00)
	Jumlah	(61.820.260.109,48)



5.3.6.7 Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(3.128.651.380.856,56)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2022 sebesar (Rp3.128.651.380.856,56). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.130.402.174.767,70 atau 56,57% dibandingkan tahun 2021 sebesar (Rp1.998.249.206.088,86). Berikut disajikan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022:

Tabel 5.136
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	
1.	Peralatan dan Mesin	(817.794.251.974,01)	(131.540.588.514,99)	(42.229.689.647,74)	(991.564.530.136,74)
2.	Gedung dan Bangunan	(433.378.448.710,33)	(96.482.150.619,17)	(535.801.339.394,52)	(1.065.661.938.724,02)
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(747.076.505.404,52)	(139.775.530.128,78)	(184.572.876.462,50)	(1.071.424.911.995,80)
	Jumlah	(1.998.249.206.088,86)	(367.798.269.262,94)	(762.603.905.504,76)	(3.128.651.380.856,56)

Koreksi Penyusutan pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.137
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(817.794.251.974,01)
Mutasi Tambah:	
- Akumulasi Penyusutan aset tahun lalu yang (kurang) dicatat	(1.753.608.971,00)
- Akumulasi Penyusutan aset tidak produktif	(161.500.000,00)
- Koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu yang (kurang) lebih catat	(46.456.418.051,63)
- Akumulasi Penyusutan mutasi bertambah dari SKPD lain	(4.443.442.350,84)
- Beban Penyusutan tahun 2022	(131.540.588.514,99)
Jumlah Mutasi Tambah	(184.355.557.888,46)
Mutasi Kurang:	
- Akumulasi Penyusutan reklas ke Aset Lain-Lain	103.510.506,00
- Akumulasi Penyusutan hibah	1.927.693,56
- Akumulasi Penyusutan reklas ke aset tidak produktif	315.654.782,87
- Akumulasi Penyusutan penghapusan (sudah ada sk)	5.720.744.392,46
- Akumulasi Penyusutan mutasi berkurang ke SKPD lain	4.443.442.350,84
Jumlah Mutasi Kurang	10.585.279.725,73
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(991.564.530.136,74)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar (Rp184.355.557.888,46) terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Aset Tahun Lalu yang (Kurang) Dicatat sebesar (Rp1.753.608.971,00).
- Akumulasi Penyusutan aset tidak produktif sebesar (Rp161.500.000,00).



- c. Koreksi Akumulasi Penyusutan tahun lalu yang (kurang) lebih catat sebesar (Rp46.456.418.051,63).
- d. Akumulasi Penyusutan mutasi bertambah dari SKPD Lain sebesar (Rp4.443.442.350,84).
- e. Beban Penyusutan sebesar (Rp131.540.588.514,99)

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp10.585.279.725,73 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan reklas ke Aset Lain-Lain sebesar Rp103.510.506,00.
- b. Akumulasi Penyusutan Hibah sebesar Rp1.927.693,56.
- c. Akumulasi Penyusutan reklas ke Aset Tidak Produktif sebesar Rp315.654.782,87.
- d. Akumulasi Penyusutan penghapusan (sudah ada SK) sebesar Rp5.720.744.392,46.
- e. Akumulasi Penyusutan mutasi berkurang ke SKPD lain sebesar Rp4.443.442.350,84.

Koreksi Penyusutan pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.138
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021		(433.378.448.710,33)
Mutasi Tambah:		
-	Koreksi Akumulasi penyusutan tahun lalu yang (kurang) lebih catat	(537.613.951.073,94)
-	Akumulasi Penyusutan mutasi bertambah dari SKPD lain	(809.766.140,00)
-	Beban Penyusutan tahun 2022	(96.482.150.619,17)
Jumlah Mutasi Tambah		(634.905.867.833,11)
Mutasi Kurang:		
-	Akumulasi Penyusutan reklas Ke Aset Lain-Lain	1.304.972.628,01
-	Akumulasi Penyusutan hibah	496.159.051,41
-	Akumulasi Penyusutan reklas ke Barang Habis Pakai / Persediaan	11.480.000,00
-	Akumulasi Penyusutan mutasi berkurang ke SKPD lain	809.766.140,00
Jumlah Mutasi Kurang		2.622.377.819,42
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021		(1.065.661.938.724,02)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar (Rp634.905.867.833,11) terdiri dari:

- a. Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu yang (Kurang) Lebih Catat sebesar (Rp537.613.951.073,94).
- b. Akumulasi Penyusutan Mutasi bertambah dari SKPD Lain sebesar (Rp809.766.140,00).
- c. Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar (Rp96.482.150.619,17).

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp2.622.377.819,42 terdiri dari:

- a. Akumulasi Penyusutan Reklas ke Aset Lain-lain sebesar 1.304.972.628,01.
- b. Akumulasi Penyusutan Hibah sebesar Rp496.159.051,41.
- c. Akumulasi Penyusutan Reklas ke Barang Pakai Habis /Persediaan sebesar Rp11.480.000,00.
- d. Akumulasi Penyusutan Mutasi Berkurang Ke SKPD Lain sebesar Rp809.766.140,00.

Koreksi Penyusutan pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139
Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(747.076.505.404,52)
Mutasi Tambah:	
- Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu yang (Kurang) Lebih Catat	(184.584.892.429,17)
- Beban Penyusutan Tahun 2022	(139.775.530.128,78)
Jumlah Mutasi Tambah	(324.360.422.557,95)
Mutasi Kurang:	
- Akumulasi Penyusutan Reklas ke Barang Habis Pakai / Persediaan	12.015.966,67
Jumlah Mutasi Kurang	12.015.966,67
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(1.071.424.911.995,80)

Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar (Rp324.360.422.557,95) terdiri dari:

- Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun Lalu yang (Kurang) Lebih Catat sebesar (Rp184.584.892.429,17).
- Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar (Rp139.775.530.128,78).

Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar Rp12.015.966,67 terdiri dari:

- Akumulasi Penyusutan Reklas ke Barang Habis Pakai /Persediaan sebesar Rp12.015.966,67.

Adanya koreksi terhadap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disebabkan beberapa hal, antara lain kesalahan catat pada saat perhitungan penyusutan, mutasi antar KIB, reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya, Aset Ekstrakomptabel dan barang pakai habis serta penghapusan Aset Tetap, sehingga nilai penyusutan harus dikoreksi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 232 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, bahwa nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap nilai per unitnya sebesar Rp1.000.000,00 untuk aset tetap lainnya nilai satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp1 sampai dengan Rp500.000,00. Aset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai minimum kapitalisasi, tidak disajikan di neraca, namun dicatat dalam daftar Aset Ekstrakomptabel. Nilai Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp92.226.396.833,38.

5.3.7 Dana Cadangan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
12.789.440.899,00	14.978.884.044,00

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Garut membentuk Dana Cadangan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2013, pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai program dan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Adapun program dan kegiatan tersebut untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah otonomi baru Kabupaten Garut Selatan. Besaran dana cadangan daerah ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan rician sebagai berikut:

- Untuk tahun 2014 sesuai dengan SP2D Nomor 06142/LS/2014 tanggal 4 Desember 2014 ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00;



- b. Untuk tahun 2015 sesuai dengan SP2D Nomor 3347/LS/2015 tanggal 2 oktober 2015 ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00; dan
- c. Untuk tahun 2016 sesuai dengan SP2D Nomor 5303/LS/2016 tanggal 20 Desember 2016 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Dana cadangan tersebut bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah dan ditempatkan pada deposito berjangka Bank Rakyat Indonesia. Bunga yang diperoleh atas penyimpanan dana cadangan pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp439.911.370,00 dan pada tahun 2022 sebesar Rp349.529.529,00 secara langsung dikapitalisasikan sebagai dana cadangan. Sampai dengan 31 Desember 2022 dana cadangan tersebut belum digunakan. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan tidak dilakukan pencabutan, sehubungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut masih menunggu kepastian hukum dari Pemerintah Pusat terhadap proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan. Rincian Dana Cadangan sebagai berikut:

Tabel 5.140
Dana Cadangan
Per 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	No Rekening	Nilai Dana Cadangan	Bunga	Saldo Akhir
1	002501004489402	5.000.000.000,00	322.371.846,00	5.322.371.846,00
2	002501004491409	5.000.000.000,00	338.120.219,00	5.338.120.219,00
3	002501004490403	2.000.000.000,00	128.948.834,00	2.128.948.834,00
		12.000.000.000,00	789.440.899,00	12.789.440.899,00

5.3.8 Aset Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
87.440.964.587,61	317.700.286.007,33

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.440.964.587,61 atau mengalami penurunan sebesar (Rp230.259.321.419,72) atau (72,48%) dari tahun 2021 sebesar Rp317.700.286.007,33. Penurunan Aset Lainnya akibat dari reklasifikasi Aset Lainnya ke Persediaan pada Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perindustrian, Perdagangan ESDM. Rincian Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.141
Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tagihan Penjualan angsuran	26.300.000,00	26.300.000,00
2	Tuntutan Ganti Rugi	486.629.500,00	498.829.500,00
3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00
4	Aset Tak Berwujud	13.024.898.638,48	11.345.093.604,48
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.329.281.263,72)	(9.257.727.399,68)
6	Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	22.061.002.709,00	-
7	Aset Lain-lain	57.098.908.833,85	310.024.284.132,53
	Jumlah	87.440.964.587,61	317.700.286.007,33



5.3.8.1 Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	26.300.000,00	26.300.000,00

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.300.000,00 dan tidak mengalami perubahan dibandingkan posisi per 31 Desember 2021. Merupakan saldo tagihan atas penjualan kendaraan roda empat yang dilakukan secara angsuran kepada 2 orang pegawai Pemerintah Kabupaten Garut per 31 Desember 2013 sesuai dengan SK Bupati Nomor 024/Kep 224-PLK/2000 tanggal 11 September 2000 dan Nomor 024/Kep.52-PLK/2001 tanggal 23 Januari 2001. Berdasarkan SK Bupati tersebut seharusnya telah lunas pada Tahun 2006.

5.3.8.2 Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	486.629.500,00	489.829.500,00

Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp486.629.500,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.200.000,00) dibandingkan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp489.829.500,00. Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo Tagihan kepada pegawai atas kasus kehilangan aset/barang milik Pemerintah Kabupaten Garut, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Pengakuan Tuntutan Ganti Rugi tersebut berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Garut Nomor: 028/Kep.577.DPPKA/2011 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi Uang Atau Barang Milik Pemerintah Kabupaten Garut;
2. Keputusan Bupati Garut Nomor: 028/Kep.1460-DPPKA/2015 tentang Penetapan Pembebanan Ganti Rugi Uang Atau Barang Milik Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester I Tahun 2021 Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

5.3.8.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	5.072.506.170,00	5.072.506.170,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Garut dengan pihak lain dalam bentuk Bangun Guna Serah (kelola) atau *Build, Operate and Transfer* (BOT) serta Kerjasama Pemanfaatan (KSP) terhadap aset milik Pemerintah Kabupaten Garut. Terdapat 3 (tiga) lokasi yang dijadikan objek Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu lahan Pasar Cibatu, lahan Pasar Limbangan dan Hotel Cipanas Indah dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan adendum atas perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT. Trie Mukty Pertama Putra nomor 511.2/1546-DP2KU/V/2012 tentang pembangunan pasar Cibatu Garut, sepakat bahwa bentuk kerjasama dalam pembangunan dan pengelolaan Pasar Cibatu Garut adalah Bangun Guna (Kelola) Serah atau *Build, Operate and Transfer* (BOT), artinya Pemerintah Kabupaten Garut memberikan hak kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra untuk membangun, memasarkan, menjual/mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain dan mengelola Pasar Cibatu Garut selama jangka waktu kerja sama. Luas tanah yang diserahkan pemanfaatannya seluas 12.192 m² dengan nilai perolehan Rp461.772.000,00.



2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan PT Elva Primandiri Nomor 027/1348/SPK-PKS/Indagpas/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*(BOT) Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Garut Berupa Lahan Pasar yang Terletak di Desa Limbangan Tengah Kecamatan Bl Limbangan, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan hak kepada PT Elva Primandiri untuk membangun, memasarkan, menjual/mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain dan mengelola Pasar Limbangan selama jangka waktu kerja sama. Luas tanah yang diserahkan pemanfaatannya seluas 6.808 m² dengan nilai perolehan Rp558.256.000,00.
3. Berdasarkan Perjanjian Kejasama Nomor 119/3509/Disparbud tanggal 1 November 2019, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan hak untuk membangun, mengelola, mengoperasikan, memanfaatkan dan memasarkan Hotel Cipanas Indah kepada CV Wulandari untuk jangka waktu selama 30 tahun. Sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/1706/Disparbud-2019 tanggal 28 September 2019, Pemerintah Kabupaten Garut menyerahkan Barang Inventaris pada Cipanas Indah dengan status Barang Inventaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada CV Wulandari untuk dilakukan pengelolaan. Ada pun nilai perolehan barang inventaris yang diserahkan berjumlah Rp4.052.478.170,00.

5.3.8.4 Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		13.024.898.638,48

Aset Tak Berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp13.024.898.638,48 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.679.805.034,00 atau 14,81% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.345.093.604,48. Rincian Aset Tak Berwujud dimuat dalam Lampiran 5.3.8.4.

Tabel 5.142
Akumulasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	11.345.093.604,48
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	1.679.805.034,00
Jumlah Mutasi Tambah	1.679.805.034,00
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	13.024.898.638,48

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud pada tahun 2022 terdiri dari:

- a. Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp1.679.805.034,00.

Tabel 5.143
Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	635.457.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	97.125.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	84.434.234,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	47.175.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	197.580.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.655.000,00
7	Dinas Perikanan dan Peternakan	27.355.050,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	49.839.000,00



No	SKPD	Nilai
9	Badan Pendapatan Daerah	436.272.750,00
10	Kecamatan Tarogong Kidul	59.912.000,00
	Jumlah	1.679.805.034,00

5.3.8.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(10.329.281.263,72)

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan jumlah akumulasi nilai pengurang akibat penggunaan Aset Tak Berwujud sesuai dengan waktu penggunaannya. Nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp10.329.281.263,72) sedangkan nilai per 31 Desember 2021 adalah (Rp9.257.727.399,68). Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dimuat dalam lampiran 5.3.8.4.1

Tabel 5.144
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2021	Mutasi 2022		Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2022
			Beban Amortisasi	Koreksi Amortisasi	
1.	Aset Tak Berwujud	(9.257.727.399,68))	(1.310.025.999,87)	238.472.135,83	(10.329.281.263,72)
	Jumlah	(9.257.727.399,68)	(1.310.025.999,87)	238.472.135,83	(10.329.281.263,72)

Koreksi Penyusutan pada Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud pada tahun 2022 sebesar Rp238.472.135,83. Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5.145
Mutasi Tambah Koreksi
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	85.714,21
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.484.285,71
3	Dinas Perhubungan	22.139.999,94
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.450.142,84
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.121.428,57
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	18.680.339,29
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	3.893.500,00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.435.280,21
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	66.940.545,46
10	Badan Pendapatan Daerah	88.496.000,00
11	Inspektorat Daerah	(8.153.071,43)
12	Kecamatan Pasirwangi	2.097.971,03
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.800.000,00
	Jumlah	238.472.135,83



5.3.8.5 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	22.061.002.709,00	0,00

Berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Data Saldo pada Rekening *Treasury Deposit Facility* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) pada kantor pusat Bank Indonesia nomor rekening 519000312980 atas nama rekening lain BI TDF TKD Kabupaten Garut per 31 Desember 2022 terdapat saldo pokok atas DBH yang dibayarkan melalui fasilitas TDF sebesar Rp22.061.002.709,00. Rincian Dana tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.146
Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)

(dalam rupiah)

No	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Nilai
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.194.727.763,00
2	DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29	262.986.892,00
3	DBH Pasal 21	4.012.354.183,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	2.864.869.331,00
5	DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi	479.229.977,00
6	DBH Sumber Daya Alam Gas Bumi	262.262.063,00
7	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Landrent	30.924.575,00
8	DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - Royalty	98.772.699,00
9	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan PSDH	13.992.090,00
10	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00
11	DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi	7.629.129.925,00
	Jumlah	22.061.002.709,00

5.3.8.6 Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	57.098.908.833,85	310.024.284.132,53

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.098.908.833,85 atau turun sebesar (Rp252.925.375.298,68) atau (81,58%) dibandingkan dengan nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp310.024.284.132,53. Aset Lain-lain terdiri dari:

5.3.8.6.1 Piutang Pasien	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	2.140.108.017,00	2.140.108.017,00

Piutang Pasien merupakan tagihan BLUD RSUD dr. Slamet Garut kepada pasien-pasien rawat inap yang belum melunasi biaya perawatan. Hal tersebut terjadi karena RSUD mempunyai fungsi sosial sehingga dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi kepada keuntungan atau laba saja. Untuk menghindari konotasi adanya penyanderaan terhadap pasien yang tidak mampu membayar, maka pasien diberi kebijaksanaan oleh Direktur RSUD untuk membayar sesuai kemampuan dan sisanya dicicil sesuai kesepakatan pembayaran. Piutang pasien per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.140.108.017,00 atau tidak ada perubahan dari piutang pasien per 31 Desember 2021 .

Berdasarkan Surat Nomor 900/119/RSU/XI/2019 bulan November 2019, BLUD RSUD dr. Slamet telah mengajukan permohonan pertimbangan penghapusan secara bersyarat piutang



perorangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya. Permohonan penghapusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat dengan surat nomor S-5/WKN.08/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara. Sampai dengan 31 Desember 2022 belum ditindaklanjuti oleh surat keputusan penghapusan piutang.

5.3.8.6.2 Penyisihan Piutang Pasien	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(214.010.801,70)

Nilai Penyisihan Piutang Pasien per 31 Desember 2022 sebesar (Rp214.010.801,70) atau tidak ada perubahan dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Nilai Penyisihan Piutang Pasien per 31 Desember 2022 diperoleh berdasarkan perhitungan:

Tabel 5.147
Penyisihan Piutang Pasien

(dalam Rupiah)

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Penyisihan Piutang
Kurang Lancar	> 1 s.d 3 Tahun	2.140.108.017,00	10%	(214.010.801,70)
	Jumlah	2.140.108.017,00		(214.010.801,70)

5.3.8.6.3 Aset Tidak Produktif	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		93.510.599.897,38

Aset Tidak Produktif merupakan aset tetap yang kondisinya rusak berat dan untuk diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dipindahtangankan, dimusnahkan dan dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Pengguna maupun Buku Inventaris Induk Pemerintah Kabupaten Garut. Jumlah Aset Tidak Produktif per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.510.599.897,38 atau mengalami penurunan sebesar (Rp1.749.858.675,65) atau 1,84% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp95.260.458.573,03. Adapun mutasi Aset Tidak Produktif tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.148
Mutasi Aset Tidak Produktif

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	95.260.458.573,03
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	327.481.488,05
- Mutasi Antar KIB	40.896.900,00
Jumlah Mutasi Tambah	368.378.388,05
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan (sudah ada SK)	(1.956.737.063,70)
- Reklas ke Aset Tetap	(161.500.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(2.118.237.063,70)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	93.510.599.897,38

Mutasi tambah Aset Tidak Produktif pada tahun 2022 sebesar Rp368.378.388,05 terdiri dari:

- Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp327.481.488,05.

Tabel 5.149
Mutasi Tambah Aset Tidak Produktif

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cigedug	158.698.300,00
2	Kecamatan Pameungpeuk	69.494.132,00
3	Kecamatan Pasirwangi	99.289.056,05
	Jumlah	327.481.488,05

b. Mutasi Antar KIB sebesar Rp40.896.900,00.

Mutasi kurang Aset Tidak Produktif pada tahun 2022 sebesar (Rp2.118.237.063,70) terdiri dari:

a. Penghapusan (sudah ada SK) sebesar (Rp1.956.737.063,70).

Tabel 5.150
Penghapusan Aset Tidak Produktif

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	(2.972.470,00)
2	Dinas Pemadam Kebakaran	(7.225.805,70)
3	Dinas Ketahanan Pangan	(45.000.000,00)
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(868.753.000,00)
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(107.100.000,00)
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(917.795.788,00)
7	Badan Kepegawaian dan Diklat	(7.890.000,00)
	Jumlah	(1.956.737.063,70)

b. Reklas ke Aset Tetap sebesar (Rp161.500.000,00).

5.3.8.6.4 Aset Lain-lain - Tanah	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	103.032.000,00	1.974.237.000,00

Aset Lain-Lain - Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp103.032.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp1.871.205.000,00) atau 94,78% dibandingkan dengan Aset Lain-Lain - Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.974.237.000,00. Adapun Rekap Mutasi Aset Lain-Lain - Tanah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.151
Aset Lain-lain - Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	1.974.237.000,00
Mutasi Tambah:	
-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Persediaan	(1.871.205.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(1.871.205.000,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	103.032.000,00

Mutasi kurang Aset Lain-Lain Tanah pada tahun 2022 sebesar (Rp1.871.205.000,00) yaitu reklas ke Persediaan sebesar (Rp1.871.205.000,00) yang merupakan Aset Tanah yang akan di hibahkan.

Tabel 5.152
Mutasi Kurang - Reklas ke Persediaan
Aset Lain-lain - Tanah

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.693.491.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.714.000,00
	Jumlah	1.871.205.000,00

5.3.8.6.5 Aset Lain-lain - Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	5.668.224.153,10	34.282.881.541,79

Jumlah Aset Lain-Lain - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.668.224.153,10 atau mengalami penurunan sebesar (Rp28.614.657.388,69) atau 83,47% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.282.881.541,79. Adapun mutasi Aset Lain-Lain - Peralatan dan Mesin tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.153
Aset Lain-Lain - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	34.282.881.541,79
Mutasi Tambah:	-
- Reklas dari Aset Tetap	143.507.016,00
- Mutasi Bertambah Dari SKPD Lain	149.998.065,00
Jumlah Mutasi Tambah	293.505.081,00
Mutasi Kurang:	
- Mutasi Berkurang Ke SKPD Lain	(149.998.065,00)
- Mutasi Antar KIB	(40.896.900,00)
- Penghapusan (Sudah ada SK)	(501.179.937,20)
- Reklas ke Persediaan	(28.216.087.567,49)
Jumlah Mutasi Kurang	(28.908.162.469,69)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.668.224.153,10

Mutasi tambah Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp293.505.081,00 terdiri dari:

- Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp143.507.016,00. Merupakan aset kendaraan yang hilang dan sedang proses Tuntutan Ganti Rugi.

Tabel 5.154
Rekap Mutasi Tambah - Reklas dari Aset Tetap
Aset Lain-lain - Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pemadam Kebakaran	31.850.000,00
2	Dinas Pertanian	76.846.166,00
3	Kecamatan Sukawening	34.810.850,00
	Jumlah	143.507.016,00

- Mutasi tambah dari SKPD Lain sebesar Rp149.998.065,00.

Mutasi kurang Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar (Rp28.908.162.469,69) terdiri dari:

- Mutasi kurang ke SKPD Lain sebesar (Rp149.998.065,00).
- Mutasi antar KIB sebesar (Rp40.896.900,00).
- Penghapusan (sudah ada SK) sebesar (Rp501.179.937,20).



d. Reklas ke Persediaan sebesar (Rp28.216.087.567,49).

Tabel 5.155
Mutasi Kurang - Reklas ke Persediaan
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	19.987.744.455,49
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.563.246.012,00
3	Dinas Pertanian	665.097.100,00
	Jumlah	28.216.087.567,49

Tabel 5.156
Rekap Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	29.172.033,16
2	Dinas Pemadam Kebakaran	58.245.507,00
3	Dinas Sosial	50.000.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	123.772.500,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	23.050.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	97.900.000,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.257.272,70
8	Dinas Perhubungan	271.181.871,72
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	63.448.000,00
10	Dinas Perikanan dan Peternakan	657.443.050,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.250.000,00
12	Dinas Pertanian	101.796.166,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	39.197.500,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	141.289.337,52
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.000.752.000,00
16	Badan Pendapatan Daerah	83.258.000,00
17	Sekretariat Daerah	179.998.065,00
18	Sekretariat DPRD	478.305.000,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.873.503.300,00
20	Kecamatan Banyuwesmi	20.875.000,00
21	Kecamatan Balubur Limbangan	20.000.000,00
22	Kecamatan Cibiuk	33.200.000,00
23	Kecamatan Cilawu	16.875.000,00
24	Kecamatan Kadungora	19.422.000,00
25	Kecamatan Kersamanah	34.810.850,00
26	Kecamatan Leles	11.500.000,00
27	Kecamatan Mekarmukti	23.950.000,00
28	Kecamatan Pakenjeng	34.710.850,00
29	Kecamatan Peundeuy	7.250.000,00
30	Kecamatan Sukawening	34.810.850,00
	Jumlah	5.668.224.153,10

5.3.8.6.6 Aset Lain-Lain - Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

22.661.313.443,00

48.237.341.894,00

Aset Lain-Lain - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.661.313.443,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp25.576.028.451) atau 53,02%



dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp48.237.341.894,00. Adapun mutasi Aset Lain-lain - Gedung dan Bangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157
Aset Lain-Lain - Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	48.237.341.894,00
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	2.986.594.820,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.986.594.820,00
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Persediaan	(28.562.623.271,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(28.562.623.271,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	22.661.313.443,00

Mutasi tambah Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp2.986.594.820,00 merupakan aset Gedung dan Bangunan yang sedang diproses izin bongkar terdiri dari:

- a. Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp2.986.594.820,00.

Tabel 5.158
Mutasi Tambah
Aset Lain-Lain - Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cikelet	401.973.200,00
2	Kecamatan Cisompet	523.822.000,00
3	Kecamatan Cisurupan	998.784.200,00
4	Kecamatan Karangpawitan	35.000.000,00
5	Kecamatan Malangbong	1.027.015.420,00
	Jumlah	2.986.594.820,00

Mutasi kurang Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar (Rp28.562.623.271,00) merupakan aset yang akan dihibahkan kepada masyarakat terdiri dari:

- a. Reklas ke Persediaan sebesar (Rp28.562.623.271,00) merupakan aset Gedung dan Bangunan yang akan di hibahkan.

Tabel 5.159
Mutasi Kurang
Aset Lain-Lain - Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	(1.540.180.000,00)
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(26.279.377.271,00)
3	Dinas Perikanan dan Peternakan	(743.066.000,00)
	Jumlah	(28.562.623.271,00)

Tabel 5.160
Rekap Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	93.759.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.909.280.125,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.340.392.000,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	899.191.534,00



No	SKPD	Nilai
5	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1.846.392.500,00
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	1.344.256.700,00
7	Dinas Pertanian	753.933.543,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	298.967.000,00
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	213.817.379,00
10	Kecamatan Banyuresmi	799.632.200,00
11	Kecamatan Bayongbong	179.287.100,00
12	Kecamatan Caringin	492.542.300,00
13	Kecamatan Cihurip	593.843.500,00
14	Kecamatan Cikelet	401.973.200,00
15	Kecamatan Cisompet	523.822.000,00
16	Kecamatan Cisurupan	998.784.200,00
17	Kecamatan Kadungora	104.313.962,00
18	Kecamatan Karangpawitan	1.175.213.974,00
19	Kecamatan Leles	505.276.000,00
20	Kecamatan Malangbong	1.027.015.420,00
21	Kecamatan Tarogong Kaler	1.159.619.806,00
	Jumlah	22.661.313.443,00

5.3.8.6.7 Aset Lain-lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	11.811.696.290,00	212.788.239.908,00

Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.811.696.290,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp200.976.543.618,00) atau 94,45% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp.212.788.239.908,00. Adapun mutasi Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.161
Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan

		(dalam rupiah)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021		212.788.239.908,00
Mutasi Tambah:		
	- Hibah	9.785.181.467,00
Jumlah Mutasi Tambah		9.785.181.467,00
Mutasi Kurang:		
	- Reklas ke Persediaan	(210.761.725.085,00)
Jumlah Mutasi Kurang		(210.761.725.085,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022		11.811.696.290,00

Mutasi tambah Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar Rp9.785.181.467,00 terdiri dari:

- Hibah sebesar Rp9.785.181.467,00 merupakan jaringan distribusi kapasitas besar yang akan dilakukan Penyertaan Modal PDAM.

Tabel 5.162
Hibah Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan

		(dalam rupiah)
No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.785.181.467,00



Mutasi kurang Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar (Rp210.761.725.085,00) terdiri dari:

- Reklas ke Persediaan sebesar (Rp210.761.725.085,00) merupakan Jaringan Rumah Tangga yang akan dihibahkan kepada masyarakat.

Tabel 5.163
Mutasi Kurang - Reklas ke Persediaan
Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(201.546.327.211,00)
2	Dinas Perumahan dan Permukiman	(497.145.500,00)
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.236.507.374,00)
4	Dinas Perikanan dan Peternakan	(177.665.000,00)
5	Dinas Pertanian	(304.080.000,00)
	Jumlah	(210.761.725.085,00)

Tabel 5.164
Rekap Aset Lain-Lain - Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.628.013.257,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.182.828.033,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	855.000,00
	Jumlah	11.811.696.290,00

5.3.8.6.8 Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	431.278.087,00	4.143.840.460,56

Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp431.278.087,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp3.712.562.373,56) atau 89,59% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.143.840.460,56. Adapun mutasi Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.165
Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	4.143.840.460,56
Mutasi Tambah:	
-	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Penghapusan (Sudah ada SK)	(321.388.601,32)
- Reklas ke Persediaan	(3.391.173.772,24)
Jumlah Mutasi Kurang	(3.712.562.373,56)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	431.278.087,00

Mutasi kurang Aset Lain-Lain Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 sebesar (Rp321.388.601,32) terdiri dari:

- Penghapusan (sudah ada SK) sebesar (Rp321.388.601,32).
- Reklas ke Persediaan sebesar (Rp3.391.173.772,24) merupakan aset tetap lainnya yang akan di hibahkan.

Tabel 5.166
Mutasi Kurang
Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(321.388.601,32)

Tabel 5.167
Mutasi Kurang Reklas ke Persediaan
Aset Lain-Lain - Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(95.939.223,24)
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	(3.255.985.549,00)
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, ESDM	(39.249.000,00)
	Jumlah	(3.391.173.772,24)

Tabel 5.168
Rekap Aset Lain-lain - Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	87.497.000,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	342.581.087,00
3	Sekretariat DPRD	1.200.000,00
	Jumlah	431.278.087,00

**5.3.8.6.9 Aset Lain-Lain -
Konstruksi dalam
Pengerjaan**

**31 Desember 2022
(Rp)****31 Desember 2021
(Rp)****0,00****255.914.000,00**

Aset Lain-Lain - Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar (Rp255.914.000,00) atau (100%) dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp255.914.000,00. Adapun mutasi Aset Lain-Lain - Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.169
Aset Lain-Lain - Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	255.914.000,00
Mutasi Tambah:	
-	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Aset Tetap	(255.914.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(255.914.000,00)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	-

Mutasi kurang Aset Lain-Lain Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2022 sebesar (Rp255.914.000,00) terdiri dari:

- Reklas ke Aset Tetap sebesar (Rp255.914.000,00).



5.3.8.6.10 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	(79.013.332.251,93)	(88.844.726.460,15)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang direklas ke Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp79.013.332.251,93) mengalami kenaikan sebesar Rp9.831.394.208,22 atau 11,07% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp88.844.726.460,15). Adapun mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.170
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Produktif

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(88.844.726.460,15)
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	(1.724.137.916,88)
- Mutasi Antar KIB	(40.896.900,00)
- Mutasi Bertambah dari SKPD Lain	(149.998.065,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.915.032.881,88)
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Aset Tetap	161.500.000,00
- Penghapusan (sudah ada SK)	1.503.182.208,84
- Mutasi Berkurang dari SKPD Lain	149.998.065,00
- Reklas ke Persediaan	9.890.849.916,26
- Mutasi Antar KIB	40.896.900,00
Jumlah Mutasi Kurang	11.746.427.090,10
Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(79.013.332.251,93)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Produktif pada tahun 2022 sebesar (Rp1.915.032.881,88) terdiri dari:

- a. Reklas dari Aset Tetap sebesar (Rp315.654.782,87);

Tabel 5.171
Mutasi Tambah - Reklas dari Aset Tetap
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Produktif

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cigedug	(147.780.778,48)
2	Kecamatan Pameungpeuk	(69.191.070,78)
3	Kecamatan Pasirwangi	(98.682.933,61)
	Jumlah	(315.654.782,87)

- b. Mutasi antar KIB sebesar (Rp40.896.900,00).
c. Mutasi Bertambah dari SKPD Lain sebesar (Rp149.998.065,00).

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Produktif pada tahun 2022 sebesar Rp11.746.427.090,10 terdiri dari:

- a. Reklas ke Aset Tetap sebesar Rp161.500.000,00;
b. Penghapusan (sudah ada SK) sebesar Rp1.076.569.074,49.

Tabel 5.172
Mutasi Kurang - Penghapusan
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Kesehatan	2.264.470,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	7.225.805,70
3	Dinas Ketahanan Pangan	38.528.506,94
4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	842.529.570,00
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	107.100.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	71.030.721,85
7	Badan Kepegawaian dan Diklat	7.890.000,00
	Jumlah	1.076.569.074,49



- c. Mutasi Berkurang ke SKPD Lain sebesar Rp149.998.065,00.
- d. Reklas ke Persediaan sebesar Rp9.890.849.916,26.
- e. Mutasi antar KIB Rp40.896.900,00.

Tabel 5.173
Mutasi Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(13.129.395.216,86)
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	(103.510.506,00)
- Mutasi Bertambah dari SKPD Lain	(149.998.065,00)
Jumlah Mutasi Tambah	(253.508.571,00)
Mutasi Kurang:	
- Mutasi Berkurang Ke SKPD Lain	149.998.065,00
- Penghapusan (sudah ada SK)	426.613.134,35
- Mutasi Antar KIB	40.896.900,00
Reklas ke Persediaan	9.347.849.872,91
Jumlah Mutasi Kurang	9.965.357.972,26
Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(3.417.545.815,60)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar (Rp253.508.571,00) terdiri dari:

- a. Reklas dari Aset Tetap sebesar (Rp103.510.506,00).

Tabel 5.174
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan - Reklas dari Aset Tetap
Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pemadam Kebakaran	(12.740.000,00)
2	Dinas Pertanian	(76.846.166,00)
3	Kecamatan Sukawening	(13.924.340,00)
	Jumlah	(103.510.506,00)

- b. Mutasi Bertambah dari SKPD Lain sebesar (Rp149.998.065,00).

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 sebesar Rp9.965.357.972,26 terdiri dari:

- a. Mutasi Berkurang ke SKPD Lain sebesar Rp149.998.065,00;
- b. Penghapusan (sudah ada SK) sebesar Rp426.613.134,35;

Tabel 5.175
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan - Penghapusan
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	426.613.134,35

- c. Mutasi antar KIB sebesar Rp40.896.900,00;
- d. Reklas ke Persediaan sebesar Rp9.347.849.872,91.

Tabel 5.176
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan - Reklas ke Persediaan
Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	1.586.922.349,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.563.246.012,00
3	Dinas Pertanian	197.681.511,91
	Jumlah	9.347.849.872,91



Tabel 5.177
Mutasi Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(3.712.005.288,82)
Mutasi Tambah:	
- Reklas dari Aset Tetap	(1.304.972.628,01)
Jumlah Mutasi Tambah	(1.304.972.628,01)
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Persediaan	211.301.360,00
Jumlah Mutasi Kurang	211.301.360,00
Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(4.805.676.556,83)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar (Rp1.304.972.628,01) terdiri dari:

- Reklas dari Aset Tetap sebesar (Rp1.304.972.628,01).

Tabel 5.178
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan - Reklas dari Aset Tetap
Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Kecamatan Cikelet	(283.500.575,00)
2	Kecamatan Cisompet	(299.609.617,04)
3	Kecamatan Cisurupan	(415.909.960,29)
4	Kecamatan Malangbong	(305.952.475,68)
	Jumlah	(1.304.972.628,01)

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp221.301.360,00 terdiri dari:

- Reklas ke Persediaan sebesar Rp211.301.360,00.

Tabel 5.179
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan - Reklas Ke Persediaan
Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	92.410.800,00
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	118.890.560,00
	Jumlah	211.301.360,00

Tabel 5.180
Mutasi Akumulasi Penyusutan
Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(1.259.903.434,81)
Mutasi Tambah:	
-	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
- Reklas ke Persediaan	331.698.683,35
Jumlah Mutasi Kurang	331.698.683,35
Saldo Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	(928.204.751,46)

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2022 sebesar Rp331.698.683,35 terdiri dari:

- Reklas ke Persediaan sebesar Rp331.698.683,35.



Tabel 5.181
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan - Reklas Ke Persediaan
Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	16.571.516,67
2	Dinas Perikanan dan Peternakan	41.455.166,68
3	Dinas Pertanian	273.672.000,00
	Jumlah	331.698.683,35

Nilai Aset Lain-lain untuk setiap SKPD disajikan pada Lampiran 5.3.8.5.

5.3.9. Kewajiban

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
13.460.929.634,34	62.278.155.078,56

Jumlah kewajiban merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh SKPD pada Pemerintah Kabupaten Garut. Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.460.929.634,34 atau mengalami penurunan sebesar (Rp48.817.225.444,22) atau (78,39)% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Penurunan kewajiban karena pada Tahun Anggaran 2022 tidak ada utang pegawai. Rincian kewajiban sebagai berikut

Tabel 5.182
Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	60.135.484,00	171.633.101,00
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	2.409.880.371,34	1.660.584.342,01
3.	Utang Belanja	10.868.397.704,00	59.911.711.173,55
4.	Utang Kepada Pihak Ketiga	122.516.075,00	534.226.462,00
	Jumlah	13.460.929.634,34	62.278.155.078,56

5.3.9.1 Utang Perhitungan pada Pihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
60.135.484,00	171.633.101,00

Utang perhitungan pada pihak ketiga merupakan utang atas pembayaran pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Utang PFK per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp60.135.484,00 yang merupakan pajak yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2022 di beberapa sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp55.323.737,00, Kecamatan Balubur Limbangan sebesar Rp1.511.700,00 dan Kecamatan Peundeuy sebesar Rp3.300.047,00.

5.3.9.2 Pendapatan Diterima Dimuka

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
2.409.880.371,34	1.660.584.342,01

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.409.880.371,34 atau mengalami kenaikan sebesar Rp749.296.029,33 atau 45,12% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Daerah tetapi sampai dengan tanggal neraca masih terdapat jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Dalam hal ini pendapatan Diterima Dimuka terdiri atas Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah dan Pendapatan dari



Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah kepada PT. Daya Mitra telekomunikasi Melalui Tata Cara Sewa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: 028/PSM.87/BPKAD/2022. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 5.183
Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	297.699.890,47	-
2.	Badan Pendapatan Daerah	2.112.180.480,87	1.660.584.342,01
	Jumlah	2.409.880.371,34	1.660.584.342,01

5.3.9.3 Utang Belanja

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
10.868.397.704,00	59.911.711.173,55

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp10.868.397.704,00 mengalami penurunan sebesar (Rp49.043.313.469,55) atau (81,86%) dibandingkan jumlah per 31 Desember 2021. Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 merupakan sisa utang belanja barang jasa dan belanja modal yang belum dibayarkan. Penurunan utang belanja karena pada tahun anggaran 2022 tidak terdapat Utang Belanja pegawai. Rincian utang belanja dimuat dalam lampiran 5.3.9.3.

5.3.9.4 Utang pada Pihak Ketiga

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
122.516.075,00	534.226.462,00

Jumlah tersebut merupakan sisa Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp122.516.075,00 mengalami penurunan sebesar (Rp411.710.387,00) atau (77,07%) dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Utang pada Pihak Ketiga merupakan utang pasien Puskesmas kepada RS Hasan Sadikin sebesar Rp122.516.075,00 yang tercatat pada Dinas Kesehatan.

5.3.10 Ekuitas

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
4.400.881.504.667,81	4.758.976.910.998,07

Ekuitas adalah nilai selisih antara nilai Aset dengan jumlah nilai Kewajiban. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.400.881.504.667,81 atau mengalami penurunan sebesar (Rp358.095.406.330,26) atau 7,52% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021.



5.4. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.4.1. Pendapatan Daerah - LO

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	4.249.648.820.830,89	4.777.371.588.640,34

Pendapatan - LO tahun 2022 sebesar Rp4.249.648.820.830,89. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp527.722.767.809,45) atau (11,05%) dibandingkan dengan Pendapatan - LO Tahun 2021. Penurunan terbesar pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, hal ini disebabkan pada tahun 2022 pendapatan BOS dicatat sebagai pendapatan Dana Alokasi Khusus yang sebelumnya dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan - LO tersebut terdiri dari:

Tabel 5.184
Pendapatan Daerah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	494.568.545.972,94	570.567.124.140,84	(75.998.578.167,90)	(13,32)
2.	Pendapatan Transfer	3.588.137.541.561,00	3.792.266.227.790,00	(204.128.686.229,00)	(5,38)
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	166.942.733.296,95	414.538.236.709,50	(247.595.503.412,55)	(59,73)
	Jumlah	4.249.648.820.830,89	4.777.371.588.640,34	(527.722.767.809,45)	(11,05)

Adapun rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	494.568.545.972,94	570.567.124.140,84

Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp494.568.545.972,94 mengalami penurunan sebesar (Rp75.998.578.167,90) atau (13,32%) dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2021. Rincian jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.185
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pajak Daerah	163.017.224.345,14	130.776.859.932,67	32.240.364.412,47	24,65
2.	Retribusi Daerah	17.318.873.075,00	17.198.007.950,00	120.865.125,00	0,70
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.114.725.807,89	6.455.066.625,00	1.659.659.182,89	25,71
4.	Lain-lain PAD yang Sah	306.117.722.744,91	416.137.189.633,17	(110.019.466.888,26)	(26,44)
	Jumlah	494.568.545.972,94	570.567.124.140,84	(75.998.578.167,90)	(13,32)

Adapun rincian untuk masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
	163.017.224.345,14	130.776.859.932,67



Pendapatan Pajak Daerah - LO untuk tahun 2022 sebesar Rp163.017.224.345,14 dimana nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp32.240.364.412,47 atau 24,65% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO sebagai berikut:

Tabel 5.186
Pendapatan Pajak Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pajak Hotel	9.948.490.522,00	6.250.015.302,00	3.698.475.220,00	59,18
2.	Pajak Restoran	23.135.688.585,00	14.661.729.141,00	8.473.959.444,00	57,80
3.	Pajak Hiburan	5.477.050.852,00	1.522.728.014,00	3.954.322.838,00	259,69
4.	Pajak Reklame	4.933.063.244,14	5.141.014.357,67	(207.951.113,53)	(4,04)
5.	Pajak Penerangan Jalan	36.570.637.861,00	30.088.678.327,00	6.481.959.534,00	21,54
6.	Pajak Parkir	585.197.895,00	332.435.303,00	252.762.592,00	76,03
7.	Pajak Air Tanah	607.615.013,00	472.691.095,00	134.923.918,00	28,54
8.	Pajak Sarang Burung Walet	19.900.000,00	11.150.000,00	8.750.000,00	78,48
9.	Mineral bukan Logam dan Lainnya	1.662.603.548,00	1.361.570.848,00	301.032.700,00	22,11
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	49.963.867.375,00	46.174.944.111,00	3.788.923.264,00	8,21
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.113.109.450,00	24.759.903.434,00	5.353.206.016,00	21,62
	Jumlah	163.017.224.345,14	130.776.859.932,67	32.240.364.412,47	24,65

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
17.318.873.075,00	17.198.007.950,00

Pendapatan Retribusi Daerah - LO untuk tahun 2022 sebesar Rp17.318.873.075,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.865.125,00 atau 0,70% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebagai berikut:

Tabel 5.187
Pendapatan Retribusi Daerah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Retribusi Jasa Umum	5.776.532.270,00	5.656.964.790,00	119.567.480,00	2,11
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.202.888.005,00	2.065.887.160,00	2.137.000.845,00	103,44
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	7.339.452.800,00	9.475.156.000,00	(2.135.703.200,00)	(22,54)
	Jumlah	17.318.873.075,00	17.198.007.950,00	120.865.125,00	0,70

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp17.318.873.075,00 mengalami kenaikan sebesar Rp120.865.125,00 atau 0,70% dibandingkan tahun 2021.

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Hasil Retribusi Jasa Umum - LO untuk tahun 2022 sebesar Rp5.776.532.270,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.567.480,00 atau 2,11% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO sebagai berikut:

Tabel 5.188
Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan - LO		Naik (Turun)	%
		Tahun 2022	Tahun 2021		
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1.097.166.800,00	984.731.000,00	112.435.800,00	11,42
2.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	9.810.000,00	8.060.000,00	1.750.000,00	21,71
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	542.084.000,00	526.982.000,00	15.102.000,00	2,87
4.	Retribusi Pelayanan Pasar	1.507.440.000,00	1.454.518.000,00	52.922.000,00	3,64
5.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.156.869.600,00	1.229.833.600,00	(72.964.000,00)	(5,93)
6.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	15.856.050,00	16.336.950,00	(480.900,00)	(2,94)
7.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	55.000.000,00	48.965.000,00	6.035.000,00	12,33
8.	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kaku	13.870.000,00	12.600.000,00	1.270.000,00	10,08
9.	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	31.029.500,00	28.000.000,00	3.029.500,00	100,00
10.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.347.406.320,00	1.346.938.240,00	468.080,00	0,03
	Jumlah	5.776.532.270,00	5.656.964.790,00	119.567.480,00	2,11

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO Tahun 2022 sebesar Rp4.202.888.005,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.137.000.845,00 atau 103,44% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO sebagai berikut:

Tabel 5.189
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	163.917.000,00	156.725.000,00	7.192.000,00	4,59
2.	Retribusi Terminal	244.573.200,00	210.706.160,00	33.867.040,00	16,07
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	934.842.000,00	679.105.000,00	255.737.000,00	37,66
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.628.000,00	44.944.000,00	5.684.000,00	12,65
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.435.075.005,00	637.079.000,00	1.797.996.005,00	282,22
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	373.852.800,00	337.328.000,00	36.524.800,00	10,83
	Jumlah	4.202.888.005,00	2.065.887.160,00	2.137.000.845,00	103,44

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO

Pendapatan Hasil Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO Tahun 2022 sebesar Rp7.339.452.800,00 mengalami penurunan sebesar (Rp2.135.703.200,00) atau (22,54%) dibandingkan tahun 2021. Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.190
Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.208.864.000,00	9.072.053.000,00	(1.863.189.000,00)	(20,54)
2.	Retribusi Izin Trayek	130.588.800,00	102.006.000,00	28.582.800,00	28,02
3.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
4.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	300.297.000,00	(300.297.000,00)	(100,00)
	Jumlah	7.339.452.800,00	9.475.156.000,00	(2.135.703.200,00)	(22,54)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
8.114.725.807,89	6.455.066.625,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tahun 2022 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD dan Bank BJB sebesar Rp8.114.725.807,89 mengalami kenaikan sebesar Rp1.659.659.182,89 atau 25,71% dibandingkan dengan tahun 2021. Kenaikan terbesar dari pendapatan laba Perumda BPR Garut. Rincian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO sebagai berikut:

Tabel 5.191
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Bagian Laba dari Perumda BPR Garut	4.899.251.605,85	3.221.633.222,00	1.661.545.262,89	51,57
2.	Bagian Laba dari PT BPR Intan JABAR	-	569.015.150,00	(569.015.150,00)	(100,00)
3.	Bagian Laba dari PT LKM Garut	163.407.322,03	140.070.586,00	39.409.857,00	28,14
4.	Bagian Laba dari Bank BJB	3.052.066.880,00	2.524.347.667,00	527.719.213,00	20,91
	Jumlah	8.114.725.807,89	6.455.066.625,00	1.659.659.182,89	25,71

5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
306.117.722.744,91	416.137.189.633,17

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2022 sebesar Rp306.117.722.744,91 mengalami penurunan sebesar (Rp110.019.466.888,26) atau (26,44%) dibandingkan tahun 2021. Penurunan terbesar pada Pendapatan BLUD dan Pendapatan Bunga. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.192
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	637.557.406,00	593.936.000,00	43.621.406,00	7,34
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.603.197.622,53	1.390.894.582,00	212.303.040,53	15,26
3.	Jasa Giro	8.608.025.677,00	6.895.379.907,00	1.712.645.770,00	24,84



No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
4.	Pendapatan Bunga	734.496.430,06	11.866.829.227,00	(11.132.332.796,94)	(93,81)
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.827.467.044,00	4.774.030.585,00	(1.946.563.541,00)	(40,77)
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.045.467.595,22	157.426.636,56	888.040.958,66	564,10
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	19.512.259,00	13.267.956,00	6.244.303,00	100,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	128.134.678,00	172.889.367,00	(44.754.689,00)	(25,89)
9.	Pendapatan BLUD	290.513.864.033,10	390.272.535.372,61	(99.758.671.339,51)	(25,56)
	Jumlah	306.117.722.744,91	416.137.189.633,17	(110.019.466.888,26)	(26,44)

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3.588.137.541.561,00	3.792.266.227.790,00

Pendapatan Transfer - LO tahun 2022 sebesar Rp3.588.137.541.561,00 mengalami penurunan sebesar (Rp204.128.686.229,00) atau (5,38%) dibandingkan dengan nilai pendapatan transfer tahun 2021. Pendapatan Transfer - LO merupakan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.193
Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.905.335.236.303,00	2.712.886.380.851,00	192.448.855.452,00	7,09
2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	12.124.874.000,00	549.086.677.200,00	(536.961.803.200,00)	(97,79)
3.	Pendapatan Transfer dari Provinsi	670.677.431.258,00	530.293.169.739,00	140.384.261.519,00	26,47
	Jumlah	3.588.137.541.561,00	3.792.266.227.790,00	(204.128.686.229,00)	(5,38)

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2.905.335.236.303,00	2.712.886.380.851,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO tahun 2022 sebesar Rp2.905.335.236.303,00 mengalami kenaikan sebesar Rp192.448.855.452,00 atau 7,09% dibandingkan tahun 2021. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebagai berikut:

Tabel 5.194
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan-LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Bagi Hasil Pajak	142.589.332.837,00	139.697.220.120,00	2.892.112.717,00	2,07
2.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	141.336.781.125,00	248.139.310.049,00	(106.802.528.924,00)	(43,04)
3.	Dana Alokasi Umum	1.657.145.048.168,00	1.665.908.667.000,00	(8.763.618.832,00)	(0,53)



No.	Uraian	Pendapatan-LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
4.	Dana Alokasi Khusus	964.264.074.173,00	659.141.183.682,00	305.122.890.491,00	46,29
	Jumlah	2.905.335.236.303,00	2.712.886.380.851,00	192.448.855.452,00	7,09

5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak - LO tahun 2022 sebesar Rp142.589.332.837,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.892.112.717,00 atau 2,07% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.195
Dana Bagi Hasil Pajak - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	72.505.626.954,00	67.221.784.907,00	5.283.842.047,00	7,86
2.	DBH PPh Pasal 21	38.451.592.093,00	41.677.631.587,00	(3.226.039.494,00)	(7,74)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 /WPOPND	4.223.795.434,00	3.803.975.668,00	419.819.766,00	11,04
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.408.318.356,00	26.993.827.958,00	414.490.398,00	1,54
	Jumlah	142.589.332.837,00	139.697.220.120,00	2.892.112.717,00	2,07

5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO

Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO tahun 2022 sebesar Rp141.336.781.125,00 mengalami penurunan sebesar (Rp106.802.528.924,00) atau (43,04%) dibandingkan dengan Tahun 2021. Rincian Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Tabel 5.196
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	6.965.809.916,00	3.490.313.900,00	3.475.496.016,00	99,58
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	6.236.984.395,00	192.486.100,00	6.044.498.295,00	3.140,23
3.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	123.989.136.716,00	241.756.296.688,00	(117.767.159.972,00)	(48,71)
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	476.501.175,00	371.185.800,00	105.315.375,00	28,37
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Royalty	1.320.982.290,00	776.151.068,00	544.831.222,00	100,00
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	177.302.422,00	195.257.343,00	(17.954.921,00)	(9,20)
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.170.064.211,00	1.357.619.150,00	812.445.061,00	59,84
	Jumlah	141.336.781.125,00	248.139.310.049,00	(106.802.528.924,00)	(43,04)

5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum - LO

Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO tahun 2022 sebesar Rp1.657.145.048.168,00 mengalami penurunan sebesar (Rp8.763.618.832,00) atau (0,53%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp1.665.908.667.000,00. Rincian Dana Alokasi Umum sebagai berikut:



Tabel 5.197
Dana Alokasi Umum - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Dana Alokasi Umum	1.657.145.048.168,00	1.665.908.667.000,00	(8.763.618.832,00)	(0,53)
	Jumlah	1.657.145.048.168,00	1.665.908.667.000,00	(8.763.618.832,00)	(0,53)

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus - LO

Pendapatan Dana Alokasi Khusus - LO tahun 2022 sebesar Rp964.264.074.173,00 mengalami kenaikan sebesar Rp305.122.890.491,00 atau 46,29% dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

Tabel 5.198
Dana Alokasi Khusus - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan – LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Dana Alokasi Khusus Reguler	79.149.439.032,00	61.072.408.305,00	18.077.030.727,00	29,60
2.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	34.395.553.461,00	74.517.464.828,00	(40.121.911.367,00)	(53,84)
3.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	850.719.081.680,00	523.551.310.549,00	327.167.771.131,00	62,49
	Jumlah	964.264.074.173,00	659.141.183.682,00	305.122.890.491,00	46,29

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
12.124.874.000,00	549.086.677.200,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO tahun 2022 sebesar Rp12.124.874.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp536.961.803.200,00) atau (97,79%) dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.199
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Dana Insentif Daerah	12.124.874.000,00	43.042.894.000,00	(30.918.020.000,00)	(71,83)
2.	Dana Desa	-	506.043.783.200,00	(506.043.783.200,00)	(100,00)
	Jumlah	12.124.874.000,00	549.086.677.200,00	(536.961.803.200,00)	(97,79)

5.4.1.2.2.1 Dana Insentif Daerah (DID) - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
12.124.874.000,00	43.042.894.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah - LO tahun 2022 sebesar Rp12.124.874.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp30.918.020.000,00) atau (71,83%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp43.042.894.000,00.

5.4.1.2.2.2 Dana Desa - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
0,00	506.043.783.200,00



Pendapatan Dana Desa - LO tahun 2022 sebesar Rp0,00 karena tidak tercatat lagi di LO sehingga mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp506.043.783.200,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp506.043.783.200,00.

5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
670.677.431.258,00	530.293.169.739,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tahun 2022 sebesar Rp670.677.431.258,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.384.261.519,00 atau 26,47% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp530.293.169.739,00. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.200
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	272.244.336.521,00	224.159.101.015,00	48.085.235.506,00	21,45
2.	Bantuan Keuangan	398.433.094.737,00	306.134.068.724,00	92.299.026.013,00	30,15
	Jumlah	670.677.431.258,00	530.293.169.739,00	140.384.261.519,00	26,47

5.4.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO tahun 2022 sebesar Rp272.244.336.521,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.085.235.506,00 atau 21,45% dibandingkan dengan Tahun 2021 yang berjumlah Rp224.159.101.015,00. dengan rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.201
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.238.380.195,00	40.397.234.025,00	4.841.146.170,00	11,98
2.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30.305.804.780,00	28.684.202.940,00	1.621.601.840,00	5,65
3.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	53.908.658.642,00	45.227.325.430,00	8.681.333.212,00	19,19
4.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	5.571.842.409,00	942.165.000,00	4.629.677.409,00	491,39
5.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	137.219.650.495,00	108.908.173.620,00	28.311.476.875,00	26,00
	Jumlah	272.244.336.521,00	224.159.101.015,00	48.085.235.506,00	21,45

5.4.1.2.3.2 Bantuan Keuangan - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
398.433.094.737,00	306.134.068.724,00

Bantuan Keuangan - LO tahun 2022 sebesar Rp398.433.094.737,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp92.299.026.013,00 atau 30,15% dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah Rp306.134.068.724,00.



Tabel 5.202
Pendapatan Bantuan Keuangan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Bantuan Keuangan	398.433.094.737,00	306.134.068.724,00	92.299.026.013,00	30,15
	Jumlah	398.433.094.737,00	306.134.068.724,00	92.299.026.013,00	30,15

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
166.942.733.296,95	414.538.236.709,50

Nilai Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2022 sebesar Rp166.942.733.296,95 mengalami penurunan sebesar (Rp247.595.503.412,55) atau (59,73%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp414.538.236.709,50. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.203
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan-LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Hibah	153.656.391.954,95	95.622.646.128,50	58.033.745.826,45	60,69
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.286.341.342,00	318.915.590.581,00	(305.629.249.239,00)	(95,83)
	Jumlah	166.942.733.296,95	414.538.236.709,50	(247.595.503.412,55)	(59,73)

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO tahun 2022 sebesar Rp153.656.391.954,95 mengalami kenaikan sebesar Rp58.033.745.826,45 atau 60,69% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp95.622.646.128,50. Rincian Pendapatan Hibah untuk tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.204
Pendapatan Hibah - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Hibah dari Pemerintah Pusat	46.365.278.610,00	20.133.542.423,00	26.231.736.187,00	130,29
2.	Pendapatan Hibah Kementrian	45.687.232.912,00	19.242.161.890,00	26.445.071.022,00	137,43
3.	Pendapatan Hibah dari Pemprov	39.594.055.041,95	47.776.376.000,50	(8.182.320.958,55)	(17,13)
4.	Pendapatan Hibah dari PNB	-	164.500.000,00	(164.500.000,00)	(100,00)
5.	Pendapatan Hibah dari Program CSR	22.009.825.391,00	8.306.065.815,00	13.703.759.576,00	164,98
	Jumlah	153.656.391.954,95	95.622.646.128,50	58.033.745.826,45	60,69

5.4.1.3.2 Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO tahun 2022 sebesar Rp13.286.341.342,00 mengalami penurunan sebesar (Rp305.629.249.239,00) atau (95,83%) dibandingkan dengan tahun 2021. Rincian Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 5.205
Lain - lain Pendapatan
sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Pendapatan Hibah Dana BOS	-	303.039.670.000,00	(303.039.670.000,00)	(100,00)
2.	Pendapatan Bonus Produksi	13.286.341.342,00	15.875.920.581,00	(2.589.579.239,00)	(16,31)
	Jumlah	13.286.341.342,00	318.915.590.581,00	(305.629.249.239,00)	(95,83)

5.4.2. Beban - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3.833.896.246.083,48	4.402.732.495.401,21

Beban - LO tahun 2022 sebesar Rp3.833.896.246.083,48 mengalami penurunan sebesar (Rp568.836.249.317,73) atau (12,92%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.402.732.495.401,21. Beban - LO meliputi Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206
Beban - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Beban Operasi	3.598.413.486.476,50	3.633.053.045.731,21	(34.639.559.254,71)	0,95
2.	Beban Transfer	223.731.878.216,00	769.679.449.670,00	(545.947.571.454,00)	(70,93)
3.	Beban Non Operasional	11.750.881.390,98	-	11.750.881.390,98	100,00
	Jumlah	3.833.896.246.083,48	4.402.732.495.401,21	(568.836.249.317,73)	(12,92)

5.4.2.1 Beban Operasi - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3.598.413.486.476,50	3.633.053.045.731,21

Beban Operasi - LO pada tahun 2022 sebesar Rp3.598.413.486.476,50. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp34.639.559.254,71) atau (0,95%) jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp3.633.053.045.731,21. Beban Operasi - LO meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.207
Beban Operasi – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Beban Pegawai	1.667.035.529.538,00	1.711.666.651.276,00	(44.631.121.738,00)	(2,61)
2.	Beban Persediaan	378.841.698.777,96	390.615.785.589,69	(11.774.086.811,73)	(3,01)
3.	Beban Jasa	592.501.383.197,91	630.265.732.554,73	(37.764.349.356,82)	(5,99)
4.	Beban Pemeliharaan	26.932.901.039,24	35.106.044.784,82	(8.173.143.745,58)	(23,28)
5.	Beban Perjalanan Dinas	109.293.093.762,00	92.130.011.585,00	17.163.082.177,00	18,63
6.	Beban Subsidi	951.000.000,00	-	951.000.000,00	100,00
7.	Beban Hibah	384.265.656.383,77	481.468.349.919,00	(97.202.693.535,23)	(20,19)



No.	Uraian	Beban - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
8.	Beban Bantuan Sosial	27.032.944.885,00	11.853.241.121,50	15.179.703.763,50	128,06
9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	363.329.438.328,52	230.131.478.553,44	133.197.959.775,08	57,88
10.	Beban Penyisihan Piutang	6.081.820.249,20	5.218.672.677,29	863.147.571,91	16,54
11.	Beban Lain-Lain	42.148.020.314,90	44.597.077.669,74	(2.449.057.354,84)	(5,49)
	Jumlah	3.598.413.486.476,50	3.633.053.045.731,21	(34.639.559.254,71)	(0,95)

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.667.035.529.538,00	1.711.666.651.276,00

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2022 sebesar Rp1.667.035.529.538,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp44.631.121.738,00) atau (2,61%) dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1.711.666.651.276,00. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.1

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
378.841.698.777,96	390.615.785.589,69

Jumlah Beban Persediaan pada tahun 2022 sebesar Rp378.841.698.777,96 mengalami penurunan sebesar (Rp11.774.086.811,73) atau (3,01%) dibandingkan Beban Persediaan tahun 2021 sebesar Rp390.615.785.589,69. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil hibah dari pemerintah pusat, badan usaha milik daerah, lembaga lainnya dan masyarakat secara langsung kepada satuan kerja perangkat daerah. Rincian Beban Persediaan disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.2

5.4.2.1.3 Beban Jasa

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
592.501.383.197,91	630.265.732.554,73

Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp592.501.383.197,91. Nilai Beban Jasa mengalami penurunan sebesar (Rp37.764.349.356,82) atau (5,99%) dibandingkan nilai Beban Jasa tahun 2021 sebesar Rp630.265.732.554,73. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan satuan kerja perangkat daerah. Rincian Beban Jasa disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.3

5.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
26.932.901.039,24	35.106.044.784,82

Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp26.932.901.039,24 mengalami penurunan sebesar (Rp8.173.143.745,58) atau (23,28%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp35.106.044.784,82. Rincian Beban Pemeliharaan disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.4

5.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
109.293.093.762,00	92.130.011.585,00



Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp109.293.093.762,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.163.082.177,00 atau 18,63% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp92.130.011.585,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.5

5.4.2.1.6 Beban Subsidi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
951.000.000,00	0,00

Beban Subsidi tahun 2022 sebesar Rp951.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp951.000.000,00 atau 100,00% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp0,00. Beban Subsidi merupakan kegiatan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus dengan menyalurkan paket sembako pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Energi Sumber Daya Alam Mineral.

5.4.2.1.7 Beban Hibah

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
384.265.656.383,77	481.468.349.919,00

Beban Hibah pada tahun 2022 sebesar Rp384.265.656.383,77 mengalami penurunan sebesar (Rp97.202.693.535,23) atau (20,19%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp481.468.349.919,00. Rincian Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.208
Beban Hibah - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	5.489.926.038,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	308.047.962.683,00
3	Hibah Dana BOS	63.434.633.707,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.176.397.500,00
5	Beban Hibah - Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan	176.643.789,47
6	Beban Hibah - Aset Tanah pada Dinas Perkim	176.970.000,00
7	Beban Hibah - Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemadam Kebakaran	2.409.617,30
8	Beban Hibah - Peralatan dan Mesin pada Dinas Lingkungan Hidup	15.000.000,00
9	Beban Hibah Tanah pada BPKAD	1.830.690.000,00
10	Beban Hibah Tanah pada Kecamatan Banyuresmi	787.366.000,00
11	Beban Hibah Tanah pada Kecamatan Cigedug	179.417.000,00
12	Beban Hibah Tanah pada Kecamatan Cilawu	590.400.000,00
13	Beban Hibah Tanah pada Kecamatan Sukawening	1.031.141.900,00
14	Utang Hibah tahun lalu pada PUPR	(673.301.851,00)
	Jumlah	384.265.656.383,77

5.4.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
27.032.944.885,00	11.853.241.121,50

Beban Bantuan Sosial tahun 2022 sebesar Rp27.032.944.885,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.179.703.763,50 atau 128,06% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp11.853.241.121,50. Rincian Beban Bantuan Sosial disajikan dalam Lampiran 5.4.2.1.8



5.4.2.1.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
363.329.438.328,52	230.131.478.553,44

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 sebesar Rp363.329.438.328,52 mengalami peningkatan sebesar Rp133.197.959.775,08 atau 57,88% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp230.131.478.553,44. Nilai tahun 2022 tersebut terdiri atas Beban Penyusutan sebesar Rp362.019.412.328,65 dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.310.025.999,87. Rincian Beban penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.209
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Beban Penyusutan	Beban Amortisasi
1	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	125.806.436.428,97	-
2	Aset Tetap - Gedung dan Bangunan	96.437.445.770,90	-
3	Aset Tetap - Jalan/Jembatan, Irigasi dan Jaringan	139.775.530.128,78	-
4	Aset Tak Berwujud	-	1.310.025.999,87
	Jumlah	362.019.412.328,65	1.310.025.999,87

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6.081.820.249,20	5.218.672.677,29

Jumlah Beban Penyisihan Piutang untuk tahun 2022 sebesar Rp6.081.820.249,20 mengalami kenaikan sebesar Rp863.147.571,91 atau 16,54% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp5.218.672.677,29. Beban Penyisihan terdiri atas Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp2.792.529.250,26, Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.017.513.336,54 dan Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp1.271.777.661,80. Rincian Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel 5.210
Beban Penyisihan Piutang - LO

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Penyisihan	Nilai
1	BLUD RSU dr. Slamet	Pelayanan Pasien	486.205.681,75
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.125.367.695,00
		Retribusi Menara Telekomunikasi	146.409.966,80
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Cicilan Kios Pasar	52.815.000,00
		Kontribusi dan Profit Sharing Pasar Cibatu	260.589.665,60
4	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	287.532,12
		Pajak Restoran	1.864.934,95
		Pajak Reklame	3.751.952,17
		Pajak Hiburan	20.986,25
		Pajak Parkir	20.217,12
		Pajak Permukaan Air Tanah	9.170.440,66
		Pajak Mineral Bukan Logam	104.830,28
		Pajak Bumi dan Bangunan	2.777.308.356,71
	Denda Pajak	1.217.902.989,79	
	Jumlah	6.081.820.249,20	



5.4.2.1.11 Beban Lain-Lain

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
42.148.020.314,90	44.597.077.669,74

Jumlah Beban Lain-Lain untuk tahun 2022 sebesar Rp 42.148.020.314,90 mengalami penurunan sebesar (Rp2.449.057.354,84) atau (5,49%) dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp44.597.077.669,74. Rincian Beban Lain-lain untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.211
Beban Lain-Lain - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Laba/Rugi BUMD	13.376.399.672,90
2	Beban Tidak Terduga	28.771.620.642,00
	Jumlah	42.148.020.314,90

5.4.2.2. Beban Transfer - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
223.731.878.216,00	769.679.449.670,00

Jumlah Beban Transfer untuk tahun 2022 sebesar Rp223.731.878.216,00. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp545.947.571.454,00) atau (70,93%) jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp769.679.449.670,00. Rincian atas Beban Transfer untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.212
Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban - LO			
		Tahun 2022	Tahun 2021	Naik (Turun)	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak	15.221.233.739,00	11.820.556.048,00	3.400.677.691,00	28,77
2.	Beban Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.201.432.788,00	1.225.027.030,00	976.405.758,00	79,70
3.	Transfer Bantuan Keuangan	206.309.211.689,00	756.633.866.592,00	(550.324.654.903,00)	(72,73)
	Jumlah	223.731.878.216,00	769.679.449.670,00	(545.947.571.454,00)	(70,93)

5.4.2.3. Beban Non Operasional - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
11.750.881.390,98	0,00

Jumlah Beban Non Operasional untuk tahun 2022 sebesar Rp11.750.881.390,98 merupakan beban penghapusan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 beban penghapusan dicatat sebagai beban operasional. Rincian Beban Non Operasional sebagai berikut:



Tabel 5.213
Beban Non Operasional - LO

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Beban Penghapusan Persediaan Barang Cetak	1.077.538.526,00
2	Beban Penghapusan Aset Tetap	7.894.037.262,76
3	Beban Penghapusan Aset Tidak Produktif	1.956.737.063,70
4	Beban Penghapusan Aset Lain-Lain	822.568.538,52
	Jumlah	11.750.881.390,98

5.4.3. Surplus /Defisit dari Operasi

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
427.503.456.138,39	374.639.093.239,13

Dalam kegiatan operasional tahun 2022, jumlah pendapatan sebesar Rp4.249.648.820.830,89 dan beban sebesar Rp3.822.145.364.692,50, maka terdapat surplus sebesar Rp427.503.456.138,39. Nilai surplus tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp52.864.362.899,26 atau 14,11% dibandingkan tahun 2021.

5.4.4. Surplus /Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
(11.750.881.390,98)	0,00

Dalam kegiatan non operasional tahun 2022, jumlah pendapatan sebesar Rp0,00 dan beban sebesar Rp11.750.881.390,98, maka terdapat defisit sebesar (Rp11.750.881.390,98).

5.4.5. Surplus /Defisit Pos Luar Biasa

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
0,00	0,00

Surplus /Defisit Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diprediksi dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk tahun 2022 adalah Nihil.

5.4.6. Surplus /Defisit - LO

Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
415.752.574.747,41	374.639.093.239,13

Surplus /Defisit - LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus /Defisit - LO untuk tahun 2022 adalah surplus sebesar Rp415.752.574.747,41.



5.5 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi keluar dan masuknya Kas, baik dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas dibedakan dalam empat jenis arus yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan dan arus kas dari aktivitas transitoris. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2022 dan saldo kas pada TA 2021.

5.5.1. Arus dari Aktivitas Operasi

5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi terdiri atas penerimaan:

Tabel 5.214
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Penerimaan Pajak Daerah	157.571.464.634,00	126.527.804.958,00
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	15.711.817.595,00	15.259.959.070,00
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.044.369.160,00	6.455.066.625,00
4.	Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah	305.711.115.021,10	412.540.546.265,61
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	129.254.394.668,00	139.697.220.120,00
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	132.610.716.585,00	248.139.310.049,00
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.657.145.048.168,00	1.665.908.667.000,00
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	964.264.074.173,00	659.141.183.682,00
9.	Penerimaan Dana Transfer Lainnya	530.022.372.200,00	549.086.677.200,00
10.	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	269.534.660.055,00	216.472.865.839,00
11.	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	398.433.094.737,00	306.126.489.384,00
12.	Penerimaan Hibah	46.365.278.610,00	20.133.542.423,00
13.	Lain - lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.286.341.342,00	318.915.590.581,00
	Jumlah	4.626.954.746.948,10	4.684.404.923.196,61

5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi terdiri atas:

Tabel 5.215
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Pembayaran Pegawai	1.678.298.468.729,00	1.711.698.801.354,00
2.	Pembayaran Barang	1.142.664.116.391,00	1.088.825.013.582,00
3.	Pembayaran Subsidi	951.000.000,00	-
4.	Pembayaran Hibah	380.148.919.928,00	477.437.424.029,00
5.	Pembayaran Bantuan Sosial	25.874.389.999,00	11.042.257.615,00
6.	Pembayaran Tak Terduga	28.771.620.642,00	39.452.922.903,00
7.	Pembayaran Bagi Hasil	17.422.666.527,00	13.045.583.078,00
8.	Pembayaran Bantuan Keuangan	713.300.459.889,00	749.302.866.592,00
	Jumlah	3.987.431.642.105,00	4.090.804.869.153,00



5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
639.523.104.843,10	593.600.054.043,61

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp639.523.104.843,10, naik sebesar Rp45.923.050.799,49 atau 7,74% dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp593.600.054.043,61. Nilai tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus masuk kas dengan arus keluar kas yang terdiri atas:

Tabel 5.216
Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2022	TA 2021
1.	Arus Masuk Kas	4.626.954.746.948,10	4.684.404.923.196,61
2.	Arus Keluar Kas	3.987.431.642.105,00	4.090.804.869.153,00
	Jumlah	639.523.104.843,10	593.600.054.043,61

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi adalah Nihil.

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan realisasi Belanja Modal sebesar Rp715.943.778.518,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.217
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Perolehan Tanah	21.374.678.883,00	34.923.261.221,00
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	115.797.914.649,00	114.413.219.545,00
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	149.847.397.573,00	204.878.310.049,00
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	394.817.632.912,00	184.540.470.291,00
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	19.106.154.881,00	20.042.025.322,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.999.999.620,00	11.150.000.000,00
	Jumlah	715.943.778.518,00	569.947.286.428,00

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(715.943.778.518,00)	(569.947.286.428,00)

Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran bruto dalam rangka perolehan atau pelepasan sumber daya ekonomi berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya yang tidak dipisahkan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp715.943.778.518,00), yang merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap.

Arus Kas Bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri atas:

Tabel 5.218
Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Arus Masuk Kas	-	-
2.	Arus Keluar Kas	715.943.778.518,00	569.947.286.428,00
	Jumlah	(715.943.778.518,00)	(569.947.286.428,00)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana dari utang dan ekuitas dana. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00, sama dibandingkan nilai tahun 2021 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mencerminkan tidak adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang.

Arus Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas atas Aktivitas Pendanaan yang terdiri atas:

Tabel 5.219
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Arus Masuk Kas	-	-
2.	Arus Keluar Kas	-	-
	Jumlah	-	-

5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi adalah Nihil.

5.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel 5.220
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
	Jumlah	-	-

5.5.3.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Dengan nilai arus masuk kas sebesar nihil dan arus keluar juga nihil, maka nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan adalah sebesar nihil.



5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp0,00 arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aliran kas bersih dari aktivitas transitoris meliputi aliran masuk kas dan aliran keluar kas sebagai berikut:

Tabel 5.221
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Arus Masuk Kas	230.964.426.323,00	193.098.493.777,00
2.	Arus Keluar Kas	230.964.426.323,00	193.098.493.777,00
	Jumlah	-	-

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.222
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK):		
1.	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	60.388.335.212,00	64.689.937.506,00
2.	PPH Pasal 21	63.438.722.964,00	29.825.340.964,00
3.	Penerimaan PFK - Lainnya	107.137.368.147,00	98.583.215.307,00
	Jumlah	230.964.426.323,00	193.098.493.777,00

Rinciannya terdiri dari:

Tabel 5.223
Rekap Iuran Wajib Pegawai (IWP)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	38.366.504.576,00
2	Dinas Kesehatan	6.642.172.552,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	2.511.438.229,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.027.095.371,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	254.097.565,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	179.243.039,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	200.635.543,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.166.788,00
9	Dinas Sosial	160.338.654,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.444.628,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	183.008.606,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	923.353.186,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	213.022.658,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	184.217.396,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	247.840.356,00
16	Dinas Perhubungan	535.056.344,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	205.418.497,00



No	SKPD	Jumlah
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	173.143.123,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	174.192.982,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	184.984.057,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	196.009.171,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	364.647.382,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	228.120.336,00
24	Dinas Pertanian	786.360.605,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	619.221.521,00
26	Sekretariat Daerah	769.814.349,00
27	Sekretariat DPRD	182.845.164,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	224.950.062,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	258.174.819,00
30	Badan Pendapatan Daerah	286.362.576,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	259.522.718,00
32	Inspektorat Daerah	426.310.456,00
33	Kecamatan Banjarwangi	45.404.508,00
34	Kecamatan Banyuresmi	76.698.833,00
35	Kecamatan Bayongbong	61.878.438,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	56.014.176,00
37	Kecamatan Bungbulang	65.356.969,00
38	Kecamatan Caringin	42.434.968,00
39	Kecamatan Cibalong	54.776.598,00
40	Kecamatan Cibatuh	60.463.640,00
41	Kecamatan Cibiuk	52.755.290,00
42	Kecamatan Cigedug	49.819.463,00
43	Kecamatan Cihurip	42.418.603,00
44	Kecamatan Cikajang	56.403.531,00
45	Kecamatan Cikelet	46.011.188,00
46	Kecamatan Cilawu	71.449.138,00
47	Kecamatan Cisewu	53.054.410,00
48	Kecamatan Cisompet	53.037.185,00
49	Kecamatan Cisurupan	82.790.505,00
50	Kecamatan Garut Kota	321.360.172,00
51	Kecamatan Kadungora	82.892.815,00
52	Kecamatan Karangtengah	42.398.241,00
53	Kecamatan Karangpawitan	175.377.862,00
54	Kecamatan Kersamanah	50.983.585,00
55	Kecamatan Leles	68.509.432,00
56	Kecamatan Leuwigoong	47.550.690,00
57	Kecamatan Malangbong	89.315.488,00
58	Kecamatan Mekarmukti	42.439.353,00
59	Kecamatan Pakenjeng	43.212.394,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	44.624.139,00
61	Kecamatan Pamulihan	41.632.486,00
62	Kecamatan Pangatikan	44.794.763,00
63	Kecamatan Pasirwangi	92.366.212,00
64	Kecamatan Peundeuy	40.029.027,00
65	Kecamatan Samarang	79.269.872,00



No	SKPD	Jumlah
66	Kecamatan Selaawi	62.543.782,00
67	Kecamatan Singajaya	46.368.077,00
68	Kecamatan Sucinaraja	48.875.194,00
69	Kecamatan Sukaresmi	54.047.894,00
70	Kecamatan Sukawening	57.294.920,00
71	Kecamatan Talegong	58.747.161,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	94.479.492,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	219.569.536,00
74	Kecamatan Wanaraja	61.962.232,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.209.641,00
	TOTAL	60.388.335.212,00

Tabel 5.224
Rekap Pajak Penghasilan Pasal 21

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	43.812.011.847,00
2	Dinas Kesehatan	680.561.415,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	33.069.646,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823.787.995,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	302.873.100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	160.183.071,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	235.996.456,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.878.755,00
9	Dinas Sosial	386.848.341,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.571.117,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	241.630.815,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	285.823.824,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214.536.463,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.208.023,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.110.458.759,00
16	Dinas Perhubungan	253.756.039,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	208.969.006,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	186.446.551,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	204.999.197,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	405.717.500,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.570.153,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	300.452.335,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	242.187.057,00
24	Dinas Pertanian	672.497.568,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	310.271.286,00
26	Sekretariat Daerah	1.390.990.012,00
27	Sekretariat DPRD	4.201.076.975,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	381.114.120,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	468.791.912,00
30	Badan Pendapatan Daerah	548.358.556,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	446.623.354,00



No	SKPD	Jumlah
32	Inspektorat Daerah	1.425.262.887,00
33	Kecamatan Banjarwangi	52.420.822,00
34	Kecamatan Banyuresmi	41.788.801,00
35	Kecamatan Bayongbong	18.248.835,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	48.919.575,00
37	Kecamatan Bungbulang	14.517.821,00
38	Kecamatan Caringin	49.162.073,00
39	Kecamatan Cibalong	44.125.994,00
40	Kecamatan Cibatuh	51.075.422,00
41	Kecamatan Cibiuk	52.420.261,00
42	Kecamatan Cigedug	39.781.828,00
43	Kecamatan Cihurip	52.418.166,00
44	Kecamatan Cikajang	57.188.615,00
45	Kecamatan Cikelet	66.404.020,00
46	Kecamatan Cilawu	50.494.542,00
47	Kecamatan Cisewu	44.702.633,00
48	Kecamatan Cisompet	52.305.175,00
49	Kecamatan Cisurupan	54.107.191,00
50	Kecamatan Garut Kota	346.227.631,00
51	Kecamatan Kadungora	52.515.787,00
52	Kecamatan Karangtengah	43.215.546,00
53	Kecamatan Karangpawitan	118.919.888,00
54	Kecamatan Kersamanah	41.400.895,00
55	Kecamatan Leles	47.462.788,00
56	Kecamatan Leuwigoong	44.098.698,00
57	Kecamatan Malangbong	48.268.080,00
58	Kecamatan Mekarmukti	41.443.950,00
59	Kecamatan Pakenjeng	49.700.103,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	49.206.939,00
61	Kecamatan Pamulihan	28.912.938,00
62	Kecamatan Pangatikan	36.773.991,00
63	Kecamatan Pasirwangi	46.904.189,00
64	Kecamatan Peundeuy	50.025.541,00
65	Kecamatan Samarang	41.814.409,00
66	Kecamatan Selaawi	36.315.978,00
67	Kecamatan Singajaya	49.862.131,00
68	Kecamatan Sucinaraja	44.071.924,00
69	Kecamatan Sukaresmi	52.758.146,00
70	Kecamatan Sukawening	50.623.568,00
71	Kecamatan Talegong	51.156.055,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	60.533.022,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	161.900.696,00
74	Kecamatan Wanaraja	35.900.158,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	328.104.004,00
	TOTAL	63.438.722.964,00



Tabel 5.225
Rekap Penerimaan Pajak PFK Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	PPH 22	PPH 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	325.886.564,00	34.311.905,00	3.118.287.655,00	171.999.090,00	3.650.485.214,00
2	Dinas Kesehatan	541.109.405,00	277.087.084,00	5.116.086.957,00	1.054.721.629,00	6.989.005.075,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	58.287.120,00	-	526.680.796,00	27.286.978,00	612.254.894,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.156.350,00	60.760.972,00	51.797.621.703,00	8.613.499.545,00	60.751.038.570,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	41.077.895,00	7.447.944,00	6.899.510.262,00	1.084.040.800,00	8.032.076.901,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.688.944,00	11.036.980,00	139.422.985,00	8.307.000,00	175.455.909,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	11.573.652,00	2.860.000,00	93.837.502,00	11.542.009,00	119.813.163,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.564.730,00	20.597.957,00	571.200.900,00	58.135.718,00	683.499.305,00
9	Dinas Sosial	26.292.565,00	12.847.873,00	198.844.700,00	20.817.000,00	258.802.138,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.461.798,00	35.482.459,00	580.639.437,00	160.207.418,00	798.791.112,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	121.304.662,00	9.963.417,00	295.155.925,00	31.320.110,00	457.744.114,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	64.365.452,00	64.365.452,00	662.193.259,00	38.410.207,00	829.334.370,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.254.581,00	11.109.276,00	550.682.656,00	6.553.214,00	641.599.727,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.798.793,00	56.859.373,00	797.105.355,00	64.739.919,00	1.005.503.440,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86.036.502,00	8.116.584,00	404.143.993,00	260.870.196,00	759.167.275,00
16	Dinas Perhubungan	44.257.631,00	5.634.837,00	351.387.411,00	20.873.618,00	422.153.497,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.408.524,00	101.011.423,00	686.811.143,00	6.461.604,00	812.692.694,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	20.159.671,00	14.961.842,00	241.596.669,00	65.290.119,00	342.008.301,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	6.025.434,00	27.339.247,00	942.310.572,00	135.862.140,00	1.111.537.393,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	46.957.316,00	34.281.662,00	1.324.064.536,00	185.931.544,00	1.591.235.058,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.136.432,00	11.516.420,00	149.713.355,00	19.050.072,00	193.416.279,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	122.319.694,00	15.252.293,00	935.023.983,00	104.717.176,00	1.177.313.146,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.163.398,00	53.059.606,00	940.701.745,00	53.059.606,00	1.086.984.355,00
24	Dinas Pertanian	148.182.601,00	38.093.970,00	2.699.608.954,00	357.131.871,00	3.243.017.396,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	46.083.939,00	59.509.101,00	920.056.092,00	113.312.164,00	1.138.961.296,00
26	Sekretariat Daerah	90.819.107,00	148.547.833,00	1.320.680.614,00	345.779.647,00	1.905.827.201,00
27	Sekretariat DPRD	49.634.603,00	64.163.325,00	460.926.635,00	64.163.325,00	638.887.888,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.465.228,00	46.393.340,00	194.618.852,00	81.110.676,00	331.588.096,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.645.275,00	52.835.945,00	660.546.139,00	50.134.055,00	817.161.414,00



Pemerintah Kabupaten Garut
Laporan Keuangan Tahun 2022

No	SKPD	PPh 22	PPh 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
30	Badan Pendapatan Daerah	43.073.291,00	21.381.516,00	425.873.546,00	20.047.564,00	510.375.917,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	15.151.548,00	34.450.492,00	162.913.672,00	21.894.314,00	234.410.026,00
32	Inspektorat Daerah	9.821.791,00	41.339.724,00	162.749.631,00	56.368.434,00	270.279.580,00
33	Kecamatan Banjarwangi	2.256.136,00	918.781,00	41.057.002,00	17.142.516,00	61.374.435,00
34	Kecamatan Banyuresmi	3.343.243,00	2.596.359,00	25.618.795,00	10.719.518,00	42.277.915,00
35	Kecamatan Bayongbong	3.724.017,00	2.287.840,00	18.248.835,00	11.237.500,00	35.498.192,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	2.762.889,00	383.191,00	21.543.206,00	8.980.300,00	33.669.586,00
37	Kecamatan Bungbulang	1.808.454,00	54.054,00	14.517.821,00	8.900.500,00	25.280.829,00
38	Kecamatan Caringin	876.459,00	2.244.508,00	8.924.506,00	12.020.500,00	24.065.973,00
39	Kecamatan Cibalong	1.725.721,00	1.138.060,00	30.379.554,00	7.838.450,00	41.081.785,00
40	Kecamatan Cibatu	2.434.278,00	2.907.768,00	28.683.876,00	13.294.785,00	47.320.707,00
41	Kecamatan Cibiuk	5.768.854,00	1.277.530,00	61.318.453,00	11.361.450,00	79.726.287,00
42	Kecamatan Cigedug	2.679.679,00	102.000,00	21.830.841,00	8.581.000,00	33.193.520,00
43	Kecamatan Cihurip	2.541.020,00	1.792.467,00	22.405.054,00	9.692.076,00	36.430.617,00
44	Kecamatan Cikajang	4.178.341,00	2.832.733,00	206.247.217,00	36.106.092,00	249.364.383,00
45	Kecamatan Cikelet	2.591.856,00	-	200.727.986,00	43.734.339,00	247.054.181,00
46	Kecamatan Cilawu	2.685.122,00	800.595,00	33.443.363,00	7.543.461,00	44.472.541,00
47	Kecamatan Cisewu	700.487,00	1.376.860,00	45.226.861,00	14.889.527,00	62.193.735,00
48	Kecamatan Cisompet	3.418.592,00	1.664.229,00	185.737.256,00	42.239.432,00	233.059.509,00
49	Kecamatan Cisurupan	3.390.382,00	8.698.128,00	205.831.374,00	59.844.867,00	277.764.751,00
50	Kecamatan Garut Kota	98.619.422,00	17.662.679,00	936.706.451,00	92.629.862,00	1.145.618.414,00
51	Kecamatan Kadungora	5.105.115,00	112.162,00	25.645.128,00	11.504.755,00	42.367.160,00
52	Kecamatan Karangtengah	1.996.807,00	2.264.513,00	18.600.296,00	7.396.568,00	30.258.184,00
53	Kecamatan Karangpawitan	43.138.743,00	4.282.058,00	326.575.651,00	42.971.731,00	416.968.183,00
54	Kecamatan Kersamanah	1.219.338,00	8.572.502,00	52.723.938,00	19.628.468,00	82.144.246,00
55	Kecamatan Leles	2.096.400,00	287.700,00	9.788.400,00	9.462.000,00	21.634.500,00
56	Kecamatan Lewigoong	2.826.622,00	1.792.369,00	206.621.081,00	36.404.552,00	247.644.624,00
57	Kecamatan Malangbong	3.841.092,00	2.951.706,00	210.262.671,00	40.257.259,00	257.312.728,00
58	Kecamatan Mekarmukti	2.575.250,00	2.604.021,00	42.340.475,00	8.790.667,00	56.310.413,00
59	Kecamatan Pakenjeng	2.049.664,00	69.000,00	41.996.883,00	19.136.909,00	63.252.456,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	1.268.192,00	4.455.612,00	24.449.279,00	17.443.247,00	47.616.330,00
61	Kecamatan Pamulihan	2.459.067,00	1.353.000,00	17.127.231,00	11.087.000,00	32.026.298,00
62	Kecamatan Pangatikan	1.737.254,00	5.362.411,00	36.986.480,00	10.824.148,00	54.910.293,00
63	Kecamatan Pasirwangi	632.680,00	2.280.237,00	31.895.932,00	12.895.821,00	47.704.670,00
64	Kecamatan Peundeuy	2.434.847,00	610.382,00	18.389.683,00	1.779.400,00	23.214.312,00
65	Kecamatan Samarang	2.102.764,00	704.700,00	32.529.717,00	12.549.453,00	47.886.634,00
66	Kecamatan Selaawi	1.236.571,00	1.798.140,00	20.282.877,00	5.488.000,00	28.805.588,00
67	Kecamatan Singajaya	2.542.901,00	3.107.205,00	34.357.305,00	16.340.463,00	56.347.874,00
68	Kecamatan Sucinaraja	5.390.107,00	3.303.269,00	59.777.764,00	10.340.279,00	78.811.419,00
69	Kecamatan Sukaresmi	3.338.954,00	800.600,00	27.443.464,00	6.090.000,00	37.673.018,00
70	Kecamatan Sukawening	6.856.890,00	551.813,00	116.476.515,00	26.459.150,00	150.344.368,00
71	Kecamatan Talegong	13.244.608,00	93.170,00	115.189.154,00	14.476.102,00	143.003.034,00



No	SKPD	PPH 22	PPH 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
72	Kecamatan Tarogong Kaler	12.303.326,00	3.516.440,00	112.741.395,00	10.135.634,00	138.696.795,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	30.282.604,00	7.734.941,00	281.596.240,00	31.041.380,00	350.655.165,00
74	Kecamatan Wanaraja	2.093.835,00	3.164.669,00	27.102.814,00	7.778.273,00	40.139.591,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.766.813,00	30.800.536,00	160.351.452,00	121.853.359,00	329.772.160,00
	TOTAL	2.880.209.892,00	1.523.930.790,00	88.490.697.910,00	14.242.529.555,00	107.137.368.147,00

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Tabel 5.226
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK):		
1.	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	60.388.335.212,00	64.689.937.506,00
2.	PPH Pasal 21	63.438.722.964,00	29.825.340.964,00
3.	Penerimaan PFK - Lainnya	107.137.368.147,00	98.583.215.307,00
	Jumlah	230.964.426.323,00	193.098.493.777,00

Rinciannya terdiri dari:

Tabel 5.227
Rekap Iuran Wajib Pegawai (IWP)

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	38.366.504.576,00
2	Dinas Kesehatan	6.642.172.552,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	2.511.438.229,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.027.095.371,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	254.097.565,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	179.243.039,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	200.635.543,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	119.166.788,00
9	Dinas Sosial	160.338.654,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.444.628,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	183.008.606,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	923.353.186,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	213.022.658,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	184.217.396,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	247.840.356,00
16	Dinas Perhubungan	535.056.344,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	205.418.497,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	173.143.123,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	174.192.982,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	184.984.057,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	196.009.171,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	364.647.382,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	228.120.336,00
24	Dinas Pertanian	786.360.605,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	619.221.521,00



No	SKPD	Jumlah
26	Sekretariat Daerah	769.814.349,00
27	Sekretariat DPRD	182.845.164,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	224.950.062,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	258.174.819,00
30	Badan Pendapatan Daerah	286.362.576,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	259.522.718,00
32	Inspektorat Daerah	426.310.456,00
33	Kecamatan Banjarwangi	45.404.508,00
34	Kecamatan Banyuresmi	76.698.833,00
35	Kecamatan Bayongbong	61.878.438,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	56.014.176,00
37	Kecamatan Bungbulang	65.356.969,00
38	Kecamatan Caringin	42.434.968,00
39	Kecamatan Cibalong	54.776.598,00
40	Kecamatan Cibatuh	60.463.640,00
41	Kecamatan Cibiuk	52.755.290,00
42	Kecamatan Cigedug	49.819.463,00
43	Kecamatan Cihurip	42.418.603,00
44	Kecamatan Cikajang	56.403.531,00
45	Kecamatan Cikelet	46.011.188,00
46	Kecamatan Cilawu	71.449.138,00
47	Kecamatan Cisewu	53.054.410,00
48	Kecamatan Cisompet	53.037.185,00
49	Kecamatan Cisarupan	82.790.505,00
50	Kecamatan Garut Kota	321.360.172,00
51	Kecamatan Kadungora	82.892.815,00
52	Kecamatan Karangtengah	42.398.241,00
53	Kecamatan Karangpawitan	175.377.862,00
54	Kecamatan Kersamanah	50.983.585,00
55	Kecamatan Leles	68.509.432,00
56	Kecamatan Leuwigoong	47.550.690,00
57	Kecamatan Malangbong	89.315.488,00
58	Kecamatan Mekarmukti	42.439.353,00
59	Kecamatan Pakenjeng	43.212.394,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	44.624.139,00
61	Kecamatan Pamulihan	41.632.486,00
62	Kecamatan Pangatikan	44.794.763,00
63	Kecamatan Pasirwangi	92.366.212,00
64	Kecamatan Peundeuy	40.029.027,00
65	Kecamatan Samarang	79.269.872,00
66	Kecamatan Selaawi	62.543.782,00
67	Kecamatan Singajaya	46.368.077,00
68	Kecamatan Sucinaraja	48.875.194,00
69	Kecamatan Sukaresmi	54.047.894,00
70	Kecamatan Sukawening	57.294.920,00
71	Kecamatan Talegong	58.747.161,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	94.479.492,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	219.569.536,00



No	SKPD	Jumlah
74	Kecamatan Wanaraja	61.962.232,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.209.641,00
	TOTAL	60.388.335.212,00

Tabel 5.228
Rekap Pajak Penghasilan Pasal 21

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	43.812.011.847,00
2	Dinas Kesehatan	680.561.415,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	33.069.646,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823.787.995,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	302.873.100,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	160.183.071,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	235.996.456,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	136.878.755,00
9	Dinas Sosial	386.848.341,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	242.571.117,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	241.630.815,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	285.823.824,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	214.536.463,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	190.208.023,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.110.458.759,00
16	Dinas Perhubungan	253.756.039,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	208.969.006,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	186.446.551,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	204.999.197,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	405.717.500,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	185.570.153,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	300.452.335,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	242.187.057,00
24	Dinas Pertanian	672.497.568,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	310.271.286,00
26	Sekretariat Daerah	1.390.990.012,00
27	Sekretariat DPRD	4.201.076.975,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	381.114.120,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	468.791.912,00
30	Badan Pendapatan Daerah	548.358.556,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	446.623.354,00
32	Inspektorat Daerah	1.425.262.887,00
33	Kecamatan Banjarwangi	52.420.822,00
34	Kecamatan Banyuresmi	41.788.801,00
35	Kecamatan Bayongbong	18.248.835,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	48.919.575,00
37	Kecamatan Bungbulang	14.517.821,00
38	Kecamatan Caringin	49.162.073,00
39	Kecamatan Cibalong	44.125.994,00



No	SKPD	Jumlah
40	Kecamatan Cibatu	51.075.422,00
41	Kecamatan Cibiuk	52.420.261,00
42	Kecamatan Cigedug	39.781.828,00
43	Kecamatan Cihurip	52.418.166,00
44	Kecamatan Cikajang	57.188.615,00
45	Kecamatan Cikelet	66.404.020,00
46	Kecamatan Cilawu	50.494.542,00
47	Kecamatan Cisewu	44.702.633,00
48	Kecamatan Cisompet	52.305.175,00
49	Kecamatan Cisarupan	54.107.191,00
50	Kecamatan Garut Kota	346.227.631,00
51	Kecamatan Kadungora	52.515.787,00
52	Kecamatan Karangtengah	43.215.546,00
53	Kecamatan Karangpawitan	118.919.888,00
54	Kecamatan Kersamanah	41.400.895,00
55	Kecamatan Leles	47.462.788,00
56	Kecamatan Leuwigoong	44.098.698,00
57	Kecamatan Malangbong	48.268.080,00
58	Kecamatan Mekarmukti	41.443.950,00
59	Kecamatan Pakenjeng	49.700.103,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	49.206.939,00
61	Kecamatan Pamulihan	28.912.938,00
62	Kecamatan Pangatikan	36.773.991,00
63	Kecamatan Pasirwangi	46.904.189,00
64	Kecamatan Peundeuy	50.025.541,00
65	Kecamatan Samarang	41.814.409,00
66	Kecamatan Selaawi	36.315.978,00
67	Kecamatan Singajaya	49.862.131,00
68	Kecamatan Sucinaraja	44.071.924,00
69	Kecamatan Sukaresmi	52.758.146,00
70	Kecamatan Sukawening	50.623.568,00
71	Kecamatan Talegong	51.156.055,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	60.533.022,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	161.900.696,00
74	Kecamatan Wanaraja	35.900.158,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	328.104.004,00
	TOTAL	63.438.722.964,00

Tabel 5.229
Rekap Penerimaan Pajak PFK Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD	PPH 22	PPH 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	325.886.564,00	34.311.905,00	3.118.287.655,00	171.999.090,00	3.650.485.214,00
2	Dinas Kesehatan	541.109.405,00	277.087.084,00	5.116.086.957,00	1.054.721.629,00	6.989.005.075,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	58.287.120,00	-	526.680.796,00	27.286.978,00	612.254.894,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.156.350,00	60.760.972,00	51.797.621.703,00	8.613.499.545,00	60.751.038.570,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	41.077.895,00	7.447.944,00	6.899.510.262,00	1.084.040.800,00	8.032.076.901,00



Pemerintah Kabupaten Garut
Laporan Keuangan Tahun 2022

No	SKPD	PPh 22	PPh 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
6	Satuan Polisi Pamong Praja	16.688.944,00	11.036.980,00	139.422.985,00	8.307.000,00	175.455.909,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	11.573.652,00	2.860.000,00	93.837.502,00	11.542.009,00	119.813.163,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.564.730,00	20.597.957,00	571.200.900,00	58.135.718,00	683.499.305,00
9	Dinas Sosial	26.292.565,00	12.847.873,00	198.844.700,00	20.817.000,00	258.802.138,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.461.798,00	35.482.459,00	580.639.437,00	160.207.418,00	798.791.112,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	121.304.662,00	9.963.417,00	295.155.925,00	31.320.110,00	457.744.114,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	64.365.452,00	64.365.452,00	662.193.259,00	38.410.207,00	829.334.370,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	73.254.581,00	11.109.276,00	550.682.656,00	6.553.214,00	641.599.727,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	86.798.793,00	56.859.373,00	797.105.355,00	64.739.919,00	1.005.503.440,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86.036.502,00	8.116.584,00	404.143.993,00	260.870.196,00	759.167.275,00
16	Dinas Perhubungan	44.257.631,00	5.634.837,00	351.387.411,00	20.873.618,00	422.153.497,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.408.524,00	101.011.423,00	686.811.143,00	6.461.604,00	812.692.694,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	20.159.671,00	14.961.842,00	241.596.669,00	65.290.119,00	342.008.301,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	6.025.434,00	27.339.247,00	942.310.572,00	135.862.140,00	1.111.537.393,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	46.957.316,00	34.281.662,00	1.324.064.536,00	185.931.544,00	1.591.235.058,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.136.432,00	11.516.420,00	149.713.355,00	19.050.072,00	193.416.279,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	122.319.694,00	15.252.293,00	935.023.983,00	104.717.176,00	1.177.313.146,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.163.398,00	53.059.606,00	940.701.745,00	53.059.606,00	1.086.984.355,00
24	Dinas Pertanian	148.182.601,00	38.093.970,00	2.699.608.954,00	357.131.871,00	3.243.017.396,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	46.083.939,00	59.509.101,00	920.056.092,00	113.312.164,00	1.138.961.296,00
26	Sekretariat Daerah	90.819.107,00	148.547.833,00	1.320.680.614,00	345.779.647,00	1.905.827.201,00
27	Sekretariat DPRD	49.634.603,00	64.163.325,00	460.926.635,00	64.163.325,00	638.887.888,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.465.228,00	46.393.340,00	194.618.852,00	81.110.676,00	331.588.096,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	53.645.275,00	52.835.945,00	660.546.139,00	50.134.055,00	817.161.414,00
30	Badan Pendapatan Daerah	43.073.291,00	21.381.516,00	425.873.546,00	20.047.564,00	510.375.917,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	15.151.548,00	34.450.492,00	162.913.672,00	21.894.314,00	234.410.026,00
32	Inspektorat Daerah	9.821.791,00	41.339.724,00	162.749.631,00	56.368.434,00	270.279.580,00
33	Kecamatan Banjarwangi	2.256.136,00	918.781,00	41.057.002,00	17.142.516,00	61.374.435,00
34	Kecamatan Banyuwesi	3.343.243,00	2.596.359,00	25.618.795,00	10.719.518,00	42.277.915,00
35	Kecamatan Bayongbong	3.724.017,00	2.287.840,00	18.248.835,00	11.237.500,00	35.498.192,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	2.762.889,00	383.191,00	21.543.206,00	8.980.300,00	33.669.586,00



No	SKPD	PPh 22	PPh 23	PPN	Pajak Lainnya	Jumlah
37	Kecamatan Bungbulang	1.808.454,00	54.054,00	14.517.821,00	8.900.500,00	25.280.829,00
38	Kecamatan Caringin	876.459,00	2.244.508,00	8.924.506,00	12.020.500,00	24.065.973,00
39	Kecamatan Cibalong	1.725.721,00	1.138.060,00	30.379.554,00	7.838.450,00	41.081.785,00
40	Kecamatan Cibatuh	2.434.278,00	2.907.768,00	28.683.876,00	13.294.785,00	47.320.707,00
41	Kecamatan Cibiuk	5.768.854,00	1.277.530,00	61.318.453,00	11.361.450,00	79.726.287,00
42	Kecamatan Cigedug	2.679.679,00	102.000,00	21.830.841,00	8.581.000,00	33.193.520,00
43	Kecamatan Cihurip	2.541.020,00	1.792.467,00	22.405.054,00	9.692.076,00	36.430.617,00
44	Kecamatan Cikajang	4.178.341,00	2.832.733,00	206.247.217,00	36.106.092,00	249.364.383,00
45	Kecamatan Cikelet	2.591.856,00	-	200.727.986,00	43.734.339,00	247.054.181,00
46	Kecamatan Cilawu	2.685.122,00	800.595,00	33.443.363,00	7.543.461,00	44.472.541,00
47	Kecamatan Cisewu	700.487,00	1.376.860,00	45.226.861,00	14.889.527,00	62.193.735,00
48	Kecamatan Cisompet	3.418.592,00	1.664.229,00	185.737.256,00	42.239.432,00	233.059.509,00
49	Kecamatan Cisurupan	3.390.382,00	8.698.128,00	205.831.374,00	59.844.867,00	277.764.751,00
50	Kecamatan Garut Kota	98.619.422,00	17.662.679,00	936.706.451,00	92.629.862,00	1.145.618.414,00
51	Kecamatan Kadungora	5.105.115,00	112.162,00	25.645.128,00	11.504.755,00	42.367.160,00
52	Kecamatan Karangtengah	1.996.807,00	2.264.513,00	18.600.296,00	7.396.568,00	30.258.184,00
53	Kecamatan Karangpawitan	43.138.743,00	4.282.058,00	326.575.651,00	42.971.731,00	416.968.183,00
54	Kecamatan Kersamanah	1.219.338,00	8.572.502,00	52.723.938,00	19.628.468,00	82.144.246,00
55	Kecamatan Leles	2.096.400,00	287.700,00	9.788.400,00	9.462.000,00	21.634.500,00
56	Kecamatan Leuwigoong	2.826.622,00	1.792.369,00	206.621.081,00	36.404.552,00	247.644.624,00
57	Kecamatan Malangbong	3.841.092,00	2.951.706,00	210.262.671,00	40.257.259,00	257.312.728,00
58	Kecamatan Mekarmukti	2.575.250,00	2.604.021,00	42.340.475,00	8.790.667,00	56.310.413,00
59	Kecamatan Pakenjeng	2.049.664,00	69.000,00	41.996.883,00	19.136.909,00	63.252.456,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	1.268.192,00	4.455.612,00	24.449.279,00	17.443.247,00	47.616.330,00
61	Kecamatan Pamulihan	2.459.067,00	1.353.000,00	17.127.231,00	11.087.000,00	32.026.298,00
62	Kecamatan Pangatikan	1.737.254,00	5.362.411,00	36.986.480,00	10.824.148,00	54.910.293,00
63	Kecamatan Pasirwangi	632.680,00	2.280.237,00	31.895.932,00	12.895.821,00	47.704.670,00
64	Kecamatan Peundeuy	2.434.847,00	610.382,00	18.389.683,00	1.779.400,00	23.214.312,00
65	Kecamatan Samarang	2.102.764,00	704.700,00	32.529.717,00	12.549.453,00	47.886.634,00
66	Kecamatan Selaawi	1.236.571,00	1.798.140,00	20.282.877,00	5.488.000,00	28.805.588,00
67	Kecamatan Singajaya	2.542.901,00	3.107.205,00	34.357.305,00	16.340.463,00	56.347.874,00
68	Kecamatan Sucinaraja	5.390.107,00	3.303.269,00	59.777.764,00	10.340.279,00	78.811.419,00
69	Kecamatan Sukaresmi	3.338.954,00	800.600,00	27.443.464,00	6.090.000,00	37.673.018,00
70	Kecamatan Sukawening	6.856.890,00	551.813,00	116.476.515,00	26.459.150,00	150.344.368,00
71	Kecamatan Talegong	13.244.608,00	93.170,00	115.189.154,00	14.476.102,00	143.003.034,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	12.303.326,00	3.516.440,00	112.741.395,00	10.135.634,00	138.696.795,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	30.282.604,00	7.734.941,00	281.596.240,00	31.041.380,00	350.655.165,00
74	Kecamatan Wanaraja	2.093.835,00	3.164.669,00	27.102.814,00	7.778.273,00	40.139.591,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.766.813,00	30.800.536,00	160.351.452,00	121.853.359,00	329.772.160,00
	TOTAL	2.880.209.892,00	1.523.930.790,00	88.490.697.910,00	14.242.529.555,00	107.137.368.147,00

5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Dengan nilai arus masuk kas sebesar Rp230.964.426.323,00 dan arus keluar kas sebesar Rp230.964.426.323,00, maka nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris adalah Rp0,00.



5.5.5 Saldo Akhir Kas

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
187.866.405.182,00	264.287.078.856,90

Saldo Kas akhir per 31 Desember 2022 adalah jumlah kas yang berasal dari saldo awal kas dan kenaikan bersih kas selama periode tahun 2022. Saldo akhir kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp187.866.405.182,00, turun sebesar (Rp76.420.673.674,90) atau (28,92%) dibandingkan dengan saldo TA 2021 sebesar Rp264.287.078.856,90. Rincian sebagai berikut:

Tabel 5.230
Kenaikan/Penurunan Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	639.523.104.843,10	593.600.054.043,61
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(715.943.778.518,00)	(569.947.286.428,00)
3.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	-	-
4.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	-	-
	Jumlah	(76.420.673.674,90)	23.652.767.615,61

Tabel 5.231
Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Saldo Awal Kas	264.287.078.856,90	240.634.311.241,29
2.	Kenaikan/ Penurunan Kas	(76.420.673.674,90)	23.652.767.615,61
	Saldo Akhir Kas	187.866.405.182,00	264.287.078.856,90

Saldo Akhir Kas TA 2022 dan TA 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.232
Rekap Saldo Akhir Kas

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Kas di Kas Daerah	154.118.430.385,00	171.361.576.205,00
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	146.404.697,00	26.229.764,00
3.	Kas di BLUD RSUD dr Slamet	26.373.751.295,00	83.796.094.944,90
4.	Kas di Dinas Kesehatan	7.119.518.708,00	9.050.359.718,00
5.	Kas di Dana BOS	108.300.097,00	52.818.225,00
	Jumlah	187.866.405.182,00	264.287.078.856,90

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp187.866.405.182,00 termasuk nilai SiLPA TA 2021 sebesar Rp154.264.835.082,00. Adapun Sisa kas yang akan digunakan langsung untuk belanja kebutuhan BLUD RSUD dr Slamet, Dinas Kesehatan dan Dana BOS sebesar Rp33.601.570.100,00 dari:

- BLUD RSUD dr. Slamet sebesar Rp26.373.751.295,00
- Dinas Kesehatan dari Puskesmas yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp7.119.518.708,00
- Dana BOS sebesar Rp108.300.097,00



5.6 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.6.1 Ekuitas Awal	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		4.758.976.910.998,07

Nilai ekuitas awal merupakan nilai ekuitas akhir pada periode sebelumnya. Nilai ekuitas awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.758.976.910.998,07 mengalami kenaikan sebesar Rp400.276.299.035,25 atau 9,18% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit - LO	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		415.752.574.747,41

Surplus/Defisit - LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus/Defisit - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah surplus sebesar Rp415.752.574.747,41 yang terdiri dari surplus kegiatan operasional sebesar Rp427.503.456.138,39 dan defisit kegiatan non operasional sebesar (Rp11.750.881.390,98). Nilai surplus tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp41.113.481.508,28 atau 10,97% dibandingkan tahun 2021.

5.6.3 Koreksi Nilai Piutang	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		7.657.756.939,74

Koreksi nilai piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.657.756.939,74 mengalami kenaikan sebesar Rp7.306.087.014,74 atau 2.077,54% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021. Koreksi nilai piutang per 31 Desember 2022 merupakan piutang pajak bumi dan bangunan dan piutang denda pajak yang kurang catat pada periode sebelumnya pada Badan Pendapatan Daerah. Rincian koreksi nilai piutang sebagai berikut:

Tabel 5.233
Koreksi Nilai Piutang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	65.082.960,00
2.	Piutang Denda Pajak	7.592.673.979,74
	Jumlah	7.657.756.939,74

5.6.4 Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		422.572.289,14

Koreksi Nilai Persediaan merupakan penambahan nilai persediaan obat - obatan pada Dinas Kesehatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga. Koreksi nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp422.572.289,14 mengalami kenaikan sebesar Rp249.616.371,60 atau 144,32% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp172.955.917,54.

5.6.5 Koreksi Nilai Penyertaan Modal	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		5.770.675.899,50

Koreksi Nilai Penyertaan Modal merupakan koreksi atas nilai penyertaan modal aset tetap - tanah pada PT BPR Intan Jabar pada tahun 2020 yang baru dicatat pada tahun 2022. Koreksi



nilai penyertaan modal mengalami penurunan sebesar Rp18.683.768.507,14 atau (144,69%) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021.

5.6.6 Koreksi Nilai Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(24.612.103.760,53)

Koreksi nilai aset tetap untuk tahun 2022 sebesar (Rp24.612.103.760,53) mengalami penurunan sebesar (Rp32.233.517.616,66) atau (422,93%) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.621.413.856,13. Koreksi Nilai Aset Tetap ini dicatat sehubungan dengan adanya kesalahan pencatatan terhadap aset tetap pada tahun-tahun sebelumnya, aset tetap yang direklasifikasi ke aset ekstrakomptabel. Selain itu koreksi nilai aset tetap juga dilakukan terhadap pencatatan aset yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga di beberapa SKPD. Rincian koreksi nilai aset tetap sebagai berikut:

Tabel 5.234
Koreksi Nilai Aset Tetap

Koreksi Tambah		
1. Aset Tahun lalu yang kurang dicatat		
- Tanah	563.600.000,00	
- Peralatan dan Mesin	2.675.108.971,00	
- Gedung dan Bangunan	944.677.324,00	
- Jalan ,Irigasi dan Jaringan	-	
- Aset Tetap Lainnya	-	
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	236.352.200,00	
		4.419.738.495,00
2. Belanja Modal BTT		
- Peralatan dan Mesin	68.477.000,00	
- Gedung dan Bangunan	865.884.570,00	
		934.361.570,00
Jumlah Koreksi Tambah		5.354.100.065,00
Koreksi Kurang		
1. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel		
- Peralatan dan Mesin	7.848.713.549,60	
- Gedung dan Bangunan	8.061.346.325,00	
- Jalan ,Irigasi dan Jaringan	32.901.000,00	
- Aset Tetap Lainnya	14.013.518.850,43	
		29.956.479.725,03
2. Penghapusan Tahun lalu		
- Tanah	9.724.100,50	
		9.724.100,50
Jumlah Koreksi Kurang		29.966.203.825,53
Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap		(24.612.103.760,53)

5.6.7 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
		(769.945.400.355,93)

Jumlah Koreksi Nilai Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar (Rp769.945.400.355,93) mengalami penurunan sebesar (Rp796.514.264.666,20) atau (2.997,92%) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.568.472.906,44. Koreksi Nilai penyusutan dicatat sehubungan dengan adanya kesalahan dalam pencatatan nilai penyusutan baik penambahan maupun pengurangan pada tahun sebelumnya. Rincian Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:



Tabel 5.235
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1	Dinas Pendidikan	(363.835.577.818,11)
2	Dinas Kesehatan	(78.183.130.368,74)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(49.417.043.405,51)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(159.130.277.801,63)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	(4.350.270.609,87)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(218.368.692,96)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	630.615.350,59
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.003.844.657,21)
9	Dinas Sosial	(491.528.178,69)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(212.025.015,24)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(578.356.397,40)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(6.637.087.060,48)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(623.999.747,56)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(633.597.266,53)
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(2.288.079.924,28)
16	Dinas Perhubungan	(4.260.683.065,49)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.390.103.003,99)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(141.413.291,73)
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(792.501.797,46)
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	(7.183.758.217,59)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.645.909.870,60)
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	(6.315.287.204,84)
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(8.173.442.474,98)
24	Dinas Pertanian	(9.885.048.230,44)
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(27.213.427.159,51)
26	Sekretariat Daerah	(4.516.481.856,67)
27	Sekretariat DPRD	(2.776.253.046,54)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(491.482.257,15)
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(4.808.996.424,56)
30	Badan Pendapatan Daerah	(339.914.115,23)
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	(209.653.592,04)
32	Inspektorat Daerah	(188.261.927,74)
33	Kecamatan Banjawangi	(230.666.141,74)
34	Kecamatan Banyuresmi	(178.371.600,75)
35	Kecamatan Bayongbong	(256.908.293,89)
36	Kecamatan Blimbangan	(461.296.188,19)
37	Kecamatan Bungbulang	(663.741.243,49)
38	Kecamatan Caringin	(276.100.803,87)
39	Kecamatan Cibalong	(303.698.282,04)
40	Kecamatan Cibatuh	(356.370.373,63)
41	Kecamatan Cibiuk	(245.508.159,31)
42	Kecamatan Cigedug	(417.431.355,22)



No	SKPD	Nilai
43	Kecamatan Cihurip	(118.010.658,31)
44	Kecamatan Cikajang	(186.706.673,09)
45	Kecamatan Cikelet	(161.732.333,15)
46	Kecamatan Cilawu	(235.238.755,61)
47	Kecamatan Cisewu	(227.609.439,82)
48	Kecamatan Cisompet	(183.941.050,67)
49	Kecamatan Cisarupan	(218.894.275,64)
50	Kecamatan Garut Kota	(1.390.197.707,92)
51	Kecamatan Kadungora	(367.440.352,83)
52	Kecamatan Karangtengah	(242.169.817,09)
53	Kecamatan Karangpawitan	(947.800.750,41)
54	Kecamatan Kersamanah	(242.397.206,29)
55	Kecamatan Leles	(369.081.158,31)
56	Kecamatan Leuwigoong	(200.997.411,37)
57	Kecamatan Malangbong	(446.262.326,81)
58	Kecamatan Mekarmukti	(202.350.901,14)
59	Kecamatan Pakenjeng	(134.337.954,74)
60	Kecamatan Pameungpeuk	(429.781.035,55)
61	Kecamatan Pamulihan	(313.774.783,23)
62	Kecamatan Pangatikan	(345.393.844,36)
63	Kecamatan Pasirwangi	(291.251.269,79)
64	Kecamatan Peundeuy	(217.324.576,52)
65	Kecamatan Samarang	(431.912.320,21)
66	Kecamatan Selaawi	(453.688.732,07)
67	Kecamatan Singajaya	(384.555.502,33)
68	Kecamatan Sucinaraja	(332.551.838,25)
69	Kecamatan Sukaesmi	(161.492.551,45)
70	Kecamatan Sukawening	150.613.996,13
71	Kecamatan Talegong	(132.370.781,52)
72	Kecamatan Tarogong Kaler	(288.252.809,53)
73	Kecamatan Tarogong Kidul	(1.262.796.642,62)
74	Kecamatan Wanaraja	(410.710.642,83)
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(69.706.676,29)
Jumlah		(769.945.400.355,93)

5.6.8 Koreksi Nilai Amortisasi

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
238.472.135,83	(17.167.292,21)

Koreksi Nilai Amortisasi merupakan koreksi atas kesalahan catat atas amortisasi aset tidak berwujud. Jumlah koreksi nilai amortisasi per 31 Desember 2022 adalah Rp238.472.135,83 mengalami kenaikan sebesar Rp255.639.428,04 atau 1.489,11% dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar (Rp17.167.292,21). Rincian koreksi nilai amortisasi sebagai berikut:

Tabel 5.236
Koreksi Nilai Amortisasi

(dalam rupiah)

No	SKPD	Koreksi	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Lebih catat tahun lalu	85.714,21
2	Dinas kependudukan dan Pencatata Sipil	Lebih catat tahun lalu	6.484.285,71
3	Dinas Perhungan	Lebih catat tahun lalu	22.139.999,94
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	Lebih catat tahun lalu	14.450.142,84
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Lebih catat tahun lalu	5.121.428,57
6	Dinas Perikanan dan Peternakan	Lebih catat tahun lalu	18.680.339,29
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Lebih catat tahun lalu	3.893.500,00
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Lebih catat tahun lalu	16.435.280,21
9	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Lebih catat tahun lalu	66.940.545,46
10	Badan Pendapatan Daerah	Lebih catat tahun lalu	88.496.000,00
11	Inspektorat Daerah	Kurang catat tahun lalu	(8.153.071,43)
12	Kecamatan Pasirwangi	Lebih catat tahun lalu	2.097.971,03
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Lebih catat tahun lalu	1.800.000,00
Jumlah			238.472.135,83

**5.6.9 Koreksi Nilai
Penyisihan Piutang**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(2.234.821.059,52)	(188.347.349,87)

Koreksi Nilai Penyisihan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.234.821.059,52). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.046.473.709,65 atau 1.086,54% dibandingkan nilai per 31 Desember 2021. Koreksi nilai penyisihan piutang dicatat sehubungan dengan adanya pembayaran piutang yang telah dilakukan penyisihan, koreksi kurang dan lebih catat tahun lalu. Rincian koreksi nilai penyisihan piutang sebagai berikut:

Tabel 5.237
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No	SKPD	Nilai
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	362.780.440,00
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM	5.577.500,00
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.657.000,00
4.	Badan Pendapatan Daerah	(2.604.835.999,52)
Jumlah		(2.234.821.059,52)

**5.6.10 Koreksi Nilai Aset Lain-
Lain**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
0,00	(131.400.000,00)

Jumlah koreksi nilai aset lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (Rp131.400.000,00) atau (100,00%) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021. Rncian koreksi nilai aset lain-lain sebagai berikut:

**5.6.11 Koreksi Nilai
Penyusutan Aset Lain-
Lain**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
11.394.032.125,10	4.386.272.369,89



Jumlah koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.394.032.125,10. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.007.759.755,21 atau (159,77%) dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.386.272.369,89. Kenaikan tersebut karena adanya reklasifikasi aset lain-lain yang telah dilakukan penyusutan ke persediaan. Rincian koreksi nilai penyusutan aset lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.238
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam rupiah)

No	SKPD	Koreksi	Nilai
1	Dinas Pendidikan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin yang Dihapuskan	426.613.134,35
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin yang Direklasifikasi ke Persediaan	1.586.922.349,00
2	Dinas Kesehatan	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	2.264.470,00
3	Dinas Perumahan dan Permukiman	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan yang Direklasifikasi ke Persediaan	92.410.800,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Direklasifikasi ke Persediaan	16.571.516,67
4	Dinas Pemadam Kebakaran	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	7.225.805,70
5	Dinas Ketahanan Pangan	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	38.528.506,94
6	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	842.529.570,00
7	Dinas Perikanan dan Peternakan	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin yang Direklasifikasi ke Persediaan	7.563.246.012,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan yang Direklasifikasi ke Persediaan	118.890.560,00
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Direklasifikasi ke Persediaan	41.455.166,68
8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	107.100.000,00
9	Dinas Pertanian	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin yang Direklasifikasi ke Persediaan	197.681.511,91
		Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Direklasifikasi ke Persediaan	273.672.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	71.030.721,85
11	Badan Kepegawaian Daerah	Akumulasi Penyusutan Aset tidak Produktif yang Dihapuskan	7.890.000,00
		Jumlah	11.394.032.125,10



5.6.12 Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	500.000,00	0,00

Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar Rp500.000,00. Nilai tersebut merupakan nilai Tuntutan Ganti Rugi atas pegawai yang kehilangan kendaraan roda dua yang belum tercatat pada tahun 2021 tetapi telah dilakukan pembayaran.

5.6.13 Koreksi Nilai Dana Cadangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	(2.538.972.674,00)	0,00

Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.538.972.674,00). Nilai tersebut merupakan koreksi kelebihan nilai Dana Cadangan atas bunga yang diterima dan dicatat pada tahun 2021.

5.6.14 Koreksi Lain-Lain	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	(692.617,00)	(213.963.333,00)

Tabel 5.239
Koreksi Nilai Lain-lain

(dalam rupiah)

No	SKPD	Koreksi	Nilai
1	Kecamatan balubur Limbangan	- Kas lainnya per, 31 Desember 2022 TPP Pegawai	272.901,00
2	Kecamatan Cikelet	- Saldo Rekening tahun lalu Baznas	(969.596,00)
3	Kecamatan Sukaresmi	- Kas lainnya per, 31 Desember 2022 TPP Pegawai	4.078,00
		Jumlah	(692.617,00)

5.6.15 Ekuitas Akhir	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
	4.400.881.504.667,81	4.758.976.910.998,07

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.400.881.504.667,81 atau mengalami penurunan sebesar (Rp358.095.406.330,26) atau (7,52%) dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021.



Bab VI
Pengungkapan Penting Lainnya

Data Mandatory Spending
Pemerintah Kabupaten Garut
APBD Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Pemandang		Anggaran Wajib	%	Keterangan
		Uraian	Nilai			
1	Anggaran Pendidikan	Total APBD	4.418.868.903.338,00	1.631.510.729.216,00	36,92	
2	Anggaran Kesehatan	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	4.236.878.122.099,00	695.182.659.415,00	16,41	
3	Belanja Infrastruktur	Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.687.309.493.188,00	700.911.434.846,00	41,54	
4	Alokasi Dana Desa			187.478.832.577,00		
5	Transfer Desa			518.247.019.000,00		
6	Anggaran Pengawasan	Total APBD	4.418.868.903.338,00	16.000.000.000,00	0,36	
7	Program Perlindungan Sosial					
8	Penganggaran Dana Pendidikan dan Pelatihan	Total APBD	4.418.868.903.338,00	7.578.022.395,00	0,17	

Data Mandatory Spending
Pemerintah Kabupaten Garut
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Pemandang		Anggaran Wajib	%	Keterangan
		Uraian	Nilai			
1	Anggaran Pendidikan	Total APBD	4.919.944.484.758,00	1.610.900.912.605,00	32,74	
2	Anggaran Kesehatan	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	4.744.057.365.152,00	806.116.907.718,00	16,99	
3	Belanja Infrastruktur	Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	1.664.958.611.188,00	1.168.460.740.683,00	70,18	
4	Alokasi Dana Desa			187.478.832.577,00		
5	Transfer Desa			518.247.019.000,00		
6	Anggaran Pengawasan	Total APBD	4.919.944.484.758,00	23.194.942.282,00	0,47	
7	Program Perlindungan Sosial					
8	Penganggaran Dana Pendidikan dan Pelatihan	Total APBD	4.919.944.484.758,00	7.367.759.600,00	0,15	



**PERHITUNGAN
ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
APBD TAHUN 2022 KABUPATEN GARUT**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	1.623.932.706.821,00
	1) Belanja Operasi	1.560.453.883.342,00
	a) belanja pegawai	1.230.283.326.974,00
	b) belanja barang dan jasa	251.025.679.893,00
	c) belanja hibah	79.144.876.475,00
	d) belanja bantuan sosial	
	2) Belanja Modal	63.478.823.479,00
	3) Belanja Transfer	
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	7.578.022.395,00
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	325.002.000,00
	2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	7.253.020.395,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.631.510.729.216,00
3.	Total Belanja Daerah	4.418.868.903.338,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	36,92

**PERHITUNGAN
ALOKASI ANGGARAN BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN
PERUBAHAN APBD TAHUN 2022 KABUPATEN GARUT**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	1.603.533.153.005,00
	1) Belanja Operasi	1.530.514.116.588,00
	a) belanja pegawai	1.172.743.985.546,00
	b) belanja barang dan jasa	196.619.343.697,00
	c) belanja hibah	161.150.787.345,00
	d) belanja bantuan sosial	
	2) Belanja Modal	73.019.036.417,00
	3) Belanja Transfer	
	b. Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	7.367.759.600,00
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	274.319.750,00
	2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah	7.093.439.850,00
2.	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.610.900.912.605,00
3.	Total Belanja Daerah	4.919.944.484.758,00
4.	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah	32,74



**PERHITUNGAN
ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
APBD TAHUN 2022 KABUPATEN GARUT**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	453.460.954.585,00
	1) Belanja Operasi	417.389.750.743,00
	a) belanja pegawai	150.904.373.409,00
	b) belanja barang dan jasa	266.385.377.334,00
	c) belanja hibah	100.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	
	2) Belanja Modal	36.071.203.842,00
	3) Belanja Transfer	
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	241.721.704.830,00
	1) Belanja pada BLUD RSUD dr Slamet	241.721.704.830,00
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan	695.182.659.415,00
3.	Total Belanja Daerah	4.418.868.903.338,00
4.	Gaji ASN	181.990.781.239,00
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	4.236.878.122.099,00
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	16,41

**PERHITUNGAN
ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
PERUBAHAN APBD TAHUN 2022 KABUPATEN GARUT**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	519.455.876.795,00
	1) Belanja Operasi	475.145.029.143,00
	a) belanja pegawai	142.469.008.746,00
	b) belanja barang dan jasa	332.276.020.397,00
	c) belanja hibah	400.000.000,00
	d) belanja bantuan sosial	
	2) Belanja Modal	44.310.847.652,00
	3) Belanja Transfer	
	b. Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang kesehatan, antara lain:	286.661.030.923,00
	1) Belanja Pada BLUD RSUD dr Slamet	286.661.030.923,00
2.	Alokasi Anggaran Kesehatan	806.116.907.718,00
3.	Total Belanja Daerah	4.919.944.484.758,00
4.	Gaji ASN	175.887.119.606,00
5.	Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN	4.744.057.365.152,00
6.	Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Terhadap Belanja Daerah diluar Gaji ASN	16,99



**Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum yang diperhitungkan
APBD Tahun Anggaran 2022**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a) DAU	1.665.908.667.000,00
	b) DBH	208.879.658.765,00
	Jumlah Penerimaan	1.874.788.325.765,00
2	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	
	b) DBH yang bersifat earmarked	
	c) ADD	187.478.832.577,00
	Jumlah Pengurang	187.478.832.577,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.687.309.493.188,00

**Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah
APBD Tahun Anggaran 2022**

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal	414.503.364.911,00
	1) tanah	37.895.997.070,00
	2) peralatan dan mesin	73.847.757.800,00
	3) bangunan dan gedung	141.706.387.278,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi	127.271.190.416,00
	5) aset tetap lainnya	33.782.032.347,00
	6) aset lainnya	
	b) Belanja Pemeliharaan	
2	a) Belanja Hibah	282.270.820.935,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	4.137.249.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	700.911.434.846,00
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	0,42



Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum yang diperhitungkan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan	
	Dana Transfer Umum	
	a) DAU	1.665.908.667.000,00
	b) DBH	208.879.658.765,00
	Jumlah Penerimaan	1.874.788.325.765,00
2	Pengurang	
	a) DAU Tambahan	
	b) DBH yang bersifat earmarked	22.350.882.000,00
	c) ADD	187.478.832.577,00
	Jumlah Pengurang	209.829.714.577,00
3	Jumlah Dana Transfer Umum yang Diperhitungkan	1.664.958.611.188,00

Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (Rp)
1	a) Belanja Modal	746.293.704.497,00
	1) tanah	28.823.821.290,00
	2) peralatan dan mesin	123.372.268.779,00
	3) bangunan dan gedung	156.653.893.244,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi	418.336.007.553,00
	5) aset tetap lainnya	19.107.713.631,00
	6) aset lainnya	
	b) Belanja Pemeliharaan	
2	a) Belanja Hibah	395.928.841.186,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	26.238.195.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan	
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	1.168.460.740.683,00
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	0,70



**Penganggaran Dana Pengawasan dalam APBD
Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Garut**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.179.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.292.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.567.909,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171.984.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.351.120.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.277.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.181.800,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.927.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.250.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.423.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	225.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.285.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	148.881.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.528.513,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.840.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.016.650,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.700.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.399.059.178,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.087.817.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.099.443.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	22.425.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	249.250.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	951.520.000,00



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	824.045.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.598.250.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	327.339.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	223.850.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	87.350.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	404.901.350,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	222.795.000,00
Jumlah Dana Pengawasan			16.000.000.000,00
Total Belanja Daerah			4.418.868.903.338,00
Persentase (Jumlah Dana Pengawasan/Total Belanja Daerah)			0,36%



**Penganggaran Dana Pengawasan dalam Perubahan APBD
Tahun Anggaran Kabupaten Garut**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56.179.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.292.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.500.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.321.217.482,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	148.567.909,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	191.494.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.628.339.100,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.277.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.679.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.927.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	205.250.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.423.900,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	225.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	447.285.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	148.881.400,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.170.513,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.840.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128.016.650,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.700.000,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.430.178,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.445.880.500,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.295.765.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	22.425.000,00



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	193.370.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Desa	951.520.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.049.220.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.696.545.500,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	327.339.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	128.465.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	87.350.000,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	404.901.350,00
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegeakan Integritas	319.690.000,00
Jumlah Dana Pengawasan			23.194.942.282,00
Total Belanja Daerah			4.889.077.196.446,00
Persentase (Jumlah Dana Pengawasan/Total Belanja Daerah)			0,47%



**Penganggaran Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Garut**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	325.002.000,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.253.020.395,00
Jumlah Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN			7.578.022.395,00
Total Belanja Daerah			4.404.933.035.873,00
Persentase (Jumlah Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN/Total Belanja Daerah)			0,17%



**Penganggaran Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Garut**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Dana
Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	274.319.750,00
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7.093.439.850,00
Jumlah Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN			7.367.759.600,00
Total Belanja Daerah			4.919.944.484.758,00
Persentase (Jumlah Dana Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN/Total Belanja Daerah)			0,15%



**Penganggaran Bagi Hasil ke Desa dan ADD dalam APBD TA 2022
Kabupaten Garut**

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	152.811.500.000,00	
10% dari Pendapatan Pajak Daerah (ketentuan)	15.281.150.000,00	
<u>Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>15.281.150.000,00</u>	
Selisih	-	
Rasio Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa		10%
Keterangan		
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	Jumlah (Rp)	%
Hasil Retribusi Daerah	20.852.839.420,00	
10% dari Hasil Retribusi Daerah (ketentuan)	2.085.283.942,00	
<u>Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>2.085.283.942,00</u>	
Selisih	-	
Rasio Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa		10%
Keterangan		
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (ADD)	Jumlah (Rp)	%
Total Dana Perimbangan	2.903.939.986.765,00	
DAK	<u>1.029.151.661.000,00</u>	
Total Dana Perimbangan - DAK	1.874.788.325.765,00	
10% dari Total Dana Perimbangan - DAK (ketentuan)	187.478.832.576,50	
<u>Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>705.725.851.577,00</u>	
Dana Desa (APBN)	518.247.019.000,00	
<u>Bantuan Keuangan - Dana Desa</u>	<u>187.478.832.577,00</u>	
Selisih	518.247.019.000,00	
Rasio Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		
Keterangan		

**Penganggaran Bagi Hasil ke Desa dan ADD dalam Perubahan APBD TA 2022
Kabupaten Garut**

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah	156.311.500.000,00	
10% dari Pendapatan Pajak Daerah (ketentuan)	15.631.150.000,00	
<u>Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>15.631.150.000,00</u>	
Selisih	-	
Rasio Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa		10%
Keterangan		
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	Jumlah (Rp)	%
Hasil Retribusi Daerah	22.150.188.325,00	
10% dari Hasil Retribusi Daerah (ketentuan)	2.215.018.832,50	
<u>Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>2.261.018.753,00</u>	
Selisih	45.999.920,50	
Rasio Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa		10%
Keterangan		
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (ADD)	Jumlah (Rp)	%
Total Dana Perimbangan	2.935.857.584.765,00	
DAK	<u>1.031.181.861.000,00</u>	
Total Dana Perimbangan - DAK	1.904.675.723.765,00	
10% dari Total Dana Perimbangan - DAK (ketentuan)	190.467.572.376,50	
<u>Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (dianggarkan)</u>	<u>713.449.989.466,00</u>	
Dana Desa (APBN)	518.247.019.000,00	
<u>Bantuan Keuangan - Dana Desa</u>	<u>195.202.970.466,00</u>	
Selisih	518.247.019.000,00	
Rasio Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa		
Keterangan		



Bab VII Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut disusun untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dalam membuat keputusan baik ekonomi, sosial maupun politik.

Laporan Keuangan juga menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Peningkatan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Garut telah dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PPK SKPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; memberi kesempatan kepada pegawai yang berkompeten untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan daerah, mengembangkan infrastruktur baik *hardware* maupun *software* yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, guna mendukung pengelolaan keuangan daerah yang profesional sehingga diharapkan akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut dapat dicapai.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut TA 2022.

Garut, Mei 2023

BUPATI


Dr. H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP.



Pemerintah Kabupaten Garut

Pernyataan Tanggung Jawab





Bupati Garut

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Garut, Mei 2023

BUPATI



Dr. H. RUDY GUNAWAN, SH.,MH.,MP.



Pemerintah Kabupaten Garut

Lampiran - Lampiran



BERITA ACARA

Sehubungan dengan Penutupan Tahun Buku Kas Daerah Kabupaten Garut tanggal 31 Desember 2022, dengan ini kami sampaikan data sebagai berikut :

Saldo menurut Bank	Rp. 154.118.430.385,00
Saldo menurut BUD	Rp. 154.118.430.385,00
Selisih	Rp. 0,00

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Garut
Tanggal 05 Januari 2023
Yang Membuat Berita Acara


Jajang Jayasman
Manager Bisnis


Ajeng Gumati Sumpena
Manager Operasional


bank bjb
KANTOR CABANG GARUT

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
REKAPITULASI HARIAN BUKU KAS UMUM (BKU)
TAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL KAS DAERAH	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	SALDO Rp
1	2	3	4
03-Jan-22	304.542.751.634,00	74.366.835.109,00	230.175.916.525,00
04-Jan-22	336.700.778,00	42.639.661,00	230.469.977.642,00
05-Jan-22	291.151.155,00	56.229.389,00	230.704.899.408,00
06-Jan-22	141.456.527,00	6.731.597.018,00	224.114.758.917,00
07-Jan-22	363.193.970,00	23.061.733.196,00	201.416.219.691,00
08-Jan-22	15.662.045,00	-	201.431.881.736,00
10-Jan-22	745.472.791,00	3.188.522.767,00	198.988.831.760,00
11-Jan-22	1.114.100.151,00	4.662.175.584,00	195.440.756.327,00
12-Jan-22	559.340.681,00	482.003.510,00	195.518.093.498,00
13-Jan-22	330.690.897,00	5.560.886.273,00	190.287.898.122,00
14-Jan-22	2.936.910.961,00	1.577.135.982,00	191.647.673.101,00
17-Jan-22	223.666.073,00	-	191.871.339.174,00
18-Jan-22	252.664.565,00	2.909.716.237,00	189.214.287.502,00
19-Jan-22	213.421.369,00	264.499.805,00	189.163.209.066,00
20-Jan-22	6.766.448.316,00	2.391.386.535,00	193.538.270.847,00
21-Jan-22	58.169.434,00	243.789.000,00	193.352.651.281,00
22-Jan-22	49.970,00	-	193.352.701.251,00
24-Jan-22	313.719.984,00	4.055.394,00	193.662.365.841,00
25-Jan-22	203.334.658,00	71.357.786,00	193.794.342.713,00
26-Jan-22	140.403.882,00	102.300.063,00	193.832.446.532,00
27-Jan-22	238.938.647,00	5.021.166.193,00	189.050.218.986,00
28-Jan-22	352.884.965,00	744.891.480,00	188.658.212.471,00
31-Jan-22	153.825.323.903,00	1.783.388.293,00	340.700.148.081,00
02-Feb-22	151.752.480,00	88.003.052.301,00	252.848.848.260,00
03-Feb-22	176.774.937,00	-	253.025.623.197,00
04-Feb-22	70.146.683,00	7.223.305.040,00	245.872.464.840,00
07-Feb-22	193.600.115,00	-	246.066.064.955,00
08-Feb-22	396.077.244,00	331.512.495,00	246.130.629.704,00
09-Feb-22	1.106.787.497,00	-	247.237.417.201,00
10-Feb-22	540.536.449,00	-	247.777.953.650,00
11-Feb-22	207.216.064,00	1.418.441.379,00	246.566.728.335,00
14-Feb-22	852.300.291,00	-	247.419.028.626,00
15-Feb-22	644.636.864,00	2.668.357.590,00	245.395.307.900,00
16-Feb-22	163.014.591,00	2.462.296.653,00	243.096.025.838,00
17-Feb-22	13.724.355.936,00	3.364.207.059,00	253.456.174.715,00
18-Feb-22	763.782.862,00	2.536.454.145,00	251.683.503.432,00
21-Feb-22	433.694.990,00	451.113.087,00	251.666.085.335,00
22-Feb-22	314.337.595,00	1.000.000.000,00	250.980.422.930,00
23-Feb-22	594.292.834,00	2.287.687.534,00	249.287.028.230,00
24-Feb-22	488.161.614,00	393.278.663,00	249.381.911.181,00
25-Feb-22	141.237.466.070,00	3.741.326.548,00	386.878.050.703,00
28-Feb-22	554.769.125,00	-	387.432.819.828,00
01-Mar-22	305.499.880,00	75.641.790.207,00	312.096.529.501,00
02-Mar-22	308.807.950,00	12.986.566.687,00	299.418.770.764,00
04-Mar-22	358.770.884,00	60.651.040,00	299.716.890.608,00
07-Mar-22	358.535.709,00	8.173.041.069,00	291.902.385.248,00
08-Mar-22	503.243.115,00	-	292.405.628.363,00
09-Mar-22	813.280.091,00	3.716.806.463,00	289.502.101.991,00
10-Mar-22	644.570.904,00	7.957.214.975,00	282.189.457.920,00
11-Mar-22	302.256.685,00	-	282.491.714.605,00
14-Mar-22	774.931.946,00	1.391.866.010,00	281.874.780.541,00
15-Mar-22	688.336.535,00	1.212.626.840,00	281.350.490.236,00
16-Mar-22	451.287.664,00	1.611.005.477,00	280.190.772.423,00

TANGGAL KAS DAERAH	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	SALDO Rp
17-Mar-22	12.982.250.660,00	1.147.184.855,00	292.025.838.228,00
18-Mar-22	479.296.183,00	7.276.243.897,00	285.228.890.514,00
21-Mar-22	971.560.545,00	-	286.200.451.059,00
22-Mar-22	327.422.678,00	6.346.087.837,00	280.181.785.900,00
23-Mar-22	11.613.539.793,00	43.200.000,00	291.752.125.693,00
24-Mar-22	367.509.509,00	2.580.896.828,00	289.538.738.374,00
25-Mar-22	203.655.339,00	3.244.622.120,00	286.497.771.593,00
28-Mar-22	345.978.820,00	677.479.245,00	286.166.271.168,00
29-Mar-22	110.347.482.238,00	10.072.554.846,00	386.441.198.560,00
30-Mar-22	23.714.264.398,00	23.490.424.387,00	386.665.038.571,00
31-Mar-22	163.638.831.259,00	9.972.079.551,00	540.331.790.279,00
01-Apr-22	349.675.489,00	102.882.971.593,00	437.798.494.175,00
04-Apr-22	216.218.167,00	235.089.614,00	437.779.622.728,00
05-Apr-22	1.420.432.394,00	2.669.823.707,00	436.530.231.415,00
06-Apr-22	495.341.015,00	-	437.025.572.430,00
07-Apr-22	3.440.715.948,00	1.281.617.042,00	439.184.671.336,00
08-Apr-22	519.648.521,00	6.860.253.995,00	432.844.065.862,00
11-Apr-22	722.020.443,00	2.888.446.120,00	430.677.640.185,00
12-Apr-22	2.032.291.142,00	1.189.189.131,00	431.520.742.196,00
13-Apr-22	10.646.814.952,00	5.932.627.476,00	436.234.929.672,00
14-Apr-22	3.653.911.766,00	55.300.269.361,00	384.588.572.077,00
18-Apr-22	710.524.635,00	7.471.951.642,00	377.827.145.070,00
19-Apr-22	376.695.906,00	4.981.799.963,00	373.222.041.013,00
20-Apr-22	657.185.421,00	16.822.629.509,00	357.056.596.925,00
21-Apr-22	436.765.756,00	48.202.907.905,00	309.290.454.776,00
22-Apr-22	230.765.507,00	68.016.993.465,00	241.504.226.818,00
24-Apr-22	6.363,00	-	241.504.233.181,00
25-Apr-22	19.146.745.788,00	11.202.199.089,00	249.448.779.880,00
26-Apr-22	743.287.354,00	10.134.105.669,00	240.057.961.565,00
27-Apr-22	3.910.194.325,00	26.482.373.786,00	217.485.782.104,00
28-Apr-22	139.182.354.663,00	12.581.545.070,00	344.086.591.697,00
29-Apr-22	1.339.984,00	-	344.087.931.681,00
30-Apr-22	789.023.729,00	-	344.876.955.410,00
05-Mei-22	34.294.800,00	-	344.911.250.210,00
09-Mei-22	510.400.114,00	75.373.434.472,00	270.048.215.852,00
10-Mei-22	780.971.456,00	498.276.243,00	270.330.911.065,00
11-Mei-22	792.612.772,00	337.780.954,00	270.785.742.883,00
12-Mei-22	600.335.618,00	3.375.196.453,00	268.010.882.048,00
13-Mei-22	425.754.057,00	4.131.116.249,00	264.305.519.856,00
17-Mei-22	6.635.537.672,00	4.456.872.003,00	266.484.185.525,00
18-Mei-22	51.039.012.073,00	2.885.856.627,00	314.637.340.971,00
19-Mei-22	3.807.630.562,00	5.811.891.867,00	312.633.079.666,00
20-Mei-22	383.200.527,00	3.879.048.481,00	309.137.231.712,00
22-Mei-22	5.435.401,00	-	309.142.667.113,00
23-Mei-22	11.054.697.728,00	2.693.209.273,00	317.504.155.568,00
24-Mei-22	683.236.111,00	32.703.947.083,00	285.483.444.596,00
25-Mei-22	46.717.329.722,00	515.770.322,00	331.685.003.996,00
26-Mei-22	93.344.275,00	-	331.778.348.271,00
27-Mei-22	397.500.481,00	6.922.424.093,00	325.253.424.659,00
30-Mei-22	514.236.602,00	7.722.795.315,00	318.044.865.946,00
31-Mei-22	141.140.885.222,00	7.095.956.158,00	452.089.795.010,00
02-Jun-22	386.837.078,00	86.213.314.556,00	366.263.317.532,00
03-Jun-22	264.284.101,00	720.300.000,00	365.807.301.633,00
04-Jun-22	24.495.882,00	-	365.831.797.515,00
06-Jun-22	350.314.182,00	7.789.467.149,00	358.392.644.548,00
07-Jun-22	1.068.497.174,00	4.364.090.043,00	355.097.051.679,00
08-Jun-22	717.717.306,00	4.863.798.492,00	350.950.970.493,00
09-Jun-22	1.133.526.627,00	5.146.105.051,00	346.938.392.069,00
10-Jun-22	372.347.384,00	6.883.629.883,00	340.427.109.570,00

TANGGAL KAS DAERAH	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	SALDO Rp
11-Jun-22	41.948.472,00	-	340.469.058.042,00
13-Jun-22	239.826.993,00	6.837.797.074,00	333.871.087.961,00
14-Jun-22	846.464.652,00	16.861.467.176,00	317.856.085.437,00
15-Jun-22	660.779.770,00	1.660.512.761,00	316.856.352.446,00
16-Jun-22	5.191.474.576,00	886.139.158,00	321.161.687.864,00
17-Jun-22	10.252.437.728,00	4.850.253.839,00	326.563.871.753,00
20-Jun-22	392.356.483,00	5.682.463.171,00	321.273.765.065,00
21-Jun-22	546.577.542,00	364.883.973,00	321.455.458.634,00
22-Jun-22	27.393.762.018,00	9.426.415.931,00	339.422.804.721,00
23-Jun-22	1.592.804.654,00	2.645.658.019,00	338.369.951.356,00
24-Jun-22	342.328.262,00	928.884.460,00	337.783.395.158,00
27-Jun-22	501.312.814,00	1.233.974.260,00	337.050.733.712,00
28-Jun-22	3.819.590.324,00	6.011.225.624,00	334.859.098.412,00
29-Jun-22	91.664.780.239,00	4.911.056.677,00	421.612.821.974,00
30-Jun-22	142.818.946.518,00	121.487.481.932,00	442.944.286.560,00
01-Jul-22	137.746.134,00	82.166.414.034,00	360.915.618.660,00
04-Jul-22	551.116.749,00	96.467.732.934,00	264.999.002.475,00
05-Jul-22	12.312.096.878,00	9.578.807.198,00	267.732.292.155,00
06-Jul-22	892.945.108,00	4.944.044.785,00	263.681.192.478,00
07-Jul-22	1.149.869.938,00	15.439.700.927,00	249.391.361.489,00
08-Jul-22	635.973.410,00	5.127.375.237,00	244.899.959.662,00
11-Jul-22	224.874.748,00	1.178.517.914,00	243.946.316.496,00
12-Jul-22	441.751.778,00	5.168.173.414,00	239.219.894.860,00
13-Jul-22	534.201.126,00	21.373.648.074,00	218.380.447.912,00
14-Jul-22	3.442.805.250,00	14.430.720.087,00	207.392.533.075,00
15-Jul-22	285.551.288,00	3.999.333.026,00	203.678.751.337,00
17-Jul-22	3.454.648,00	-	203.682.205.985,00
18-Jul-22	374.097.014,00	2.541.966.757,00	201.514.336.242,00
19-Jul-22	11.229.337.625,00	10.202.449.044,00	202.541.224.823,00
20-Jul-22	939.796.251,00	4.168.654.722,00	199.312.366.352,00
21-Jul-22	19.210.996.387,00	4.149.523.325,00	214.373.839.414,00
22-Jul-22	338.146.931,00	4.991.025.871,00	209.720.960.474,00
24-Jul-22	252,00	-	209.720.960.726,00
25-Jul-22	728.187.767,00	4.019.170.588,00	206.429.977.905,00
26-Jul-22	1.331.293.656,00	8.486.640.644,00	199.274.630.917,00
27-Jul-22	524.923.594,00	2.955.316.595,00	196.844.237.916,00
28-Jul-22	553.920.967,00	4.653.608.752,00	192.744.550.131,00
29-Jul-22	40.859.985.205,00	8.542.438.321,00	225.062.097.015,00
30-Jul-22	906.000,00	-	225.063.003.015,00
31-Jul-22	535.104.916,00	-	225.598.107.931,00
01-Agu-22	327.250.650,00	75.118.060.472,00	150.807.298.109,00
02-Agu-22	139.243.840.953,00	3.907.177.712,00	286.143.961.350,00
03-Agu-22	2.296.500.850,00	12.914.958.295,00	275.525.503.905,00
04-Agu-22	811.145.961,00	5.182.746.927,00	271.153.902.939,00
05-Agu-22	438.344.678,00	3.454.296.180,00	268.137.951.437,00
08-Agu-22	1.139.982.173,00	7.152.801.275,00	262.125.132.335,00
09-Agu-22	1.098.393.325,00	6.404.094.522,00	256.819.431.138,00
10-Agu-22	486.005.894,00	532.948.399,00	256.772.488.633,00
11-Agu-22	595.489.247,00	15.452.961.365,00	241.915.016.515,00
12-Agu-22	15.307.688.120,00	8.962.247.488,00	248.260.457.147,00
14-Agu-22	26.908.177,00	-	248.287.365.324,00
15-Agu-22	475.904.964,00	4.661.382.096,00	244.101.888.192,00
16-Agu-22	461.995.099,00	6.581.614.229,00	237.982.269.062,00
18-Agu-22	634.884.872,00	6.234.809.880,00	232.382.344.054,00
19-Agu-22	1.517.228.023,00	2.224.659.921,00	231.674.912.156,00
20-Agu-22	13.623.550,00	-	231.688.535.706,00
22-Agu-22	1.112.302.457,00	2.145.645.600,00	230.655.192.563,00
23-Agu-22	15.071.227.396,00	3.370.777.915,00	242.355.642.044,00
24-Agu-22	828.524.634,00	11.057.367.101,00	232.126.799.577,00

TANGGAL KAS DAERAH	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	SALDO Rp
25-Agu-22	495.812.049,00	1.555.713.109,00	231.066.898.517,00
26-Agu-22	30.253.686.484,00	10.209.624.841,00	251.110.960.160,00
29-Agu-22	1.441.698.927,00	524.715.384,00	252.027.943.703,00
30-Agu-22	944.466.861,00	5.337.823.339,00	247.634.587.225,00
31-Agu-22	276.943.782.807,00	1.083.334.480,00	523.495.035.552,00
01-Sep-22	501.883.167,00	136.209.345.980,00	387.787.572.739,00
02-Sep-22	11.045.716.411,00	9.964.203.607,00	388.869.085.543,00
03-Sep-22	1.005.820,00	-	388.870.091.363,00
05-Sep-22	399.356.217,00	1.959.745.138,00	387.309.702.442,00
06-Sep-22	1.784.156.793,00	5.533.555.958,00	383.560.303.277,00
07-Sep-22	1.231.260.895,00	3.350.239.840,00	381.441.324.332,00
08-Sep-22	1.217.589.609,00	2.298.277.457,00	380.360.636.484,00
09-Sep-22	1.321.065.087,00	9.417.235.810,00	372.264.465.761,00
11-Sep-22	1.011.500,00	-	372.265.477.261,00
12-Sep-22	1.481.441.093,00	6.670.394.050,00	367.076.524.304,00
13-Sep-22	620.706.006,00	14.570.327.279,00	353.126.903.031,00
14-Sep-22	446.673.990,00	9.610.464.282,00	343.963.112.739,00
15-Sep-22	14.325.425.942,00	2.580.349.761,00	355.708.188.920,00
16-Sep-22	12.734.399.338,00	2.678.389.478,00	365.764.198.780,00
19-Sep-22	10.630.124.003,00	3.675.835.573,00	372.718.487.210,00
20-Sep-22	2.987.688.145,00	1.637.111.019,00	374.069.064.336,00
21-Sep-22	906.310.516,00	3.090.389.937,00	371.884.984.915,00
22-Sep-22	27.860.293.916,00	5.326.827.017,00	394.418.451.814,00
23-Sep-22	645.469.044,00	17.246.002.480,00	377.817.918.378,00
24-Sep-22	6.853,00	-	377.817.925.231,00
26-Sep-22	1.486.703.138,00	14.898.683.517,00	364.405.944.852,00
27-Sep-22	598.117.816,00	2.017.706.987,00	362.986.355.681,00
28-Sep-22	1.172.311.185,00	9.844.659.678,00	354.314.007.188,00
29-Sep-22	2.483.091.825,00	2.319.666.000,00	354.477.433.013,00
30-Sep-22	256.844.364.450,00	8.450.726.509,00	602.871.070.954,00
01-Okt-22	479.066.316,00	-	603.350.137.270,00
03-Okt-22	204.205.970,00	75.626.538.676,00	527.927.804.564,00
04-Okt-22	539.942.866,00	12.046.511.651,00	516.421.235.779,00
05-Okt-22	2.003.684.219,00	6.362.068.180,00	512.062.851.818,00
06-Okt-22	979.204.816,00	6.372.292.542,00	506.669.764.092,00
07-Okt-22	868.385.132,00	5.134.250.955,00	502.403.898.269,00
08-Okt-22	3.341.637,00	-	502.407.239.906,00
10-Okt-22	532.593.068,00	4.532.325.239,00	498.407.507.735,00
11-Okt-22	6.928.426.562,00	5.311.494.359,00	500.024.439.938,00
12-Okt-22	3.308.333.331,00	2.678.337.903,00	500.654.435.366,00
13-Okt-22	2.936.819.802,00	5.312.516.755,00	498.278.738.413,00
14-Okt-22	15.075.624.345,00	6.709.570.575,00	506.644.792.183,00
16-Okt-22	6.313.260,00	-	506.651.105.443,00
17-Okt-22	34.189.333.159,00	13.088.370.314,00	527.752.068.288,00
18-Okt-22	67.259.979.928,00	6.547.515.816,00	588.464.532.400,00
19-Okt-22	544.623.358,00	8.000.357.952,00	581.008.797.806,00
20-Okt-22	1.191.657.787,00	4.972.467.037,00	577.227.988.556,00
21-Okt-22	33.823.186.463,00	23.842.970.606,00	587.208.204.413,00
22-Okt-22	5.667.740,00	1.782,00	587.213.870.371,00
24-Okt-22	10.713.220.661,00	81.849.057.900,00	516.078.033.132,00
25-Okt-22	3.450.915.901,00	5.779.440.026,00	513.749.509.007,00
26-Okt-22	327.272.085,00	5.553.216.356,00	508.523.564.736,00
27-Okt-22	2.895.486.167,00	2.838.879.673,00	508.580.171.230,00
28-Okt-22	41.217.972.985,00	7.957.797.670,00	541.840.346.545,00
31-Okt-22	188.512.728.044,00	1.885.772.897,00	728.467.301.692,00
01-Nov-22	169.719.415,00	91.008.692.389,00	637.628.328.718,00
02-Nov-22	165.565.774,00	18.681.472.246,00	619.112.422.246,00
03-Nov-22	952.680.014,00	9.045.713.847,00	611.019.388.413,00
04-Nov-22	1.973.735.852,00	25.701.180.425,00	587.291.943.840,00

TANGGAL KAS DAERAH	PENERIMAAN Rp	PENGELUARAN Rp	SALDO Rp
07-Nov-22	3.957.415.020,00	3.929.426.661,00	587.319.932.199,00
08-Nov-22	548.404.443,00	18.477.726.299,00	569.390.610.343,00
09-Nov-22	571.285.570,00	8.910.287.495,00	561.051.608.418,00
10-Nov-22	976.541.640,00	6.726.148.989,00	555.302.001.069,00
11-Nov-22	3.428.110.814,00	24.586.922.690,00	534.143.189.193,00
14-Nov-22	525.208.674,00	3.333.302.879,00	531.335.094.988,00
15-Nov-22	20.983.304.909,00	8.903.916.002,00	543.414.483.895,00
16-Nov-22	896.553.327,00	13.239.427.646,00	531.071.609.576,00
17-Nov-22	366.089.687,00	6.263.388.474,00	525.174.310.789,00
18-Nov-22	4.308.448.583,00	19.460.485.983,00	510.022.273.389,00
21-Nov-22	3.020.059.681,00	3.618.507.300,00	509.423.825.770,00
22-Nov-22	709.780.331,00	4.432.317.912,00	505.701.288.189,00
23-Nov-22	17.283.729.589,00	10.566.043.512,00	512.418.974.266,00
24-Nov-22	286.746.638,00	8.352.844.855,00	504.352.876.049,00
25-Nov-22	583.318.881,00	12.670.076.093,00	492.266.118.837,00
28-Nov-22	403.320.429,00	140.746.100,00	492.528.693.166,00
29-Nov-22	6.110.179.573,00	15.140.814.917,00	483.498.057.822,00
30-Nov-22	150.569.869.097,00	4.232.220.751,00	629.835.706.168,00
01-Des-22	243.330.052,00	104.958.439.200,00	525.120.597.020,00
02-Des-22	363.425.187,00	16.605.824.810,00	508.878.197.397,00
05-Des-22	3.981.901.495,00	2.086.478.310,00	510.773.620.582,00
06-Des-22	285.669.031,00	24.855.439.160,00	486.203.850.453,00
07-Des-22	3.080.379.922,00	5.330.636.113,00	483.953.594.262,00
08-Des-22	776.219.965,00	12.854.620.931,00	471.875.193.296,00
09-Des-22	51.919.651.206,00	22.381.066.804,00	501.413.777.698,00
12-Des-22	96.412.795.162,00	16.265.569.857,00	581.561.003.003,00
13-Des-22	682.525.545,00	10.188.457.137,00	572.055.071.411,00
14-Des-22	4.763.373.706,00	12.343.108.502,00	564.475.336.615,00
15-Des-22	3.736.120.251,00	26.456.300.882,00	541.755.155.984,00
16-Des-22	21.136.116.120,00	21.595.504.693,00	541.295.767.411,00
18-Des-22	41.149.500,00	-	541.336.916.911,00
19-Des-22	14.405.423.833,00	11.701.732.377,00	544.040.608.367,00
20-Des-22	1.386.956.247,00	25.544.128.634,00	519.883.435.980,00
21-Des-22	11.619.870.837,00	33.075.784.803,00	498.427.522.014,00
22-Des-22	1.292.310.603,00	44.169.097.701,00	455.550.734.916,00
23-Des-22	3.884.139.772,00	29.644.908.271,00	429.789.966.417,00
24-Des-22	2.465.364,00	-	429.792.431.781,00
26-Des-22	28.270.739.751,00	53.130.692.967,00	404.932.478.565,00
27-Des-22	32.377.961.846,00	18.777.340.151,00	418.533.100.260,00
28-Des-22	1.334.306.719,00	65.588.182.304,00	354.279.224.675,00
29-Des-22	3.304.510.287,00	46.116.623.723,00	311.467.111.239,00
30-Des-22	6.922.644.494,00	165.334.904.822,00	153.054.850.911,00
31-Des-22	1.063.579.474,00	-	154.118.430.385,00
JUMLAH	3.585.010.824.064,00	3.430.892.393.679,00	154.118.430.385,00

BEBAN DIBAYAR DI MUKA PER 31 DESEMBER 2022

No	SKPD	Beban Dibayar Di Muka				Jumlah
		Pajak Kendaraan	PBI	Premi Asuransi BMD	Premi Asuransi Pengunjung Objek Wisata	
1	Dinas Pendidikan	14.586.456,71	-	-	-	14.586.456,71
2	Dinas Kesehatan	23.843.785,62	30.791.022.000,00	-	-	30.814.865.785,62
	- BLUD Puskesmas	24.258.177,53	-	-	-	24.258.177,53
3	BLUD RSUD dr Slamet	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.750.403,29	-	-	-	24.750.403,29
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.019.169,04	-	-	-	3.019.169,04
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.120.695,34	-	-	-	15.120.695,34
7	Dinas Pemadam Kebakaran	7.268.652,60	-	-	-	7.268.652,60
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.317.529,86	-	-	-	12.317.529,86
9	Dinas Sosial	9.453.724,35	-	-	-	9.453.724,35
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.907.026,03	-	-	-	2.907.026,03
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.288.740,15	-	-	-	6.288.740,15
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.807.104,10	-	-	-	4.807.104,10
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.317.409,04	-	-	-	5.317.409,04
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.726.900,05	-	-	-	6.726.900,05
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	26.116.866,88	-	-	-	26.116.866,88
16	Dinas Perhubungan	6.796.922,80	-	-	-	6.796.922,80
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.537.012,33	-	-	-	5.537.012,33
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.976.817,53	-	-	-	1.976.817,53
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	5.300.582,74	-	-	-	5.300.582,74
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.129.807,67	-	-	-	2.129.807,67
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.617.626,85	-	-	-	2.617.626,85
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	4.954.161,64	-	-	-	4.954.161,64
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.578.292,60	-	-	17.500.000,00	24.078.292,60
24	Dinas Pertanian	15.206.483,01	-	-	-	15.206.483,01
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	8.872.013,42	-	-	-	8.872.013,42
26	Sekretariat Daerah	36.522.918,67	-	14.539.972,60	-	51.062.891,27
27	Sekretariat DPRD	4.750.819,45	-	-	-	4.750.819,45
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.721.971,78	-	-	-	6.721.971,78
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.459.828,26	-	-	-	9.459.828,26
30	Badan Pendapatan Daerah	8.862.806,03	-	-	-	8.862.806,03
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	7.643.185,76	-	-	-	7.643.185,76
32	Inspektorat	10.534.253,97	-	-	-	10.534.253,97
33	Kecamatan Banjarnegara	467.019,18	-	-	-	467.019,18
34	Kecamatan Banyuwangi	2.568.768,49	-	-	-	2.568.768,49
35	Kecamatan Bayungbong	987.216,23	-	-	-	987.216,23
36	Kecamatan Balubur Limbangan	2.676.327,12	-	-	-	2.676.327,12
37	Kecamatan Bungbulang	484.900,27	-	-	-	484.900,27
38	Kecamatan Caringin	666.120,55	-	-	-	666.120,55
39	Kecamatan Cibalong	765.386,85	-	-	-	765.386,85
40	Kecamatan Cibatu	1.679.334,25	-	-	-	1.679.334,25
41	Kecamatan Cibiuk	534.680,82	-	-	-	534.680,82
42	Kecamatan Cigedug	648.851,23	-	-	-	648.851,23
43	Kecamatan Cihurip	1.012.970,96	-	-	-	1.012.970,96
44	Kecamatan Cikajang	2.014.333,70	-	-	-	2.014.333,70
45	Kecamatan Cikelet	989.399,18	-	-	-	989.399,18
46	Kecamatan Cilawu	2.771.655,34	-	-	-	2.771.655,34
47	Kecamatan Cisewu	619.468,49	-	-	-	619.468,49
48	Kecamatan Cisompet	63.760,27	-	-	-	63.760,27
49	Kecamatan Cisarupan	1.396.721,37	-	-	-	1.396.721,37
50	Kecamatan Garut Kota	1.577.643,84	-	-	-	1.577.643,84
51	Kecamatan Kadungora	775.072,60	-	-	-	775.072,60
52	Kecamatan Karangtengah	1.133.778,90	-	-	-	1.133.778,90
53	Kecamatan Karangpawitan	6.299.116,72	-	-	-	6.299.116,72
54	Kecamatan Kersamanah	1.133.768,77	-	-	-	1.133.768,77
55	Kecamatan Leles	2.858.095,89	-	-	-	2.858.095,89
56	Kecamatan Leuwigoong	995.934,25	-	-	-	995.934,25
57	Kecamatan Malangbong	1.958.848,49	-	-	-	1.958.848,49
58	Kecamatan Mekarmukti	406.433,42	-	-	-	406.433,42
59	Kecamatan Pakenjeng	941.578,08	-	-	-	941.578,08
60	Kecamatan Pameungpeuk	2.067.115,07	-	-	-	2.067.115,07
61	Kecamatan Pamulihan	369.189,04	-	-	-	369.189,04
62	Kecamatan Pangatikan	1.040.356,44	-	-	-	1.040.356,44
63	Kecamatan Pasirwangi	1.422.272,60	-	-	-	1.422.272,60
64	Kecamatan Peundeuy	-	-	-	-	-
65	Kecamatan Samarang	2.555.156,71	-	-	-	2.555.156,71
66	Kecamatan Selaawi	1.106.127,12	-	-	-	1.106.127,12
67	Kecamatan Singajaya	1.753.936,71	-	-	-	1.753.936,71
68	Kecamatan Sucinaraja	399.987,67	-	-	-	399.987,67
69	Kecamatan Sukaresmi	685.760,55	-	-	-	685.760,55
70	Kecamatan Sukawening	594.079,45	-	-	-	594.079,45
71	Kecamatan Talegong	1.018.210,96	-	-	-	1.018.210,96
72	Kecamatan Tarogong Kaler	3.277.750,68	-	-	-	3.277.750,68
73	Kecamatan Tarogong Kidul	2.895.538,36	-	-	-	2.895.538,36
74	Kecamatan Wanaraja	2.380.491,78	-	-	-	2.380.491,78
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.404.533,42	-	-	-	2.404.533,42
	Jumlah	393.645.836,92	30.791.022.000,00	14.539.972,60	17.500.000,00	31.216.707.809,52

RINCIAN PERSEDIAAN
per, 31 Desember 2022

No	Uraian	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Persediaan Bahan-Bahan Baku	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	1.432.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	17.181.450,00	-
3	BLUD RSUD dr. Slamet	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	239.737.650,00	-	-	-	-	-	79.524.200,00	-
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	-	576.900,00	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	482.450,00	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	866.594,00	2.245.361,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	243.000,00	-
9	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	321.600,00	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	3.086.671.894,20	-	-	1.658.800,00	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	982.227,00	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	1.512.740.500,00	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	999.900,00	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Peduli Anak	-	-	-	-	-	-	2.872.557,33	3.451.224,36
16	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	4.222.925,00	7.499.550,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	-	1.216.450,00	-
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	1.229.500,00	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	1.608.500,00	-
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	-	-	-	860.690,00	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	9.389.700,00	3.908.800,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	515.700,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	-	-	-	-	1.003.700,00
24	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	-	187.660,00	-
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	1.094.775,00	-
26	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	17.345.547,00	890.633,00
27	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	1.381.000,00	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	1.584.800,00	3.898.000,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	408.560,00	637.800,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	9.502.225,00	5.397.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	-	-	-	-	-	258.940,00	318.780,00
32	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	209.790,00	1.520.700,00
33	Kecamatan Banjarwangi	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Banyuwesmi	-	-	-	-	-	-	114.600,00	-
35	Kecamatan Bayongbong	-	-	-	-	-	-	854.800,00	-
36	Kecamatan Balubur Limbangan	-	-	-	-	-	2.800.000,00	-	-
37	Kecamatan Bungbulang	-	-	-	-	-	-	-	954.000,00
38	Kecamatan Caringin	-	-	-	-	-	-	348.300,00	-
39	Kecamatan Cibalong	-	-	-	-	-	-	1.082.100,00	-

No	Uraian	Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Persediaan Bahan-Bahan Kimia	Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Persediaan Bahan-Bahan Baku	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover
40	Kecamatan Cibatu	-	-	-	-	-	-	242.700,00	-
41	Kecamatan Cibiuk	-	-	-	-	-	-	286.500,00	-
42	Kecamatan Cigedug	-	-	-	-	-	-	191.800,00	362.400,00
43	Kecamatan Cihurip	-	-	-	-	-	-	-	542.550,00
44	Kecamatan Cikajang	-	-	-	-	-	-	467.200,00	-
45	Kecamatan Cikelet	-	-	-	-	-	-	515.700,00	-
46	Kecamatan Cilawu	-	-	-	-	-	-	855.200,00	585.100,00
47	Kecamatan Cisewu	-	-	-	-	-	-	176.300,00	252.300,00
48	Kecamatan Cisompet	-	-	-	-	-	-	264.000,00	-
49	Kecamatan Cisarupan	-	-	-	-	-	-	70.000,00	141.200,00
50	Kecamatan Garut Kota	-	-	-	-	-	-	432.900,00	1.302.900,00
51	Kecamatan Kadungora	-	-	-	-	-	-	17.400,00	195.100,00
52	Kecamatan Karangtengah	-	-	-	-	-	-	159.000,00	-
53	Kecamatan Karangpawitan	-	-	-	-	-	-	659.650,00	2.192.800,00
54	Kecamatan Kersamanah	-	-	-	-	-	-	216.000,00	-
55	Kecamatan Leles	-	-	-	-	400.000,00	-	-	691.500,00
56	Kecamatan Leuwigoong	-	-	-	-	-	-	507.500,00	-
57	Kecamatan Malangbong	-	-	-	-	-	-	-	221.800,00
58	Kecamatan Mekarmukti	-	-	-	-	-	-	103.800,00	850.000,00
59	Kecamatan Pakenjeng	-	-	-	-	-	-	900.800,00	-
60	Kecamatan Pamengpeuk	-	462.550,00	-	-	-	-	-	-
61	Kecamatan Pamulihan	-	-	-	-	-	-	412.300,00	146.900,00
62	Kecamatan Pangatikan	-	-	-	-	-	-	-	495.000,00
63	Kecamatan Pasirwangi	-	-	-	-	-	-	-	114.600,00
64	Kecamatan Peundeuy	-	-	-	-	-	-	-	114.600,00
65	Kecamatan Samarang	-	-	-	-	-	-	943.300,00	-
66	Kecamatan Selaawi	-	-	-	-	-	-	148.600,00	114.600,00
67	Kecamatan Singajaya	-	-	-	-	-	-	-	221.800,00
68	Kecamatan Sucinaraja	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Kecamatan Sukaresmi	-	-	-	-	-	-	3.345.300,00	-
70	Kecamatan Sukawening	-	-	-	-	-	-	-	298.200,00
71	Kecamatan Talegong	-	-	-	-	-	-	286.500,00	-
72	Kecamatan Tarogong Kaler	-	-	-	-	-	-	82.200,00	545.200,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	-	-	-	-	-	-	1.069.700,00	-
74	Kecamatan Wanaraja	-	-	-	-	-	-	501.000,00	32.200,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	1.601.150,00	1.125.150,00
	Jumlah	239.737.650,00	462.550,00	982.227,00	3.086.671.894,20	400.000,00	2.800.000,00	1.686.257.813,33	42.787.148,36

Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Persediaan Obat-Obatan-Obat	Persediaan Obat-Obatan-Obat Lainnya	Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	Persediaan Barang - BLUD	Jumlah
926.300,00	-	-	-	-	352.600,00	-	-	-	-	-	1.521.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	554.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542.550,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.000,00
75.200,00	70.000,00	-	-	-	400.000,00	-	-	-	-	-	756.400,00
406.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.142.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.852.450,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.091.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.800,00
-	-	-	5.000.000,00	-	500.000,00	-	-	-	-	-	6.453.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.800,00
-	-	-	-	-	352.000,00	-	-	-	-	-	814.550,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	559.200,00
-	-	-	-	-	105.000,00	-	-	-	-	-	600.000,00
-	-	-	-	-	819.500,00	-	-	-	-	-	934.100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	943.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263.200,00
-	-	83.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	305.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.595.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.500,00
-	-	-	-	-	612.800,00	-	-	-	-	-	1.240.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.069.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	533.200,00
2.264.600,00	500.000,00	-	137.900,00	-	-	-	-	-	-	-	5.628.800,00
899.932.640,00	1.440.000,00	4.314.500,00	6.007.500,00	77.675.425,00	48.361.977,00	24.745.727.366,67	34.966.250,00	280.584.233.385,73	260.669.228,80	11.118.377.373,08	322.841.804.929,17

**DAFTAR ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	831.550.809.170,22
2	Dinas Kesehatan	257.283.977.509,64
3	BLUD RSUD dr. Slamet	115.778.448.458,79
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.261.853.867.290,70
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	109.451.523.385,34
6	Satuan Polisi Pamong Praja	3.813.977.339,76
7	Dinas Pemadam Kebakaran	7.656.922.352,18
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.164.226.639,05
9	Dinas Sosial	9.567.693.288,84
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.085.021.883,46
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.507.848.260,07
12	Dinas Lingkungan Hidup	45.783.254.682,65
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.282.543.723,31
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.606.239.906,01
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.586.467.517,57
16	Dinas Perhubungan	29.633.775.908,99
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.699.186.046,89
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8.086.534.483,54
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10.699.374.345,88
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	64.540.687.889,47
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11.871.708.970,76
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	25.997.597.018,23
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	80.702.412.290,15
24	Dinas Pertanian	40.748.845.305,21
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	139.573.412.396,40
26	Sekretariat Daerah	58.376.389.122,88
27	Sekretariat DPRD	7.072.403.113,84
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.966.527.003,30
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	242.585.937.978,23
30	Badan Pendapatan Daerah	4.794.751.967,88
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	2.460.277.847,34
32	Inspektorat Daerah	5.996.353.523,01
33	Kecamatan Banjarwangi	2.595.329.630,67
34	Kecamatan Banyuwesmi	2.703.297.217,14
35	Kecamatan Bayongbong	3.165.417.755,68
36	Kecamatan Balubur Limbangan	3.275.848.952,22
37	Kecamatan Bungbulang	1.534.358.750,79
38	Kecamatan Caringin	1.872.757.723,02
39	Kecamatan Cibalong	1.341.772.898,37
40	Kecamatan Cibatuh	2.440.344.457,95
41	Kecamatan Cibiuk	2.541.235.500,03
42	Kecamatan Cigedug	1.340.109.314,12
43	Kecamatan Cihurip	1.979.246.308,41
44	Kecamatan Cikajang	2.838.519.024,58
45	Kecamatan Cikelet	2.338.134.934,47
46	Kecamatan Cilawu	4.501.179.531,18
47	Kecamatan Cisewu	2.218.465.067,26
48	Kecamatan Cisompet	2.260.661.434,04
49	Kecamatan Cisarupan	2.502.461.536,25
50	Kecamatan Garut Kota	14.153.560.389,30
51	Kecamatan Kadungora	3.931.799.558,93
52	Kecamatan Karangtengah	1.274.284.849,72
53	Kecamatan Karangpawitan	7.940.068.675,01
54	Kecamatan Kersamanah	1.272.687.791,76
55	Kecamatan Leles	2.937.194.429,69
56	Kecamatan Leuwigoong	4.293.512.353,62
57	Kecamatan Malangbong	3.046.068.112,96
58	Kecamatan Mekarmukti	834.633.128,05
59	Kecamatan Pakemjeng	2.481.128.354,34
60	Kecamatan Pamengpeuk	3.434.492.079,52
61	Kecamatan Pamulihan	2.319.578.911,23
62	Kecamatan Pangatikan	3.509.363.404,09

No	SKPD	(Rp)
63	Kecamatan Pasirwangi	5.156.801.416,73
64	Kecamatan Peundeuy	1.390.596.553,34
65	Kecamatan Samarang	4.312.259.854,22
66	Kecamatan Selaawi	11.459.639.364,46
67	Kecamatan Singajaya	1.729.412.962,23
68	Kecamatan Sucinaraja	1.787.574.656,78
69	Kecamatan Sukaresmi	1.336.958.474,80
70	Kecamatan Sukawening	4.027.979.496,32
71	Kecamatan Talegong	4.908.543.019,45
72	Kecamatan Tarogong Kaler	4.337.846.025,86
73	Kecamatan Tarogong Kidul	8.324.436.460,10
74	Kecamatan Wanaraja	1.967.473.068,57
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	636.536.908,06
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	3.592.032.566.954,91

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - TANAH
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Tanah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	125.213.742.142,90
2	Dinas Kesehatan	20.583.771.255,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	406.665.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.166.999.781,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	43.786.523.652,24
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran	15.892.941,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.181.787.960,00
9	Dinas Sosial	1.381.375.950,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.168.200.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.794.562.869,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	300.000.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.939.181.995,60
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.199.500.000,00
16	Dinas Perhubungan	11.087.940.427,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.694.000.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.757.700.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	866.100.000,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	38.367.819.261,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	960.500.000,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.455.812.619,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	28.709.878.531,00
24	Dinas Pertanian	15.403.373.729,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	30.889.266.170,00
26	Sekretariat Daerah	28.480.736.646,00
27	Sekretariat DPRD	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	222.038.110.585,29
30	Badan Pendapatan Daerah	362.999.961,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	-
32	Inspektorat Daerah	855.680.000,00
33	Kecamatan Banjarwangi	494.431.000,00
34	Kecamatan Banyuwesmi	67.200.000,00
35	Kecamatan Bayongbong	345.800.000,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	879.200.000,00
37	Kecamatan Bungbulang	227.750.000,00
38	Kecamatan Caringin	32.208.000,00
39	Kecamatan Cibalong	300.639.000,00
40	Kecamatan Cibatuh	-
41	Kecamatan Cibiuk	1.070.800.000,00
42	Kecamatan Cigedug	704.201.000,00
43	Kecamatan Cihurip	-
44	Kecamatan Cikajang	61.461.519,50
45	Kecamatan Cikelet	240.000.000,00
46	Kecamatan Cilawu	1.512.215.000,00
47	Kecamatan Cisewu	1.146.867.686,90
48	Kecamatan Cisompet	76.428.572,00
49	Kecamatan Cisarupan	68.800.000,00
50	Kecamatan Garut Kota	8.387.089.000,00
51	Kecamatan Kadungora	1.272.683.150,00
52	Kecamatan Karangtengah	215.600.000,00
53	Kecamatan Karangpawitan	2.867.344.300,00
54	Kecamatan Kersamanah	590.200.000,00
55	Kecamatan Leles	405.800.962,12
56	Kecamatan Leuwigoong	1.384.422.000,00
57	Kecamatan Malangbong	191.250.000,00
58	Kecamatan Mekarmukti	369.940.000,00
59	Kecamatan Pakenjeng	237.000.000,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	835.600.000,00
61	Kecamatan Pamulihan	75.000.000,00
62	Kecamatan Pangatikan	2.301.674.400,00

No	SKPD	Tanah (Rp)
63	Kecamatan Pasirwangi	3.246.686.450,00
64	Kecamatan Peundeuy	249.642.857,00
65	Kecamatan Samarang	1.475.409.000,00
66	Kecamatan Selaawi	6.282.953.202,00
67	Kecamatan Singajaya	775.000.000,00
68	Kecamatan Sucinaraja	294.000.000,00
69	Kecamatan Sukaresmi	518.675.000,00
70	Kecamatan Sukawening	927.544.500,00
71	Kecamatan Talegong	1.366.747.500,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	1.319.840.000,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	4.846.363.000,00
74	Kecamatan Wanaraja	-
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	935.732.588.575,55

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - PERALATAN DAN MESIN
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)
1	Dinas Pendidikan	294.910.202.265,44
2	Dinas Kesehatan	235.202.851.293,36
3	BLUD RSUD dr. Slamet	217.422.917.606,05
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.138.812.184,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	19.992.453.421,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.797.521.858,46
7	Dinas Pemadam Kebakaran	13.850.677.711,13
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.478.012.047,41
9	Dinas Sosial	5.492.801.103,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.268.783.106,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	6.069.337.532,57
12	Dinas Lingkungan Hidup	37.951.948.064,34
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.726.981.412,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.250.808.145,61
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.717.594.393,30
16	Dinas Perhubungan	26.037.238.585,26
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.342.773.849,01
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.922.736.229,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	4.823.690.747,99
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	4.479.908.322,48
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.117.902.664,20
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	18.969.419.284,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.600.388.151,00
24	Dinas Pertanian	23.242.326.054,43
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	14.741.944.402,80
26	Sekretariat Daerah	53.074.029.492,18
27	Sekretariat DPRD	8.941.235.318,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.875.295.542,09
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	13.669.136.158,99
30	Badan Pendapatan Daerah	7.815.335.932,70
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	5.110.988.582,23
32	Inspektorat Daerah	9.802.627.941,36
33	Kecamatan Banjarwangi	1.458.884.050,00
34	Kecamatan Banyuwesi	1.705.373.151,00
35	Kecamatan Bayongbong	1.277.899.336,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	1.872.879.959,00
37	Kecamatan Bungbulang	1.537.205.820,00
38	Kecamatan Caringin	1.224.147.100,00
39	Kecamatan Cibalong	1.386.151.440,00
40	Kecamatan Cibatuh	1.692.581.229,00
41	Kecamatan Cibiuk	1.150.569.200,00
42	Kecamatan Cigedug	849.215.974,00
43	Kecamatan Cihurip	1.124.535.520,90
44	Kecamatan Cikajang	1.801.925.153,40
45	Kecamatan Cikelet	1.075.990.700,00
46	Kecamatan Cilawu	1.867.431.585,01
47	Kecamatan Cisewu	1.153.651.556,00
48	Kecamatan Cisompet	1.347.682.235,00
49	Kecamatan Cisarupan	1.490.586.829,00
50	Kecamatan Garut Kota	5.093.086.264,00
51	Kecamatan Kadungora	1.543.336.806,27
52	Kecamatan Karangtengah	1.093.170.458,00
53	Kecamatan Karangpawitan	4.922.957.605,00
54	Kecamatan Kersamanah	1.013.005.010,01
55	Kecamatan Leles	2.064.813.625,00
56	Kecamatan Leuwigoong	1.418.738.945,00
57	Kecamatan Malangbong	1.785.359.757,00
58	Kecamatan Mekarmukti	1.181.526.555,00
59	Kecamatan Pakenjeng	1.134.032.689,30
60	Kecamatan Pamengpeuk	1.693.067.140,27
61	Kecamatan Pamulihan	1.368.974.182,00

No	SKPD	Peralatan dan Mesin (Rp)
62	Kecamatan Pangatikan	1.136.060.211,00
63	Kecamatan Pasirwangi	1.160.583.958,39
64	Kecamatan Peundeuy	1.178.851.404,00
65	Kecamatan Samarang	1.899.567.899,00
66	Kecamatan Selaawi	1.083.951.240,00
67	Kecamatan Singajaya	987.122.119,00
68	Kecamatan Sucinaraja	1.456.032.417,00
69	Kecamatan Sukaresmi	1.178.679.097,23
70	Kecamatan Sukawening	1.381.138.729,00
71	Kecamatan Talegong	1.475.059.221,02
72	Kecamatan Tarogong Kaler	2.344.138.919,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	4.062.487.513,00
74	Kecamatan Wanaraja	1.625.806.057,20
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.633.649.475,00
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	1.236.770.587.536,39

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - GEDUNG DAN BANGUNAN
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Gedung dan Bangunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.007.307.554.132,85
2	Dinas Kesehatan	274.159.281.501,38
3	BLUD RSUD dr. Slamet	124.275.404.293,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.189.345.426,55
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	47.641.701.141,10
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.987.322.384,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	2.307.845.330,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.855.793.771,00
9	Dinas Sosial	8.137.725.064,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.109.116.781,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.932.111.250,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	19.646.562.931,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.100.036.793,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.260.281.847,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.611.234.453,00
16	Dinas Perhubungan	22.945.230.496,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.329.887.940,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	5.941.036.153,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.694.743.739,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	36.507.585.132,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.942.682.104,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	23.981.925.136,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	54.832.606.029,00
24	Dinas Pertanian	38.898.644.815,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	158.259.708.931,00
26	Sekretariat Daerah	28.037.017.789,00
27	Sekretariat DPRD	10.215.483.350,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.227.992.300,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27.575.498.296,99
30	Badan Pendapatan Daerah	3.601.306.264,30
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	1.392.158.372,00
32	Inspektorat Daerah	2.821.056.555,00
33	Kecamatan Banjarwangi	2.285.948.306,00
34	Kecamatan Banyuwangi	2.381.821.780,00
35	Kecamatan Bayongbong	3.070.750.328,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	2.763.841.600,00
37	Kecamatan Bungbulang	1.860.930.150,00
38	Kecamatan Caringin	2.156.930.362,00
39	Kecamatan Cibalong	1.104.390.800,00
40	Kecamatan Cibatuh	2.936.820.985,00
41	Kecamatan Cibiuk	1.366.332.700,00
42	Kecamatan Cigedug	1.184.212.241,00
43	Kecamatan Cihurip	1.980.199.425,45
44	Kecamatan Cikajang	2.835.364.331,00
45	Kecamatan Cikelet	2.119.206.531,00
46	Kecamatan Cilawu	3.072.578.930,00
47	Kecamatan Cisewu	1.467.307.671,00
48	Kecamatan Cisompet	164.409.924,00
49	Kecamatan Cisarupan	2.144.662.152,00
50	Kecamatan Garut Kota	8.285.190.003,00
51	Kecamatan Kadungora	3.035.942.092,00
52	Kecamatan Karangtengah	1.166.518.520,00
53	Kecamatan Karangpawitan	5.307.595.212,00
54	Kecamatan Kersamanah	580.707.608,00
55	Kecamatan Leles	2.881.563.300,00
56	Kecamatan Leuwigoong	2.889.996.620,00
57	Kecamatan Malangbong	2.522.321.912,00
58	Kecamatan Mekarmukti	483.635.000,00
59	Kecamatan Pakenjeng	2.612.086.330,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	2.951.696.710,00
61	Kecamatan Pamulihan	2.603.299.558,00

No	SKPD	Gedung dan Bangunan (Rp)
62	Kecamatan Pangatikan	1.336.173.500,00
63	Kecamatan Pasirwangi	1.974.034.889,00
64	Kecamatan Peundeuy	1.364.018.492,00
65	Kecamatan Samarang	3.317.886.081,00
66	Kecamatan Selaawi	5.908.604.189,00
67	Kecamatan Singajaya	1.410.087.270,00
68	Kecamatan Sucinaraja	1.476.311.380,00
69	Kecamatan Sukaresmi	970.739.751,00
70	Kecamatan Sukawening	2.981.563.153,00
71	Kecamatan Talegong	3.251.057.968,20
72	Kecamatan Tarogong Kaler	2.703.368.120,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	5.364.750.910,00
74	Kecamatan Wanaraja	2.276.879.180,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	611.009.750,00
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	2.120.888.626.215,82

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	35.321.910.480,67
2	Dinas Kesehatan	7.822.323.591,09
3	BLUD RSUD dr. Slamet	8.021.497.801,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.817.346.250.238,67
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	33.944.878.626,57
6	Dinas Pemadam Kebakaran	491.390.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.471.802.302,00
8	Dinas Sosial	25.786.800,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	382.989.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.409.019.791,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	204.177.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	257.491.364,40
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	104.902.500,00
14	Dinas Perhubungan	865.708.481,00
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.741.638.189,82
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	500.000,00
17	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.082.071.040,00
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.854.119.090,00
19	Dinas Pertanian	1.802.600.452,00
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	4.407.651.228,00
21	Sekretariat Daerah	625.622.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	52.500.000,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	366.344.589,00
24	Badan Pendapatan Daerah	29.480.000,00
25	Kecamatan Balubur Limbangan	4.809.500,00
26	Kecamatan Bungbulang	837.323.000,00
27	Kecamatan Cisewu	126.641.854,10
28	Kecamatan Kadungora	49.529.000,00
29	Kecamatan Kersamanah	196.500.000,00
30	Kecamatan Malangbong	117.005.000,00
31	Kecamatan Mekarmukti	83.118.000,00
32	Kecamatan Pakenjeng	201.582.000,00
33	Kecamatan Talegong	240.672.866,80
34	Kecamatan Tarogong Kaler	1.200.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.600.000,00
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	1.967.498.635.786,12

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - ASET TETAP LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya (Rp)
1	Dinas Pendidikan	319.875.453.417,12
2	Dinas Kesehatan	5.999.500,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	21.900.000,00
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.125.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	198.659.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	176.592.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.834.000,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.000.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84.687.310,00
10	Dinas Perhubungan	120.814.000,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	147.250.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	4.198.409,00
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	123.705.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.256.751.873,69
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	840.562.666,00
16	Dinas Pertanian	813.522.650,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	50.050.000,00
18	Sekretariat Daerah	476.835.499,00
19	Sekretariat DPRD	9.179.200,00
20	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.500.000,00
21	Inspektorat Daerah	80.750.600,00
22	Kecamatan Bungbulang	16.040.000,00
23	Kecamatan Garut Kota	7.600.000,00
24	Kecamatan Karangpawitan	765.000,00
25	Kecamatan Mekarmukti	1.720.000,00
Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022		328.340.495.624,81

**DAFTAR ASET TETAP (NILAI PEROLEHAN) - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Konstruksi dalam Pengerjaan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	646.631.000,00
2	Dinas Kesehatan	5.203.190.200,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	593.450.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99.793.963.380,78
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.240.785.750,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	93.421.350,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	149.144.200,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.102.382.838,00
9	Dinas Sosial	50.435.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	283.328.900,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	7.961.858.017,00
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga	39.886.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	98.324.050,00
15	Dinas Perikanan dan Peternakan	99.209.000,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.038.447.189,00
17	Dinas Pertanian	273.195.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	792.900.500,00
19	Sekretariat Daerah	3.599.177.690,00
20	Badan Kepegawaian dan Diklat	98.293.400,00
21	Inspektorat Daerah	204.128.400,00
22	Kecamatan Cibalong	137.890.530,00
23	Kecamatan Cibiuk	115.958.000,00
24	Kecamatan Cigedug	51.106.500,00
25	Kecamatan Cisewu	48.509.000,00
26	Kecamatan Cisompet	1.710.706.075,00
27	Kecamatan Karangpawitan	116.383.863,00
28	Kecamatan Pangatikan	102.044.625,00
29	Kecamatan Pasirwangi	138.241.920,00
30	Kecamatan Singajaya	116.277.525,00
31	Kecamatan Sucinaraja	137.721.400,00
32	Kecamatan Tarogong Kaler	142.895.500,00
33	Kecamatan Tarogong Kidul	123.358.270,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.769.000,00
Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022		131.453.014.072,78

**DAFTAR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	JENIS ASET TETAP						JUMLAH (Rp)
		Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)	Konstruksi dalam Pengerjaan (Rp)	
1	Dinas Pendidikan	-	(245.573.189.229,08)	(684.248.388.919,34)	(21.903.106.120,34)	-	-	(951.724.684.268,76)
2	Dinas Kesehatan	-	(179.679.327.723,25)	(104.621.940.382,49)	(1.392.171.725,45)	-	-	(285.693.439.831,19)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	-	(190.618.144.933,09)	(41.696.630.528,62)	(2.648.610.779,55)	-	-	(234.963.386.241,26)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	(31.638.441.308,56)	(12.209.642.258,55)	(993.933.420.153,19)	-	-	(1.037.781.503.720,30)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	-	(18.915.561.699,59)	(8.789.615.402,76)	(10.452.767.103,22)	-	-	(38.157.944.205,57)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	(5.632.086.844,46)	(630.860.908,24)	-	-	-	(6.262.947.752,70)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	-	(8.307.345.157,03)	(457.570.672,91)	(393.112.000,01)	-	-	(9.158.027.829,95)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(6.146.665.088,81)	(3.142.536.448,94)	(12.812.942.741,61)	-	-	(22.102.144.279,36)
9	Dinas Sosial	-	(4.059.481.324,65)	(1.460.089.743,51)	(859.560,00)	-	-	(5.520.430.628,16)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(3.163.380.586,20)	(2.506.436.696,89)	(224.249.720,45)	-	-	(5.894.067.003,54)
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	(3.819.863.462,16)	(1.677.571.060,34)	-	-	-	(5.497.434.522,50)
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	(25.178.683.498,91)	(8.837.191.258,10)	(8.002.964.215,68)	-	-	(42.018.838.972,69)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	(11.425.886.021,18)	(1.484.341.860,51)	(151.423.600,00)	-	-	(13.061.651.481,69)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	(3.641.110.767,19)	(1.356.736.695,30)	(103.675.984,11)	-	-	(5.101.523.446,60)
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	(12.885.425.691,39)	(4.218.035.822,34)	(27.989.625,00)	-	-	(17.131.451.138,73)
16	Dinas Perhubungan	-	(22.739.581.841,32)	(8.653.365.522,08)	(313.537.616,87)	-	-	(31.706.484.980,27)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	(12.029.510.514,97)	(1.637.965.227,15)	-	-	-	(13.667.475.742,12)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	(4.550.900.449,37)	(1.131.287.449,09)	-	-	-	(5.682.187.898,46)
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	(4.080.454.691,53)	(1.570.761.875,58)	-	-	-	(5.651.216.567,11)
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	(3.308.115.090,07)	(11.948.233.852,30)	(1.463.505.073,46)	-	-	(16.719.854.015,83)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	(6.650.079.742,33)	(3.854.673.460,27)	(198.518,53)	-	-	(10.504.951.721,13)
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	-	(17.110.988.028,79)	(6.752.812.791,72)	(5.727.039.240,26)	-	-	(29.590.840.060,77)
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	(5.607.626.368,77)	(14.333.032.090,00)	(5.232.930.907,08)	-	-	(25.173.589.365,85)
24	Dinas Pertanian	-	(20.323.715.287,12)	(17.806.932.322,83)	(1.554.169.785,27)	-	-	(39.684.817.395,22)
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	-	(12.139.190.055,35)	(53.413.350.219,86)	(4.015.568.560,19)	-	-	(69.568.108.835,40)
26	Sekretariat Daerah	-	(40.485.483.308,03)	(15.238.371.132,03)	(193.175.553,24)	-	-	(55.917.029.993,30)
27	Sekretariat DPRD	-	(6.545.873.284,94)	(5.547.621.469,22)	-	-	-	(12.093.494.754,16)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(5.543.577.914,23)	(1.629.682.924,56)	(16.000.000,00)	-	-	(7.189.260.838,79)
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	(11.118.797.533,34)	(9.938.069.362,47)	(13.784.756,23)	-	-	(21.070.651.652,04)
30	Badan Pendapatan Daerah	-	(5.897.654.197,31)	(1.112.785.326,16)	(3.930.666,65)	-	-	(7.014.370.190,12)
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	(3.626.010.696,33)	(515.151.810,56)	-	-	-	(4.141.162.506,89)
32	Inspektorat Daerah	-	(7.011.029.208,39)	(756.860.764,96)	-	-	-	(7.767.889.973,35)
33	Kecamatan Banjarwangi	-	(1.153.124.267,15)	(490.809.458,18)	-	-	-	(1.643.933.725,33)
34	Kecamatan Banyuresmi	-	(1.094.323.549,05)	(356.774.164,81)	-	-	-	(1.451.097.713,86)
35	Kecamatan Bayongbong	-	(933.316.970,24)	(595.714.938,08)	-	-	-	(1.529.031.908,32)
36	Kecamatan Balur Limbangan	-	(1.209.504.375,15)	(1.030.568.231,63)	(4.809.500,00)	-	-	(2.244.882.106,78)
37	Kecamatan Bungbulang	-	(1.232.216.812,58)	(1.229.981.324,28)	(482.692.082,35)	-	-	(2.944.890.219,21)
38	Kecamatan Caringin	-	(999.428.965,80)	(541.098.773,18)	-	-	-	(1.540.527.738,98)

No	SKPD	JENIS ASET TETAP					Konstruksi dalam Pengerjaan (Rp)	JUMLAH (Rp)
		Tanah (Rp)	Peralatan dan Mesin (Rp)	Gedung & Bangunan (Rp)	Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp)	Aset Tetap Lainnya (Rp)		
39	Kecamatan Cibalong	-	(1.027.909.760,63)	(559.389.111,00)	-	-	-	(1.587.298.871,63)
40	Kecamatan Cibat	-	(1.187.841.341,37)	(1.001.216.414,68)	-	-	-	(2.189.057.756,05)
41	Kecamatan Cibiuk	-	(665.981.076,12)	(496.443.323,85)	-	-	-	(1.162.424.399,97)
42	Kecamatan Cigedug	-	(635.920.128,02)	(812.706.272,86)	-	-	-	(1.448.626.400,88)
43	Kecamatan Cihurip	-	(815.359.392,34)	(310.129.245,60)	-	-	-	(1.125.488.637,94)
44	Kecamatan Cikajang	-	(1.239.245.523,44)	(620.986.455,88)	-	-	-	(1.860.231.979,32)
45	Kecamatan Cikelet	-	(830.617.719,98)	(266.444.576,55)	-	-	-	(1.097.062.296,53)
46	Kecamatan Cilawu	-	(1.249.626.827,77)	(701.419.156,06)	-	-	-	(1.951.045.983,83)
47	Kecamatan Cisewu	-	(932.503.549,86)	(788.843.104,53)	(3.166.046,35)	-	-	(1.724.512.700,74)
48	Kecamatan Cisompet	-	(985.659.590,74)	(52.905.781,22)	-	-	-	(1.038.565.371,96)
49	Kecamatan Cisarupan	-	(984.544.624,70)	(217.042.820,05)	-	-	-	(1.201.587.444,75)
50	Kecamatan Garut Kota	-	(3.909.827.648,74)	(3.709.577.228,96)	-	-	-	(7.619.404.877,70)
51	Kecamatan Kadungora	-	(1.158.884.676,71)	(800.901.012,63)	(9.905.800,00)	-	-	(1.969.691.489,34)
52	Kecamatan Karangtengah	-	(742.960.613,86)	(458.043.514,42)	-	-	-	(1.201.004.128,28)
53	Kecamatan Karangpawitan	-	(3.682.883.619,65)	(1.592.093.685,34)	-	-	-	(5.274.977.304,99)
54	Kecamatan Kersamanah	-	(573.264.252,00)	(337.960.574,25)	(196.500.000,00)	-	-	(1.107.724.826,25)
55	Kecamatan Leles	-	(1.386.745.472,68)	(1.028.237.984,75)	-	-	-	(2.414.983.457,43)
56	Kecamatan Leuwigoong	-	(940.320.192,10)	(459.325.019,28)	-	-	-	(1.399.645.211,38)
57	Kecamatan Malangbong	-	(1.079.434.714,10)	(373.428.841,94)	(117.005.000,00)	-	-	(1.569.868.556,04)
58	Kecamatan Mekarmukti	-	(890.736.026,95)	(377.946.800,00)	(16.623.600,00)	-	-	(1.285.306.426,95)
59	Kecamatan Pakenjeng	-	(892.444.046,96)	(806.089.068,00)	(5.039.550,00)	-	-	(1.703.572.664,96)
60	Kecamatan Pamengpeuk	-	(1.186.203.054,55)	(859.668.716,20)	-	-	-	(2.045.871.770,75)
61	Kecamatan Pamulihan	-	(1.057.247.184,70)	(670.447.644,07)	-	-	-	(1.727.694.828,77)
62	Kecamatan Pangatikan	-	(779.760.405,04)	(586.828.926,87)	-	-	-	(1.366.589.331,91)
63	Kecamatan Pasirwangi	-	(782.920.640,49)	(579.825.160,17)	-	-	-	(1.362.745.800,66)
64	Kecamatan Peundeuy	-	(904.659.303,80)	(497.256.895,86)	-	-	-	(1.401.916.199,66)
65	Kecamatan Samarang	-	(1.231.536.397,55)	(1.149.066.728,23)	-	-	-	(2.380.603.125,78)
66	Kecamatan Selaawi	-	(748.784.853,07)	(1.067.084.413,47)	-	-	-	(1.815.869.266,54)
67	Kecamatan Singajaya	-	(757.842.030,55)	(801.231.921,22)	-	-	-	(1.559.073.951,77)
68	Kecamatan Sucinaraja	-	(1.042.961.077,55)	(533.529.462,67)	-	-	-	(1.576.490.540,22)
69	Kecamatan Sukaresmi	-	(999.842.307,82)	(331.293.065,61)	-	-	-	(1.331.135.373,43)
70	Kecamatan Sukawening	-	(921.999.827,78)	(340.267.057,90)	-	-	-	(1.262.266.885,68)
71	Kecamatan Talegong	-	(984.613.191,74)	(434.364.523,16)	(6.016.821,67)	-	-	(1.424.994.536,57)
72	Kecamatan Tarogong Kaler	-	(1.654.236.152,56)	(518.850.360,58)	(510.000,00)	-	-	(2.173.596.513,14)
73	Kecamatan Tarogong Kidul	-	(3.154.342.283,99)	(2.918.180.948,91)	-	-	-	(6.072.523.232,90)
74	Kecamatan Wanaraja	-	(1.163.937.604,12)	(771.274.564,51)	-	-	-	(1.935.212.168,63)
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(2.305.836.535,00)	(408.145.192,90)	(1.509.589,04)	-	-	(2.715.491.316,94)
Total Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2022		0,00	(991.564.530.136,74)	(1.065.661.938.724,02)	(1.071.424.911.995,80)	0,00	0,00	(3.128.651.380.856,56)

DAFTAR ASET LAINNYA (NILAI PEROLEHAN) - ASET TAK BERWUJUD

No	SKPD	Aset Tak Berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.105.791.000,00
2	Dinas Kesehatan	149.417.276,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	5.522.727,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	98.984.000,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	49.666.500,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	172.341.500,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	284.567.592,59
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110.148.734,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	25.800.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	598.345.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	197.580.000,00
12	Dinas Perhubungan	575.046.720,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.174.600.200,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	172.139.200,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	65.609.264,00
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	143.198.761,60
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	171.427.814,68
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	226.706.550,00
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	99.580.000,00
20	Dinas Pertanian	804.112.529,73
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	448.046.453,20
22	Sekretariat Daerah	415.472.774,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.018.063.213,00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.933.990.600,00
25	Badan Pendapatan Daerah	1.153.227.750,00
26	Badan Kepegawaian dan Diklat	52.200.750,00
27	Inspektorat Daerah	364.082.500,00
28	Kecamatan Bayongbong	16.000.000,00
29	Kecamatan Cigedug	24.975.000,00
30	Kecamatan Cikajang	46.555.000,00
31	Kecamatan Garut Kota	5.000.000,00
32	Kecamatan Kadungora	40.800.000,00
33	Kecamatan Karangpawitan	51.324.900,00
34	Kecamatan Pasirwangi	50.250.328,68
35	Kecamatan Singajaya	25.000.000,00
36	Kecamatan Tarogong Kidul	109.324.000,00
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.000.000,00
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	13.024.898.638,48

DAFTAR AKUMULASI AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

No	SKPD	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(461.491.600,02)
2	Dinas Kesehatan	(101.054.310,40)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(4.418.181,60)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(98.984.000,00)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	(39.733.200,00)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(137.873.200,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(169.379.074,08)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(32.315.546,80)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(20.640.000,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(548.345.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(39.516.000,00)
12	Dinas Perhubungan	(509.278.120,00)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.077.629.760,00)
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(146.345.520,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	(65.609.264,00)
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga	(66.189.096,96)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(74.988.788,21)
18	Dinas Perikanan dan Peternakan	(138.459.235,00)
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(79.548.000,00)
20	Dinas Pertanian	(804.112.529,73)
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(421.850.453,20)
22	Sekretariat Daerah	(350.540.214,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(990.576.713,00)
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(2.732.948.490,90)
25	Badan Pendapatan Daerah	(626.977.550,00)
26	Badan Kepegawaian dan Diklat	(52.200.750,00)
27	Inspektorat Daerah	(259.081.357,14)
28	Kecamatan Bayongbong	(16.000.000,00)
29	Kecamatan Cigedug	(24.975.000,00)
30	Kecamatan Cikajang	(40.571.000,00)
31	Kecamatan Garut Kota	(5.000.000,00)
32	Kecamatan Kadungora	(32.640.000,00)
33	Kecamatan Karangpawitan	(30.794.940,00)
34	Kecamatan Pasirwangi	(39.940.728,68)
35	Kecamatan Singajaya	(25.000.000,00)
36	Kecamatan Tarogong Kidul	(24.273.640,00)
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(40.000.000,00)
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	(10.329.281.263,72)

DAFTAR ASET LAIN - LAIN

No	SKPD	Aset Lain-lain							JUMLAH (Rp)
		Aset Tak Produktif	Aset Lain-lain (Tanah)	Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin)	Aset Lain-lain (Gedung dan Bangunan)	Aset Lain-lain (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	Aset Lain-lain (Aset Tetap Lainnya)	Aset Lain-lain (Konstruksi dalam Pengerjaan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Dinas Pendidikan	12.699.601.560,81	-	29.172.033,16	-	-	87.497.000,00	-	12.816.270.593,97
2	Dinas Kesehatan	31.535.276.416,41	-	-	93.759.000,00	-	-	-	31.629.035.416,41
3	BLUD RSUD dr. Slamet	73.550.000,00	-	-	-	-	-	-	73.550.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.278.445.438,00	-	-	7.909.280.125,00	8.628.013.257,00	-	-	19.815.738.820,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.218.445.831,00	-	-	1.340.392.000,00	-	-	-	2.558.837.831,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	901.141.075,51	-	-	-	-	-	-	901.141.075,51
7	Dinas Pemadam Kebakaran	764.257.581,00	-	58.245.507,00	-	-	-	-	822.503.088,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	274.977.000,00	-	-	-	-	-	-	274.977.000,00
9	Dinas Sosial	2.781.471.616,00	-	50.000.000,00	-	-	-	-	2.831.471.616,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	60.300.000,00	-	123.772.500,00	-	-	-	-	184.072.500,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	13.700.000,00	-	23.050.000,00	-	-	-	-	36.750.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	2.701.148.890,00	-	97.900.000,00	-	-	-	-	2.799.048.890,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.143.963.996,00	-	-	-	-	-	-	1.143.963.996,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	965.252.430,76	-	-	-	-	-	-	965.252.430,76
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	125.257.272,70	-	-	-	-	125.257.272,70
16	Dinas Perhubungan	1.408.994.066,00	-	271.181.871,72	-	-	-	-	1.680.175.937,72
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	204.027.650,00	-	-	899.191.534,00	-	-	-	1.103.219.184,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	21.792.000,00	-	63.448.000,00	1.846.392.500,00	-	-	-	1.931.632.500,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	579.376.658,01	-	-	-	-	-	-	579.376.658,01
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	225.744.155,40	-	-	-	-	-	-	225.744.155,40
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7.359.071,38	-	-	-	-	-	-	7.359.071,38
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	697.996.968,00	-	657.443.050,00	1.344.256.700,00	3.182.828.033,00	342.581.087,00	-	6.225.105.838,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.900.231.921,00	-	13.250.000,00	-	-	-	-	4.913.481.921,00
24	Dinas Pertanian	1.400.340.352,00	-	101.796.166,00	753.933.543,00	-	-	-	2.256.070.061,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	4.337.839.624,98	-	39.197.500,00	298.967.000,00	855.000,00	-	-	4.676.859.124,98
26	Sekretariat Daerah	1.616.579.745,00	-	179.998.065,00	-	-	-	-	1.796.577.810,00
27	Sekretariat DPRD	6.894.798.870,00	-	478.305.000,00	-	-	1.200.000,00	-	7.374.303.870,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.873.496.390,00	-	141.289.337,52	-	-	-	-	2.014.785.727,52
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	246.964.000,00	103.032.000,00	1.000.752.000,00	213.817.379,00	-	-	-	1.564.565.379,00
30	Badan Pendapatan Daerah	2.546.800.439,70	-	83.258.000,00	-	-	-	-	2.630.058.439,70
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	212.400.000,00	-	-	-	-	-	-	212.400.000,00
32	Inspektorat Daerah	685.739.500,00	-	-	-	-	-	-	685.739.500,00
33	Kecamatan Banjarwangi	6,00	-	-	-	-	-	-	6,00
34	Kecamatan Banyuwesmi	188.463.509,00	-	20.875.000,00	799.632.200,00	-	-	-	1.008.970.709,00
35	Kecamatan Bayongbong	185.464.855,00	-	-	179.287.100,00	-	-	-	364.751.955,00

No	SKPD	Aset Lain-lain							JUMLAH (Rp)
		Aset Tak Produktif	Aset Lain-lain (Tanah)	Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin)	Aset Lain-lain (Gedung dan Bangunan)	Aset Lain-lain (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	Aset Lain-lain (Aset Tetap Lainnya)	Aset Lain-lain (Konstruksi dalam Pengerjaan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
36	Kecamatan Balubur Limbangan	186.517.841,00	-	20.000.000,00	-	-	-	-	206.517.841,00
37	Kecamatan Bungbulang	98.736.176,00	-	-	-	-	-	-	98.736.176,00
38	Kecamatan Caringin	95.070.000,00	-	-	492.542.300,00	-	-	-	587.612.300,00
39	Kecamatan Cibalong	119.785.200,00	-	-	-	-	-	-	119.785.200,00
40	Kecamatan Cibatu	154.194.700,00	-	-	-	-	-	-	154.194.700,00
41	Kecamatan Cibiuk	32.768.000,00	-	33.200.000,00	-	-	-	-	65.968.000,00
42	Kecamatan Cigedug	338.603.100,00	-	-	-	-	-	-	338.603.100,00
43	Kecamatan Cihurip	148.455.734,65	-	-	593.843.500,00	-	-	-	742.299.234,65
44	Kecamatan Cikajang	183.691.388,60	-	-	-	-	-	-	183.691.388,60
45	Kecamatan Cikelet	224.864.305,00	-	-	401.973.200,00	-	-	-	626.837.505,00
46	Kecamatan Cilawu	35.900.000,00	-	16.875.000,00	-	-	-	-	52.775.000,00
47	Kecamatan Cisewu	138.910.000,00	-	-	-	-	-	-	138.910.000,00
48	Kecamatan Cisompet	86.301.100,00	-	-	523.822.000,00	-	-	-	610.123.100,00
49	Kecamatan Cisarupan	129.954.237,00	-	-	998.784.200,00	-	-	-	1.128.738.437,00
50	Kecamatan Garut Kota	969.215.070,00	-	-	-	-	-	-	969.215.070,00
51	Kecamatan Kadungora	145.133.267,00	-	19.422.000,00	104.313.962,00	-	-	-	268.869.229,00
52	Kecamatan Karangengah	143.675.000,00	-	-	-	-	-	-	143.675.000,00
53	Kecamatan Karangpawitan	123.143.468,00	-	-	1.175.213.974,00	-	-	-	1.298.357.442,00
54	Kecamatan Kersamanah	201.596.000,00	-	34.810.850,00	-	-	-	-	236.406.850,00
55	Kecamatan Leles	175.741.503,00	-	11.500.000,00	505.276.000,00	-	-	-	692.517.503,00
56	Kecamatan Leuwigoong	112.627.471,00	-	-	-	-	-	-	112.627.471,00
57	Kecamatan Malangbong	159.334.420,00	-	-	1.027.015.420,00	-	-	-	1.186.349.840,00
58	Kecamatan Mekarmukti	126.199.685,00	-	23.950.000,00	-	-	-	-	150.149.685,00
59	Kecamatan Pakenjeng	81.221.113,70	-	34.710.850,00	-	-	-	-	115.931.963,70
60	Kecamatan Pamengpeuk	210.308.073,74	-	-	-	-	-	-	210.308.073,74
61	Kecamatan Pamulihan	67.360.000,00	-	-	-	-	-	-	67.360.000,00
62	Kecamatan Pangatikan	381.432.019,00	-	-	-	-	-	-	381.432.019,00
63	Kecamatan Pasirwangi	191.995.096,93	-	-	-	-	-	-	191.995.096,93
64	Kecamatan Peundeuy	264.861.778,00	-	7.250.000,00	-	-	-	-	272.111.778,00
65	Kecamatan Samarang	235.348.795,00	-	-	-	-	-	-	235.348.795,00
66	Kecamatan Selaawi	135.954.668,00	-	-	-	-	-	-	135.954.668,00
67	Kecamatan Singajaya	201.899.974,00	-	-	-	-	-	-	201.899.974,00
68	Kecamatan Sucinaraja	51.857.300,00	-	-	-	-	-	-	51.857.300,00
69	Kecamatan Sukaesmi	137.131.853,00	-	-	-	-	-	-	137.131.853,00
70	Kecamatan Sukawening	47.634.003,00	-	34.810.850,00	-	-	-	-	82.444.853,00
71	Kecamatan Talegong	142.813.363,00	-	-	-	-	-	-	142.813.363,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	145.210.541,00	-	-	1.159.619.806,00	-	-	-	1.304.830.347,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	7.730.790,00	-	-	-	-	-	-	7.730.790,00
74	Kecamatan Wanaraja	91.982.495,80	-	-	-	-	-	-	91.982.495,80
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	339.498.750,00	-	1.873.503.300,00	-	-	-	-	2.213.002.050,00
	Total Aset Lainnya (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	93.510.599.897,38	103.032.000,00	5.668.224.153,10	22.661.313.443,00	11.811.696.290,00	431.278.087,00	-	134.186.143.870,48

DAFTAR AKUMULASI ASET LAIN - LAIN

No	SKPD	Aset Tak Produktif	Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin)	Aset Lain-lain (Gedung dan Bangunan)	Aset Lain-lain (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Dinas Pendidikan	(4.452.704.877,69)	(7.108.777,76)	-	-	(4.459.813.655,45)
2	Dinas Kesehatan	(25.245.797.480,88)	-	(3.750.360,00)	-	(25.249.547.840,88)
3	BLUD RSUD dr. Slamet	(66.290.000,00)	-	-	-	(66.290.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(702.199.172,00)	-	(15.852.140,00)	-	(718.051.312,00)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	(1.186.452.744,30)	-	(483.703.600,00)	-	(1.670.156.344,30)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(554.618.629,85)	-	-	-	(554.618.629,85)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	(759.227.334,79)	(39.135.507,00)	-	-	(798.362.841,79)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(259.963.666,68)	-	-	-	(259.963.666,68)
9	Dinas Sosial	(2.619.573.665,56)	(50.000.000,00)	-	-	(2.669.573.665,56)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(59.350.000,00)	(9.916.785,70)	-	-	(69.266.785,70)
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	(19.757.141,82)	-	-	(19.757.141,82)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(440.345.972,00)	(97.900.000,00)	-	-	(538.245.972,00)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.143.643.996,00)	-	-	-	(1.143.643.996,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(956.377.551,20)	-	-	-	(956.377.551,20)
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	(90.742.077,92)	-	-	(90.742.077,92)
16	Dinas Perhubungan	(1.376.858.650,50)	(45.982.207,41)	-	-	(1.422.840.857,91)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(167.396.560,00)	-	(371.821.281,53)	-	(539.217.841,53)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	(19.786.800,00)	(57.684.571,44)	-	-	(77.471.371,44)
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(573.070.491,10)	-	-	-	(573.070.491,10)
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	(182.632.862,16)	-	-	-	(182.632.862,16)
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.929.535,68)	-	-	-	(4.929.535,68)
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	(397.598.015,16)	(138.219.678,19)	(295.547.260,00)	(928.204.751,46)	(1.759.569.704,81)
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(3.386.503.827,00)	(7.571.428,56)	-	-	(3.394.075.255,56)
24	Dinas Pertanian	(1.330.645.139,77)	(76.846.166,00)	(100.375.806,19)	-	(1.507.867.111,96)
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.263.081.124,98)	(14.427.500,00)	-	-	(4.277.508.624,98)
26	Sekretariat Daerah	(1.616.579.745,00)	(179.998.065,00)	-	-	(1.796.577.810,00)
27	Sekretariat DPRD	(6.824.760.350,00)	-	-	-	(6.824.760.350,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.869.906.420,85)	(101.824.878,06)	-	-	(1.971.731.298,91)
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(244.147.714,29)	(793.099.514,31)	(118.050.929,03)	-	(1.155.298.157,63)
30	Badan Pendapatan Daerah	(2.437.055.478,67)	(83.258.000,00)	-	-	(2.520.313.478,67)
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	(212.400.000,00)	-	-	-	(212.400.000,00)
32	Inspektorat Daerah	(682.604.500,00)	-	-	-	(682.604.500,00)
33	Kecamatan Banjarwangi	(6,00)	-	-	-	(6,00)
34	Kecamatan Banyuwangi	(166.711.389,00)	(13.642.857,14)	(310.904.302,22)	-	(491.258.548,36)
35	Kecamatan Bayongbong	(145.532.479,26)	-	(76.902.821,72)	-	(222.435.300,98)
36	Kecamatan Balubur Limbangan	(159.589.841,00)	(20.000.000,00)	-	-	(179.589.841,00)
37	Kecamatan Bungbulang	(91.475.735,20)	-	-	-	(91.475.735,20)

No	SKPD	Aset Tak Produktif	Aset Lain-lain (Peralatan dan Mesin)	Aset Lain-lain (Gedung dan Bangunan)	Aset Lain-lain (Jalan, Irigasi dan Jaringan)	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
38	Kecamatan Caringin	(83.522.500,00)	-	(87.524.367,42)	-	(171.046.867,42)
39	Kecamatan Cibalong	(81.135.771,44)	-	-	-	(81.135.771,44)
40	Kecamatan Cibatu	(126.016.730,74)	-	-	-	(126.016.730,74)
41	Kecamatan Cibiuk	(31.199.428,56)	(33.200.000,00)	-	-	(64.399.428,56)
42	Kecamatan Cigedug	(312.093.435,61)	-	-	-	(312.093.435,61)
43	Kecamatan Cihurip	(114.522.155,14)	-	(142.855.643,89)	-	(257.377.799,03)
44	Kecamatan Cikajang	(151.063.864,94)	-	-	-	(151.063.864,94)
45	Kecamatan Cikelet	(197.739.737,16)	-	(283.500.575,00)	-	(481.240.312,16)
46	Kecamatan Cilawu	(20.514.285,74)	(9.642.857,14)	-	-	(30.157.142,88)
47	Kecamatan Cisewu	(138.830.000,00)	-	-	-	(138.830.000,00)
48	Kecamatan Cisompet	(59.539.039,29)	-	(299.609.617,04)	-	(359.148.656,33)
49	Kecamatan Cisarupan	(98.963.961,00)	-	(415.909.960,29)	-	(514.873.921,29)
50	Kecamatan Garut Kota	(674.531.367,88)	-	-	-	(674.531.367,88)
51	Kecamatan Kadungora	(117.300.438,45)	(19.422.000,00)	(14.521.879,36)	-	(151.244.317,81)
52	Kecamatan Karangtengah	(140.035.000,00)	-	-	-	(140.035.000,00)
53	Kecamatan Karangpawitan	(97.475.229,89)	-	(385.353.294,16)	-	(482.828.524,05)
54	Kecamatan Kersamanah	(174.560.142,88)	(4.972.978,57)	-	-	(179.533.121,45)
55	Kecamatan Leles	(152.730.003,02)	(11.500.000,00)	(340.327.600,00)	-	(504.557.603,02)
56	Kecamatan Leuwigoong	(81.619.283,50)	-	-	-	(81.619.283,50)
57	Kecamatan Malangbong	(135.233.691,44)	-	(305.952.475,68)	-	(441.186.167,12)
58	Kecamatan Mekarmukti	(103.125.525,26)	(10.264.285,72)	-	-	(113.389.810,98)
59	Kecamatan Pakenjeng	(60.561.488,48)	(4.958.692,86)	-	-	(65.520.181,34)
60	Kecamatan Pamengpeuk	(200.464.264,59)	-	-	-	(200.464.264,59)
61	Kecamatan Pamulihan	(67.360.000,00)	-	-	-	(67.360.000,00)
62	Kecamatan Pangatikan	(110.021.149,87)	-	-	-	(110.021.149,87)
63	Kecamatan Pasirwangi	(171.850.960,25)	-	-	-	(171.850.960,25)
64	Kecamatan Peundeuy	(228.871.880,13)	(7.250.000,00)	-	-	(236.121.880,13)
65	Kecamatan Samarang	(232.929.795,00)	-	-	-	(232.929.795,00)
66	Kecamatan Selaawi	(87.207.685,92)	-	-	-	(87.207.685,92)
67	Kecamatan Singajaya	(160.478.376,88)	-	-	-	(160.478.376,88)
68	Kecamatan Sucinaraja	(48.587.300,00)	-	-	-	(48.587.300,00)
69	Kecamatan Sukaresmi	(102.728.473,87)	-	-	-	(102.728.473,87)
70	Kecamatan Sukawening	(38.848.288,71)	(13.924.340,00)	-	-	(52.772.628,71)
71	Kecamatan Talegong	(106.048.027,03)	-	-	-	(106.048.027,03)
72	Kecamatan Tarogong Kaler	(140.792.541,00)	-	(753.212.643,30)	-	(894.005.184,30)
73	Kecamatan Tarogong Kidul	(4.818.474,00)	-	-	-	(4.818.474,00)
74	Kecamatan Wanaraja	(81.764.323,80)	-	-	-	(81.764.323,80)
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(327.008.750,00)	(1.455.295.505,00)	-	-	(1.782.304.255,00)
	Total Aset Tetap (Nilai Perolehan) Per 31 Des 2022	(69.861.905.128,04)	(3.417.545.815,60)	(4.805.676.556,83)	(928.204.751,46)	(79.013.332.251,93)

**RINCIAN UTANG BELANJA
PER 31 DESEMBER 2022**

No	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Telepon	Jasa Air	Jasa Listrik	Jasa Internet	Jasa Konsultan	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan			1.506.280,00	10.002.298,00				11.508.578,00
2	Dinas Kesehatan	35.225.000,00			10.646.160,00			1.290.468.381,00	1.336.339.541,00
3	BLUD RSUD dr Slamet							7.063.659.430,00	7.063.659.430,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				4.250.500,00	3.277.500,00	49.235.000,00		56.763.000,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman			306.250,00	1.296.863,00				1.603.113,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja		680.100,00	125.750,00					805.850,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran				2.316.368,00	3.169.099,00			5.485.467,00
8	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah								-
9	Dinas Sosial			483.850,00	31.740,00	717.900,00			1.233.490,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			1.630.750,00	6.404.701,00				8.035.451,00
11	Dinas Ketahanan Pangan		637.250,00		507.100,00				1.144.350,00
12	Dinas Lingkungan Hidup			100.000,00	4.423.471,00	1.126.317,00			5.649.788,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.018.500,00	12.962.603,00	517.509,00			14.498.612,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			686.500,00					686.500,00
15	DPPKBPPPA					335.500,00			335.500,00
16	Dinas Perhubungan				2.099.260.846,00				2.099.260.846,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika		361.421,00	1.467.750,00	10.366.138,00				12.195.309,00
18	Dinas Koperasi dan UKM			1.679.500,00	2.170.124,00	485.850,00			4.335.474,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu		34.857,00	99.500,00	7.484.068,00				7.618.425,00
20	Dinas Pemuda dan Olahraga								-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		69.100,00	517.000,00	2.615.300,00				3.201.400,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan		35.800,00	782.450,00	2.767.568,00	2.318.250,00			5.904.068,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		39.357,00	753.600,00	20.381.030,00				21.173.987,00
24	Dinas Pertanian			1.639.040,00	5.027.158,00				6.666.198,00
25	Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM			318.250,00	2.153.706,00	3.171.000,00			5.642.956,00
26	Sekretariat Daerah		46.573.900,00	25.371.125,00	37.708.662,00				109.653.687,00
27	Sekretariat DPRD		607.050,00	960.000,00	6.755.900,00	3.413.850,00			11.736.800,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			514.000,00	7.190.848,00	4.006.550,00			11.711.398,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			11.558.250,00	576.444,00	3.038.122,00			15.172.816,00
30	Badan Pendapatan Daerah			1.390.500,00	-	3.312.243,00			4.702.743,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat				1.960.609,00	34.357,00			1.994.966,00
32	Inspektorat			100.000,00	5.689.481,00	626.600,00			6.416.081,00
33	Kecamatan Banjarwangi				190.740,00				190.740,00
34	Kecamatan Banyuwangi				735.756,00				735.756,00
35	Kecamatan Bayongbong								-
36	Kecamatan Balubur Limbangan				926.208,00				926.208,00
37	Kecamatan Bungbulang				864.913,00	896.550,00			1.761.463,00
38	Kecamatan Caringin								-
39	Kecamatan Cibalong			61.300,00	723.460,00				784.760,00
40	Kecamatan Cibatu				1.238.164,00				1.238.164,00
41	Kecamatan Cibiuk				756.820,00				756.820,00

No	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Telepon	Jasa Air	Jasa Listrik	Jasa Internet	Jasa Konsultan	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Jumlah
42	Kecamatan Cigedug				276.789,00				276.789,00
43	Kecamatan Cihurip								-
44	Kecamatan Cikajang			492.260,00	770.249,00				1.262.509,00
45	Kecamatan Cikelet				516.252,00				516.252,00
46	Kecamatan Cilawu				355.760,00	442.008,00			797.768,00
47	Kecamatan Cisewu								-
48	Kecamatan Cisompet				657.372,00				657.372,00
49	Kecamatan Cisarupan			453.000,00					453.000,00
50	Kecamatan Garut Kota			1.033.050,00	2.910.369,00				3.943.419,00
51	Kecamatan Kadungora				1.065.716,00				1.065.716,00
52	Kecamatan Karangtengah				534.294,00				534.294,00
53	Kecamatan Karangpawitan				2.465.495,00				2.465.495,00
54	Kecamatan Kersamanah				230.131,00				230.131,00
55	Kecamatan Leles				825.572,00	685.150,00			1.510.722,00
56	Kecamatan Leuwigoong			132.400,00	460.997,00				593.397,00
57	Kecamatan Malangbong								-
58	Kecamatan Mekarmukti				1.226.029,00				1.226.029,00
59	Kecamatan Pakenjeng								-
60	Kecamatan Pameungpeuk								-
61	Kecamatan Pamulihan								-
62	Kecamatan Pangatikan			171.500,00	607.712,00				779.212,00
63	Kecamatan Pasirwangi				497.949,00				497.949,00
64	Kecamatan Peundeuy				561.444,00				561.444,00
65	Kecamatan Semarang								-
66	Kecamatan Selaawi			52.000,00	522.663,00	1.102.950,00			1.677.613,00
67	Kecamatan Singajaya				221.744,00				221.744,00
68	Kecamatan Sucinaraja			90.000,00	373.858,00				463.858,00
69	Kecamatan Sukaresmi					393.775,00			393.775,00
70	Kecamatan Sukawening				266.620,00				266.620,00
71	Kecamatan Talegong								-
72	Kecamatan Tarogong Kaler			630.670,00	730.060,00				1.360.730,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul			892.000,00	1.971.448,00				2.863.448,00
74	Kecamatan Wanaraja			803.250,00	606.636,00				1.409.886,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		31.857,00	610.940,00	196.000,00				838.797,00
JUMLAH		35.225.000,00	49.070.692,00	58.431.215,00	2.289.236.906,00	33.071.080,00	49.235.000,00	8.354.127.811,00	10.868.397.704,00

BEBAN PEGAWAI
per, 31 Desember 2022

No	URAIAN	Gaji dan Tunjangan	Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan KDH/WDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1	Dinas Pendidikan	646.256.224.586,00	12.691.964.750,00	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	112.759.809.698,00	4.168.654.198,00	-	-	-	-
3	BLUD RSUD dr. Slamet	41.841.197.389,00	-	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.164.922.787,00	7.782.566.745,00	-	-	-	-
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	4.060.628.610,00	2.450.287.074,00	-	-	-	-
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.908.933.139,00	2.000.481.875,00	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran	3.217.723.022,00	2.036.445.088,00	-	-	-	462.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.929.398.905,00	1.438.285.264,00	-	-	-	-
9	Dinas Sosial	2.589.908.566,00	1.864.292.142,00	-	-	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.096.284.358,00	2.030.639.845,00	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.950.239.338,00	2.019.675.048,00	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	14.351.515.780,00	4.232.171.278,00	-	-	-	44.122.880,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.418.214.893,00	2.855.593.515,00	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.946.211.760,00	1.912.794.576,00	-	-	-	-
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.949.046.449,00	2.568.543.284,00	-	-	-	-
16	Dinas Perhubungan	8.421.932.219,00	4.050.393.324,00	-	-	-	109.683.200,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.289.279.388,00	2.116.858.085,00	-	-	-	-
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2.796.821.777,00	1.998.281.455,00	-	-	-	-
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2.790.757.050,00	2.092.053.068,00	-	-	-	-
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2.950.699.275,00	1.767.548.731,00	-	-	-	-
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.123.449.820,00	1.939.422.591,00	-	-	-	-
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	6.902.278.948,00	3.953.382.453,00	-	-	-	8.369.583,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.660.058.120,00	2.190.142.714,00	-	-	-	17.800.000,00
24	Dinas Pertanian	17.433.987.201,00	8.427.983.895,00	-	-	-	11.749.350,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	9.809.964.096,00	4.773.731.817,00	-	-	-	-
26	Sekretariat Daerah	12.363.955.845,00	13.803.917.978,00	173.824.702,00	725.850.000,00	-	-
27	Sekretariat DPRD	32.710.880.951,00	2.137.053.601,00	-	312.234.000,00	-	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.627.266.710,00	3.295.150.206,00	-	-	-	-
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.105.727.251,00	3.147.134.629,00	-	-	-	-
30	Badan Pendapatan Daerah	4.543.890.521,00	3.776.959.865,00	-	-	2.622.541.281,00	-
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	4.256.402.958,00	3.819.919.294,00	-	-	-	-
32	Inspektorat Daerah	7.156.747.366,00	8.405.354.386,00	-	-	-	-
33	Kecamatan Banjarwangi	746.890.357,00	528.432.369,00	-	-	-	-
34	Kecamatan Banyuresmi	1.210.750.814,00	594.596.935,00	-	-	-	-
35	Kecamatan Bayongbong	994.344.358,00	520.291.144,00	-	-	-	-
36	Kecamatan Balubur Limbangan	908.566.682,00	482.343.350,00	-	-	-	-

No	URAIAN	Gaji dan Tunjangan	Tambahan Penghasilan PNS	Gaji dan Tunjangan KDH/WDH	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH / WKDH	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
37	Kecamatan Bungbulang	1.054.002.453,00	592.021.793,00	-	-	-	-
38	Kecamatan Caringin	708.120.748,00	544.268.827,00	-	-	-	-
39	Kecamatan Cibalong	903.592.585,00	590.964.422,00	-	-	-	-
40	Kecamatan Cibatuh	971.601.875,00	534.590.036,00	-	-	-	-
41	Kecamatan Cibiuk	880.532.838,00	495.829.099,00	-	-	-	-
42	Kecamatan Cigedug	808.013.369,00	482.681.522,00	-	-	-	-
43	Kecamatan Cihurip	700.221.412,00	535.896.131,00	-	-	-	-
44	Kecamatan Cikajang	935.568.260,00	490.399.820,00	-	-	-	-
45	Kecamatan Cikelet	766.209.009,00	554.437.308,00	-	-	-	-
46	Kecamatan Cilawu	1.145.212.158,00	585.514.715,00	-	-	-	-
47	Kecamatan Cisewu	865.031.560,00	571.957.273,00	-	-	-	-
48	Kecamatan Cisompet	868.363.200,00	568.947.753,00	-	-	-	-
49	Kecamatan Cisarupan	1.311.242.460,00	569.505.738,00	-	-	-	-
50	Kecamatan Garut Kota	5.178.276.423,00	2.563.011.690,00	-	-	-	-
51	Kecamatan Kadungora	1.334.259.923,00	638.903.852,00	-	-	-	-
52	Kecamatan Karangtengah	693.096.501,00	452.448.968,00	-	-	-	-
53	Kecamatan Karangpawitan	2.797.026.957,00	1.330.534.075,00	-	-	-	-
54	Kecamatan Kersamanah	835.737.908,00	487.153.699,00	-	-	-	-
55	Kecamatan Leles	1.119.553.996,00	576.100.524,00	-	-	-	-
56	Kecamatan Leuwigoong	790.283.625,00	466.457.834,00	-	-	-	-
57	Kecamatan Malangbong	1.417.134.879,00	660.500.038,00	-	-	-	-
58	Kecamatan Mekarmukti	692.452.934,00	491.074.184,00	-	-	-	-
59	Kecamatan Pakenjeng	716.075.683,00	541.269.180,00	-	-	-	-
60	Kecamatan Pamengpeuk	727.241.822,00	515.550.387,00	-	-	-	-
61	Kecamatan Pamulihan	697.777.605,00	544.196.872,00	-	-	-	-
62	Kecamatan Pangatikan	731.562.706,00	447.032.836,00	-	-	-	-
63	Kecamatan Pasiwangi	1.457.704.797,00	680.096.074,00	-	-	-	-
64	Kecamatan Peundeuy	661.598.135,00	504.335.669,00	-	-	-	-
65	Kecamatan Samarang	1.290.378.524,00	623.248.827,00	-	-	-	-
66	Kecamatan Selaawi	1.012.312.596,00	527.617.351,00	-	-	-	-
67	Kecamatan Singajaya	756.019.374,00	543.703.287,00	-	-	-	-
68	Kecamatan Sucinaraja	796.046.723,00	461.732.873,00	-	-	-	-
69	Kecamatan Sukaresmi	862.972.436,00	470.054.957,00	-	-	-	-
70	Kecamatan Sukawening	920.308.345,00	500.342.175,00	-	-	-	-
71	Kecamatan Talegong	948.058.878,00	615.942.247,00	-	-	-	-
72	Kecamatan Tarogong Kaler	1.508.195.186,00	760.497.428,00	-	-	-	-
73	Kecamatan Tarogong Kidul	3.514.787.934,00	1.605.754.587,00	-	-	-	-
74	Kecamatan Wanaraja	990.064.179,00	541.650.568,00	-	-	-	-
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.032.728.985,00	1.392.044.144,00	-	-	-	-
	Jumlah	1.042.644.279.968,00	149.931.615.335,00	173.824.702,00	1.038.084.000,00	2.622.541.281,00	192.187.013,00

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Beban Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN	TPG PNSD	Tamsil Guru PNSD	Belanja Pegawai Dana BOS	Belanja Pegawai BLUD	Jumlah
-	120.260.000,00	-	338.423.631.940,00	3.665.250.000,00	102.540.923.998,00	-	1.103.698.255.274,00
-	149.850.000,00	4.901.071.913,00	-	-	-	7.907.814.538,00	129.887.200.347,00
-	-	-	-	-	-	9.945.855.250,00	51.787.052.639,00
-	1.149.070.000,00	-	-	-	-	-	25.096.559.532,00
-	86.050.000,00	-	-	-	-	-	6.596.965.684,00
-	25.760.000,00	-	-	-	-	-	4.935.175.014,00
-	5.790.000,00	-	-	-	-	-	5.260.420.110,00
-	40.120.000,00	-	-	-	-	-	3.407.804.169,00
-	26.320.000,00	-	-	-	-	-	4.480.520.708,00
-	12.600.000,00	-	-	-	-	-	5.139.524.203,00
-	19.190.000,00	-	-	-	-	-	4.989.104.386,00
-	147.240.000,00	-	-	-	-	-	18.775.049.938,00
-	17.530.000,00	-	-	-	-	-	6.291.338.408,00
-	69.350.000,00	-	-	-	-	-	4.928.356.336,00
-	32.440.000,00	-	-	-	-	-	6.550.029.733,00
-	39.610.000,00	-	-	-	-	-	12.621.618.743,00
-	80.880.000,00	-	-	-	-	-	5.487.017.473,00
-	27.530.000,00	-	-	-	-	-	4.822.633.232,00
-	32.310.000,00	-	-	-	-	-	4.915.120.118,00
-	196.999.600,00	-	-	-	-	-	4.915.247.606,00
-	16.240.000,00	-	-	-	-	-	5.079.112.411,00
-	33.150.000,00	-	-	-	-	-	10.897.180.984,00
-	119.140.000,00	-	-	-	-	-	5.987.140.834,00
-	104.350.000,00	-	-	-	-	-	25.978.070.446,00
-	44.830.000,00	-	-	-	-	-	14.628.525.913,00
-	58.130.000,00	-	-	-	-	-	27.125.678.525,00
-	30.700.000,00	-	-	-	-	-	35.190.868.552,00
-	36.510.000,00	-	-	-	-	-	6.958.926.916,00
-	35.070.000,00	-	-	-	-	-	7.287.931.880,00
-	39.960.000,00	-	-	-	-	-	10.983.351.667,00
-	5.440.000,00	-	-	-	-	-	8.081.762.252,00
-	9.200.000,00	-	-	-	-	-	15.571.301.752,00
-	-	-	-	-	-	-	1.275.322.726,00
-	-	-	-	-	-	-	1.805.347.749,00
-	-	-	-	-	-	-	1.514.635.502,00
-	-	-	-	-	-	-	1.390.910.032,00

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Beban Jasa Pelayanan kesehatan bagi ASN	TPG PNSD	Tamsil Guru PNSD	Belanja Pegawai Dana BOS	Belanja Pegawai BLUD	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-	1.646.024.246,00
-	-	-	-	-	-	-	1.252.389.575,00
-	-	-	-	-	-	-	1.494.557.007,00
-	-	-	-	-	-	-	1.506.191.911,00
-	-	-	-	-	-	-	1.376.361.937,00
-	-	-	-	-	-	-	1.290.694.891,00
-	-	-	-	-	-	-	1.236.117.543,00
-	2.600.000,00	-	-	-	-	-	1.428.568.080,00
-	-	-	-	-	-	-	1.320.646.317,00
-	3.200.000,00	-	-	-	-	-	1.733.926.873,00
-	-	-	-	-	-	-	1.436.988.833,00
-	-	-	-	-	-	-	1.437.310.953,00
-	-	-	-	-	-	-	1.880.748.198,00
-	93.450.000,00	-	-	-	-	-	7.834.738.113,00
-	-	-	-	-	-	-	1.973.163.775,00
-	-	-	-	-	-	-	1.145.545.469,00
-	45.240.000,00	-	-	-	-	-	4.172.801.032,00
-	3.360.000,00	-	-	-	-	-	1.326.251.607,00
-	-	-	-	-	-	-	1.695.654.520,00
-	-	-	-	-	-	-	1.256.741.459,00
1.000.000,00	680.000,00	-	-	-	-	-	2.079.314.917,00
-	3.360.000,00	-	-	-	-	-	1.186.887.118,00
-	-	-	-	-	-	-	1.257.344.863,00
-	-	-	-	-	-	-	1.242.792.209,00
-	-	-	-	-	-	-	1.241.974.477,00
-	-	-	-	-	-	-	1.178.595.542,00
-	-	-	-	-	-	-	2.137.800.871,00
-	-	-	-	-	-	-	1.165.933.804,00
-	-	-	-	-	-	-	1.913.627.351,00
-	-	-	-	-	-	-	1.539.929.947,00
-	-	-	-	-	-	-	1.299.722.661,00
-	-	-	-	-	-	-	1.257.779.596,00
-	-	-	-	-	-	-	1.333.027.393,00
-	-	-	-	-	-	-	1.420.650.520,00
-	-	-	-	-	-	-	1.564.001.125,00
-	23.420.000,00	-	-	-	-	-	2.292.112.614,00
-	52.300.000,00	-	-	-	-	-	5.172.842.521,00
-	1.680.000,00	-	-	-	-	-	1.533.394.747,00
-	6.540.000,00	-	-	-	-	-	3.431.313.129,00
1.000.000,00	3.047.449.600,00	4.901.071.913,00	338.423.631.940,00	3.665.250.000,00	102.540.923.998,00	17.853.669.788,00	1.667.035.529.538,00

**BEBAN PERSEDIAAN
per, 31 Desember 2022**

No	URAIAN	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	BLUD RSUD dr. Slamet	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman	Satuan Polisi Pamong Praja
1	Beban Persediaan Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	1.479.205.500,00	53.284.000,00	-
2	Beban Persediaan Bahan-Bahan Kimia	-	1.200.000,00	-	-	-	-
3	Beban Persediaan Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	275.400.900,00	-	39.480.000,00	-	11.220.000,00
4	Beban Persediaan Bahan-Bahan Baku	-	-	-	-	-	-
5	Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-
6	Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-
7	Beban Persediaan Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-
8	Beban Persediaan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-
9	Beban Persediaan Bahan-Bahan Lainnya	-	3.033.455.198,00	-	17.220.000,00	-	-
10	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	10.944.000,00	-	-
11	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-
12	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-
13	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
14	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
15	Beban Persediaan Suku Cadang - Suku Cadang Lainnya	-	-	-	22.655.000,00	-	-
16	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.351.664.540,00	69.737.226,00	-	22.190.740,00	34.957.347,00	54.259.940,00
17	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	395.432.037,00	125.826.611,00	-	52.161.200,00	193.869.360,00	9.125.650,00
18	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	441.739.120,00	1.069.765.067,00	-	256.662.000,00	249.049.130,00	162.693.488,00
19	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	16.070.000,00	5.200.000,00	-	-	-	2.750.000,00
20	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-
21	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	1.584.000,00	12.464.000,00	-	-	-	267.500,00
22	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	52.844.400,00	48.791.600,00	-	32.760.000,00	-	4.302.000,00
23	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	19.210.800,00	29.145.140,00	-	26.650.200,00	29.765.134,00	14.104.200,00
24	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-
25	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-
26	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata	-	1.500.000,00	-	-	-	-
27	Beban Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	121.185.430,00	207.508.600,00	-	33.036.000,00	46.158.300,00	-
28	Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat	-	45.906.148.386,22	-	-	-	-
29	Beban Persediaan Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-	36.528.800,00	-	-	-	-
30	Beban Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	96.002.398,00	-	-	57.393.526.700,00	899.620.924,00	-
31	Beban Persediaan Natura dan Pakan-Pakan	-	-	-	-	-	-
32	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat	501.437.800,00	6.600.839.997,00	-	40.675.000,00	50.701.000,00	107.595.000,00
33	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	70.950.000,00	30.749.050,00	-	3.000.000,00	50.000.000,00	7.500.000,00
34	Beban Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	-	7.804.836.451,20	-	-	-	-
35	Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	-	-	-	-	-	-
36	Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	-	5.400.000,00	-	-	-	-

No	URAIAN	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	BLUD RSUD dr. Slamet	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman	Satuan Polisi Pamong Praja
37	Beban Persediaan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	-	-	-	-	-	-
38	Beban Persediaan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	2.962.303.000,00	-	-	-	58.785.000,00
39	Beban Persediaan Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	28.577.250,00	-	-	-	396.550,00
40	Beban Persediaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	-	-	-
41	Beban Persediaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-	-	-
42	Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	10.408.000,00	-	-	-	743.200,00
43	Beban Persediaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	16.100.000,00	45.175.000,00	-	608.000,00	-	949.355.770,00
44	Beban Persediaan Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	-	-	-
45	Beban Persediaan Pakaian Penyelamatan	-	-	-	-	-	-
46	Beban Persediaan Pakaian Siaga	-	-	-	4.000.000,00	-	-
47	Beban Persediaan Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-
48	Beban Persediaan Pakaian Kerja Laboratorium	-	71.400.000,00	-	-	-	-
49	Beban Persediaan Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-
50	Beban Persediaan Pakaian Adat Daerah	-	-	-	-	-	-
51	Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	10.404.000,00	10.143.900,00	-	-	-	-
52	Beban Persediaan Pakaian Olahraga	-	143.195.820,00	-	-	-	10.950.000,00
53	Beban Persediaan Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-
54	Beban Persediaan BOS SD	66.152.454.671,00	-	-	-	-	-
55	Beban Persediaan BOS SMP	19.868.713.492,00	-	-	-	-	-
56	Beban Persediaan Barang BLUD Puskesmas	-	24.352.221.772,00	-	-	-	-
57	Beban Persediaan Barang BLUD RSUD	-	-	32.510.049.957,83	-	-	-
58	Beban Persediaan - BTT	-	139.826.777,87	-	-	-	-
59	Beban Persediaan Tak Habis Pakai - Komponen Rambu-Rambu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	89.115.792.688,00	93.027.748.546,29	32.510.049.957,83	59.434.774.340,00	1.607.405.195,00	1.394.048.298,00

Dinas Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Perhubungan
-	190.920.000,00	242.877.012,00	-	-	-	-	-	-	-
493.730.000,00	93.562.000,00	-	-	-	49.950.000,00	-	-	209.220.000,00	137.872.080,00
-	24.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	77.248.119,00	-	-	-	-	-	-	-
-	369.820.800,00	2.000.000,00	-	-	-	-	-	80.289.075,00	-
194.325.480,00	186.340.000,00	16.100.000,00	109.102.000,00	22.477.500,00	277.372.300,00	-	16.450.000,00	15.000.000,00	81.259.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.488.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.445.550,00
14.630.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	2.100.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	14.436.290,00	21.196.650,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	18.078.600,00	-	-	-	-	-	-
39.150.000,00	85.245.000,00	15.750.000,00	110.700.000,00	-	-	-	41.619.000,00	165.795.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	92.500.920,00	128.601.732,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.762.727,53
1.562.063.227,00	2.022.730.412,00	1.674.818.707,00	1.861.347.100,00	5.401.111.102,80	7.942.818.405,00	2.747.365.806,00	4.204.829.990,00	7.102.789.033,51	1.711.917.372,53

Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat Daerah
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	637.240.329,00	-	7.600.000,00	134.460.000,00	618.075.000,00	-	970.629.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.628.400,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.806.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.168.000,00	-	-	-	-	-	88.957.620,00	70.818.500,00
9.100.000,00	-	16.520.000,00	24.250.500,00	34.500.000,00	9.375.000,00	28.007.900,00	79.195.800,00	68.975.000,00	3.498.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	3.500.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	11.880.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	27.000.000,00	-	-	-	-	3.750.000,00	40.257.000,00	76.200.000,00	-
-	10.730.500,00	10.640.000,00	-	-	-	-	-	-	48.742.875,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.422.000,00
-	-	13.901.500,00	1.300.500,00	-	-	-	-	-	284.908.600,00
7.400.000,00	27.750.000,00	-	489.951.540,00	17.250.000,00	44.320.000,00	61.695.000,00	73.414.575,00	11.366.904,00	73.455.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.594.140,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587.714.332,00	844.982.046,00	618.392.696,00	2.453.314.958,00	983.825.066,00	1.582.960.481,00	1.347.386.672,00	4.475.907.488,00	1.250.220.135,00	7.745.714.696,00

Sekretariat DPRD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Kepegawaian dan Diklat	Inspektorat Daerah	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banyuresmi	Kecamatan Bayongbong	Kecamatan Balubur Limbangan	Kecamatan Bungbulang
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	17.160.000,00	40.500.000,00	98.136.000,00	-	-	50.400.000,00	48.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169.608.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103.873.500,00	-	-	897.336,00	-	63.660.000,00	-	-	6.502.000,00	-	-
-	26.430.000,00	17.500.000,00	182.576.750,00	-	84.800.000,00	-	-	-	-	31.737.500,00
81.312.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.920.750,00	-
12.673.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115.368.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	34.401.000,00	-	3.487.650,00	18.727.200,00	21.450.000,00	-	-	-	-	5.002.900,00
-	-	-	92.722.490,00	-	47.150.000,00	-	-	4.500.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.378.880.786,00	1.627.583.725,00	4.282.797.092,00	2.363.711.888,00	958.685.123,00	1.078.102.415,00	280.720.200,00	242.508.209,00	260.118.000,00	233.591.194,00	230.715.836,00

Kecamatan Caringin	Kecamatan Cibalong	Kecamatan Cibatu	Kecamatan Cibiuk	Kecamatan Cigedug	Kecamatan Cihurip	Kecamatan Cikajang	Kecamatan Cikelet	Kecamatan Cilawu	Kecamatan Cisewu	Kecamatan Cisompet	Kecamatan Cisarupan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.660.000,00	12.525.000,00	-	-	21.600.000,00	-	95.200.000,00	-	59.550.000,00	38.400.000,00	181.440.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.851.000,00	7.152.200,00	-	1.500.000,00	8.127.500,00	4.876.500,00	16.873.600,00	7.352.100,00	-	9.000.000,00	5.500.000,00	7.477.300,00
-	2.468.000,00	-	-	-	-	3.141.400,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.926.500,00	4.292.200,00	-	-	-	-	4.487.300,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.950.000,00	-	-
-	-	-	4.750.000,00	-	2.926.500,00	5.722.200,00	-	-	-	-	-
-	-	9.427.900,00	4.682.500,00	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	5.727.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275.344.204,00	224.938.730,00	229.740.806,00	191.577.980,00	238.428.200,00	221.111.600,00	262.308.900,00	273.472.790,00	208.557.792,00	181.489.272,00	257.464.991,00	414.627.570,00

Kecamatan Garut Kota	Kecamatan Kadungora	Kecamatan Karangtengah	Kecamatan Karangpawitan	Kecamatan Kersamanah	Kecamatan Leles	Kecamatan Leuwigoong	Kecamatan Malangbong	Kecamatan Mekarmukti	Kecamatan Pakenjeng	Kecamatan Pamengpeuk	Kecamatan Pamulihan
8.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	8.452.600,00	6.502.000,00	-	-	-	-	3.175.200,00	7.000.000,00	8.269.400,00	-	-
92.465.000,00	2.775.500,00	-	21.131.500,00	-	6.536.500,00	3.690.000,00	1.750.000,00	3.568.500,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.583.500,00	5.072.600,00	-	-	-	-	3.510.000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6.397.500,00	-	-	-	7.700.000,00	-	-
51.759.900,00	-	-	-	-	-	-	6.243.200,00	12.874.400,00	-	-	-
21.750.000,00	-	-	7.500.000,00	11.250.000,00	-	-	-	6.000.000,00	36.000.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.288.367.721,00	212.635.750,00	194.489.360,00	3.699.090.685,00	281.393.325,00	243.260.100,00	177.728.160,00	304.321.000,00	267.728.650,00	267.100.735,00	267.962.620,00	195.397.390,00

Kecamatan Pangatikan	Kecamatan Pasirwangi	Kecamatan Peundeuy	Kecamatan Samarang	Kecamatan Selaawi	Kecamatan Singajaya	Kecamatan Sucinaraja	Kecamatan Sukaesmi	Kecamatan Sukawening	Kecamatan Talegong	Kecamatan Tarogong Kaler	Kecamatan Tarogong Kidul
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	56.160.000,00	2.229.300,00	-	18.700.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.225.000,00	-	-	-	-	11.913.800,00	-	-	12.970.860,00	4.025.000,00	14.656.500,00	-
1.500.000,00	-	-	7.000.000,00	-	54.690.000,00	-	-	-	-	38.091.602,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3.536.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6.502.500,00	-	-	19.510.000,00	-	-	-	-	-	12.920.000,00
-	-	-	-	6.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	10.200.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258.977.625,00	202.619.150,00	126.085.800,00	263.972.600,00	131.016.150,00	363.743.482,00	129.192.227,00	194.552.650,00	274.728.370,00	185.099.900,00	1.077.382.194,00	3.530.912.092,00

Kecamatan Wanaraja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah
-	-	1.908.407.338,00
5.607.500,00	-	1.032.077.165,00
27.697.000,00	24.966.550,00	6.358.374.842,00
-	-	3.774.390.306,80
-	-	1.238.384.473,00
-	-	54.930.000,00
-	-	38.360.000,00
-	-	537.277.900,00
-	-	3.964.992.795,00
12.312.000,00	-	326.741.272,00
-	-	144.609.000,00
-	-	94.878.000,00
-	-	125.489.900,00
-	-	275.000,00
-	15.337.600,00	1.364.826.233,00
11.793.950,00	44.174.609,00	7.114.904.572,67
1.750.050,00	46.914.450,00	3.445.814.585,64
27.230.000,00	215.968.639,00	17.035.225.280,00
-	7.100.000,00	264.763.005,00
-	-	2.500.000,00
526.200,00	-	227.309.918,00
10.462.026,00	10.079.550,00	1.507.326.165,00
7.020.000,00	8.996.100,00	1.810.704.838,00
-	-	83.417.380,00
-	-	498.711.320,00
-	3.400.000,00	167.092.500,00
19.840.900,00	86.587.000,00	3.760.995.657,00
-	-	46.094.138.036,22
-	-	330.860.905,00
-	-	81.613.816.890,20
-	-	108.950.000,00
58.000.000,00	210.907.964,00	20.739.215.417,00
30.000.000,00	26.371.000,00	6.172.164.315,00
-	-	7.804.836.451,20
-	10.000.000,00	33.415.000,00
-	-	5.400.000,00

Kecamatan Wanaraja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah
-	-	442.117.012,00
-	620.810.000,00	7.792.896.709,00
-	-	172.578.200,00
-	-	194.414.500,00
-	-	77.248.119,00
3.115.000,00	-	966.153.591,00
5.250.000,00	-	2.790.190.002,00
-	-	81.312.000,00
-	-	86.433.650,00
-	-	47.010.000,00
-	-	4.800.000,00
-	-	244.063.750,00
-	8.194.200,00	167.386.115,00
-	-	172.837.500,00
6.828.500,00	8.194.200,00	767.451.250,00
-	-	1.724.606.381,00
-	-	66.000.000,00
-	-	66.152.454.671,00
-	-	19.868.713.492,00
-	-	24.352.221.772,00
-	-	32.510.049.957,83
-	-	165.420.917,87
-	-	209.762.727,53
227.433.126,00	1.348.001.862,00	378.841.698.777,96

BEBAN JASA
per, 31 Desember 2022

No	URAIAN	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	BLUD RSUD dr. Slamet	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	-	-	-	-
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	230.330.000,00	422.360.000,00	-	19.150.000,00	-
3	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	4.427.660.000,00	-	620.200.000,00	-
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	-	-	-	-	-
5	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.335.750.000,00	-	-	426.000.000,00	45.000.000,00
6	Honorarium Rohaniwan	-	-	-	-	-
7	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	-	-	-	-	-
8	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-	-
9	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	25.092.500.000,00	-	-	-	-
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	8.906.722.667,00	-	-	-
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	-	38.323.500,00	-	-	-
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-	-	-	-
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-
15	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-
16	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	-	-	-	52.386.800,00	-
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	-	-	-	-	-
18	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	-	-	-	-	-
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	-	-	-	-	-
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-	-
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	10.000.000,00	-	-	-
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	15.400.000,00	99.000.000,00	-	351.200.000,00	113.400.000,00
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	-	343.500.000,00	-	59.800.000,00	126.000.000,00
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	67.123.000,00	-	-	-
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	-	810.250.000,00	-	-	-
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	48.000.000,00	178.200.000,00	-	162.100.000,00	178.801.000,00
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	115.198.500,00	205.600.000,00	-	184.100.000,00	145.729.000,00
28	Beban Jasa Tenaga Supir	-	90.000.000,00	-	-	-
29	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	-	-	-	-	-
30	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	-	-	-	-	-
31	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.000.000,00	-	-	-	-
32	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	-	14.000.000,00	-	-	-
33	Beban Jasa Tenaga Operator Tiket	-	-	-	-	-
34	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	-	-	-	-	-
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-
36	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	-	-	-	-	-
37	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	-	-	-	-	-
38	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	-	-	-	370.525.000,00	-

No	URAIAN	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	BLUD RSUD dr. Slamet	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
39	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	-	-
40	Beban Jasa Kalibrasi	-	-	-	-	-
41	Beban Jasa Pengolahan Sampah	-	81.107.000,00	-	-	-
42	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	-	-	-	-	-
43	Beban Jasa Pengukuran Tanah	-	-	-	-	-
44	Beban Jasa Jalan/Tol	-	-	-	-	-
45	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	-	34.565.000,00	-	20.300.000,00	-
46	Beban Tagihan Telepon	45.457,00	-	-	-	-
47	Beban Tagihan Air	13.570.294,00	-	-	-	12.052.946,00
48	Beban Tagihan Listrik	111.138.622,00	115.686.038,00	-	52.810.703,00	36.299.258,00
49	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.900.000,00	10.700.000,00	-	9.900.000,00	9.969.600,00
50	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.954.760,00	38.177.234,00	-	127.962.398,00	-
51	Beban Paket/Pengiriman	-	528.000,00	-	-	-
52	Beban Penambahan Daya	-	-	-	-	-
53	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	68.475.049,58	-	30.485.629,71	6.089.971,51
54	Beban Lembur	52.490.000,00	5.000.000,00	-	-	-
55	Beban Medical Check Up	-	-	-	-	-
56	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-
57	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	62.776.365.185,00	-	-	-
58	Beban Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	-	6.354.412.615,00	-	-	-
59	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	-	-
60	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.002.846,00	-	-	-	-
61	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-
62	Beban Sewa Tanah	-	-	-	-	-
63	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	36.978.400,00	73.692.300,00	-	-	-
64	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	39.387.500,00	112.700.000,00	-	-	-
65	Beban Sewa Jalan , Instalasi dan Jaringan	-	356.288.971,00	-	-	-
66	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
67	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	-	-	-	-	-
68	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	121.714.000,00	99.598.080,00	-	101.235.000,00	74.952.000,00
69	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	8.000.000,00	-	-	-	-
70	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	-	-	-	-	-
71	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	7.975.000,00	-	-	-	-
72	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	-	-	-	570.972.900,00	-
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	-	7.925.400,00	-	-	-
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa - Jasa Desain Rekayasa Lainnya	-	-	-	99.733.000,00	-
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	-	-	-	1.610.016.560,00	-
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang - Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	-	-	-	-	124.177.000,00

No	URAIAN	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	BLUD RSUD dr. Slamet	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Permukiman
77	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	182.882.600,00	-	-	-	-
78	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	67.740.600,00	7.996.440,00	-	-	-
79	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	-	-	-	-	-
80	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	-	-	-	39.904.000,00	-
81	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	-	-	-	-	-
82	Beban Jasa Konsultansi Spesialis - Jasa Pembuatan Peta	-	-	-	-	-
83	Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Lingkungan	-	-	-	-	63.480.000,00
84	Beban Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	-	88.470.300,00	-	-	44.844.000,00
85	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-	-	-	-	-
86	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Transportasi	-	-	-	-	-
87	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Telematika	-	-	-	-	98.329.000,00
88	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
89	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Pertambangan dan Energi	-	-	-	-	-
90	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang - Keuangan	-	-	-	-	-
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei	95.848.500,00	-	-	-	-
92	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	-	47.924.250,00	-	89.660.250,00	-
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Konsultansi Manajemen	-	-	-	-	-
94	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus	-	27.527.100,00	-	-	-
95	Beban Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata - Jasa Konsultansi Kelembagaan Kepariwisata	-	-	-	-	-
96	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	67.790.000,00	-	-	94.747.000,00	48.562.000,00
97	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	115.340.000,00	689.023.000,00	-	-	27.500.000,00
98	Beban Sosialisasi	143.028.000,00	61.650.000,00	-	233.495.000,00	-
99	Beban Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-
100	Beban Diklat Kepemimpinan	-	-	-	-	-
101	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
102	Beban Jasa BOS	75.897.348.756,00	-	-	-	-
103	Beban Jasa BLUD	-	84.731.632.473,47	111.501.476.961,30	-	-
104	Beban Jasa Hadiah yang Bersifat Perlombaan	44.000.000,00	183.000.000,00	-	-	-
105	Beban Jasa Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-	-	-	-
106	Beban Jasa Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	-	-
107	Beban Jasa Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	-	-	-	-	-
108	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	355.713.387,00	-	-	-
109	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	-	3.083.930.473,00	-	-	-
	Jumlah	103.933.913.835,00	175.024.827.463,05	111.501.476.961,30	5.326.684.240,71	1.155.185.775,51

Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Perhubungan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.971.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.952.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	63.112.500,00	-	-	-	955.744.900,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	98.013.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	32.906.000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.506.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	94.880.890,00	-	-	47.419.200,00	95.731.000,00	-	-	-
-	-	453.810.200,00	-	-	-	94.794.000,00	-	1.040.796.500,00	-	49.089.000,00
-	-	-	-	64.000.000,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	72.870.500,00	-	-	-	-
21.375.000,00	113.436.000,00	48.000.000,00	-	-	-	38.405.406,00	-	-	-	-
-	138.000.000,00	18.250.000,00	-	71.511.697,00	-	33.000.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	391.973.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	112.000.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	40.500.000,00	21.000.000,00	-	-	218.550.000,00	8.550.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	13.000.000,00	1.350.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.137.200.000,00	-	-	-	-	-	-
15.000.000,00	-	-	-	-	34.513.500,00	-	-	-	-	-
4.600.180.398,58	3.733.710.387,10	1.859.437.122,58	4.634.322.723,61	4.414.042.017,92	731.419.246,13	9.070.921.326,29	1.798.053.062,53	7.222.372.729,65	25.235.699.042,45	26.629.988.778,48

Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.700.000,00	6.400.000,00	65.390.000,00	578.870.000,00	42.450.000,00	31.325.000,00	184.800.000,00	209.450.000,00	136.500.000,00	815.230.000,00	38.900.000,00
-	54.000.000,00	23.400.000,00	125.050.000,00	-	-	12.000.000,00	-	-	637.200.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	281.020.000,00	-	93.000.000,00	-
-	-	30.000.000,00	403.200.000,00	-	6.400.000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00
-	3.000.000,00	-	-	-	-	9.100.000,00	-	-	-	-
-	129.600.000,00	-	55.800.000,00	-	-	14.000.000,00	3.000.000,00	-	-	5.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	38.000.000,00	-	24.665.000,00	-	-	-	-	3.465.000,00
-	-	-	-	-	9.365.000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	20.400.000,00	65.800.000,00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.600.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	14.000.000,00	-	256.720.000,00	-	-	-
-	-	-	-	25.905.000,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	774.600.000,00	-	-	7.500.000,00	-
30.800.000,00	37.800.000,00	23.800.000,00	242.800.000,00	9.800.000,00	142.000.000,00	50.400.000,00	482.900.000,00	405.300.000,00	627.400.000,00	-
46.200.000,00	33.120.640,00	20.400.000,00	54.514.820,00	24.135.660,00	24.456.900,00	-	-	-	36.400.000,00	331.800.000,00
48.000.000,00	-	62.057.700,00	-	-	101.246.500,00	163.200.000,00	296.910.000,00	480.000.000,00	463.900.000,00	-
259.150.000,00	-	50.000.000,00	-	12.675.000,00	-	60.000.000,00	8.100.000,00	-	-	248.100.000,00
140.800.000,00	139.616.257,00	71.209.600,00	462.630.763,00	71.210.700,00	91.996.559,00	177.981.762,00	217.541.842,00	142.209.100,00	771.781.840,00	359.920.128,00
182.600.000,00	219.820.000,00	184.904.000,00	457.254.792,00	146.687.909,00	72.949.953,00	457.937.336,00	237.270.084,00	146.537.160,00	668.204.160,00	415.743.300,00
-	-	-	-	-	8.149.800,00	-	-	-	200.599.800,00	-
-	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	10.000.000,00	-	13.500.000,00	3.000.000,00	-	146.250.000,00	-
283.890.000,00	-	-	-	-	10.500.000,00	102.250.000,00	-	68.000.000,00	-	155.750.000,00
249.784.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	20.135.200,00	-	-	-	149.850.000,00	-	1.244.000,00	-	80.419.500,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-
-	85.096.000,00	-	-	-	-	-	130.000.000,00	-	74.872.281,00	-
261.502.900,00	-	297.500.000,00	-	-	178.500.000,00	1.299.455.279,00	876.192.590,00	1.542.798.250,00	-	-

Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pertanian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretariat Daerah	Sekretariat DPRD
-	-	-	255.315.650,00	-	-	-	-	-	12.830.000,00	-
7.881.000,00	-	-	-	-	-	-	27.872.100,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.839.600,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	126.817.500,00	-	-
-	-	44.932.000,00	99.689.100,00	-	22.000.000,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	98.995.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	122.716.050,00	-	-
49.538.750,00	-	-	-	-	-	-	-	27.355.000,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	243.447.440,00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	14.985.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98.623.500,00	-	47.896.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	52.491.000,00	298.068.000,00	-	-	-	-	49.794.600,00	102.643.000,00	199.300.000,00	98.457.000,00
-	120.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	314.145.715,00	-
-	132.500.000,00	-	-	-	-	-	2.200.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	143.769.420,00	-	-	-	-
311.520.750,00	-	-	-	-	1.168.500,00	-	81.052.200,00	43.570.000,00	297.270.956,00	-
-	-	-	93.662.000,00	-	-	68.226.000,00	-	-	208.875.000,00	165.000.000,00
-	-	38.144.000,00	-	-	-	-	-	-	109.450.000,00	1.681.326.000,00
-	-	137.615.000,00	-	-	-	-	-	-	83.950.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.149.809.000,00	4.000.000,00	-	43.250.000,00	72.000.000,00	-	438.000.000,00	-
-	-	-	5.000.000,00	2.000.000,00	-	-	-	-	40.250.000,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00	-	-	-
-	151.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	684.278.320,00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.373.966.891,34	1.655.246.505,54	1.789.754.042,67	7.036.596.325,00	594.312.411,47	1.170.542.063,98	3.943.095.997,53	3.743.691.879,81	3.834.328.985,22	10.296.375.963,40	5.314.372.728,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Kepegawaian dan Diklat	Inspektorat Daerah	Kecamatan Banjarwangi	Kecamatan Banyuresmi	Kecamatan Bayongbong	Kecamatan Balubur Limbangan	Kecamatan Bungbulang	Kecamatan Caringin	Kecamatan Cibalong
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	59.841.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	46.753.200,00	-	-	-	-	-	-	-
198.000.000,00	99.234.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121.301.500,00	-	52.549.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	447.546.000,00	499.468.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
-	431.690.100,00	-	-	651.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
170.976.000,00	-	-	150.000.000,00	406.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.534.310.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	174.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.946.390.472,29	6.147.641.962,37	5.129.610.578,38	8.376.948.985,98	10.079.287.923,61	230.526.396,46	376.820.992,66	170.924.037,19	334.882.000,10	310.472.173,98	278.960.697,26	194.991.948,86

Kecamatan Cibatu	Kecamatan Cibiuk	Kecamatan Cigedug	Kecamatan Cihurip	Kecamatan Cikajang	Kecamatan Cikelet	Kecamatan Cilawu	Kecamatan Cisewu	Kecamatan Cisompet	Kecamatan Cisarupan	Kecamatan Garut Kota	Kecamatan Kadungora	Kecamatan Karangtengah
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63.547.000,00	-	-	-	-	65.955.000,00	261.302.400,00	-	-
-	-	-	-	-	-	44.433.300,00	-	-	19.350.000,00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.361.152.000,00	-	-
264.538.911,35	147.619.617,37	123.648.550,80	123.286.148,42	398.300.961,83	370.285.604,46	487.329.256,77	201.467.254,21	170.225.406,01	203.588.208,71	7.129.430.103,43	316.071.126,36	157.908.679,62

Kecamatan Selaawi	Kecamatan Singajaya	Kecamatan Sucinaraja	Kecamatan Sukaresmi	Kecamatan Sukawening	Kecamatan Talegong	Kecamatan Tarogong Kaler	Kecamatan Tarogong Kidul	Kecamatan Wanaraja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.547.790,00
-	-	-	-	101.400.000,00	2.400.000,00	16.100.000,00	37.710.000,00	26.400.000,00	253.720.000,00	6.727.715.000,00
43.800.000,00	47.400.000,00	49.200.000,00	43.800.000,00	173.800.000,00	72.000.000,00	63.600.000,00	118.600.000,00	119.400.000,00	1.194.770.000,00	21.504.610.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.020.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.577.790.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.100.000,00
-	-	-	-	-	-	-	11.200.000,00	-	11.200.000,00	690.400.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.400.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.092.500.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.542.206.667,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.598.140,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.800.000,00
38.000.000,00	152.000.000,00	-	64.000.000,00	-	109.000.000,00	148.400.000,00	84.400.000,00	59.800.000,00	11.900.000,00	7.314.500.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.027.667.500,00
-	24.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.661.136.800,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.233.900.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.539.600.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.720.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.905.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812.300.000,00
-	33.600.000,00	50.400.000,00	-	37.800.000,00	11.000.000,00	152.600.000,00	239.400.000,00	21.000.000,00	-	9.846.643.070,00
13.592.600,00	-	8.155.560,00	-	-	16.505.300,00	8.155.560,00	92.950.000,00	-	26.600.000,00	2.618.410.420,00
-	-	-	2.112.000,00	-	-	179.400.000,00	1.332.737.800,00	-	-	8.736.960.200,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.352.621.600,00
18.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	144.000.000,00	71.000.000,00	12.000.000,00	27.197.904,00	9.899.398.796,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.442.820.000,00	8.051.416.486,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.549.600,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.666.400.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.750.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.641.826.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.784.950,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.824.700,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.426.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516.088.281,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.913.974.019,00

Kecamatan Selaawi	Kecamatan Singajaya	Kecamatan Sucinaraja	Kecamatan Sukaresmi	Kecamatan Sukawening	Kecamatan Talegong	Kecamatan Tarogong Kaler	Kecamatan Tarogong Kidul	Kecamatan Wanaraja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.999.250,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.490.140,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.952.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.904.000,00
-	-	-	-	-	-	-	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.839.600,00
-	-	-	2.830.000,00	-	-	-	63.880.070,00	-	-	1.925.419.925,00
-	-	-	44.433.300,00	-	-	-	-	-	-	774.294.677,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.901.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.716.050,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.569.950,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.447.440,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.985.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.531.595,00	622.683.885,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.942.856,00	3.019.004.656,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434.145.715,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.227.100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.769.420,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.535.309,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	493.664.000,00	3.034.520.406,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.750.000,00	3.665.994.797,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.341.214.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.534.310.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.897.348.756,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.233.109.434,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.222.659.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.600.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.338.416.707,00
-	-	-	-	-	-	201.728.780,00	656.187.330,00	-	-	7.084.769.833,00
141.284.935,33	271.650.745,50	128.054.353,60	189.835.161,37	344.535.438,41	247.641.518,08	963.305.359,55	2.888.539.193,04	348.295.492,51	3.852.991.795,28	592.501.383.197,91

**BEBAN PEMELIHARAAN
per, 31 Desember 2022**

No	URAIAN	Beban Pemeliharaan Tanah	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	-	86.708.375,51	448.095.500,00	-	534.803.875,51
2	Dinas Kesehatan	-	257.986.867,00	83.883.642,00	7.500.000,00	349.370.509,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	-	2.086.793.778,00	-	-	2.086.793.778,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	322.506.110,00	-	16.343.276.600,00	16.665.782.710,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	119.900.000,00	75.967.000,00	654.137.935,00	-	850.004.935,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	261.840.000,00	26.635.000,00	-	288.475.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	-	174.302.000,00	-	-	174.302.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	98.930.000,00	15.060.000,00	-	113.990.000,00
9	Dinas Sosial	-	41.850.000,00	5.287.000,00	-	47.137.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	87.750.000,00	-	-	87.750.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	7.900.000,00	63.130.000,00	-	71.030.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	678.403.279,00	7.000.000,00	-	685.403.279,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	104.339.051,00	62.700.000,00	-	167.039.051,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	6.340.000,00	-	-	6.340.000,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	59.010.000,00	65.980.600,00	-	124.990.600,00
16	Dinas Perhubungan	-	186.088.100,00	-	-	186.088.100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	195.400.000,00	9.593.000,00	-	204.993.000,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	-	36.909.854,00	-	-	36.909.854,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	-	67.626.750,00	-	-	67.626.750,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	-	81.961.711,51	296.839.510,00	-	378.801.221,51
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	9.150.000,00	84.380.000,00	-	93.530.000,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	-	31.458.023,00	-	12.156.027,00	43.614.050,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	9.680.000,00	20.000.000,00	-	29.680.000,00
24	Dinas Pertanian	13.580.500,00	9.950.946,00	-	-	23.531.446,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	-	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
26	Sekretariat Daerah	-	400.609.000,00	494.648.883,00	-	895.257.883,00
27	Sekretariat DPRD	-	435.563.772,22	-	-	435.563.772,22
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	137.548.921,00	117.229.800,00	-	254.778.721,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	112.020.590,00	-	-	112.020.590,00
30	Badan Pendapatan Daerah	-	510.865.000,00	43.266.000,00	-	554.131.000,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	-	109.245.064,00	-	-	109.245.064,00
32	Inspektorat Daerah	-	93.178.900,00	-	-	93.178.900,00
33	Kecamatan Banjarwangi	-	4.220.000,00	-	-	4.220.000,00
34	Kecamatan Banyuwangi	-	30.870.000,00	-	-	30.870.000,00
35	Kecamatan Bayungbong	-	9.680.000,00	-	-	9.680.000,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	-	37.460.000,00	-	-	37.460.000,00
37	Kecamatan Bungbulang	-	8.655.000,00	-	-	8.655.000,00
38	Kecamatan Caringin	-	3.570.000,00	-	-	3.570.000,00
39	Kecamatan Cibalong	-	23.960.000,00	-	-	23.960.000,00
40	Kecamatan Cibatuh	-	10.040.000,00	-	-	10.040.000,00
41	Kecamatan Cibiuk	-	5.680.000,00	-	-	5.680.000,00
42	Kecamatan Cigedug	-	26.000.000,00	20.000.000,00	-	46.000.000,00
43	Kecamatan Cihurip	-	13.250.000,00	-	-	13.250.000,00
44	Kecamatan Cikajang	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cikelet	-	38.770.000,00	-	-	38.770.000,00
46	Kecamatan Cilawu	-	4.260.000,00	-	-	4.260.000,00
47	Kecamatan Cisewu	-	18.380.000,00	-	-	18.380.000,00
48	Kecamatan Cisompet	-	13.800.000,00	-	-	13.800.000,00
49	Kecamatan Cisarupan	-	9.290.000,00	-	-	9.290.000,00
50	Kecamatan Garut Kota	-	17.420.000,00	-	-	17.420.000,00
51	Kecamatan Kadungora	-	17.820.000,00	33.972.000,00	-	51.792.000,00
52	Kecamatan Karangtengah	-	15.420.000,00	-	-	15.420.000,00
53	Kecamatan Karangpawitan	-	44.770.000,00	-	-	44.770.000,00
54	Kecamatan Kersamanah	-	10.500.000,00	-	-	10.500.000,00
55	Kecamatan Leles	-	9.840.000,00	15.500.000,00	-	25.340.000,00
56	Kecamatan Leuwigoong	-	6.450.000,00	-	-	6.450.000,00
57	Kecamatan Malangbong	-	9.670.000,00	40.500.000,00	-	50.170.000,00
58	Kecamatan Mekarmukti	-	40.729.500,00	-	-	40.729.500,00
59	Kecamatan Pakenjeng	-	15.460.000,00	-	-	15.460.000,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	-	12.000.000,00	47.400.000,00	-	59.400.000,00
61	Kecamatan Pamulihan	-	7.000.000,00	7.650.000,00	-	14.650.000,00
62	Kecamatan Pangatikan	-	23.592.000,00	-	-	23.592.000,00
63	Kecamatan Pasirwangi	-	12.237.600,00	-	-	12.237.600,00
64	Kecamatan Peundeuy	-	10.520.000,00	13.400.000,00	-	23.920.000,00
65	Kecamatan Samarang	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00
66	Kecamatan Selaawi	-	9.327.000,00	100.000.000,00	-	109.327.000,00
67	Kecamatan Singajaya	-	16.610.000,00	-	-	16.610.000,00
68	Kecamatan Sucinaraja	-	19.800.000,00	-	29.480.000,00	49.280.000,00
69	Kecamatan Sukaesmi	-	28.137.500,00	6.000.000,00	-	34.137.500,00
70	Kecamatan Sukawening	-	17.360.000,00	-	-	17.360.000,00
71	Kecamatan Talegong	-	9.250.000,00	-	-	9.250.000,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	-	55.860.000,00	-	-	55.860.000,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	-	47.618.750,00	36.918.600,00	-	84.537.350,00
74	Kecamatan Wanaraja	-	12.140.000,00	-	-	12.140.000,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-
	Jumlah	133.480.500,00	7.587.800.442,24	2.819.207.470,00	16.392.412.627,00	26.932.901.039,24

BEBAN PERJALANAN DINAS
per, 31 Desember 2022

No	URAIAN	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Tetap	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Beban Transportasi (Biaya Langsung Non Personl)	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	17.525.000,00	-	1.229.960.000,00	251.367.500,00	213.069.050,00	-	-	1.711.921.550,00
2	Dinas Kesehatan	587.455.750,00	-	40.331.284.300,00	2.836.896.000,00	1.657.895.114,00	-	50.531.850,00	45.464.063.014,00
3	BLUD RSUD dr. Slamet	225.035.329,00	-	-	-	-	-	-	225.035.329,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.373.350,00	-	2.515.867.500,00	9.000.000,00	190.808.600,00	-	-	2.920.049.450,00
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	73.453.000,00	-	593.550.000,00	3.900.000,00	-	-	-	670.903.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	314.348.000,00	-	1.247.806.000,00	589.098.000,00	18.150.000,00	-	-	2.169.402.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	31.170.000,00	-	81.620.000,00	7.650.000,00	45.313.750,00	-	-	165.753.750,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	205.954.258,00	-	274.233.000,00	114.090.000,00	8.506.500,00	-	-	602.783.758,00
9	Dinas Sosial	313.378.000,00	4.320.000,00	458.037.650,00	43.070.000,00	14.500.000,00	-	-	833.305.650,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	353.358.303,00	-	421.980.000,00	613.700.000,00	5.110.000,00	-	-	1.394.148.303,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	23.375.000,00	-	351.198.000,00	124.430.000,00	53.765.071,00	-	-	552.768.071,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	210.196.063,00	-	205.225.000,00	11.000.000,00	87.700.000,00	-	-	514.121.063,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	323.396.766,00	-	230.844.050,00	32.883.450,00	-	-	-	587.124.266,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	356.317.660,00	-	765.160.000,00	100.700.000,00	5.300.000,00	-	-	1.227.477.660,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	144.084.002,00	-	793.785.000,00	388.180.000,00	263.310.000,00	-	-	1.589.359.002,00
16	Dinas Perhubungan	67.496.000,00	-	242.230.719,00	89.847.500,00	-	-	-	399.574.219,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	214.701.719,00	-	223.018.000,00	5.000.000,00	26.440.000,00	-	-	469.159.719,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	528.348.000,00	-	420.145.000,00	138.660.000,00	92.121.000,00	-	-	1.179.274.000,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	320.378.020,00	-	127.183.000,00	8.683.800,00	145.083.072,00	-	-	601.327.892,00
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	823.739.900,00	-	663.888.550,00	43.300.000,00	187.915.000,00	-	-	1.718.843.450,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	111.334.000,00	-	-	312.429.000,00	36.838.000,00	-	-	460.601.000,00
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	190.221.300,00	-	331.946.800,00	40.440.000,00	8.128.000,00	-	-	570.736.100,00
23	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	236.335.000,00	-	406.220.000,00	307.320.000,00	69.854.888,00	-	-	1.019.729.888,00
24	Dinas Pertanian	366.566.971,00	-	849.122.800,00	664.400.000,00	1.310.000,00	-	96.000.000,00	1.977.399.771,00
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Miner	276.551.887,00	-	145.800.000,00	453.130.000,00	439.121.071,00	-	-	1.314.602.958,00
26	Sekretariat Daerah	4.960.943.977,00	-	1.527.109.847,00	416.389.000,00	304.906.694,00	-	190.166.106,00	7.399.515.624,00
27	Sekretariat DPRD	14.226.838.906,00	-	1.536.877.453,00	586.179.150,00	-	-	-	16.349.895.509,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.725.022.727,00	-	445.010.450,00	43.820.000,00	56.902.200,00	-	191.384.860,00	2.462.140.237,00
29	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	287.434.675,00	-	14.535.000,00	2.500.000,00	34.618.797,00	-	-	339.088.472,00
30	Badan Pendapatan Daerah	510.519.912,00	-	640.380.000,00	-	-	-	-	1.150.899.912,00
31	Badan Kepegawaian dan Diklat	976.955.229,00	-	205.177.000,00	882.430.000,00	347.434.000,00	-	-	2.411.996.229,00
32	Inspektora Daerah	761.887.610,00	-	57.920.000,00	732.030.330,00	-	-	-	1.551.837.940,00
33	Kecamatan Banjarwangi	-	-	143.210.000,00	-	-	-	-	143.210.000,00
34	Kecamatan Banyuwangi	-	-	186.180.000,00	-	-	-	-	186.180.000,00
35	Kecamatan Bayongbong	-	-	264.660.000,00	-	-	-	-	264.660.000,00
36	Kecamatan Balubur Limbangan	-	-	222.210.000,00	-	-	-	-	222.210.000,00
37	Kecamatan Bungbulang	-	-	120.910.000,00	58.500.000,00	-	-	-	179.410.000,00
38	Kecamatan Caringin	-	-	215.780.000,00	13.000.000,00	-	-	-	228.780.000,00
39	Kecamatan Cibalong	-	-	123.910.000,00	-	-	-	-	123.910.000,00
40	Kecamatan Cibatu	-	-	196.390.000,00	15.000.000,00	-	-	-	211.390.000,00
41	Kecamatan Cibiuk	-	-	79.420.000,00	-	-	-	-	79.420.000,00
42	Kecamatan Cigedug	-	-	65.950.000,00	7.200.000,00	-	-	-	73.150.000,00

No	URAIAN	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Beban Perjalanan Dinas Tetap	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Beban Transportasi (Biaya Langsung Non Personl)	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	Jumlah
43	Kecamatan Cihurip	-	-	164.800.000,00	-	-	-	-	164.800.000,00
44	Kecamatan Cikajang	-	-	101.370.000,00	-	-	-	-	101.370.000,00
45	Kecamatan Cikelet	-	-	129.650.000,00	-	-	-	-	129.650.000,00
46	Kecamatan Cilawu	-	-	48.580.000,00	-	-	-	-	48.580.000,00
47	Kecamatan Cisewu	-	-	253.590.000,00	-	-	-	-	253.590.000,00
48	Kecamatan Cisompet	-	-	128.960.000,00	-	-	-	-	128.960.000,00
49	Kecamatan Cisarupan	-	-	41.510.000,00	-	-	-	-	41.510.000,00
50	Kecamatan Garut Kota	-	-	210.390.000,00	237.400.000,00	-	-	-	447.790.000,00
51	Kecamatan Kadungora	-	-	253.370.000,00	2.800.000,00	-	-	-	256.170.000,00
52	Kecamatan Karangtengah	-	-	69.720.000,00	-	-	-	-	69.720.000,00
53	Kecamatan Karangpawitan	-	-	168.210.000,00	15.000.000,00	-	-	-	183.210.000,00
54	Kecamatan Kersamanah	-	-	37.030.000,00	-	-	-	-	37.030.000,00
55	Kecamatan Leles	-	-	250.080.000,00	20.000.000,00	-	-	-	270.080.000,00
56	Kecamatan Leuwigoong	-	-	121.570.000,00	-	-	-	-	121.570.000,00
57	Kecamatan Malangbong	-	-	230.054.400,00	-	-	-	-	230.054.400,00
58	Kecamatan Mekarmukti	-	-	153.830.000,00	-	-	-	-	153.830.000,00
59	Kecamatan Pakenjeng	-	-	195.380.000,00	34.000.000,00	-	-	-	229.380.000,00
60	Kecamatan Pamengpeuk	-	-	96.335.000,00	-	-	-	-	96.335.000,00
61	Kecamatan Pamulihan	-	-	158.550.000,00	-	-	-	-	158.550.000,00
62	Kecamatan Pangatikan	-	-	65.800.000,00	-	-	-	-	65.800.000,00
63	Kecamatan Pasirwangi	-	-	85.400.000,00	-	-	-	-	85.400.000,00
64	Kecamatan Peundeuy	-	-	105.450.000,00	12.000.000,00	-	-	-	117.450.000,00
65	Kecamatan Samarang	-	-	113.710.000,00	-	-	-	-	113.710.000,00
66	Kecamatan Selaawi	-	-	67.500.000,00	-	-	-	-	67.500.000,00
67	Kecamatan Singajaya	-	-	183.030.000,00	17.500.000,00	-	-	-	200.530.000,00
68	Kecamatan Sucinaraja	-	-	40.320.000,00	-	-	-	-	40.320.000,00
69	Kecamatan Sukaresmi	-	-	66.780.000,00	-	-	-	-	66.780.000,00
70	Kecamatan Sukawening	-	-	126.190.000,00	-	-	-	-	126.190.000,00
71	Kecamatan Talegong	-	-	167.870.000,00	-	-	-	-	167.870.000,00
72	Kecamatan Tarogong Kaler	-	-	82.420.000,00	32.200.000,00	-	-	-	114.620.000,00
73	Kecamatan Tarogong Kidul	-	-	335.480.000,00	4.200.000,00	-	-	-	339.680.000,00
74	Kecamatan Wanaraja	-	-	110.810.000,00	-	-	-	-	110.810.000,00
75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.850.000,00	-	507.250.000,00	38.200.000,00	-	250.795.576,00	-	837.095.576,00
	Jumlah	30.009.546.314,00	4.320.000,00	63.826.724.519,00	10.359.523.730,00	4.314.100.807,00	250.795.576,00	528.082.816,00	109.293.093.762,00

**BEBAN BANTUAN SOSIAL
per 31 Desember 2022**

(dalam rupiah)

No	SKPD	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Masyarakat/Perorangan	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat yang Direncanakan	Jumlah
1	Dinas Perumahan dan Permukiman	2.878.500.000,00	-	-	-	-	-	2.878.500.000,00
2	Dinas Sosial	13.195.300.000,00	26.117.000,00	142.702.999,00	-	1.158.554.886,00	-	14.522.674.885,00
3	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.420.000.000,00	-	-	2.420.000.000,00
4	Dinas Koperasi	-	-	-	2.055.000.000,00	-	-	2.055.000.000,00
5	Dinas Perikanan dan Peternakan	-	-	-	-	-	216.270.000,00	216.270.000,00
6	Dinas Pertanian	-	-	-	-	-	2.530.000.000,00	2.530.000.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM	-	-	-	910.500.000,00	-	-	910.500.000,00
8	Sekretariat Daerah	1.000.000.000,00	-	-	500.000.000,00	-	-	1.500.000.000,00
	Jumlah	17.073.800.000,00	26.117.000,00	142.702.999,00	5.885.500.000,00	1.158.554.886,00	2.746.270.000,00	27.032.944.885,00